



REPUBLIC OF INDONESIA

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 33 TAHUN 2021**

TENTANG

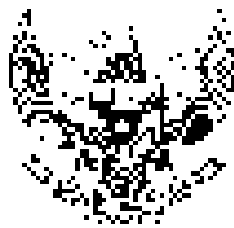
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

**KOTA MADIUN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021**



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA MADIUN TAHUN 2022

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 merupakan bahan pembahasan lebih lanjut Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun dan Badan Anggaran DPRD Kota Madiun untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 1 Juli 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di M A D I U N
pada tanggal 1 Juli 2021

**a.n WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH**

Ttd

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 33/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


**BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19750117 199602 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	7
1.4 Maksud dan Tujuan	8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	11
2.1 Kondisi Daerah Umum	11
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	12
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	19
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	35
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	81
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD	93
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	161
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	161
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	194
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	194
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020.....	206
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Madiun Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	208
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2022.....	212
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	214
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	214
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	228
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	228
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	230
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	233
3.2.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah.....	234
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	241
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	241
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	244
4.2.1 Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2022.....	244
4.2.2 Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.....	244
4.2.3 Prioritas dan Tema Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022.....	255
4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022.....	266
4.2.5 Inovasi Daerah dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022.....	267
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	268
5.1 Program Prioritas Daerah	268
5.2 Rencana Pendanaan Daerah	281
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	500
6.1 Indikator Kinerja Utama	500
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	503
BAB VII PENUTUP	556

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan Tahun 2015-2020	15
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2020	17
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2015-2020	18
Tabel 2.4 Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2015-2020 (Rp. Milyar)	19
Tabel 2.5 Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus Kota Madiun Tahun 2015 – 2020	20
Tabel 2.6 Jumlah PMKS dan Persentase PMKS Kota Madiun Tahun 2015–2020	21
Tabel 2.7 Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penanganan PMKS Kota Madiun Tahun 2015–2020	22
Tabel 2.8 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2015-2020	23
Tabel 2.9 Indikator Kinerja Pendidikan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2018–2020	24
Tabel 2.10 Indikator Kinerja Pendidikan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2018–2020	28
Tabel 2.11 Angka Kematian Bayi Di Kota Madiun Tahun 2016-2020	29
Tabel 2.12 Balita Gizi Buruk Di Kota Madiun Tahun 2016-2020	31
Tabel 2.13 Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2015–2020	33
Tabel 2.14 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan, Tahun 2020	35
Tabel 2.15 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2020	36
Tabel 2.16 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2018 – 2020	38
Tabel 2.17 Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan	42
Tabel 2.18 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2020	44
Tabel 2.19 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2020	45
Tabel 2.20 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2020	46
Tabel 2.21 Jumlah Kasus KLB Di Kota Madiun Tahun 2019	47
Tabel 2.22 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Di Kota Madiun Tahun 2016 - Tahun 2019	48
Tabel 2.23 Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri Di Kota Madiun Tahun 2019	49
Tabel 2.24 Puskesmas Dan Pustu Di Kota Madiun Tahun 2016 – Tahun 2020	50
Tabel 2.25 Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta Di Kota Madiun Tahun 2014 –Tahun 2020	51
Tabel 2.26 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan	52
Tabel 2.27 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 – 2020	59
Tabel 2.28 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2018- 2020	61
Tabel 2.29 Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2019	63
Tabel 2.30 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018 -2020	64
Tabel 2.31 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA di Kota Madiun Tahun 2018 – 2020	68
Tabel 2.32 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan di Kota Madiun Tahun 2018 – 2020	70
Tabel 2.33 Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik di Kota Madiun Tahun 2018 – 2019	71
Tabel 2.34 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Madiun Tahun 2018- 2020	72
Tabel 2.35 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2020	74
Tabel 2.36 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2018-2020	76
Tabel 2.37 Lama Proses Perizinan di Kota Madiun, 2020	79
Tabel 2.38 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2020 (%)	81
Tabel 2.39 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015 s/d 2020	83
Tabel 2.40 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s/d 2020 (Milyar Rupiah)	84

Tabel 2.41 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 s/d 2020 (Milyar Rupiah)	85
Tabel 2.42 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 s/d 2020 (%).....	86
Tabel 2.43 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.) Tahun 2015 s/d 2019	88
Tabel 2.44 Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2015-2019	89
Tabel 2.45 Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2020	92
Tabel 2.46 Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2020	94
Tabel 2.47 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2020	161
Tabel 2.48 Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Kota Madiun 2020	163
Tabel 2.49 Permasalahan Pembangunan Daerah	164
Tabel 2.50 Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	166
Tabel 3.1 Kerangka Makro Ekonomi Indonesia 2020-2024.....	198
Tabel 3.2 Asumsi Makro RKPD Kota Madiun 2022	214
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2017 s.d Tahun 2022	219
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2016 s.d Tahun 2022	225
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2017 s.d Tahun 2022	227
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Pembiayaan Pembangunan melalui CSR Kota Madiun 2019-2020	234
Tabel 4.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan RPJMD 2019-2024	243
Tabel 4.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019-2024	255
Tabel 4.3 Beberapa Usulan Anggota Dewan Berdasarkan Serap Aspirasi Masyarakat	257
Tabel 4.4 Isu Strategis dan Masalah Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022	258
Tabel 4.5 Isu Strategis, Strategi, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022	263
Tabel 4.6 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2022	264
Tabel 4.7 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022	266
Tabel 4.8 Inovasi Daerah dalam rangka Mempercepat Pencapaian Target Kinerja	268
Tabel 5.1 Belanja Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2022	270
Tabel 5.2 Kompilasi Program, Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2022	271
Tabel 5.3 Pagu Indikatif Belanja berdasarkan Urusan Tahun 2022	282
Tabel 5.4 Pagu Indikatif Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah tahun 2022	283
Tabel 5.5 Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	284
Tabel 6.1 Prioritas Pembangunan dan Target Indikator Kinerja Utama Kota Madiun	501
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	504

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD	2
Gambar 1.2 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7
Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kota Madiun	12
Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020	16
Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2020	17
Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2015-2020	18
Gambar 2.5 Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2015-2020 (Rp. Milyar)	19
Gambar 2.6 Jumlah PMKS dan Persentase PMKS Kota Madiun Tahun 2015-2020	21
Gambar 2.7 Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penanganan PMKS Kota Madiun Tahun 2015 - 2020	23
Gambar 2.8 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2015-2020	24
Gambar 2.9 Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Madiun Tahun 2015-2020	28
Gambar 2.10 Angka Kematian Bayi Di Kota Madiun Tahun 2016-2020	30
Gambar 2.11 Balita Gizi Buruk Di Kota Madiun Tahun 2016-2020	32
Gambar 2.12 Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2015-2020	34
Gambar 2.13 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun Tahun 2015-2020	37
Gambar 2.14 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2020	45
Gambar 2.15 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2020	46
Gambar 2.16 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun 2015-2020 (tahun)	47
Gambar 2.17 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Di Kota Madiun Tahun 2016 - Tahun 2019	48
Gambar 2.18 Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri Di Kota Madiun	50
Gambar 2.19 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2015-2020	78
Gambar 2.20 Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2015-2020	79
Gambar 2.21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2020 (%)	82
Gambar 2.22 Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2020 (%)	89
Gambar 2.23 Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2015-2019	90
Gambar 2.24 Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2015 - 2020	91
Gambar 2.25 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2015 - 2020	91
Gambar 2.26 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Madiun tahun 2020	161
Gambar 3.1 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2021 - 2022	194
Gambar 3.2 Sektor yang Mengalami Potensi Keuntungan dan Kerugian akibat COVID-19	197
Gambar 3.3 Dampak COVID-19 terhadap Permintaan dan Penawaran	198
Gambar 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur tahun 2020	200
Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	202
Gambar 3.6 Struktur PDRB Jawa Timur Triwulan II 2020	203
Gambar 3.7 Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Triwulan II-2020 (y-on-y) dan (q to q)	204
Gambar 3.8 PDRB per Kapita Jawa Timur Tahun 2014-2019	205
Gambar 3.9 Laju Inflasi Provinsi Jawa Timur (Q1 2018 - Q2 2020)	205
Gambar 3.10 Inflasi per Sektor Provinsi Jawa Timur (Q1 2018 - Q2 2020)	206
Gambar 4.1 Keterkaitan Visi antar Level Pemerintahan	241
Gambar 4.2 Hubungan antara Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024	242
Gambar 4.3 Hubungan antara Visi, Misi, Arahannya dan 7 agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024	245
Gambar 4.4 Tema, dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022	247
Gambar 4.5 Major Project dalam RKP Tahun 2022	249
Gambar 4.6 Hubungan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024	250
Gambar 4.7 Keselarasan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dan Jawa Timur Tahun 2022	251
Gambar 4.8 Pembagian Kawasan percepatan Pembangunan di Jawa Timur	252
Gambar 4.9 Pembagian Klaster Wilayah Pembangunan Jawa Timur	253

Gambar 4.10 Isu Strategis Kota Madiun Tahun 2022	258
Gambar 4.11 Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022	264
Gambar 4.12 Perkembangan Tema Pembangunan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2018-2022	266
Gambar 5.1 Nilai dan Proporsi Pendanaan berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2022	270
Gambar 5.2 Pagu Indikatif dan Proporsi Pendanaan berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2022	281

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perkembangan GDP Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang dan Indonesia Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020-2021	195
Grafik 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2020	207
Grafik 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2020	207
Grafik 3.4 Gini Rasio Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2020	208
Grafik 3.5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2022	209
Grafik 3.6 Proyeksi Inflasi Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024	210
Grafik 3.7 Proyeksi TPT Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024	210
Grafik 3.8 Proyeksi Ketimpangan pendapatan Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024	211
Grafik 3.9 Proyeksi Tingkat kemiskinan Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024	211
Grafik 3.10 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2022	212
Grafik 3.11 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2017-2022	215
Grafik 3.12 Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2017-2022	216
Grafik 3.13 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2017-2022	216
Grafik 3.14 Perkembangan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2017-2022	217
Grafik 3.15 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) Kota Madiun Tahun 2017-2022	217
Grafik 3.16 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2017-2022	220
Grafik 3.17 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2017-2022	220
Grafik 3.18 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2017-2022	221
Grafik 3.19 Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2017-2022	221
Grafik 3.20 Perkembangan Belanja modal Kota Madiun Tahun 2017-2022	222
Grafik 3.21 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2017-2022	223
Grafik 3.22 Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun Tahun 2017-2022	223
Grafik 3.23 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2017-2022 (Milyar Rupiah)	226
Grafik 6.1 Prioritas Pembangunan Pertama dan Target Indikator Kinerja Daerah	502
Grafik 6.2 Prioritas Pembangunan Kedua dan Target Indikator Kinerja Daerah	502
Grafik 6.3 Prioritas Pembangunan Ketiga dan Target Indikator Kinerja Daerah	503

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

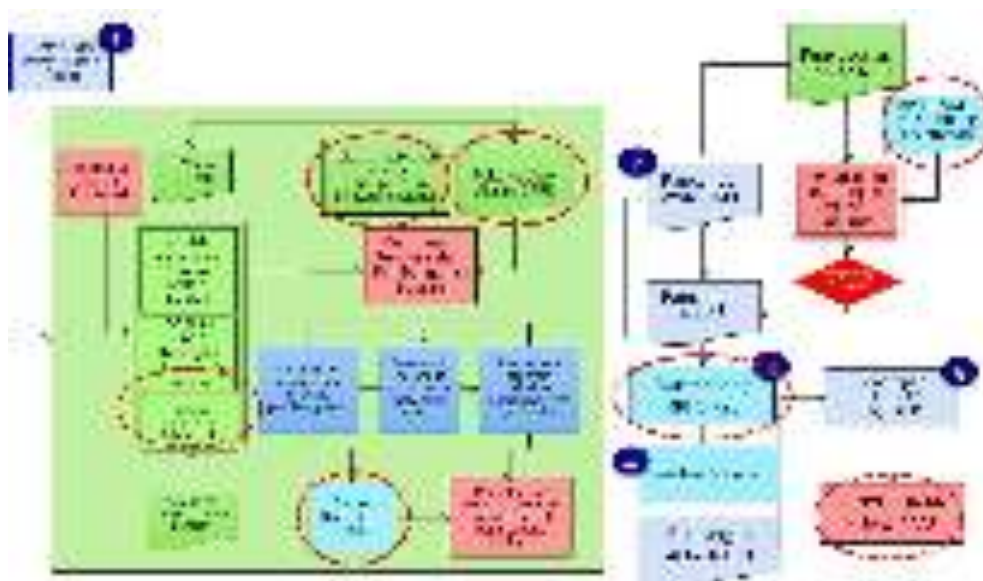
Salah satu aspek penting yang perlu dipenuhi dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan juga merupakan tahap awal dan penting dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan merupakan acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) untuk 20 tahun, rencana pembangunan jangka Panjang daerah (RPJMD) untuk 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) atau tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2022 disusun melalui lima tahapan utama sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan tersebut meliputi :

- (1) persiapan penyusunan RKPD,
- (2) penyusunan rancangan awal RKPD, dan rancangan RKPD,
- (3) pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota,
- (4) perumusan rancangan akhir RKPD dan
- (5) penetapan RKPD.



Sumber: Permendagri 86/2017

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD

Dalam menyusun RKPD Kota Madiun tahun 2022 dilakukan melalui empat pendekatan utama. Keempat pendekatan tersebut adalah: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, serta (4) *bottom up* dan *top down*. Pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi. Pendekatan partisipatif mengakomodir masukan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musrenbang. Pendekatan *bottom up* dan *top down* merupakan merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, kota/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan perencanaan pembangunan di Kota Madiun juga berorientasi substantif Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Orientasi ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan Holistik-Tematik mencakup penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Dalam pendekatan ini, sangat penting untuk koordinasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kemudian, pendekatan integratif menggambarkan keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas daerah.

Sedangkan pendekatan spasial mengisyaratkan adanya pertimbangan dimensi keruangan dalam perencanaan, sehingga kegiatan yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2022 mengacu pada RKP pemerintah pusat dan provinsi Jawa Timur. Berbagai isu dan tantangan strategis dalam RKP tersebut diantaranya adalah pemulihan dampak pandemi COVID19 yang sudah terjadi dari awal tahun 2020. Covid19 ini tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan saja, namun juga pada sisi ekonomi, sosial serta keuangan negara dan daerah. Oleh karena itu, kebijakan daerah Kota Madiun Tahun 2022 di arahkan dan di fokuskan pada sinergitas dengan kebijakan pemerintah di atasnya untuk melanjutkan kebijakan ditahun 2021 mengenai percepatan pemulihan ekonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari tema pembangunan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Madiun 2022.

Penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2022 telah melibatkan para pemangku kepentingan dan dilakukan berbasis SIPD. Para pemangku kepentingan turut berperan serta melalui Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan guna untuk menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan dalam rumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun, rancangan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi dan pemangku kepentingan yang relevan sebagai penerima manfaat. Selain Forum Konsultasi Publik keterlibatan *stakeholder* juga dilakukan pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang secara partisipatif dilakukan mulai dari Musrenbang RKPD di kelurahan Kecamatan yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan, forum PD dan selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD di Kota. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk penghimpunan usulan masyarakat dan pemerintahan paling dasar (Kelurahan) berdasarkan kebutuhan mendasar atau prioritas di tengah masyarakat. Berdasar dari usulan-usulan tersebut, Musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi masyarakat dilevel dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan mengenai RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk penyelarasan antara rencana kerja PD dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kota Madiun Tahun 2019 – 2024. RKPD Tahun 2022 secara praktis merupakan

pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Kota Madiun periode 2019–2024. Selain itu, penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2022 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, serta RPJPD Kota Madiun 2005-2025. Dalam perumusan dan penyusunan perencanaan tahunan ini, Pemerintah Kota Madiun melibatkan semua *stake holders* (pemangku kepentingan), mulai dari masyarakat pada tingkat desa, seluruh OPD, LSM, DPRD, lembaga masyarakat, sampai dengan akademisi.

RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Muatan yang terdapat dalam RKPD, antara lain kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

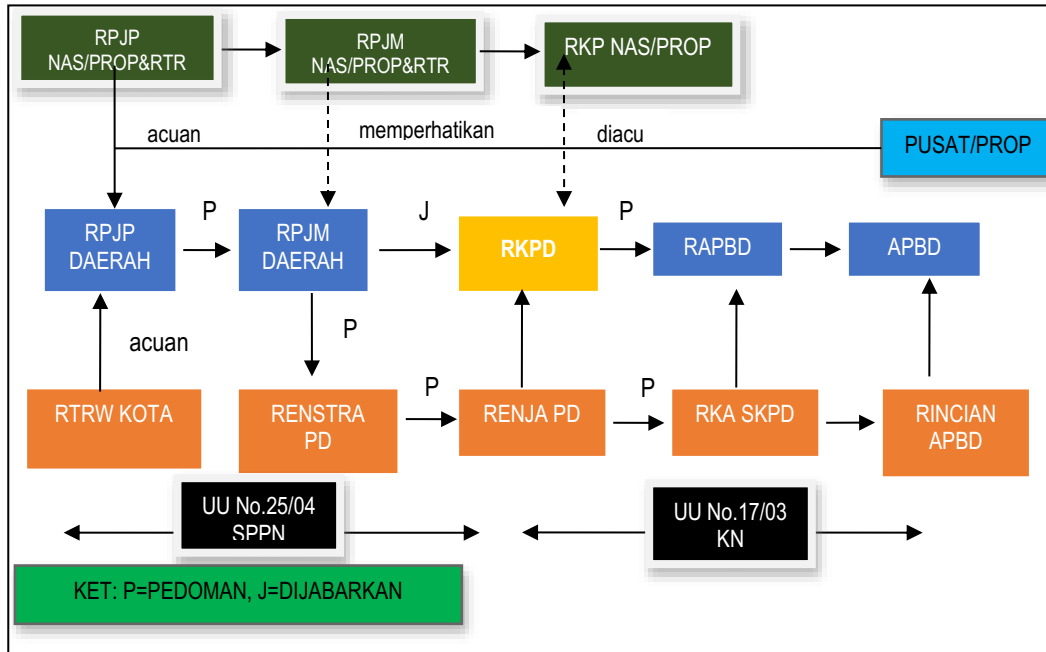
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Madiun Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen perencanaan dan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara lain: (1) RPJPD; (2) RPJMD; (3) Renstra-PD; (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Sedangkan dokumen di luar Kota Madiun yang terkait dengan dokumen ini antara lain: (1) RPJP Nasional dan Provinsi; (2) RPJM Nasional dan Provinsi; dan (3) RKP Nasional dan Provinsi. Diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.2

Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Kota Madiun Tahun 2022 merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan RPJMD Kota Madiun 2019-2024. RKPD Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022; RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2022 akan menjadi acuan penyusunan Rancangan APBD dan Renja perangkat daerah Tahun 2022 Kota Madiun. Keterkaitan antar dokumen ini penting bagi penyusunan kebijakan daerah yang konsisten demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2022 adalah sebagai pedoman perencanaan bagi semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam pembangunan Kota Madiun Tahun 2022. Secara khusus, maksud penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang selaras, terintegrasi dan bersinergi dengan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen RKP Tahun 2022; dan

2. menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
3. menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2022;
4. memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022;
2. menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam menyusun Rancangan dokumen Renja 2022;
3. meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi perencanaan pembangunan antar *stakeholder*, sehingga dokumen perencanaan Tahun 2021 memuat kebijakan publik untuk dapat dijadikan acuan seluruh komponen masyarakat Kota Madiun dalam melaksanakan perannya;
4. menyediakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah dan menginformasikan arah pelaksanaan pembangunan tahun 2022;
5. mewujudkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun tahun 2022 mengikuti sistematika penulisan Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini memuat latar belakang penyusunan RKPD Kota Madiun, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan RKPD, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam Bab II menjabarkan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Selain itu pada bab II ini juga menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2020 dan realisasi dari Rancangan Perubahan RPJMD dan permasalahan pembangunan.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah Tahun 2022, dan program pembangunan daerah Tahun 2022.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII : PENUTUP

Pada bab penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.

Pemerintah Kota Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa, merupakan salah satu Pemerintahan Kota yang secara administrasi wilayah masuk kedalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kota Madiun sebesar 33,23 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km². Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga terdapat 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Secara geografi Kota Madiun berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, sehingga wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan, diantaranya:

1. Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, disebelah utara;
2. Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, disebelah selatan;
3. Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, disebelah timur; dan
4. Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, disebelah barat.

Untuk mengetahui letak dan luas wilayah Pemerintah Kota Madiun, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada gambar 2.1 dibawah ini

c. Kondisi Topografi.

Ditinjau dari kondisi topografi wilayahnya, Kota Madiun terletak dilembah sungai Madiun yaitu sekitar 30 Km disebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dan Sungai Bengawan Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 65 m diatas permukaan laut. Keadaan topografi di Kota Madiun di bagian selatan mempunyai ketinggian 67 m diatas permukaan laut dan di bagian utara 64 m, sedangkan dibagian tengah ketinggiannya 63 m diatas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota.

d. Kondisi Geologi.

Ditinjau dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri dari Aluvium dan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Kedalaman efektif tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman di atas 90 cm dengan kemiringan lahan yang relatif datar maka kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

e. Kondisi Hidrologi.

Secara Hidrologi Kota Madiun terdiri dari air tanah dan air permukaan tanah. Sumber air tanah dan air permukaan tanah selain dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari 2 (dua) sungai yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun. Selain itu terdapat pula anak-anak Sungai Madiun yaitu: Sungai Sono dan Sungai Piring yang merupakan saluran irigasi lahan pertanian di wilayah Kota Madiun

f. Kondisi Klimatologi.

Kondisi Klimatologis Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Dilihat dari rata-rata curah hujan yang terjadi sejak 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan bahwa musim penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan Mei, sedangkan kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan November. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir curah hujan yang terjadi di Kota Madiun termasuk kategori menengah yaitu antara 101-300 mm/bulan.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian.

g. Penggunaan lahan

Pola penggunaan lahan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kawasan terbangun meliputi permukiman dengan fasilitas pendukungnya seluas 19,82 km² atau 59,64% dari luas kota. Sedangkan kawasan tidak terbangun meliputi sawah tegalan/kebun, perkebunan, kolam/empang seluas 13,41 km² atau 40,36% dari luas kota. Madiun merupakan daerah urban, sehingga dominasi penggunaan lahannya adalah untuk kawasan terbangun yang berkembang pesat pada wilayah Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman. Untuk kawasan tidak terbangun berupa lahan pertanian yang merupakan sawah irigasi teknis sebagian besar berada pada Kecamatan Manguharjo.

h. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kota Madiun telah disiapkan beberapa kawasan pengembangan seperti kawasan pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, pariwisata, permukiman, dan pengembangan aktivitas lainnya. Pengembangan pertanian Kota Madiun melalui padi dan palawija dengan luas lahan yang dipertahankan seluas 892 Ha yang tersebar ditiga kecamatan diarahkan untuk mendorong terwujudnya kedaulatan pangan. Selanjutnya pengembangan perikanan terfokus pada pengembangan ikan air tawar khususnya ikan lele. Pengembangan sektor peternakan cukup potensial seperti ternak sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Pemerintah Kota Madiun telah mempersiapkan kawasan pengembangan perkebunan seluas 114 Ha dan kawasan pengembangan industri seluas 22,7 Ha yang tersebar di Kecamatan Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo. Selanjutnya perlu adanya perhatian dan pengembangan kawasan pariwisata yang memiliki nilai jual dan layak dipromosikan. Yang perlu diperhatikan dari pengembangan kawasan untuk permukiman yaitu munculnya pemukiman liar dan kepadatan penduduk dimasa mendatang. Terakhir kawasan pengembangan aktivitas lainnya terdiri dari kawasan untuk perdagangan dan jasa seluas 132,70 Ha, jalur perlintasan kereta api seluas 56 km², dan kawasan untuk peningkatan pertahanan dan keamanan seluas 39,37 Ha.

i. Wilayah Rawan Bencana

Dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2019, Kota Madiun termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori sedang. Menurut jenis bencana, kelas risiko bencana yang tinggi di Kota Madiun adalah untuk bencana banjir, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan. Sedangkan kelas risiko bencana pada kategori sedang adalah tanah longsor dan cuaca ekstrim. Terdapat beberapa kawasan masih mengalami bencana alam berskala kecil. Kawasan yang rawan terjadi bencana alam di Kota Madiun diantaranya adalah:

1. Banjir berupa genangan air di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun yang diakibatkan oleh luapan dari Sungai Piring, Maling, dan Sono yang berhulu di wilayah Kabupaten Madiun.
2. Angin puting beliung di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun.
3. Kebakaran di wilayah Kota Madiun.

2. Demografi.

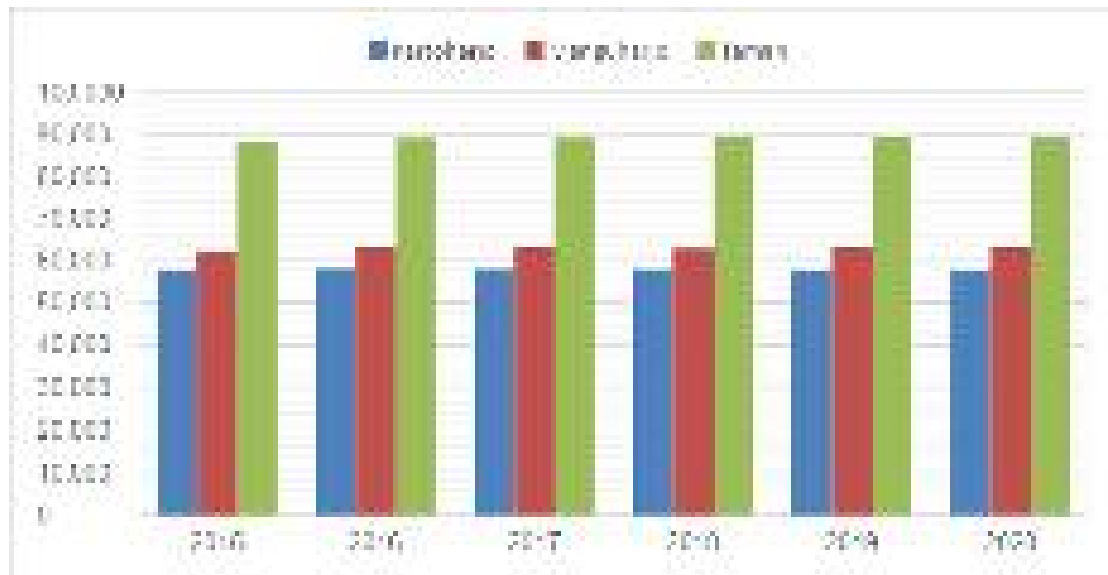
Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan tahun 2020 sebanyak 210.147 jiwa, tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 57.806 jiwa, Kecamatan Manguharjo 62.947 jiwa, dan Kecamatan Taman 89.394 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan
Tahun 2015-2020

No	Kecamatan	Tahun/Jiwa					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kartoharjo	57.777	58.147	57.985	57.927	57.748	57.806
2	Manguharjo	62.276	62.877	62.879	62.801	63.017	62.947
3	Taman	88.195	89.013	88.945	89.069	89.350	89.394
	Total	208.248	210.037	209.809	209.797	210.115	210.147

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2020

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, grafik Jumlah penduduk Kota Madiun menurut Kecamatan Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan

Persebaran penduduk di Kota Madiun pada tahun 2015-2020 cenderung merata pada setiap kecamatan. Penurunan jumlah penduduk di beberapa Kecamatan sangat sedikit jumlahnya. Sehingga, selama lima tahun terakhir jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman, disusul Kecamatan Manguharjo, dan terakhir berada pada Kecamatan Kartoharjo.

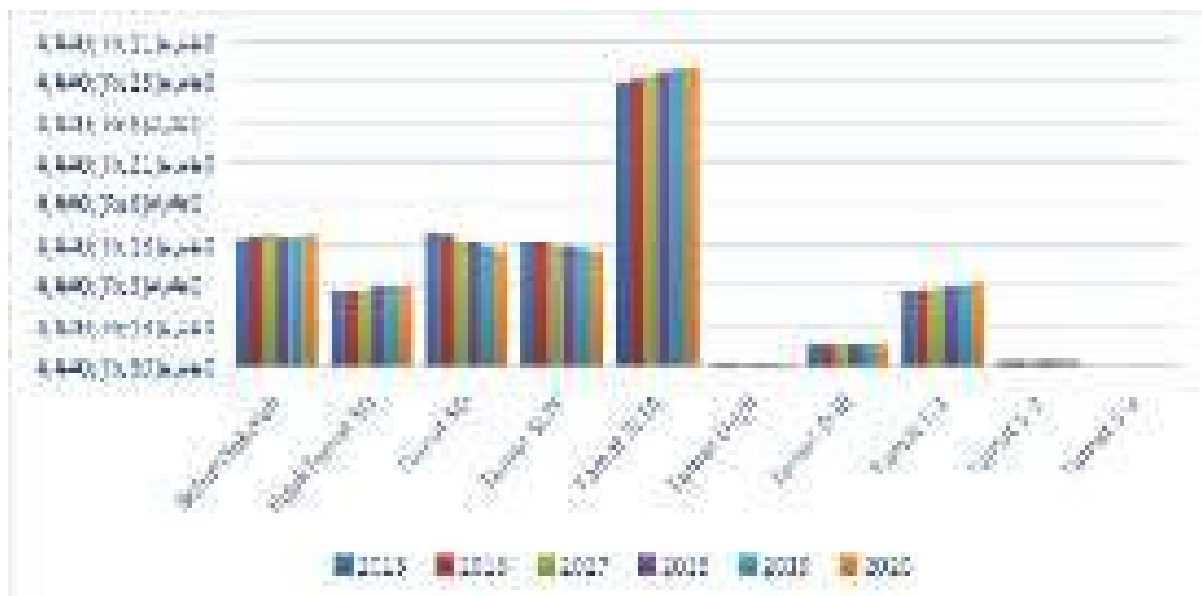
Sementara itu, jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sampai Tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 73.126 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 502 jiwa; D-III 5.875 jiwa; S-1 20.442 jiwa; S-2 1.412 jiwa, dan S-3 39 jiwa. Secara lengkap jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2015 s/d 2020 dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2015 s/d 2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :						
Belum Sekolah;	30.989	31.740	32.430	31.258	31.374	32.261
Tidak Tamat SD;	18.575	18.695	18.755	19.575	19.887	19.801
Tamat SD;	32.950	32.318	30.919	30.169	29.266	28.459
Tamat SLTP;	30.155	30.342	29.836	29.487	28.787	28.230
Tamat SLTA;	69.799	70.756	71.494	72.405	73.045	73.126
Tamat D-I/II;	440	439	452	468	498	502
Tamat D-III;	5.507	5.557	5.566	5.639	5.761	5.875
Tamat S-1;	18.608	18.929	19.065	19.431	20.071	20.442
Tamat S-2;	1.205	1.238	1.268	1.334	1.391	1.412
Tamat S-3.	20	23	24	31	35	39

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2020

Adapun grafik Jumlah penduduk Kota Madiun menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 2.3
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2015 s/d 2020

Selama lima tahun terakhir jumlah penduduk Kota Madiun kategori tamat SLTA terus meningkat. Begitu pula dengan jumlah penduduk kategori tamat D-I/II, tamat D-III, tamat S-1, tamat S-2, Tamat S-3 yang terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, masih sedikit yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA

Sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun Tahun 2020 menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2015 s/d 2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan :						
a. Belum/Tidak Bekerja	38.404	35.539	38.358	36.721	36.390	37.002
b. Mengurus Rumah Tangga	34.603	35.328	34.773	34.965	34.412	34.301
c. Pelajar/Mahasiswa	43.581	45.352	44.032	45.119	44.940	43.957
d. Pensiunan	6.374	6.399	6.270	6.237	6.095	6.046
e. PNS	7.379	7.396	7.204	6.992	6.826	6.711
f. TNI	1.850	1.942	1.830	1.806	1.771	1.733
g. POLRI	1.048	1.057	1.039	1.040	1.027	1.025
h. Jasa	8.608	9.105	8.951	8.449	8.449	8.213
i. Karyawan	42.126	43.735	43.557	44.679	46.311	47.098
j. Buruh	5.082	4.690	4.578	4.489	4.390	4.679
k. Wiraswasta	18.727	19.060	18.826	18.945	18.994	19.107
l. Lain-lain	466	434	391	355	510	275

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2020

Berikut grafik Jumlah penduduk Kota Madiun menurut Jenis Pendidikan Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2015 s/d 2020

Berdasarkan tabel dan grafik jumlah penduduk menurut pekerjaannya, terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kota Madiun bekerja pada sektor swasta. Jumlah penduduk Kota Madiun yang bekerja menjadi karyawan setiap tahun mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2020 berjumlah 47.098 orang. Sebaliknya penduduk yang Mengurus Rumah Tangga sejak tahun 2016 – 2020 mengalami penurunan. Posisi Kota Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan, maka penduduk yang memiliki pekerjaan wiraswasta jumlahnya juga cukup banyak yaitu hingga tahun 2020 sebanyak 19.107 orang dan yang bekerja pada sektor jasa sebanyak 8.213 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor publik yaitu PNS, TNI/Polri secara keseluruhan pada Tahun 2020 berjumlah 9468 orang.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total nilai PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada Tahun 2015 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2020 (Rp. Milyar)

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2015	10.192,08	8.455,44	6,15
2016	11.184,10	8.954,69	5,90
2017	12.111,90	9.486,12	5,93
2018	13.129,87	10.051,71	5,96
2019	14.107,33	10.623,07	5,69
2020	13.769,29	10.262,44	-3,39

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2020

Berdasarkan Data BPS Kota Madiun, grafik Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 2.5
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2020 (Rp. Milyar)

PDRB Kota Madiun selama periode 2015-2019 menunjukkan tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2015 mencapai Rp. 10.192,08 milyar dan pada tahun 2019 meningkat mencapai Rp. 14.107,33 milyar. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHB mengalami penurunan hingga sehingga menjadi sebesar 13.769,29 milyar. PDRB ADHK Kota Madiun juga meningkat dari Rp. 8.455,44 milyar pada tahun 2015 menjadi Rp. 10.623,07 milyar pada tahun 2019. PDRB ADHK mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 10.262,44 milyar.

Melihat dari grafik diatas pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2015-2020 masih fluktuatif. Pada tahun 2015 hingga tahun 2016 mengalami penurunan, selanjutnya pada tahun 2016-2019 perlahan mengalami peningkatan dan kembali menurun pada tahun 2020. Salah satu faktor terjadinya tren fluktuatif yaitu pengaruh kondisi ekonomi global yang belum membaik.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat diukur dengan persentase tahapan keluarga sejahtera. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi kedalam 5 kategori tahapan yaitu: Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus.

Tabel 2.5
Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus
Kota Madiun Tahun 2015 – 2020

KATEGORI	TAHUN											
	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
PRA KS	332	0,63%	198	0,37%	190	0,36%	120	0,23%	88	0,17%	88	0,16%
KS-I	7.643	14,52%	7.710	14,57%	5.328	10,11%	6.806	12,99%	6.115	11,63%	8.742	15,84%
KS-II	17.759	33,73%	20.121	38,03%	24.502	46,47%	21.322	40,70%	22.001	41,84%	21.822	39,55%
KS-III	23.815	45,24%	21.692	41,00%	18.162	34,45%	19.122	36,50%	19.231	36,57%	19.378	35,12%
KS-III Plus	3.096	5,88%	3.183	6,02%	4.541	8,61%	5.021	9,58%	5151	9,80%	5.145	9,32%
JUMLAH	52.645	100,00%	52.904	100,00%	52.723	100,00%	52.391	100,00%	52.586	100,00%	55.175	100,00%

Sumber :Dinas Sosial Kota Madiun Tahun 2020

Persentase Pra KS dan KS-1 pada Tahun 2018 sebesar 13,22% atau jumlahnya 6.926 keluarga, sedangkan tahun 2019 jumlahnya 6.203 keluarga mengalami penurunan 723 keluarga atau 1,42%. Terdapat perubahan pada Tahun 2020 yaitu, persentase Pra KS dan KS mengalami peningkatan 2627 keluarga atau sebesar 4,2%. Hal ini menunjukkan sedikit penurunan kesejahteraan dalam kategori Pra KS dan KS-1

Persentase Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus mengalami kenaikan 1,43% pada tahun 2018 jumlahnya 45.465 menjadi 46.383 pada tahun 2019, yang artinya perbaikan ekonomi atau kesejahteraan keluarga mengalami kenaikan sedikit. Ditemukan kondisi yang berbeda pada Tahun 2020, persentase Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus mengalami penurunan 4,2% dan jumlahnya menurun menjadi 46.345 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang baik.

Penurunan Kesejahteraan pada tahun 2020 disebabkan kondisi ekonomi Nasional dan Global yang tidak stabil. Keluarga di Kota Madiun secara umum termasuk kategori Keluarga Sejahtera II dan III serta III Plus sebanyak 46.345 keluarga atau 84,00%.

Selain indikator Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus, indikator kesejahteraan sosial juga dapat dilihat dengan persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator ini membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kota Madiun. Indikator ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Kota Madiun dalam upaya mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program-program kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. Jumlah dan Presentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.6
Jumlah PMKS dan Presentase PMKS Kota Madiun
Tahun 2015 – 2020

Tahun	Jumlah PMKS	Presentase PMKS
2015	7962	3,82
2016	9113	4,35
2017	10723	5,11
2018	10583	5
2019	10702	5,09
2020	30362	14

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2020



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 2.6
Jumlah PMKS dan Presentase PMKS Kota Madiun
Tahun 2015 – 2020

Jumlah PMKS mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan PMKS, yang mana jumlah jenis PMKS yang sebelumnya hanya sebanyak 22 jenis, bertambah menjadi 26 jenis PMKS.

Sesuai dengan instruksi pada Peraturan Menteri Sosial tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan dan pengelompokan kembali jenis-jenis PMKS, untuk diupdate data jumlah PMKS secara keseluruhan. Sehingga pada tabel di atas terlihat ada kenaikan jumlah PMKS.

Pada tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 jumlah PMKS yang terdata mengalami penambahan sebanyak 3.171 orang atau sebesar 1,31% dari jumlah penduduk, akan tetapi jumlah PMKS yang meningkat tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah yang tertangani secara signifikan, dengan capaian 101,74% dengan intervensi program dan kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. Sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 jumlah PMKS meningkat drastis sebanyak 19.779 orang atau sebesar 9,4 dari jumlah penduduk dengan capaian yang tertangani sebesar 99,8%.

Jumlah Penanganan PMKS dan Presentase PMKS dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penanganan PMKS Kota Madiun
Tahun 2015 – 2020

Tahun	Jumlah Penanganan PMKS	Presentase Penanganan PMKS
2015	7.739	97,20
2016	8.585	94,00
2017	10.910	101,74
2018	10.835	100,10
2019	10.729	100,30
2020	30.295	99,80

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2020



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 2.7
Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penanganan PMKS Kota Madiun Tahun 2015 – 2020

Berdasarkan data dan grafik diatas bahwa pada tahun 2015 dari 7.962 jumlah PMKS yang ada, sebanyak 7.739 jumlah PMKS berhasil ditangani atau sekitar 97,2%. Pada tahun 2016 dari 9.113 jumlah PMKS, hanya 8.585 yang dapat tertangani atau sekitar 94%. Tahun 2017 hingga tahun 2019 seluruh jumlah PMKS yang ada di Kota Madiun berhasil ditangani, bahkan persentase penanganan PMKS mencapai lebih dari 100%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah PMKS yang cukup signifikan, sebesar 99,8% dari 30.362 jumlah PMKS berhasil ditangani.

Selanjutnya terdapat tabel dan grafik Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2015-2020 sebagai berikut.

Tabel 2.8
Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2015 sampai dengan 2020

Tahun	Jumlah Penduduk kemiskinan	Tingkat Kemsikinan
2015	8.550	4,89
2016	9.050	5,16
2017	8.701	4,94
2018	7.920	4,49
2019	7.690	4,35
2020	8.830	4,98

Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2020



Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 2.8
Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2015 sampai dengan 2020

Berkaitan dengan tabel dan grafik diatas Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2015-2020 mengalami tren yang fluktuatif. Pada Tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan, selanjutnya pada Tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan yang signifikan bahkan sampai dengan 2019. Hingga pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan kembali mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan program-program pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan pengawasan pelaksanaan kemiskinan sudah berjalan walaupun belum maksimal yang tentu memerlukan penyempurnaan lagi.

c. Fokus Pendidikan

Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat pada Fokus Kesejahteraan Sosial, di antaranya adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Pendidikan
Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2018 – 2020

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4	5
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
A	Fokus Kesejahteraan Sosial			
1	Pendidikan			
1.1	Angka Melek Huruf	98,87	97,99	100
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,11	11,13	11,14
1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	144,9	143,28	120,23

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	135,03	170,76	174,89
1.5	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	134,59	135,45	113,38
1.6	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	169,63	131,33	140,7
1.7	Pendidikan yang ditamatkan :			
1.8	Pendidikan Dasar	28,44	27,65	26,75
1.9	Angka Harapan Lama Sekolah	14,21	14,39	14,40

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, Tahun 2020

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah usia 15 tahun keatas (sampai dengan 59 tahun, sesuai dengan indikator dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional) yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan tau huruf lainnya.

Perkembangan Angka Melek Huruf diatas usia 15 tahun, tahun 2018 telah mencapai 98,87% namun pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi 97,99%. Pada tahun 2020 angka melek huruf telah mencapai 100%. Secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk Kota Madiun yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-ata lama sekolah adalah rata – rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Pada perhitungan metode baru, rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.

Angka rata-rata lama sekolah tahun 2018 sebesar 11,11. Tahun 2019 sedikit meningkat menjadi sebesar 11,13 dan tahun 2020 sebesar 11,14. Dengan nilai rata-rata lama sekolah sebesar 11,11, 11,13 dan 11,14 maka artinya bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun baru mampu menempuh atau menamatkan pendidika sampai dengan kelas 1 SMA atau putus sekolah pada kelas 2 SMA. Hal ini disebabkan makin sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya suport dari Pemerintah Kota Madiun yaitu Program Pendidikan Dasar, Peningkatan sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP dan Program BOS dari Pemerinah Pusat.

3. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan sebesar 144,9% dan 143,28%. Pada tahun 2020 angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A mengalami penurunan lebih dari 20% sehingga menjadi sebesar 120,23%. Hal tersebut menunjukkan terjadinya penurunanan jumlah penduduk di luar usia SD (7-12) yang masih bersekolah SD, walaupun Angka Partisipasi Kasar SD/MI tahun 2018 hingga tahun 2020 nilainya masih mencapai lebih besar dari 100%

4. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SMP terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B periode tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2018 menunjukkan nilai persentase sebesar 135,03%, terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2019 menjadi 170,76%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga angka persentasenya sebesar 174,89%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang sedang bersekolah di SMP/MTs berapapun usianya diluar usia 13-15 tahun sebesar 135% pada tahun 2018, 171% pada tahun 2019, dan 174% pada tahun 2020.

5. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A tahun 2018 yakni sebesar 134,59% dan pada tahun 2019 sebesar 135,45%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 22,07% sehingga persentasenya menjadi 113,38%. Hal tersebut diartikan bahwa sebesar 34,59% pada tahun 2018, 35,45% pada tahun 2019, dan 13,38% terdapat beberapa anak yang berusia 7-12 tahun tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI.

6. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B merupakan jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMP dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B sebesar menunjukkan trend fluktuatif pada tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018 sebesar 169,63% kemudian pada tahun 2019 menurun sebesar 38,3% sehingga persentasenya menjadi 131,33%. Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 140,7%. Pada tahun 2018 terdapat 69,63% anak yang berusia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SMP dan pada tahun 2019 menurun menjadi 31,33%, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 40,7%.

7. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Capaian harapan lama sekolah pada tahun 2018 adalah 14,20, pada tahun 2019 adalah 14,39 dan pada tahun 2020 capaian angka harapan lama sekolah sebesar 14,40. Hal ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kota Madiun sudah mencapai pada jenjang perguruan tinggi. Ini disebabkan karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun dengan Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa.

d. Fokus Kesehatan

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Bidang Urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

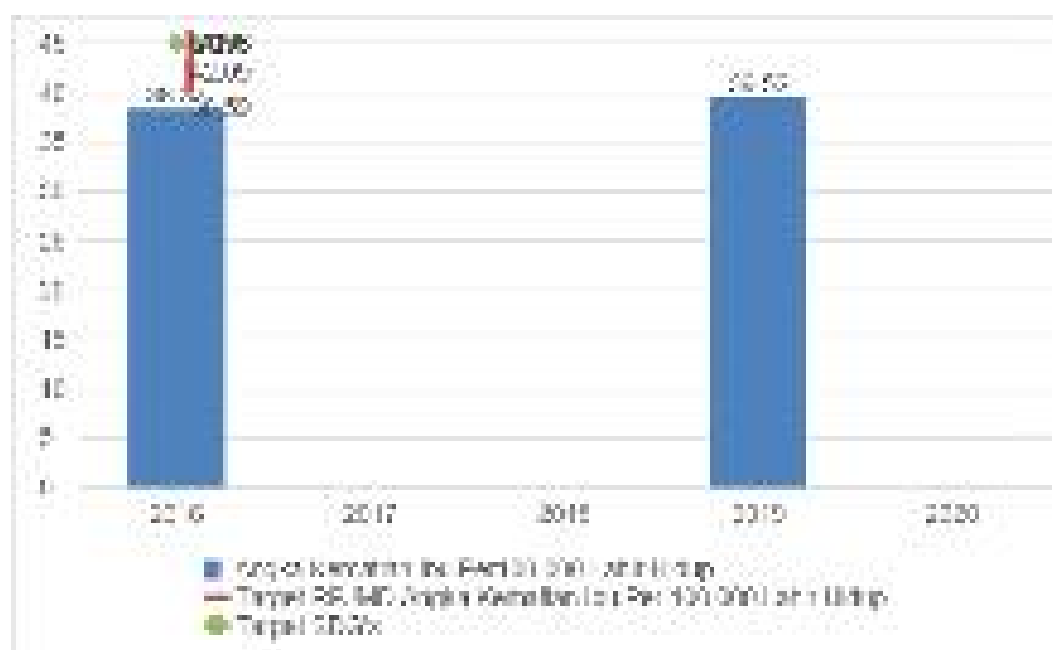
Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Angka Kematian Ibu Di Kota Madiun Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah Lahir Hidup	2602	2.583	2.561	2.530	1852
2	Jumlah Kematian Ibu	1	0	0	1	0
3	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Lahir Hidup	38,43	0	0	39,53	0
4	Target RPJMD Angka Kematian Ibu Per 100.000 Lahir Hidup	57,76	51,35	44,97	38,59	42,09

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun, Tahun 2020.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup pada Tahun tahun 2016 dan 2017 di Kota Madiun tidak tercatat angka kematian ibu. Namun, pada tahun 2019 tercatat angka kematian ibu sebesar 39,53, artinya terdapat kemaian ibu sebanyak 39,53 ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu tersebut sebanyak 1 orang ibu. Terjadi penurunan angka kematian ibu pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat upaya Pemerintah Kota Madiun untuk bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil baik melalui pendampingan, pembinaan, dan pelayanan langsung. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Gambar 2.9
Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Madiun Tahun 2015 –2020

Dari grafik di atas terlihat bahwa target RPJMD AKI di Tahun 2016-2019 mengalami penurunan dari 57,75 menjadi 38,59. Pada tahun 2020 persentasenya mengalami sedikit kenaikan menjadi 42,09. Dari tabel di atas terlihat bahwa AKI di Tahun 2020 masih dibawah target RPJMD tetapi masih dibawah target SDG'S yaitu sebesar 70 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian ibu adalah:

- a. Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal.
- b. Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi.
- c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga masa nifas.
- d. Memastikan seluruh ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC terpadu yaitu 10 T plus skrining Diabetes Militus (DM), Hipertensi, jantung, hepatitis dan HIV/AIDS di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.
- e. Menjalani kerjasama dengan SpOG terkait pelayanan rujukan pada ibu hamil.
- f. Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

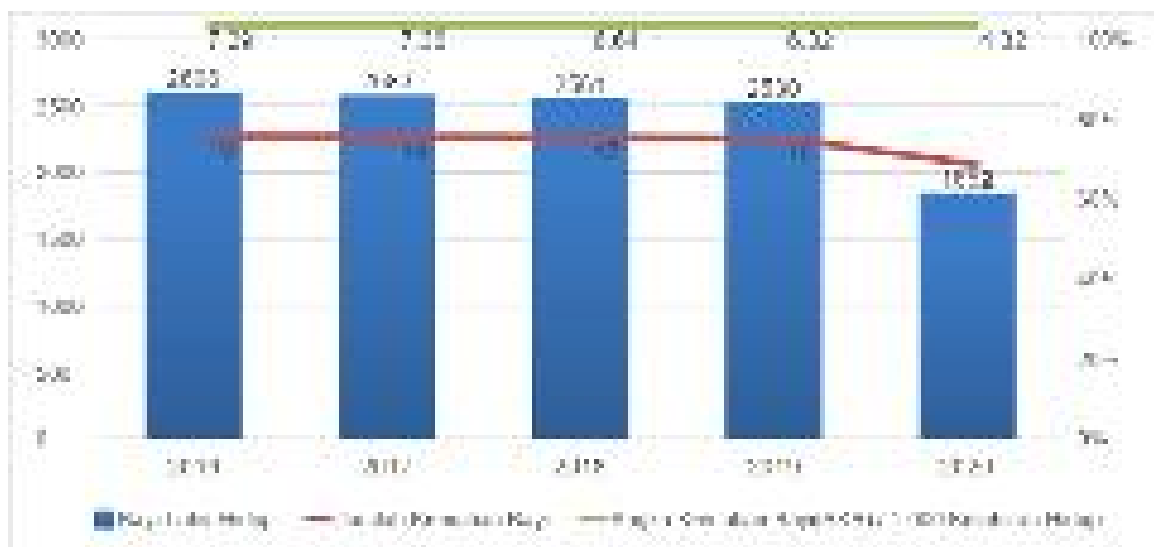
Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Angka Kematian Bayi Di Kota Madiun Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Bayi Lahir Hidup	2606	2583	2561	2530	1852
2	Jumlah Kematian Bayi	19	19	17	16	8
3	Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 Kelahiran Hidup	7.29	7.36	6.64	6.32	4,32

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun, Tahun 2020.

Dari tabel di atas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Tahun 2016 dan 2017 berjumlah 19, presentase angka kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 sebesar 7,29 dan pada tahun 2017 sebesar 7,36. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 secara absolut jumlah kematian bayi mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya. Tahun 2018 presentase angka kematian bayi sebesar 6,64 dengan jumlah absolut sebanyak 17 kematian bayi. Tahun 2019 presentase kematian bayi mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 6,32 dengan jumlah absolut 16 kematian bayi. Presentase kematian bayi tahun 2020 mengalami penurunan hingga 4,32 dengan jumlah absolut 8 kematian bayi, hal tersebut disebabkan penurunan jumlah lahir hidup. Adapun tren Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun, Tahun 2020.

Gambar 2.10

Angka Kematian Bayi Di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Dari grafik di atas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi/1000 kelahiran hidup setelah tahun 2017 mengalami penurunan dan diikuti penurunan jumlah kematian bayi secara absolut. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- a. PMT bagi ibu hamil untuk mencegah bayi BBLR.
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (edukasi kontrol sesuai jadwal).
- c. Edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan bayi.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah:

- a. Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal.

- b. Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi.
- c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga masa nifas.
- d. Berkoordinasi dengan Dokter Spesialis Anak terkait pelayanan rujukan bayi dengan kelainan.
- e. Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran masing-masing.

3. Persentase Balita Gizi Buruk

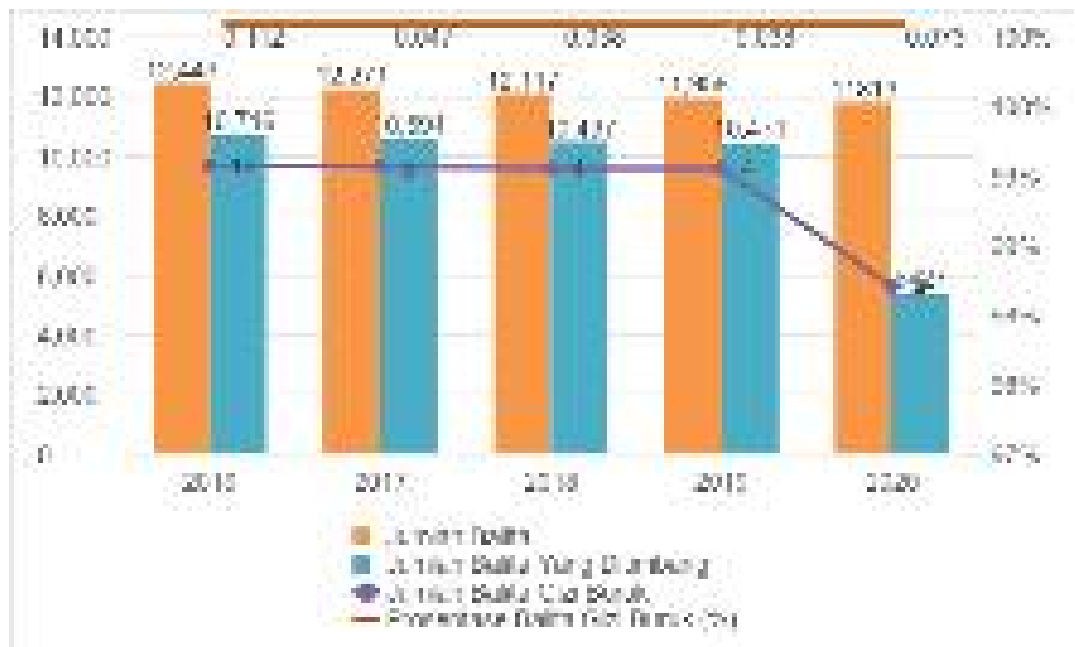
Persentase balita gizi buruk pada Tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Balita Gizi Buruk Di Kota Madiun Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah Balita	12.44 3	12.27 1	12.11 7	11.95 6	11.81 3
2	Jumlah Balita Yang Ditimbang	10.71 6	10.59 4	10.49 7	10.47 1	5427
3	Jumlah Balita Gizi Buruk	12	5	4	4	4
4	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,112	0,047	0,038	0,038	0,073

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2020.

Dari tabel diatas terlihat bahwa selama tahun 2015-2020 jumlah balita yang menderita gizi buruk dan persentase balita gizi buruk mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2016 menuju tahun 2017. Salah satu faktor penurunan tersebut yaitu menurunnya jumlah balita yang ditimbang setiap tahunnya. Adapun tren Balita Gizi Buruk Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2020.

Gambar 2.11
Balita Gizi Buruk Di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Dari grafik diatas terlihat bahwa persentase Balita Gizi Buruk di Tahun 2016 sebesar 0,113 dengan jumlah absolut 12 balita gizi buruk. Pada tahun 2017 persentase balita gizi buruk mengalami sedikit penurunan sebesar 0,065 sehingga jumlah absolut balita gizi buruk menjadi 5 orang. Pada tahun 2018 sebesar 0,038% dengan jumlah absolut sebanyak 4 balita gizi buruk. Angka tersebut sama dengan persentase balita gizi buruk di Tahun 2019. Pada tahun 2020 persentase balita gizi buruk meningkat dai 0,038 menjadi 0,073 dengan jumlah absolut tetap sebanyak 4 balita gizi buruk. Penyebab terjadinya kenaikan persentase balita balita gizi buruk karena adanya bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang kurang dari 2500 gram sehingga balita tersebut berpotensi tidak maksimal dalam penyerapan nutrisi makanan yang menyebabkan berat badan tidak naik signifikan. Selain itu masih adanya pola asuh dan pola makan yang kurang tepat pada keluarga.

Langkah yang dilakukan untuk menurunkan jumlah balita gizi buruk adalah:

1. Penimbangan balita di Posyandu setiap bulan sebagai deteksi dini terjadinya penyimpangan pertumbuhan sehingga lebih mudah dalam intervensi sebelum menjadi balita gizi buruk.
2. Pelaksanaan kelas ibu balita.
3. Edukasi kepada masyarakat tentang BBLR dan upaya perbaikan gizi keluarga.

4. Pelatihan cara Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) untuk petugas Puskesmas sehingga bisa memberikan informasi kepada masyarakat.
5. Pemberian Makanan Tambahan dan vitamin bagi balita BGM dan 2T sampai tuntas.
6. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil mulai ditemukan KEK sampai dengan masa nifas untuk mencegah kelahiran bayi BBLR.

e. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Indikator-indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan olahraga diantaranya adalah keikutsertaan dan prestasi dalam event regional dan nasional, jumlah event/ kegiatan budaya, jumlah pembinaan generasi muda, dan jumlah prestasi olahraga. Keikutsertaan dan prestasi dalam event Regional dan Nasional Tahun 2020 di bidang olahraga tetap di angka 50 untuk prestasi keolahragaan dan 8 untuk prestasi kebudayaan. Berikut tabel Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2015-2020:

Tabel 2.13
Prestasi Olahraga dan Kebudayaan
Kota Madiun Tahun 2015 – 2020

KETERANGAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PRESTASI KEOLAHRAGAAN	6	7	8	33	52	50
PRESTASI KEBUDAYAAN	6	2	10	12	8	8

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun, Tahun 2020

Dari tabel diatas jumlah prestasi keolahragaan terus meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan terjadi sedikit penurunan pada tahun 2020. Prestasi kebudayaan meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2018 lalu mengalami penurunan pada tahun 2019. Peningkatan prestasi keolahragaan dan prestasi kebudayaan diimbangi pula dengan peningkatan partisipatif peserta. Berikut grafik Prestasi Keolahragaan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2015-2020:



Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 2.12
Prestasi Olahraga dan Kebudayaan
Kota Madiun Tahun 2015 – 2020

Rincian untuk prestasi olahraga sebagai berikut :

Prestasi Olahraga selama Tahun 2020 meraih sebanyak 50 medali diantaranya :

Kejuaraan PORPROV JATIM :

- a. 2 medali perunggu cabang olahraga angkat besi
- b. 1 medali perunggu cabang olahraga atletik (lompat jauh)
- c. 1 medali perunggu cabang olahraga billiard
- d. 1 medali emas cabang olahraga gulat
- e. 2 medali perunggu cabang olahraga gulat
- f. 4 medali perunggu cabang olahraga judo
- g. 1 medali perunggu cabang olahraga karate
- h. 1 medali perak cabang olahraga karate
- i. 4 medali perunggu cabang olahraga muathay
- j. 1 medali perak cabang olahraga muathay
- k. 2 medali emas cabang olahraga muathay
- l. 1 medali perak cabang olahraga renang
- m. 1 medali perunggu cabang olahraga senam
- n. 3 medali perunggu cabang olahraga taekwondo
- o. 2 medali perak cabang olahraga tenis meja
- p. 1 medali perunggu cabang olahraga tenis meja
- q. 1 medali perak cabang olahraga tinju
- r. 7 medali emas cabang olahraga jujitsu
- s. 2 medali perak cabang olahraga jujitsu
- t. 5 medali perunggu cabang olahraga jujitsu
- u. 1 medali perak cabang olahraga judo beregu
- v. 1 medali peunggu cabang olahraga tenis meja beregu

Kejuaraan diluar PORPROV JATIM 2019:

- a. 2 medali emas cabang olahraga atletik
- b. 2 medali emas cabang olahraga sepak takraw
- c. 1 medali emas cabang olahraga pencak silat

Prestasi Seni Budaya selama Tahun 2020 sebanyak 8 kejuaraan

- a. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional
- b. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional
- c. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
- d. Juara Penyaji Sabet Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
- e. Juara Penyaji Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
- f. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
- g. Juara 3 Lomba Baca Puisi Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Timur
- h. Juara 3 Lomba Teater Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Timur

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum daerah adalah kemampuan daerah agar terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan umum melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. aspek pelayanan daerah terdiri dari pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan perizinan.

a. Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang anggarannya sudah diamanatkan dalam Undang-undang sebesar 20 persen dari APBD yang diharapkan dapat mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah. Harapan kedepannya dapat menciptakan SDM yang terampil dan cerdas. Untuk mewujudkan hal tersebut Kota Madiun sudah memetakan memetakan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik jenjang pendidikan terendah yaitu PAUD dan TK yang dapat di lihat sebagaimana tabel 2.14 dibawah ini.

Tabel 2.14
Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan, Tahun 2020

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
PAUD				
1.	Bangunan PAUD (unit)	24	28	20
2.	Peserta PAUD	224	200	215
3.	Tenaga Pendidik	47	38	37

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
TK				
1.	Jumlah Siswa (Orang)	1,622	1,485	2,037
2.	Jumlah TK Bangunan Baik (Unit)	84	79	130

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2020

Data menunjukkan pada tahun 2020 fasilitas pendidikan PAUD di Kota Madiun dapat dikatakan merata di setiap kecamatan dengan ketersediaan pendidik yang memadai. Jumlah bangunan PAUD di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 24 unit dengan jumlah pendidik 47 orang, Kecamatan Manguharjo sebanyak 28 unit dengan jumlah tenaga pendidik 38 orang, dan Kecamatan Taman sebanyak 20 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 130 orang. Selanjutnya terdapat tabel Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2020.

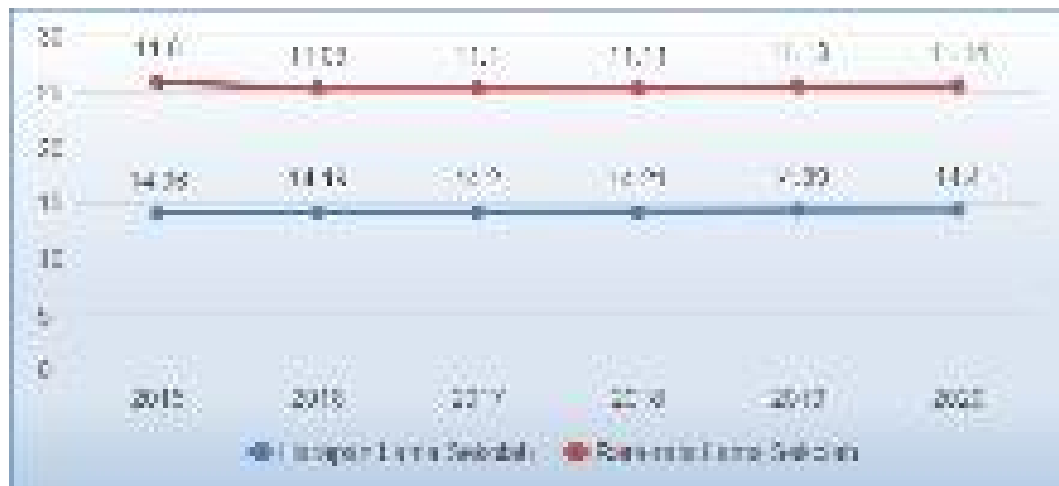
Tabel 2.15
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2020

Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Mangunharjo	Taman	Kartoharjo	
Sekolah Dasar (SD)	22	26	24	72
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	6	6	3	15
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	9	4	24
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	0	1	0	1
Sekolah Mengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK)	15	15	12	42
Madrasah Aliyah (MA)	0	4	1	5

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2020

Jumlah sekolah dasar (SD) di Kota Madiun tahun 2020 sebanyak 72 unit dan Madrasah Ibtidaiyah 15 unit. Jumlah sekolah jenjang SMP sebanyak 24 unit dan MTs sebanyak 1 unit. Jumlah sekolah menurut SMA/SMK sebanyak 42 unit dan MA sebanyak 5 unit. Kecamatan Taman menjadi kecamatan terbanyak yang memiliki jumlah unit sekolah, mengingat jumlah penduduk terbanyak juga terdapat pada Kecamatan Taman.

Kondisi dan jumlah bangunn dibeberapa jenjang pendidikan akan mendorong meningkatnya angka HLS dan RLS yang merupakan indikator dimensi pengetahuan pada IPM, menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan perlahan mengalami kemajuan di Kota Madiun. Sebagaimana dilihat pada Gambar II.13, selama periode tahun 2015 hingga tahun 2020, harapan lama sekolah di Kota Madiun telah meningkat dari 14,06 tahun (2015) menjadi 14,40 tahun (2020) atau naik sebesar 0,34 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,08 (tahun 2015) menjadi 11,14 tahun (2020) atau naik 0,06 tahun.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2020

Gambar 2.13
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun
Tahun 2015-2020

Angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 6,6 persen per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2020, harapan lama sekolah di Kota Madiun telah mencapai 14,40 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3.

Pada periode yang sama, rata-rata lama sekolah di Kota Madiun tumbuh 1 persen per tahun. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. RLS Kota Madiun tahun 2020 mencapai 11,14 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kota Madiun usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas XI (SMA Kelas 2).

Pada Aspek Pelayanan Umum, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, di antaranya adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan
Tahun 2018 - 2020

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4	5
II	ASPEK PELAYANAN UMUM			
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan			
1.1	Pendidikan Dasar			
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	140,16	135,75	113,75
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	01:39	1:52	1:177
1.1.3	Rasio guru/murid	01:16	1:16	1:16
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	01:22	1:28	1:24
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	134,59	135,45	174,89
1.2	Fasilitas Pendidikan			
1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	96,95	95,24	98,48
1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/Mts	96,36	98,68	92,63
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1.3.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	106,66	109	95,61
1.4	Angka Putus Sekolah			
1.4.1	Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs	0	0	0,7
1.4.2	Rata-rata Angka Putus Sekolah	0	0	0,7
1.5	Angka Kelulusan			
1.5.1	Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan	100	100	100
1.5.2	Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	128,52	111,35	100
1.5.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.	98,02	96,1	96,83
1.5.4	Rata-rata Angka Kelulusan	100	100	100
1.6	Manajemen Pelayanan Pendidikan			
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100
1.6.2	Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manajemen berbasis sekolah	100	100	100
1.6.3	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional	1.250	1.427	398

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, Tahun 2020.

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS)

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan baik jenjang SD/MI, SMP/MTs.

Capaian Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar pada tahun 2018 adalah sebesar 140,16%, pada tahun 2019 sebesar 135,75%, dan pada tahun 2020 capaian angka partisipasi sekolah menurun sehingga persentasenya menjadi sebesar 113,75. Secara umum APS ini menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapat akses layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan pendidikan di Kota Madiun sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah untuk mengukur jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini adalah merupakan jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Untuk tahun 2018 capaiannya adalah sebesar 39, sedangkan pada tahun 2019 capainnya adalah sebesar 52 dan tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 177. Capaian ini berarti 1 (satu) lembaga pada jenjang pendidikan dasar menampung 52 siswa per 10.000 penduduk usia sekolah pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mejadi 1 (satu) lembaga dapat menampung 177 siswa per 10.000 penduduk. Ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ada di Kota Madiun sudah sangat mencukupi.

3. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar

Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Capaian rasio guru murid pada tahun 2018 hingga tahun 2020 adalah 1:16, artinya bahwa satu orang guru menangani 16 siswa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang menyebutkan bahwa untuk SD dan SMP rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah berbanding 20 peserta didik.

4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada tahun 2018 adalah 1:22 artinya 1 guru menangani 1 kelas/rombel dengan rata-rata siswa sebanyak 22 siswa. Untuk tahun 2019 capainnya adalah 1:28 artinya 1 guru dapat menangani 1 kelas/rompel dengan rata-rata siswa sebanyak 28 siswa. Pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan disbanding capaian tahun sebelumnya, capaian rasio menjadi 1:24 artinya satu guru dapat menangani 1 kelas/rompel dengan rata-rata 24 siswa. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas.

Dibandingkan dengan tahun 2018 rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata ada peningkatan yaitu kalau tahun 2018 1 (satu) orang guru menangani 22 anak tetapi pada tahun 2019 satu orang guru menangani 28 anak, hal ini dikarenakan adanya perekrutan guru CPNS guru di Kota Madiun. Sesuai dengan Peraturan Beersama Meteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011 tahun 2011 tentang penataan guru Pegawai Negeri Sipil bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang pendidikan dasar 1 (satu) mengampu minimal 20 peserta didik/kelas.

5. Angka Partisipasi Murni SD/SMP

Angka Partisipasi Murni adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. Angka Partisipasi Murni adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni SD/SMP tahun 2018 yakni sebesar 134,59% dan pada tahun 2019 sebesar 135,45%. Pada tahun 2020 angka partisipasi meningkat cukup signifikan menjadi 174,89%. Hal tersebut diartikan bahwa pada tahun 2018 sebesar 34,59% dan 35,45% pada tahun 2019 terdapat beberapa anak yang berusia 7-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI. Pada 2020 anak yang berusia 7-15 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI meningkat menjafi 74,89%.

6. Kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik

Kondisi sekolah pendidikan dasar dengan kondisi bangunan baik akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif. Capaian kondisi sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik tahun 2018 hingga tahun 2020 persentasenya terus meningkat.

Capaian pada tahun 2018 sebesar 96,36%, sedangkan capaian tahun 2019 adalah sebesar 96,88% dan di tahun 2020 meningkat menjadi 98,48%. Dibandingkan dengan tahun 2018 maka capaian tahun 2019 ada kenaikan sebesar 0,52%. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 2,12% dibandingkan tahun 2019.

Kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik tahun 2018 sebesar 96,36% mengalami peningkatan sebesar 2,32% pada tahun 2019 menjadi 98,68%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,05% sehingga capaiannya menjadi 92,63, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Peningkatan kondisi bangunan baik untuk SD/MI dikarenakan ada perhatian dari Pemerintah Kota Madiun untuk rehab dan pembangunan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan maupun penambahan ruang sekolah. Penurunan kondisi bangunan untuk SMP/MTs disebabkan adanya kerusakan bangunan seperti kerusakan langit-langit kelas yang bolong sehingga rawan ambol. Perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah agar memperhatikan kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan di jenjang SMP/MTs.

7. APK Pendidikan anak usia dini (PAUD) disini adalah APK PAUD Formal atau Taman Kanak-Kanak.

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2018 capainnya adalah 106,66%. Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2019 adalah sebesar 109%, sehingga ada kenaikan sebesar 2,34%. Pada tahun 2020 capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini mengalami penurunan sebesar 13,39 sehingga menjadi 95,61. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya.

8. Angka putus sekolah pendidikan dasar dan rata-rata angka putus sekolah

Angka putus sekolah dan rata-rata putus sekolah pendidikan dasar pada tahun 2018 dan 2019 adalah 0. Dengan kata lain Angka Putus sekolah dan rata-rata putus sekolah di Kota Madiun tidak ada pelajar yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari akan pentingnya pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan Program BOS dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2020 angka putus sekolah dan rata-rata angka putus sekolah kembali muncul sebesar 0,7%. Hal tersebut dikarenakan turunnya angka partisipasi sekolah.

9. Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM)

Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM) adalah persentase yang menunjukkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2018 capainya adalah 100%, demikian juga angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2019 dan tahun 2020 capainya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan dengan mengadakan program dan kegiatan yang ditujukan pada siswa yaitu adanya kegiatan Uji Coba UN bagi siswa SD dan SMP baik yang dilaksanakan di Sekolah maupun dilaksanakan Tingkat Kota. Angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2018 capainya sebesar 128,52 %, kemudian capaian menurun sebesar 17,17% pada tahun 2019 menjadi 111,35%. Pada tahun 2020 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs berhasil mencapai 100%.

10. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2018 adalah 98,02 dari jumlah guru sebanyak 1.277 , sedangkan capaian pada tahun 2019 adalah 98,07% dari jumlah guru sebanyak 1.818. Pada tahun 2020 capaian guru yang memenuhi kualifikasi meningkat menjadi 96,83%. Peningkatan jumlah guru dalam waktu satu tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas guru yang mengajar.

Tabel 2.17
Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kualifikasi	Tahun 2018	Tahun 2019
1	SMA	11	11
2	D1	1	4
3	D2	15	17
4	D3	1	6
5	DIV/S1	1.277	1.818
6	S2	109	116

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun

11. Pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK

Capaian pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK pada tahun 2018 adalah 100%. Dan pada tahun 2019 dan 2020 juga capainya adalah 100%. Pengelolaan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan TIK merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi terpadu yang memuat seluruh data pendidikan dan menyediakan berbagai

informasi terpadu yang memuat seluruh data pendidikan dan menyediakan berbagai informasi pendidikan tingkat Kota yang dapat dipergunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel dan efisien.

Mulai tahun 2013 semua pendataan sudah berbasis internet dan terkoneksi dengan Pusat data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana semua bantuan BOS, KIP dan Sertifikasi Guru serta data peserta Ujian Nasional data bersumber pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Mulai tahun 2015 hingga saat ini Data Pokok Pendidikan menjadi dsatu-satunya basis data bagi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam menentukan jumlah penerima BOS, Sertifikasi Guru, Program Indonesia Pintar maupun bantuan lain yang bersumber dari dana APBN. Oleh karena itu keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu keharusan dan harus di update terus menerus.

Data tersebut harus di perbaharui setiap saat dengan sistem online yang terkoneksi langsung dengan server Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan di upload secara Nasional. Semua sekolah SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Madiun sudah berbasis web dan terkoneksi dengan Pusat Data Statistik Pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.

12. Sekolah Semua Jenjang Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah Standar Nasional. Penerapan NBS pada lembaga sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari :

- a. Sekolah memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
- b. Sekolah menyusun Rencana Kerja tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- c. Sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah. RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite sekolah dan disahkan oleh SKP Pendidikan Kota.

Di Kota Madiun semua sekolah sudah memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dokumen tersebut selalu diperbaharui setiap tahun anggaran dan tahun ajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian satuan pendidikan semua jenjang telah melaksanakan manajemen berbasis sekolah sebesar 100% mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

13. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti pelatihan profesional

Capaian pada tahun 2018 adalah 1.250 guru, sedangkan pada tahun capaian 2019 adalah sebanyak 1.472 guru telah sesuai dengan target RPJMD. Hal ini disebabkan adanya guru CPNS tahun 2019 sejumlah 76 orang guru. Pada tahun 2020 tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan professional menurun sangat drastis yaitu menjadi 398 guru.

b. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar selain pendidikan. Jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, jumlah dokter serta tenaga kesehatan yang memadai dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat untuk menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Persebaran jumlah rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 2.18, 2.19 dan 2.20 dibawah ini.

Tabel 2.18
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2020

Tahun	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk
2015	0,12
2016	0,11
2017	0,11
2018	0,11
2019	0,11
2020	0,11

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, Tahun 2020

Selama tahun 2015 hingga tahun 2020, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan putsu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2015, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,12. Pada tahun 2016 hingga 2020 sedikit mengalami penurunan sehingga rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan putsu stabil di angka 0,11. Penurunan terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk namun jumlah puskesmas, poliklinik dan putsu tetap, sehingga rasio cenderung stabil. Berikut tren rasio Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2020:



Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2020

Gambar 2.14
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2020

Selanjutnya terdapat tabel rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk pada tabel 2.19

Tabel 2.19
Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2020

Tahun	Dokter	Tenaga Kesehatan Lainnya
2015	112,85	770,72
2016	103,32	719,87
2017	151,09	996,14
2018	136,40	906,59
2019	138,02	818,12
2020	171,93	1.094,707

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2020

Rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga tahun 2020, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 112,85 hingga 171,93. Rasio tenaga kesehatan pada tahun 2015 hingga tahun 2020 berkisar anantara 770,72 hingga 1.094,707. Namun, secara keseluruhan rasio dokter dan tenaga kesehatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Tren rasio dokter dan tanga kesehatan lainnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2020

Gambar 2.15

Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2020

Setelah mengetahui rasio puskesmas dan rasio dokter serta tenaga kesehatan, berikut ini terdapat tabel rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun.

Tabel 2.20

Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2020

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2015	8	208.248	0,0384
2016	8	210.037	0,0381
2017	8	209.809	0,0383
2018	8	209.672	0,0383
2019	8	210.115	0,0383
2020	8	210.147	0,0451

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2020

Tabel data diatas menunjukkan selama tahun 2015 hingga tahun 2020 di Kota Madiun sebanyak 8 rumah sakit masih beroperasi. Adapun rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2015 menuju 2016 di Kota Madiun mengalami sedikit penurunan dari 0,0384 menjadi 0,0381. Perubahan tersebut terjadi karena penambahan jumlah penduduk tetapi secara absolut jumlah rumah sakit tetap. Namun, tiga tahun setelah 2016 rasio rumah sakit per 1.000 penduduk cenderung stabil dan mengalami peningkatan sebesar 0,0113 pada tahun 2020.

Salah satu aspek kesehatan direpresentasikan oleh umur harapan hidup. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh umur harapan hidup saat lahir. Umur harapan hidup di Kota Madiun terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana terlihat pada Gambar II.16, selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,44 tahun (2016) menjadi 72,81 tahun (2020) atau naik sebesar 0,40. Dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 8 persen per tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kota Madiun. Masyarakat semakin menikmati pembangunan dibidang kesehatan.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2020

Gambar 2.16

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun 2015-2020 (tahun)

Aspek kesehatan juga menangani kasus Kejadian Luar Biasa, Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Tahun 2019 sebanyak 9 kasus yang terjadi pada 7 kelurahan di Kota Madiun. Dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.21
Jumlah Kasus KLB Di Kota Madiun Tahun 2019

No	Jenis Kasus KLB	Kelurahan Tempat Kejadian	Waktu Kejadian Diketahui
1	Suspek Difteri	Kelurahan Mojorejo	4 Januari 2019
2	Suspek Difteri	Kelurahan Kelun	1 Februari 2019
3	DSS	Kelurahan Manisrejo	13 Februari 2019
4	AFP	Kelurahan Kelun	26 April 2019
5	DBD	Kelurahan Ngegong	13 Mei 2019
6	Suspek Difteri	Kelurahan Pangongangan	27 Juni 2019
7	Keracunan Makanan	Kelurahan Ngegong	30 Juli 2019
8	AFP	Kelurahan Manisrejo	9 Agustus 2019
9	AFP	Kelurahan Sukosari	4 November 2019

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Jumlah Kasus KLB di Tahun 2019 sebanyak 9 kasus, mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2018, penurunan kasus KLB ini terutama banyak terjadi pada kasus-kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), menunjukkan sebagai salah satu keberhasilan dari pelaksanaan Outbreak Response Imunization (ORI) difteri tahun 2018 dimana kekebalan kelompok meningkat sehingga kasus difteri ditahun 2019 menurun. Dari 9 kasus KLB keseluruhan telah ditanggulangi dalam waktu ≤ 24 Jam.

Kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka kejadian KLB di masyarakat adalah:

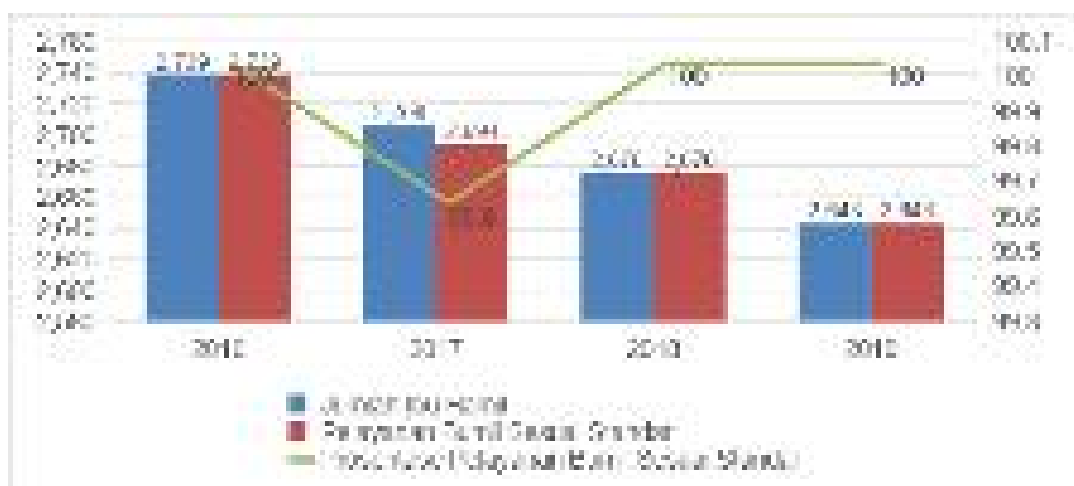
1. Meningkatkan cakupan imunisasi untuk mempertahankan kekebalan kelompok sehingga kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dapat ditekan/menurun;
2. Meningkatkan KIE kepada seluruh jejaring surveilans epidemiologi;
3. Meningkatkan Surveilans Aktif Rumah Sakit guna kewaspadaan dini dan respon.

Berikutnya yang harus diperhatikan yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar, data pelayanan kesehatan ibu hamil pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.22
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Di Kota Madiun
Tahun 2016 - Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Ibu Hamil	2.739	2.706	2.676	2.643
2	Pelayanan Bumil Sesuai Standar	2.739	2.694	2.676	2.643
3	Persentase Pelayanan Bumil Sesuai Standar	100	99,6	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun



Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Gambar 2.17
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Di Kota Madiun
Tahun 2016 - Tahun 2019

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa capaian persentase pelayanan bumil sesuai standar di Tahun 2019 sebesar 100%. Pelayanan Ibu hamil sesuai standart sudah mencapai target yang diharapkan yaitu bahwa 100% ibu hamil sudah mendapat pelayanan secara paripurna dengan minimal 4 kali kunjungan dan terlaksananya ANC terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun. Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga dalam pencapaiannya harus melingkupi semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun. Strategi kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah:

- a. sosialisasi kesehatan bagi calon pengantin;
- b. optimalisasi kelas ibu hamil di puskesmas;
- c. terjalin kerjasama yang baik dengan SpOG terkait pelayanan ANC terpadu;
- d. pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan;
- e. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan selama kehamilan dan setelah persalinan.

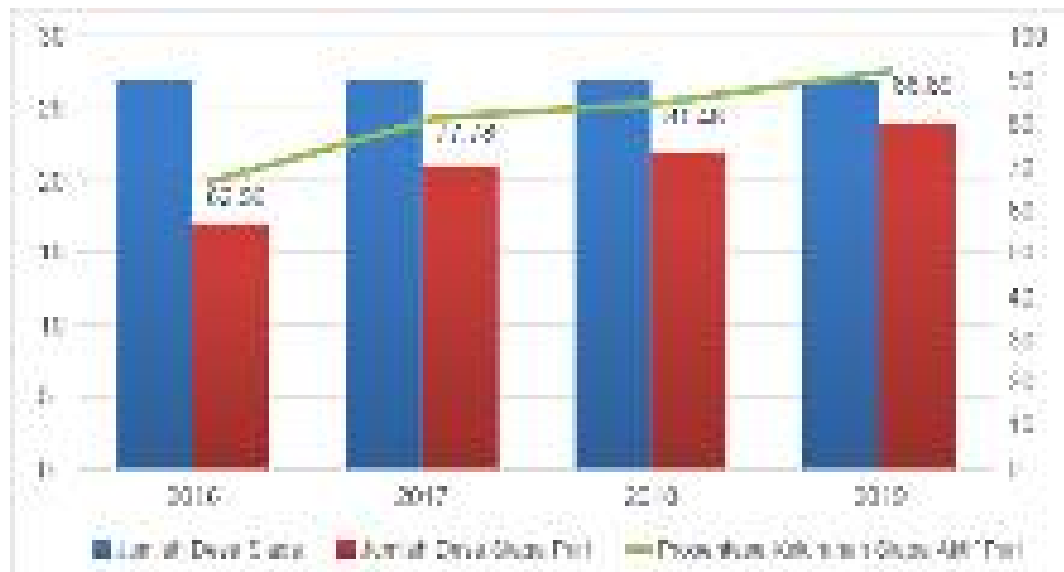
Penduduk Kota Madiun harus dapat mengaskes pelayanan kesehatan dasar setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa/Kelurahan, maka peran Kelurahan siaga aktif berstrata puri sangat dibutuhkan. Berikut terdapat data kelurahan siaga pada Tahun 2019:

Tabel 2.23
Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri Di Kota Madiun
Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Desa Siaga	27	27	27	27
2	Jumlah Desa Siaga Puri	17	21	22	24
3	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Puri	62,96	77,78	81,48	88,89

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Tabel diatas menunjukkan jumlah desa siaga puri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga, capaian persentase kelurahan siaga aktif puri juga meningkat. Berikut grafik tren peningkatan capaian kelurahan siaga aktif puri:



Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Gambar 2.18
Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri Di Kota Madiun
Tahun 2016 - Tahun 2019

Dari grafik di atas terlihat bahwa cakupan kelurahan siaga aktif di Tahun 2019 bahwa 100% dari 27 kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Strata kelurahan siaga aktif (Purnama dan Mandiri) Tahun 2019 sebesar 88,89% yaitu sebanyak 24 kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun. Adanya peningkatan 2 kelurahan dibandingkan Tahun 2018. Capaian tersebut dikarenakan:

1. peran aktif kader kelurahan siaga aktif dalam upaya menghidupkan kegiatan kelurahan siaga aktif;
2. adanya kegiatan inovasi sangat membantu tercapainya kelurahan siaga berstrata PURI;
3. kerjasama lintas sektor dengan OPD terkait menggerakkan pemberdayaan masyarakat terutama Kelurahan Siaga Aktif sebagai induk UKBM di kelurahan.

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu pada Tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.24
Puskesmas Dan Pustu Di Kota Madiun
Tahun 2016 – Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6	6
2	Jumlah Pustu	18	18	18	18	18
3	Jumlah Penduduk	210.037	209.809	209.797	210.115	210.147
4	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu Per 1.000 Penduduk	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 tidak ada penambahan jumlah Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun. Rasio jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per 1.000 penduduk pada Tahun 2016 hingga Tahun 2020 masih sama disebabkan jumlah dari Puskesmas dan Pustu masih sama. Di setiap Kelurahan di Kota Madiun sudah terdapat pelayanan kesehatan berupa Puskesmas dan Rumah Sakit sehingga aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup mudah. Dimana terdapat 8 RS yaitu 2 RS Umum milik pemerintah, 1 RS Paru milik pemerintah, 1 RS Umum milik TNI AD, 1 RS Bersalin milik swasta serta 3 RS Umum milik swasta, sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Madiun sudah terpenuhi.

1. Jumlah Puskesmas Poned

Puskesmas yang masuk dalam kategori Pelayanan Mampu Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) terdapat 1 Puskesmas yaitu Puskesmas Banjarejo, dan sampai sekarang masih belum ada penambahan.

2. Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk

Pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, jumlah Rumah Sakit di Kota Madiun masih sama yaitu sebanyak 8 Rumah Sakit. Rasio Rumah Sakit di Kota Madiun dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta Di Kota Madiun
Tahun 2014 -Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi	1	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Milik TNI/AD	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Swasta	3	3	3	3	3
5	Rumah Sakit Khusus	2	2	2	2	2
6	Jumlah Rumah Sakit	8	8	8	8	8
7	Jumlah Penduduk	210.037	209.809	209.797	210.115	210.417
8	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk	0,0381	0,0383	0,0381	0,0381	0,0451

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio jumlah Rumah Sakit terhadap 1.000 penduduk pada Tahun 2019 sebesar 0,0381. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 masih sama dikarenakan secara absolute jumlah RS masih sama yaitu 8 RS. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,0451 dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran pada Aspek Pelayanan Umum yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Fokus pada bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4	5
II	ASPEK PELAYANAN UMUM			
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Kesehatan			
2.1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk	0,11	0,11	0,11
2.2	Jumlah Puskesmas PONED	1	1	1
2.3	Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,0381	0,0381	0,0451
2.4	Rasio dokter per 100.000 penduduk	136,32	138,02	171,93
2.5	Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk	906,59	818,12	1.094,70 7
2.6	Puskesmas berstandar ISO	0	0	0
2.7	SOP Pelayanan	444	457	478
2.8	Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani	100	100	100
2.9	Cakupan kelurahan siaga aktif	100	100	100
2.10	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	65,19	68,21	69
2.11	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	62,96
2.12	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100
2.13	angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	39,53	0
2.14	Persentase Rumah Tangga Sehat	65,19	68,21	69
2.15	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Pra Bayar	100	100	95,17
2.16	Jumlah Kasus KLB	14	9	162
2.17	Persentase Penanganan Penyakit	100	87,5	100
2.18	Persentase Kelurahan Ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	44,4	59,26	40,74
2.19	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	100	100
2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	81,32	81,84	74,94
2.21	Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100	100
2.22	Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi Syarat	84,01	85,12	6,63
2.23	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai Standart	100	100	100
2.24	Persentase Penduduk yang di skrining Faktor Resiko PTM	94,84	104,67	90,25
2.25	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI	81,48	88,89	0

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
2.26	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	369	408	502
2.27	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standart	100	100	100
2.28	Persentase TTU dan TPM sehat	84,12	85,61	86,32
2.29	Persentase Kecukupan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya (sesuai Permenkes 75/2014)	60,8	69,79	84,21
2.30	Persentase Kematian Akibat Penyakit Potensial Wabah	0	0,82	2,56
2.31	Angka Kematian Bayi	6,64	6,32	4,32

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Putsu per 1.000 penduduk

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, dan putsu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama tahun 2018 hingga tahun 2020, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan putsu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020, rasio ini stabil di angka sebesar 0,11.

2. Jumlah Puskesmas PONED

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas berberap dalam menurunkan angka kematian ibu, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan kunci keberhasilan pelayanan PONED. Selama tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah puskesmas yang menyediakan layanan PONED sebanyak 1 puskesmas.

3. Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk

Selama tahun 2018 hingga 2020, di Kota Madiun beroperasi sebanyak 8 rumah sakit, yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah kota, 1 rumah sakit milik pemerintah provinsi, 1 rumah sakit milik TNI/AD, 1 rumah sakit swasta, dan 1 rumah sakit khusus. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,0381. Sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2020 sehingga nilainya mencapai 0,0451.

4. Rasio dokter per 100.000 penduduk

Rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga 2020, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 136,32 hingga 171,93. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020. Secara keseluruhan dalam tiga tahun rasio dokter menunjukkan peningkatan.

5. Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk

Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan lainnya per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020, rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 906,59 hingga 1.094,707. Rasio tenaga kesehatan yang terus meningkat disebabkan adanya pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang semakin baik.

6. Puskesmas berstandar ISO

Fungsi utama puskesmas sebagai unit pelayanan masyarakat adalah upaya promotif dan preventif terhadap resiko penyakit di tengah masyarakat yang dilayani. Di Kota Madiun selama tahun 2018 hingga 2020 belum mempunyai puskesmas yang telah mempunyai standar ISO atau dapat dikatakan puskesmas plus yang dapat menjalankan rawat inap dan rawat jalan secara simultan di Kota Madiun.

7. SOP Pelayanan

Standar Operasional Prosedur merupakan dasar dalam melakukan pekerjaan dan sistem penghargaan yang diberikan kepada pegawai untuk menunjang pelayanan. Skor SOP Pelayanan di Kota Madiun tahun 2018 hingga 2020 berkisar antara 444 hingga 478. Angka tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, diharapkan SOP pelayanan kesehatan di Kota Madiun menunjukkan kriteria yang baik.

8. Cakupan Masyarakat Miskin terlayani

Pada tahun 2018 hingga tahun 2020, di Kota Madiun penanganan masyarakat miskin yang terlayani telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh adanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Madiun.

9. Cakupan Kelurahan siaga aktif

Kelurahan/Desa Siaga Aktif adalah Kelurahan/Desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa/Kelurahan. Di Kota Madiun pada tahun 2018 hingga tahun 2020 cakupan kelurahan siaga aktif sebesar 100% yang berarti seluruh Kelurahan/Desa aktif beroperasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

10. Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan menciptakan suatu Rumah Tangga Sehat dimana setiap anggota menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Sementara pada tahun 2018 persentase rumah tangga yang mempraktikkan rumah tangga ber-PHBS yaitu sebesar 65,19%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 68,21 dan pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 69%.

11. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan kelurahan Universal Child Immunization di Kota Madiun, pada tahun 2018 dan 2019 telah mencapai 100%. pada tahun 2020 cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan sehingga cakupannya hanya sebesar 62,96%. Dengan demikian, diharapkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat dari suatu penyakit dapat diminimalisir.

12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Penyelesaian dan penanganan DBD diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selama tahun 2018 hingga tahun 2020 kota Madiun berhasil menangani kasus DBD dengan persentase mencapai 100%. Hal ini didukung oleh keterlibatan lintas program dan lintas sector, seperti koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan lingkungan dalam melaporkan kasus serta adanya penanganan yang cepat.

13. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2018 tidak tercatat kasus kematian ibu. Namun, pada tahun 2019 tercatat angka kematian ibu sebesar 39,53, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 39,53 ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sehingga angka kematian ibu menjadi 0.

14. Persentase Rumah Tangga Sehat

Rumah tangga sehat akan mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Persentase rumah tangga sehat tahun 2018 yaitu sebesar 65,19%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 68,21 dan pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 69%.

15. Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Pra Bayar

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Pra Bayar Kota Madiun tahun 2018 dan 2019 sebanyak 100%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 4,73% sehingga menjadi 95,13%. Sebagian besar masyarakat Kota Madiun telah memiliki Jaminan Pra Bayar.

16. Jumlah Kasus KLB

KLB adalah timbulnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Jumlah kasus KLB di Kota Madiun tahun 2018 sebanyak 14 kejadian, lalu pada tahun 2019 menurun menjadi 9 kejadian. Pada tahun 2020 jumlah kasus KLB meningkat sangat drastis mengingat pada 2020 terjadi fenomena wabah yang dapat menular yaitu kasus terjadinya virus corona.

17. Persentase Penanganan Penyakit

Persentase penanganan penyakit Kota Madiun tahun 2018 berhasil mencapai 100% tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga menjadi 87,5. Pada tahun 2020 pemerintah berhasil meningkatkan persentase penanganan penyakit menjadi 100%.

18. Persentase Kelurahan Ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Masalah kesehatan lingkungan merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan, salah satunya masalah sanitasi yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Pada tahun 2018 presentase kelurahan ber STBM Kota Madiun sebesar 44,4 terjadi peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2019 sehingga menjadi 59,26. Sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan pula menjadi 40,74.

19. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat merupakan salah satu komoditi kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Obat harus tersedia secara cukup, baik item dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat di Kota Madiun tahun 2018 hingga 2020 mencapai angka 100%, artinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

20. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun

Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan dinas kesehatan Kota Madiun tahun 2018 sebesar 81,32, mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2019 sehingga menjadi 81,84. Pelayanan dinas kesehatan memiliki kategori yang sangat baik dalam dua tahun tersebut. Pada tahun 2020 IKM menurun menjadi 74,94 yang artinya kategori pelayanan menurun menjadi baik. Sehingga kualitas pelayanan harus ditingkatkan.

21. Presentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah

Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun tahun 2018 hingga 2020 telah mencapai 100%. Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun terbilang baik hingga saat ini.

22. Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai

IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Di Kota Madiun tahun 2018 produk olahan IRTP yang telah berhasil dinilai sebesar 84,01%, pada tahun 2019 85,12, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 86,63%.

23. Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai standart

Sarana dan Prasarana rumah sakit merupakan peralatan yang mendukung pelayanan mendasar perawatan kesehatan yang aman. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit di Kota Madiun tahun 2018 hingga 2020 telah memenuhi standart dengan capaian sebesar 100%.

24. Persentase Penduduk yang di skrining faktor resiko PTM

Penduduk yang di skrining faktor resiko PTM tahun 2018 sebesar 94,84%, pada tahun 2019 meningkat melebihi target yaitu mencapai 104,67%. Sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,42% menjadi 90,25%.

25. Persentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI

Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI tahun 2018 sebesar 81,48 lalu meningkat menjadi 88,89 pada tahun 2019. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penambahan 2 kelurahan yang berstrata PURI pada tahun 2019.

26. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terus meningkat, yaitu berkisar antara 369 hingga 502 sarana. Semakin meningkatnya sarana pelayanan kesehatan diharapkan semakin banyak masyarakat yang terpenuhi haknya dalam mendapat layanan kesehatan.

27. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standart

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Madiun tahun 2018 hingga tahun 2020 telah sesuai standart serta mendapatkan persentase sebesar 100%

28. Persentase TTU dan TPM sehat

Persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) sehat mencapai 84,12. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi 85,61 dan 86,32. Diharapkan tempat-tempat umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan serta tempat pengolahan makanan seperti warung makan, toko penjual makanan, dan lokasi jajanan makanan dapat dilakukan pengawasan lebih lanjut agar persentase mengalami peningkatan.

29. Persentase Kecukupan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan ketersediaan sarana kesehatan adalah kecukupan alat kesehatan yang berada di puskesmas dan jaringan lainnya. Persentase kecukupan alat kesehatan di puskesmas Kota Madiun tahun 2018 sebesar 60,8% kemudian meningkat menjadi 69,79% di tahun 2019. Pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang cukup besar sehingga persentasenya menjadi 84,21%.

30. Persentase Kematian Akibat Penyakit

Pada tahun 2018 tidak ada persentase kematian yang diakibatkan oleh penyakit. Pada tahun 2019 dan 2020 persentase tersebut meningkat menjadi 0,82% dan 2,56%. Adanya wabah virus di tahun 2020 menyebabkan persentase kematian akibat penyakit mengalami peningkatan.

31. Angka Kematian Bayi

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi. Pada tahun 2018, angka kematian bayi di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 6,64. Pada tahun 2019 menurun menjadi 6,32, selanjutnya pada tahun 2020 kembali menurun sehingga angka kematian bayi menjadi sebesar 4,32. Angka kematian bayi yang terus menurun akan berpengaruh pada angka keberlangsungan hidup bayi.

c. Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2018 sampai dengan 2019 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 27.
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 – 2020

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4	5
II	ASPEK PELAYANAN UMUM			
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
4.1	Rasio rumah layak huni	99,65	99,95	99,95
4.2	Rasio permukiman layak huni	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Sasaran tersebut dijabarkan dalam beberapa Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Madiun tahun 2018 sebesar 99,65 dan 99,95 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Semakin tinggi rasio berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rumah layak huni. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH.

Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2019 dan tahun 2020 didapatkan sebanyak 132 rumah yang berhak menerima Bansos RTLH. Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\% = \frac{42.849}{42.869} \times 100\% = 99,95\%$$

2. Rasio pemukiman layak huni

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 definisi dari Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan serta Perda Kota Madiun No.6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Mengacu pada point 6 diatas tentang lingkungan permukiman kumuh bahwa sampai dengan tahun 2020 sudah tertangani semua sehingga ditingkat kelurahan sudah tidak ada lagi Kawasan Permukiman Kumuh atau dengan kata lain tidak ada lagi permukiman tidak layak huni. Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100 = \frac{2758,67}{2758,67} \times 100\% = 100\%$$

d. Pelayanan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.28
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum
Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2018- 2020

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4	5
II	ASPEK PELAYANAN UMUM			
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
6	Sosial			
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	16	16
6.2	Jumlah Penerima Bantuan	12936	10.612	49.075
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social	10594	10.573	30.295
6.4	Persentase PMKS yang tertangani	100.1	100,30%	99,80%
6.5	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	12936	10.612	49.075
6.6	Angka Kemiskinan	4,49	4,35	4,98
6.7	Indeks Gini	0,34	0,35	0,33

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, Tahun 2020

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.

Data menunjukkan bahwa di Kota Madiun pada tahun 2018 hingga 2020 terdapat 15 Panti Asuhan dan 1 Panti Jompo yang terdaftar sedangkan yang aktif dan menerima bantuan sosial permakanan hanya 8 lembaga. Jumlah bantuan sosial untuk Panti Asuhan menyesuaikan dengan jumlah masing-masing anak yang diasuh, total anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp.148.700.000.

2. Jumlah Penerima Bantuan Penerima bantuan

pada tahun 2019 lebih sedikit dari tahun 2018 karena ada bantuan yang pada tahun 2018 ada tetapi untuk tahun 2019 bantuan tersebut tidak ada lagi yaitu bantuan beras subsidi (TUAN RASIDI) dari Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020 jumlah penerima bantuan meningkat dratis dikarekanan terdapat tambahan program bantuan dari pemerintah pada masa pandemi. Masing-masing bantuan sosial mempunyai persyaratan khusus dan memerlukan beberapa tahapan agar dapat menerima bantuan. Kecepatan data daerah belum dapat sepenuhnya diakomodir oleh Pusat, sehingga bantuan yang diterima jumlahnya dibawah pagu. Untuk Bansos Lansia non potensial, bantuan tidak tersalurkan karena penerima bantuan sudah meninggal dan tidak dapat dialihkan ke ahli waris.

3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2018 sebesar 10.594, pada tahun 2019 sebesar 10.573, dan meningkat sebesar 30.295 pada tahun 2020. Penanganan yang tertangani yaitu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yang dahulu disebut dengan PMKS. Penanganan PPKS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, Jumlah PPKS di Kota Madiun sebanyak 10.702 orang atau sebesar 5,1% dari total jumlah penduduk. Sebanyak 2.536 orang PPKS atau 1,2 % dari jumlah penduduk, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan sedangkan PPKS lainnya (Fakir Miskin) sejumlah 3,9% dari jumlah penduduk memerlukan penanganan berupa bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

4. PMKS yang tertangani

Pada tahun 2019 capaian penanganan mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,2 poin dari tahun sebelumnya. Jumlah totalnya mencapai 10.729 orang atau sebesar 100,3%. Sebaliknya, pada tahun 2020 capaian penanganan mengalami penurunan sebesar 0,2 poin dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 99,8%. Hal ini memang sangat mungkin dicapai mengingat penanganan masalah sosial memang tidak bisa dibatasi hanya untuk masyarakat Kota Madiun saja. Terdapat pemerlu pelayanan sosial asal luar kota yang berada di Kota Madiun dan memerlukan penanganan khusus sebanyak 150 orang. Warga luar kota tersebut yang memerlukan pelayanan sosial dengan rincian : 92 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 20 orang gelandangan/ orang terlantar, 5 orang Pengemis, 9 orang Lansia terlantar, 9 orang Anak jalanan dan 5 orang pemulung.

5. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Berikut data PMKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2019.

Tabel 2.29
Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2019

JENIS PMKS	SATUAN	JUMLAH	BANTUAN
1. Lanjut Usia Terlantar/ Non potensial	orang	101	Berupa bantuan uang @ Rp 2.000.000,-
2. Anak Terlantar	orang	365	Berupa bantuan permakanan @ Rp 300.000,-
3. Fakir Miskin dengan rincian :	orang	10.146	
- Fakir Miskin KPM BPNT		4.833	APBN
- Fakir Miskin KPM PKH		3.269	APBN
- Fakir Miskin KPM BPNTD		2.044	APBD II
Jumlah		10.612	

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

Pada tahun 2019 jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial sebanyak 10.612 orang. Jenis PMKM yang diberi bantuan yaitu lanjut usia terlantar/non potensial berupa bantuan uang @Rp. 2.000.000. Anak terlantar juga mendapat bantuan berupa permakanan sebesar @Rp. 300.000. Jumlah penerima bantuan terbanyak yaitu jenis PMKS fakir miskin dengan jumlah 10.146 orang, bantuan yang diterima berasal dari APBN maupun APBD.

6. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan). Sesuai data BPS angka kemiskinan Kota Madiun tahun 2019 sebesar 4,35% atau sekitar 7.690 penduduknya berada dibawah garis kemiskinan (Rp. 478,304,-/jiwa/bln). Angka tersebut merupakan rangking ketiga di Jawa Timur, Kabupaten/kota dengan angka kemiskinan terendah setelah Kota Batu (3,81%) dan Kota Malang (4.07%). Capaian tersebut meningkat 0,14 poin dari tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 angka kemiskinan Kota Madiun mengalami peningkatan sebesar 0,53 poin. Berbagai bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD dan pemberdayaan sosial yang diterima masyarakat, sangat efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.

7. Indeks Gini

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kota Madiun pada tahun 2018-2020 tercatat antara angka 0,33 hingga 0,35 dengan demikian termasuk Kota dengan ketimpangan sedang.

e. Pelayanan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada aspek tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018 -2020

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
II	ASPEK PELAYANAN UMUM			
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
7	Tenaga Kerja			
7.1	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	100	100	100
7.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	64.55%	66.86%	68,63%
7.3	Pencari kerja yang ditempatkan	99.1	85,52	57,28%
7.4	Tingkat pengangguran terbuka	3.85 %	4.01%	8,32%
7.5	Keselamatan dan perlindungan	13968	15.976	18.565
7.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, Tahun 2020.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun

Indikator ini menunjukkan capaian kinerja penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Dalam era industrialisasi, masalah sengketa pengusaha dan pekerja menjadi semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil.

Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja terus memperkuat peranan mediator hubungan industrial. Hal ini dilakukan untuk mencegah, meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Mediator hubungan industrial berperan sebagai ujung tombak dalam membina dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang ditandai ketenangan bekerja para pekerja atau buruh dan stabilitas dunia usaha. Dengan peran mediator tersebut, di Kota Madiun perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha ditahun 2018-2020 yang terdaftar pengaduan dan dapat terselesaikan dengan capaian kinerja 100% Penyelesaian pengaduan ini dapat diselesaikan melalui cara mediasi dan perjanjian bersama. Untuk perbandingan realisasi angka sengketa pengusaha pekerja antara tahun 2018-2020 mengalami kesamaan yaitu 100%. Namun jumlah kasus yang diselesaikan ditahun setiap berbeda.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2018 sebesar 64,55%, sedangkan pada tahun 2019 adalah 66,86%, sehingga TPAK tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,31% apabila dibandingkan dengan TPAK tahun 2018 yang sebesar 64,55%. Pada tahun 2020 TPAK mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya menjadi 68,63%.

Pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Madiun ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 66,86 %. Hal ini menunjukkan dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), terdapat angkatan kerja

sebanyak 67 orang yang terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Berarti yang sisanya sebanyak 33 orang adalah bukan angkatan kerja yang terdiri dari usia sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurung waktu tahun 2018-2020 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan ketrampilan serta menciptakan wirausaha baru.

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan dapat dihitung dengan cara persentase dari jumlah pencari kerja dibandingkan dengan pencari kerja yang terdaftar. Persentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2018 sebesar 99,1% sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 13,58% menjadi 85,52%. Pada tahun 2020 pencari kerja yang ditempatkan sebesar menurun hampir sebesar 30% atau menjadi sebesar 57,28%. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi yang masih berlangsung dan sebagian besar perusahaan atau pemberik kerja tidak melakukan rekrutmen tenaga kerja baru.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran Terbuka atau sering juga diistilahkan dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran

Terbuka Tahun 2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun adalah sebesar 3,85 %. pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,16%. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,16% sehingga persentasenya menjadi sebesar 4,01 %. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 8,32%. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) dan tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi yang berlangsung dan banyak perusahaan yang melakukan pemberhentian kerja.

5. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, begitu juga dengan Undang- Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hukum keselamatan kerja) meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib menaati peraturan tersebut guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pekerja dilingkungan pekerjaannya. Sedangkan bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan.

Di Kota Madiun selama tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sebesar 13.968, tahun 2019 meningkat menjadi 15.976. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan sebanyak hampir 3.000 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlahnya menjadi 18.565 pekerja.

6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Reformasi telah membukakan pemikiran bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance. Perubahan UUD Negara Republik

Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3), UU NO 21 tahun 2000, KEP/16/MEN/2001, merupakan dasar hukum dalam melaksanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus di pahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha.

Pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah bersama sama menegakkan dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian bersama (PB).

Meskipun sudah adanya PB yang disepakati anatar pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah, namun masih terdapat sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Untuk Kota Madiun jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha ditahun 2018-2020 yang terdaftar dapat terselesaikan semua.

f. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pembangunan untuk mencapai tujuan mengembangkan pengarusuteraan gender dengan sasaran meningkatkannya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.31
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA di Kota Madiun Tahun 2018 - 2020

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
II	ASPEK PELAYANAN UMUM			
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	13,32	12,78	12,72
8.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	86,67	86,95	87,27
8.3	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0,002	0,017	0,016
8.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	89,75	93,81	86,22

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
8.5	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100
8.6	Indeks Pemberdayaan Gender	82,28	77,07	
8.7	Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah dan Swasta	99,43	99,73	
8.8	Indeks pembangunan Gender	93,47	94,05	

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk realisasi tahun 2018 sebesar 13,32% tahun 2019 sebesar 12,78 % dan tahun 2020 sebesar 12,72%. Beberapa alasan yang menyebabkan penurunan adalah pensiun, mutasi, ataupun meninggal dunia.

2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

Jumlah partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami kenaikan/peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Untuk tahun 2018 realisasi sebesar 86,67, tahun 2019 sebesar 86,95 dan tahun 2020 mencapai 87,27.

3. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Realisasi tahun 2018 sebesar 0,02 kemudian meningkat sebesar 0,017 untuk tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan lebih kecil sehingga menjadi 0,016. Rasio KDRT menggambarkan semakin tinggi rasio maka menggambarkan adanya peningkatan kesadaran kaum perempuan untuk melapor jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

4. Jumlah Partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2019 mengalami kenaikan/peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk realisasi capaian tahun 2018 sebesar 89,75% % sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 93,81%, dengan perhitungan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibanding jumlah angkatan kerja perempuan. Terjadi penurunan angka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2020 sehingga menjadi 86,22. Penurunan ini menunjukkan bahwa angkatan kerja laki-laki masih diperhitungkan dari pada angkatan kerja perempuan.

5. Jumlah Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Semua laporan pengaduan yang masuk di Pusat Pelayanan Terpadu tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2018 hingga tahun 2020 didata dan tertangani semuanya, sehingga capaiannya 100%.

6. Jumlah Indeks Pemberdayaan Gender

Menurut BPS, Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Madiun tahun 2018 sebesar 82,28 % dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019 sehingga persentasenya sebesar 77,07. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang semakin baik.

7. Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah dan swasta

Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta mengalami penurunan sedikit di tahun 2019 yaitu sebesar 99,73% sedangkan di tahun 2018 sebesar 99,99%.

8. Jumlah Indeks Pembangunan Gender

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pada tahun 2018 nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 93,47 dan ada peningkatan di tahun berikutnya sebesar 94,05. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil.

g. Pelayanan Perhubungan

Adapun untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembangan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan di Kota Madiun Tahun 2018 – 2020

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
II	ASPEK PELAYANAN UMUM			
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
14	Perhubungan			
14.1	Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu	95%	104%	
14.2	Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik	91	100	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN		
		2018	2019	2020
14.3	IKM terhadap pelayanan pelayanan angkutan dan lalu lintas	78,08	85,08	
	Presentase Perlengkapan Jalan			67%
	Kinerja Angkutan Umum			39%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun

Penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja pada tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu

Persentase jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2018 sebesar 95% kemudian pada tahun 2019 tercapai realisasi 104 %, sedangkan target tahun 2019 adalah 100%. Adapun realisasi ini diperoleh dari :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah rambu yang terpasang tahun 2019}}{\text{Jumlah Kebutuhan Rambu}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{2245}{2163} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = 104 \%$$

Tercapainya realisasi pemasangan rambu-rambu lalu lintas sampai 104% melebihi kebutuhan yang telah direncanakan dikarenakan adanya beberapa lokasi atau objek baru yang sangat dinamis seperti pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, dll yang membutuhkan pemasangan rambu baru diluar kebutuhan yang telah direncanakan.

2. Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik

Rasio sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik pada tahun 2018 adalah 91 %, sedangkan target pada tahun 2018 adalah 80 %. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.33
Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik
di Kota Madiun Tahun 2018 - 2019

NO	NAMA	2018			2019		
		JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%	JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%
1	TRAFFIC LIGHT	29	27	93%	29	29	100%
2	HALTE	11	10	91%	11	11	100%
3	CCTV	10	9	90%	10	10	100%
	JUMLAH	50	46	91%	50	50	100%

Adapun perhitungan persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah sarfas LLAJ tahun 2019}}{\text{Total Sarana dan Fasilitas LLAJ}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{50}{50} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = 100 \%$$

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2017 tercapai 89% dan meningkat pada tahun 2018 mencapai 91%.

3. IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas

IKM (Indek kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas tahun 2019 target 80 dan terealisasi 85,08.

1. Persentase Perlengkapan Jalan

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa; rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dan di luar badan jalan, dan penyelenggaraan perlengkapan jalan. Persentase perlengkapan jalan Kota Madiun sebesar 67%, terdapat 33% jalan yang belum dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan.

2. Kinerja Angkutan Umum

Kinerja Angkutan Umum Kota Madiun tahun 2020 mencapai 39%. Capaian tersebut menandakan belum optimalnya penggunaan angkutan umum di Kota Madiun. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, hal tersebut menyebabkan minimnya penggunaan angkutan umum.

h. Pelayanan Kepemudaan dan Olah Raga

Perkembangan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sarasanya berikut:

Tabel 2.34
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Madiun Tahun 2018- 2020

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN		
		2018	2019	2020
II	ASPEK PELAYANAN UMUM			
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
18	Pemuda dan Olahraga			
18.1	Jumlah organisasi pemuda	3	6	6
18.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	3	1
18.3	Jumlah kegiatan olahraga	8	18	2

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN		
		2018	2019	2020
18.4	Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3
18.5	Lapangan olahraga	83	83	83
18.6	Jumlah Organisasi Olah Raga	28	28	28
18.7	Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional	11	7	3
18.8	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional	34	52	79
18.9	Jumlah Peserta Olah Raga	20.394	19.266	2.015
18.10	Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak	100	100	100

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

Penjelasan untuk masing-masing indikator tersebut adalah :

1. Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi kepemudaan Kota Madiun Tahun 2020 antara lain :

- a. Front Pemuda Kerakyatan;
- b. Organisasi Generasi Muda (Pribumi);
- c. Organisasi Generasi Muda Pecinta Alam (Eskanda);
- d. Paguyuban Pakandayu;
- e. Purna Paskibraka Indonesia (PPI);
- f. Pramuka.

2. Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun Tahun 2018 dan 2019 sebanyak 3 kegiatan, antara lain :

1. Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka;
2. Lomba Gerak Jalan;
3. Pembinaan putra putri berprestasi (kerjasama dengan TNI dan POLRI)

Pada tahun 2020 hanya terdapat satu kegiatan kepemudaan yang terlaksana.

3. Jumlah kegiatan Olah raga

Jumlah kegiatan olahraga di Kota Madiun Tahun 2018 dan 2019 sebanyak 18 kegiatan, antara lain :

1. Lomba Bola voli kelurahan ;
2. Lomba bola voli pelajar SD, SMP ;
3. Lomba single event panahan pelajar SD, SMP ;
4. Lomba single event catur pelajar SD, SMP ;
5. Lomba single event renang pelajar SD, SMP ;
6. Lomba single event bulu angkis pelajar SD, SMP ;
7. Lomba single event sepak takraw pelajar SD, SMP ;
8. Lomba single event tenis meja pelajar SD, SMP ;

9. Lomba single event atletik pelajar SD, SMP ;
10. Lomba single event pencak silat pelajar SD, SMP ;
11. Lomba single event taekwondo pelajar SD, SMP ;
12. Lomba single event senam pelajar SD, SMP ;
13. Lomba single event tenis lapangan pelajar SD, SMP ;
14. Lomba single event karate pelajar SD, SMP ;
15. Lomba single event bola basket pelajar SD, SMP ;
16. Festival Seni Pencak Silat Nusantara ;
17. Lomba Bola Voli PKK ;
18. Charismatic 10K Run.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kegiatan keolahragaan di Kota Madiun dikarenakan adanya pandemi yang terjadi sehingga mengakibatkan terbatasnya penyelenggaraan kegiatan keolahragaan.

4. Gelanggang/ balai remaja

Gelanggang/balai remaja di Kota Madiun Tahun 2020 masih sama dengan di Tahun 2018 dan 2019 yaitu sebanyak 3, antara lain :

1. GOR Parikesit;
2. GOR SMAN 1 Kota Madiun;
3. GOR SMAN 3 Kota Madiun.

5. Lapangan olah raga

Lapangan olahraga di Kota Madiun Tahun 2018 hingga Tahun 2020 jumlahnya sebanyak 83

6. Jumlah organisasi olahraga

Pada Tahun 2020 sebanyak 28 dengan jumlah yang tetap sama dengan kondisi dua tahun sebelumnya.

Tabel 2.35
Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1	Bulu Tangkis	3 Klub	15	Angkat Besi	3 Klub
2	Tenis Lapangan	10 Klub	16	Taekwondo	4 Klub
3	Renang	2 Klub	17	Panjat Tebing	2 Klub
4	Atletik	1 Klub	18	Judo	1 Klub
5	Wushu	1 Klub	19	Senam	4 Klub
6	Pencak Silat	11 Klub	20	Balap sepeda	1 Klub
7	Catur	1 Klub	21	Tinju	1 Klub
8	Tenis Meja	1 Klub	22	Menembak	1 Klub
9	Panahan	1 Klub	23	Karate	2 Klub
10	Basket	2 Klub	24	Sepatu Roda	5 Klub
11	Bola Volly	2 Klub	25	Drumband	42 Klub
12	Sepak Bola	23 Klub	26	Bilyard	5 Klub
13	Sepak Takraw	10 Klub	27	Sepak Bola Futsal	12 Klub
14	Gulat	1 Klub	28	KONI	1 Klub

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

7. Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional

Sejak Januari 2019, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga telah memberangkatkan para atlet berprestasi untuk mengikuti berbagai pertandingan di tingkat provinsi maupun nasional diantaranya cabang olahraga bola basket, pencak silat, Taekwondo dan masih banyak lagi cabang olahraga lainnya. Adapun Prestasi olahraga untuk Tahun 2019 di tingkat Nasional sebanyak 7 (tujuh) kejuaraan yaitu :

1. Kejuaraan diluar PORPROV JATIM 2019:
 - a. 2 medali emas cabang olahraga atletik;
 - b. 2 medali emas cabang olahraga sepak takraw;
 - c. 1 medali emas cabang olahraga pencak silat;
 - d. 1 medali perunggu cabang olahraga pencak silat;
 - e. 1 medali perunggu cabang olahraga catur.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah prestasi di bidang pemuda dan olah raga tingkat nasional menjadi 3 prestasi hal tersebut dikarenakan terbatasnya penyelenggaraan kegiatan keolahragaan ditengah pandemi.

8. Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional

Prestasi olahraga untuk Tahun 2019 di tingkat Nasional dan regional sebanyak 50 (lima puluh). Pada Tahun 2020 jumlah prestasi mengalami peningkatan menjadi sebanyak 79.

9. Rasio Kondisi Sarpras Olahraga yang layak

Rasio Kondisi Sarpras Olahraga yang layak Kota Madiun tahun 2018-2020 telah mencapai 100%.

i. Pelayanan Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun menetapkan tujuan dalam rencana strategis yaitu “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian”, dan menetapkan sasaran strategis ”meningkatkan kesetersediaan pangan dan stabilnya produksi hasil pertanian dan perikanan”.

Dengan demikian, penyelenggaran urusan pemerintahan bidang pangan di Kota Madiun berorientasi untuk “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan” dengan sasaran

“meningkatnya ketersediaan pangan”. Indikator utama dalam mencapai tujuan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut diukur dengan indikator neraca bahan makanan. Sedangkan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dihitung menggunakan indikator rasio ketersediaan bahan pangan utama (beras). Sedangkan indikator pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan dinilai dengan persentase ketersediaan energi dan protein.

Adapun perkembangan indikator kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.36
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2018-2020

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN		
		TAHU N 2018	TAHU N 2019	TAHUN 2020
II	ASPEK PELAYANAN UMUM			
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
9	Pangan			
9.1	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada
9.2	ketersediaan pangan utama	183,38	154,44	138,56
9.3	Ketersediaan Energi dan Protein	138,61	138,63	138,63

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Regulasi ketahanan pangan

Adapun regulasi bidang ketahanan pangan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 501-401.113/67/2017 Tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Madiun.
- b. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 520-401.113/110/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 520-401.204/23/2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun;

- c. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 188-401.113/129/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Madiun;
- d. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 188-401.113/126/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Tim Pembina Kegiatan Rumah Pangan Lestari Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 188-401.2014/27/2015 tentang Pembentukan Tim Bina Kegiatan Rumah Pangan Lestari;
- e. Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun No. 188-401.113/01/2017 Tanggal 24 November 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun Nomor 060-401.204/001/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun.

2. Ketersediaan pangan utama

Berdasarkan perhitungan diperoleh rasio ketersediaan pangan utama yaitu 154,44 Kg/kapita/tahun yang diperoleh dari pembagian jumlah ketersediaan beras sebesar 20.061 Ton dengan jumlah penduduk 2019 yaitu 210.147 jiwa. Adapun penurunan ketersediaan ketersediaan pangan utama dari tahun 2018-2019 sekitar 28,94%, Namun ketersediaan pangan utama Tahun 2019 masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu 46,5 kg/kapita/th. Ketersediaan pangan utama Tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 15,88%, penurunan tersebut lebih kecil dibandingkan penurunan tahun 2018 hingga tahun 2019.

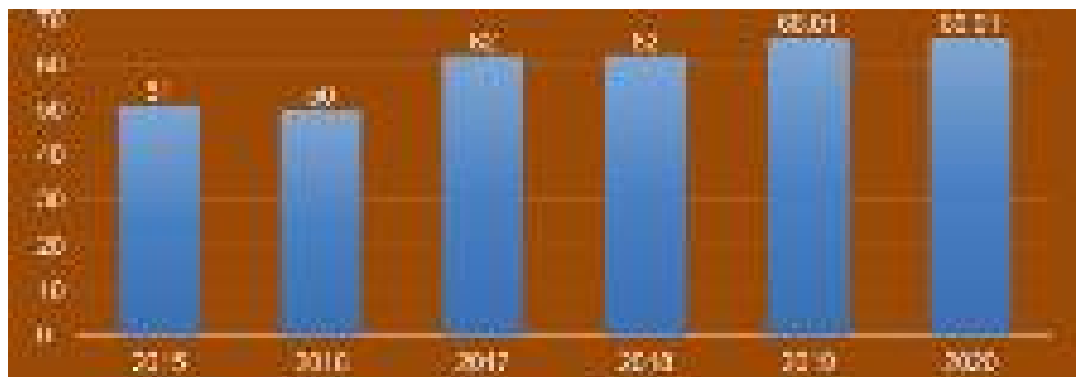
3. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein

Jumlah ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2019 adalah 3.106 Kkal, sedangkan protein 93,14 gram. Standar kecukupan energi dan protein yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan Nasional Pangan dan Gizi dimana acuan yang digunakan saat ini adalah WNPG X tahun 2012., yaitu AKE (angka kecukupan energi) di tingkat ketersediaan sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan AKP (angka kecukupan protein) di tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/ kapita/hari. Jika dibandingkan dengan standar tersebut

maka ketersediaan energi per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (138,63%). Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (147,84%). Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari untuk tahun 2019 mengalami kenaikan 0,01% dari ketersediaan energi dan protein tahun 2018.

j. Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang di amanatkan dalam undang-undang, cakupan petugas satuan polisi pamong praja dan pelindung masyarakat sangat berpengaruh dalam terciptanya suasana tertib dan tentram dalam masyarakat, saat ini pemerintah kota madiun akan mamperkecil rasio petugas dan jumlah penduduk dengan mengagendakan perekrutan petugas Satpol PP per kelurahan. Untuk mengetahui besar cakupan petugas tahun 2020 Satpol PP dan Linmas dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada gambar 2.19 dan 2.20 di bawah ini.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2020

Gambar 2.19

Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2015-2020

Berdasarkan grafik diatas rasio linmas per 10.000 penduduk Kota Madiun pada tahun 2015 hingga 2016 sedikit mengalami penurunan. Setelah tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi hingga nilai rasio sebesar 66,01 pada tahun 2019 dan 2020.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2020

Gambar 2.20
Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk di Kota Madiun
Tahun 2015-2020

Selain petugas linmas, petugas Polisi Pamong Praja juga memiliki peran dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Data menunjukkan rasio petugas Satpol PP per 10.000 penduduk selama tahun 2015 samapk dengan tahu 2020 mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 hingga 2020 yakni meningkat dari 4,6 menjadi 5,3.

k. Pelayanan Perizinan

Tahun 2019 lama pengurusan perizinan sudah sangat efektif dan tidak berbelit-belit, rata-rata lama mengurus perizinan di Kota Madiun membutuhkan peoses selama lima hari dan jumlah persyaratan yang harus dilengkapi jumlahnya berbeda-beda sesuai izin yang akan diurus. Hal ini dapat dilihat sesuai tabel dibawah terkecuali untuk perizinan yang melibatkan beberapa rekomendasi dari berbagai instansi dikarenakan harus ada survei lapangan.

Tabel 2.37
Lama Proses Perizinan di Kota Madiun, 2020

No.	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
1	Izin Reklame Permanen	5 (lima)	6 (enam)	Tidak Ada
2	Izin Reklame Insidentil	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
3	Izin Operasional Puskesmas	5 (lima)	9 (sembilan)	Tidak Ada
4	Izin Penyelenggaraan Optikal (SIPO)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
5	Izin Apotik	Perizinan diproses melalui sistem nasional (oss.go.id)		
6	Izin Operasional Klinik			
7	Izin Operasional Lab Klinik			
8	Izin Unit Transfusi Darah/ Bank Darah	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
9	Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
10	Izin Praktik Perawat (SIPP)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
11	Izin Kerja Perawat (SIKP)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada

No.	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
12	Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
13	Izin Praktik Bidan (SIPB/SIKB)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
14	Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
15	Izin Kerja Refraksi Optisien (SIKRO)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
16	Izin Praktik Radiografer (SIPRad)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
17	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
18	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
19	Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
20	Izin Kerja Terapis Wicara	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
21	Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
22	Izin Kerja Okupasi Terapis	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
23	Izin Praktek Tenaga Sanitarian (SIPTS)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
24	Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
25	Izin Praktik Akupunturis	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
26	Izin Kerja Akupunturis	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
27	Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
28	Izin Kerja Teknisi Kardiovaskuler	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
29	Izin Kerja Optometris	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
30	Izin Kerja Teknisi Gigi	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
31	Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIK ATLM)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
32	Izin Praktik Elektromedis (SIP E)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
33	Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
34	Izin Praktik Ortotis Prostetis	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
35	Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
36	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
37	Izin Tukang Gigi	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
38	Izin Praktik Dokter Hewan	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
39	Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
40	Izin Klinik Hewan	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
41	Izin Rumah Sakit Hewan	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
42	Izin Rumah Sakit Hewan Khusus	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
43	Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner	5 (lima)	7 (tujuh)	Tidak Ada
44	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing	5 (lima)	7 (tujuh)	Tidak Ada
45	Izin Penempatan Pedagang Pasar	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
46	Izin Promosi Dalam Pasar	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
47	Izin Reklame Dalam Pasar	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
48	Izin Pengelolaan Parkir Dalam Pasar	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
49	Izin Pengelolaan Kamar Mandi/WC Dalam Pasar	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
50	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Perizinan diproses melalui sistem nasional (oss.go.id)		
51	Izin Operasional Rumah Sakit			
52	Izin Toko Obat			
53	Izin Toko Alat Kesehatan			
54	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
55	Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT			
56	Izin Lingkungan Amdal	5 (lima)	10 (sepuluh)	Tidak Ada
57	Izin Lingkungan UKL UPL	5 (lima)	10 (sepuluh)	Tidak Ada
58	Izin TPS Limbah B3	5 (lima)	7 (tujuh)	Tidak Ada
59	Izin Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah (Aset)	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada

No.	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
60	Izin Sewa Wales	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
61	Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk terop di jalan golongan A dan B	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
62	Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk keperluan jalan keluar masuk ke perusahaan dan industri	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
63	Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk penimbunan barang, bahan bangunan dan bekas bongkaran di jalan golongan A dan B	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
64	Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk usaha atau industri beserta halamannya di jalan golongan A, B dan C	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
65	Izin Pemakaian Lahan Sumber Umis	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
66	Izin Sewa Jasa Pemakaian GOR, Stadion Wilis dan Wisma Haji	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
67	Izin Sewa Kios Ex Bengkok Kelurahan Pilangbango	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada

Sumber: DPMPSTPKUM, 2020

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut.

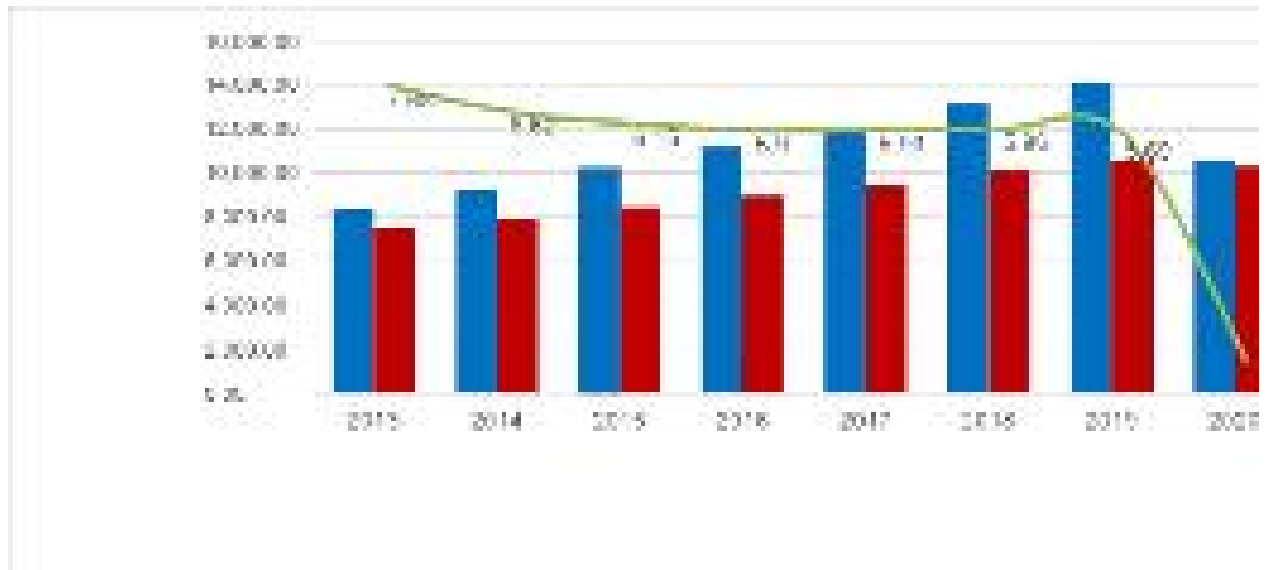
a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (baik ADHB maupun ADHK). Laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2.38
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun
Tahun 2015 s/d 2020 (%)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2015	6,15
2016	5,9
2017	5,93
2018	5,96
2019	5,69
2020	-3,39

Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2020



Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 2.21
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun
Tahun 2015 s/d 2020 (%)

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun selama periode 2015-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. Tren fluktuatif dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2015 hingga 2016 laju pertumbuhan mengalami penurunan, lalu perlahan meningkat hingga tahun 2018 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan akan mengalami penurunan yang signifikan disebabkan adanya pandemi covid-19 yang masih terus berlangsung diseluruh dunia sehingga berdampak pada perekonomian global, nasional, maupun regional. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama periode 2013-2020 adalah sebesar 4,31 % per tahun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Madiun selama periode tersebut terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 7,68%, sedang pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu terkontraksi sebesar 3,39%.

Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada Tahun 2015 s/d 2019 Kota Madiun adalah sebagai berikut.

Tabel 2.39
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2015 s/d 2020

Lapangan Usaha	Tahun								Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,72	0,98	1,58	1,31	(1,78)	1,78	(0,94)	11,57	0,46
Pertambangan dan Penggalian	3,69	1,69	1,98	1,91	2,31	1,07	2,41	-5,65	2,47
Industri Pengolahan	7,52	7,74	6,51	7,21	8,00	7,01	4,64	-12,84	7,31
Pengadaan Listrik dan Gas	10,42	7,29	3,73	3,86	4,91	5,45	6,69	1,98	5,73
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,68	2,15	2,58	3,82	6,84	4,44	4,52	4,86	4,48
Konstruksi	7,69	4,98	5,48	4,44	5,57	2,03	4,90	-4,71	5,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,89	5,46	4,48	5,11	5,83	7,54	6,20	-11,18	5,83
Transportasi dan Pergudangan	7,18	8,45	6,78	7,13	8,18	8,48	9,11	-4,38	7,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	7,77	7,28	7,28	7,30	7,47	9,23	8,86	-7,98	7,46
Informasi dan Komunikasi	9,45	8,13	8,13	6,64	6,77	5,34	4,58	16,12	7,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	11,81	7,81	7,52	7,11	3,88	4,08	4,79	-0,66	7,53
Real Estate	7,28	6,76	6,76	5,64	4,22	3,57	5,96	0,33	5,98
Jasa Perusahaan	7,48	8,41	8,41	5,94	6,34	5,31	6,10	-3,18	7,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,00	0,78	3,88	3,05	2,46	4,48	3,85	-2,23	2,60
Jasa Pendidikan	6,08	7,71	6,30	5,14	4,50	4,21	7,65	1,97	5,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,50	7,87	9,35	5,85	5,93	7,38	7,52	9,98	6,91
Jasa Lainnya	4,25	5,19	4,28	4,17	4,14	5,74	6,92	-10,68	4,21
PDRB	7,68	6,62	6,15	5,90	5,93	5,96	5,69	-3,39	6,42

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

**) angka sangat sementara

Pada tahun 2020 ketika terjadi pandemic Covid-19, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sector pertanian yaitu sebesar 11,57. Pertumbuhan positif tersebut diikuti oleh sector lain seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa Pendidikan, real estate, informasi dan komunikasi, pengadaan air, dan pengadaan listrik gas. Sedangkan sector lain mengalami pertumbuhan negatif. Jika di bandingkan dengan tahun 2019, pertumbuhan tertinggi ditempati oleh sector penyediaan akomodasi dan makan minum (9,11%), disusul sector transportasi dan pergudangan (8,86%), dan sector perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor

(7,65%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor sekunder di Kota Madiun memiliki kinerja yang lebih baik. Pertumbuhan yang tinggi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum ditopang oleh status Kota Madiun sebagai kota transit maupun pusat bisnis yang mendorong berdirinya jasa hotel dan rumah makan. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah yakni sektor pertambangan dan penggalian (2,41%) dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (-0,94%). Jika dilihat pada tahun 2019, pertumbuhan tertinggi ditempati oleh sektor transportasi dan perdagangan (9,11%), disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (8,86%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor sekunder di Kota Madiun memiliki kinerja yang baik. Pertumbuhan yang tinggi pada sektor transportasi dan pergudangan ditopang oleh status kota madiun sebagai kota transit maupun pusat bisnis. Selama periode 2015-2019 sektor dengan pertumbuhan terendah yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan pertambangan dan penggalian.

PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2015 s/d 2020 Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.40
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s/d 2020
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	98,02	102,29	100,96	105,68	106,81	120,59
2	Pertambangan dan Penggalian	2,48	2,62	2,73	2,91	3,05	2,95
3	Industri Pengolahan	1.637,08	1.807,90	1.983,44	2.143,80	2.290,02	2.030,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,78	8,39	9,52	10,35	11,22	11,48
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	22,65	24,46	26,74	28,51	29,04	30,40
6	Konstruksi	664,08	718,12	767,94	805,27	834,71	798,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.529,95	2.791,97	3.031,46	3.371,83	3.658,65	3.311,32
8	Transportasi dan Pergudangan	321,17	360,09	407,73	449,97	498,89	477,53
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	464,84	523,63	574,36	636,99	705,63	661,55
10	Informasi dan Komunikasi	1.393,96	1.524,59	1.660,03	1.752,67	1.851,67	2.172,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.056,63	1.177,74	1.259,76	1.355,51	1.432,48	1.423,02
12	Real Estate	274,01	297,82	318,81	344,40	374,20	381,91
13	Jasa Perusahaan	69,26	75,73	82,45	90,30	98,17	97,71

No	Uraian	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	329,41	350,21	366,76	401,37	438,16	452,66
15	Jasa Pendidikan	803,00	862,99	923,49	978,13	1.067,46	1.109,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	131,10	141,94	155,98	172,62	189,69	212,57
17	Jasa Lainnya	386,66	413,64	439,72	479,56	518,48	474,94
PDRB		10.192,08	11.184,10	12.111,90	13.129,87	14.108,33	13.769,29

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020 **) angka sementara

Sektor terbesar pada tahun 2020 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor yaitu sebesar 3.311,32 milyar. Sektor terbesar kedua adalah informasi dan komunikasi sebesar 2.172,16 milyar. Jika dilihat pada tahun 2019, PDRB ADHB tertinggi ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor (3.658,65), diikuti sektor industri pengolahan (2.290,02). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan kota industri yang mendorong munculnya bisnis baru yang dapat meningkatkan PDRB sektor lain.

PDRB atas dasar harga konstan pada Tahun 2015 s/d 2019 Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.41
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 s/d 2020
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	75,38	76,37	75,01	76,35	75,63	84,38
2	Pertambangan dan Penggalan	2,04	2,08	2,13	2,15	2,20	2,08
3	Industri Pengolahan	1.448,90	1.553,36	1.677,59	1.795,20	1.878,54	1.637,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,02	7,30	7,65	8,07	8,61	8,78
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	18,38	19,08	20,39	21,29	22,26	23,34
6	Konstruksi	548,47	572,82	604,75	616,99	647,20	616,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	1.979,78	2.080,95	2.202,18	2.368,25	2.515,13	2.233,21
8	Transportasi dan Pergudangan	242,76	260,07	281,35	305,21	330,00	318,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	407,81	437,59	470,29	513,72	559,24	514,60
10	Informasi dan Komunikasi	1.332,55	1.421,03	1.517,25	1.598,22	1.671,41	1.940,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	780,75	836,28	868,72	904,19	947,54	941,30
12	Real Estate	217,68	229,96	239,67	248,22	263,02	263,89

No	Uraian	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	Jasa Perusahaan	61,46	65,10	69,23	72,91	77,36	74,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	281,38	289,96	297,09	310,42	322,38	315,18
15	Jasa Pendidikan	623,55	655,60	685,13	714,00	768,65	783,82
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,79	114,10	120,87	129,79	139,55	153,48
17	Jasa Lainnya	319,71	333,04	346,82	366,73	392,10	350,22
PDRB		8.455,44	8.954,69	9.486,12	10.051,71	10.623,82	10.262,44

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

PDRB berdasarkan harga konstan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sector yg tertinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor sebesar 2.233,21 milyar diikuti oleh sector informasi dan komunikasi sebesar 1.940,86 milyar. Jika dilihat pada tahun 2015 hingga 2019, PDRB ADHK tertinggi ditempati oleh sektor perdaganga besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor, kemudian disusul oleh sektor industri pengolahan. Kondisi tersebut tidak jauh beda dengan PDRB ADHB, sektor dengan PDRB ADHK terendah yaitu sektor pertambangan da penggalian.

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 2.42
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2014 s/d 2020 (%)

Lapangan Usaha	Tahun							Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,00	0,96	0,91	0,83	0,80	0,76	0,88	0,88
Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Industri Pengolahan	16,18	16,06	16,16	16,40	16,25	16,23	14,74	16,00
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22
Konstruksi	6,65	6,52	6,38	6,33	6,10	5,92	5,80	6,24
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	24,92	24,82	24,96	25,14	25,71	25,93	24,05	25,08

Lapangan Usaha	Tahun							Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
dan Sepeda Motor								
Transportasi dan Pergudangan	3,05	3,15	3,22	3,36	3,42	3,54	3,47	3,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,51	4,56	4,68	4,73	4,91	4,98	4,80	4,74
Informasi dan Komunikasi	13,73	13,68	13,63	13,67	13,44	13,12	15,78	13,86
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,23	10,37	10,53	10,38	10,28	10,32	10,33	10,35
Real Estate	2,57	2,69	2,67	2,63	2,61	2,62	2,77	2,65
Jasa Perusahaan	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,69	0,71	0,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,32	3,23	3,13	3,02	3,04	3,06	3,29	3,16
Jasa Pendidikan	7,87	7,88	7,72	7,61	7,49	7,45	8,06	7,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,29	1,27	1,28	1,31	1,31	1,54	1,32
Jasa Lainnya	3,73	3,79	3,70	3,62	3,64	3,65	3,45	3,65
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

Melihat pada table II. 42, sektor yang paling dominan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 25,08% per tahun. Dengan tren yang terus meningkat dalam kurun waktu 2014-2020, kontribusi sektor tersebut di masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat dan semakin menguatkan posisi Kota Madiun sebagai kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 16,00% per tahun dimana kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai 16,40%. Jenis industri dengan kontribusi terbesar di sektor ini selama periode 2014-2020 berasal dari industri alat angkutan, industri makanan dan minuman, serta barang dari karet dan plastik. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan di Kota Madiun memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mengingat kontribusinya yang tinggi terhadap perekonomian.

Selanjutnya, PDRB perkapita menurut lapangan usaha sebagai berikut :

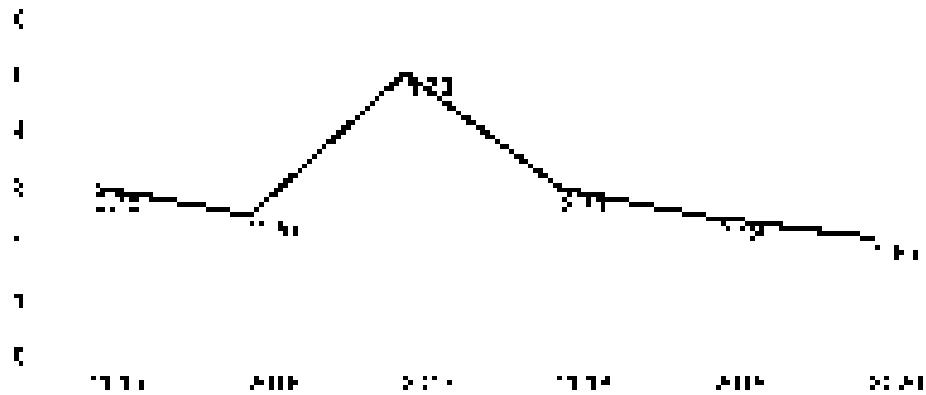
Tabel 2.43
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.) Tahun 2015 s/d 2019

No	Uraian	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,56	0,58	0,57	0,60	0,60	
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	
3	Industri Pengolahan	9,35	10,29	11,31	12,11	12,94	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	
6	Konstruksi	3,79	4,09	4,36	4,55	4,72	
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	14,46	18,90	17,33	19,05	20,67	
8	Transportasi dan Pergudangan	1,84	2,05	2,32	2,54	2,82	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,66	2,98	3,26	3,60	3,99	
10	Informasi dan Komunikasi	7,97	8,68	9,43	9,90	10,46	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,04	6,71	7,15	7,66	8,09	
12	Real Estate	1,57	1,70	1,81	1,95	2,11	
13	Jasa Perusahaan	0,40	0,43	0,47	0,51	0,55	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,88	1,99	2,08	2,27	2,48	
15	Jasa Pendidikan	4,59	4,91	5,24	5,53	6,03	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,81	0,89	0,98	1,07	
17	Jasa Lainnya	2,21	2,36	2,50	2,71	2,93	
PDRB Per Kapita		58,24	63,69	68,89	74,54	79,70	

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2019

Di Kota Madiun PDRB menurut lapangan usaha selama tahun 2015-2019 yang dominan diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran yang menduduki tingkat pertama sebesar 20,67 poin. Peringkat kedua diduduki oleh sektor industri pengolahan sebesar 12,94 poin dan posisi ketiga disusul sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,46 poin. Selengkapnya PDRB per Kapita menurut Lapangan Usaha seperti terlihat pada tabel diatas.

Di Kota Madiun tingkat inflasi cenderung stabil. Lebih detail, inflasi di Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 2.22
Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2020 (%)

Berdasarkan gambar II.21 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 tingkat inflasi Kota Madiun sebesar 2,75%, kemudian terjadi penurunan sebesar 0,50% pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup tinggi menjadi 4,78%. Penyebab utama dari kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan komoditas lainnya. Pada tahun 2018 kembali turun menjadi 2,71% dan diperkirakan akan turun menjadi 2,19% di tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 1,85%.

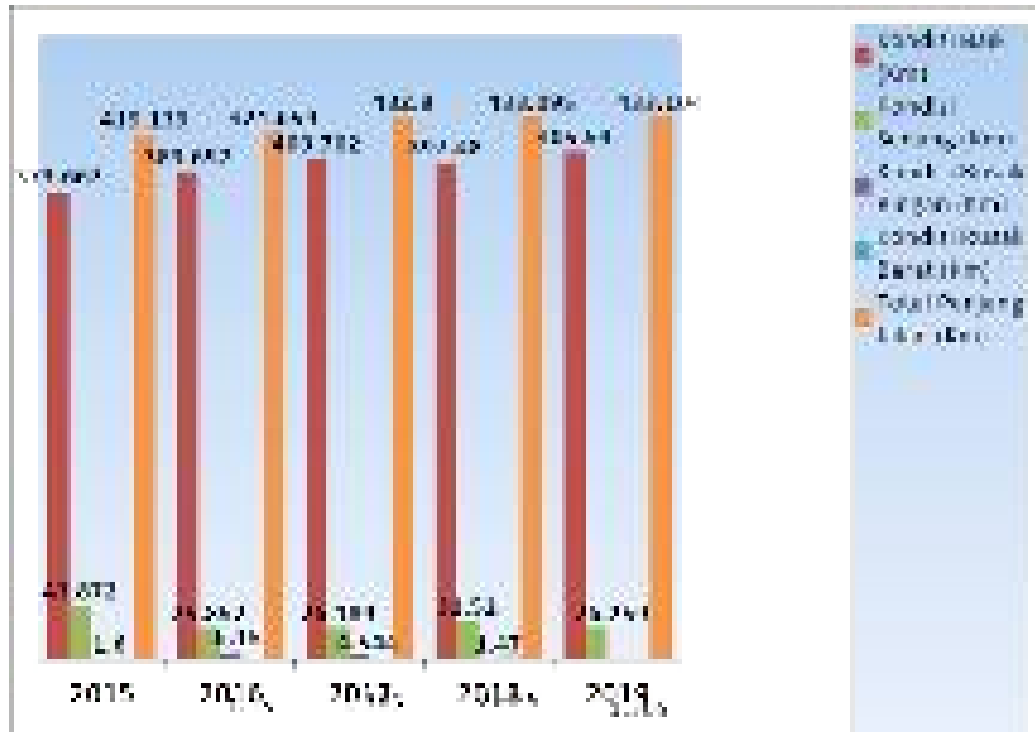
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan dan kondisi jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun yang dalam hal ini jalan yang menjadi kewenangan Kota Madiun.

Tabel 2.44
Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2015-2019

Tahun	Kondisi Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total Jalan
2015	373,667	43,872	1,6	0	419,139
2016	389,657	25,852	6,15	1,15	421,659
2017	400,702	26,189	4,544	1,365	432,8
2018	397,48	31,52	1,47	2,625	433,095
2019	405,54	26,25	0	1,305	433,104

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2020



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 2.23
Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2015-2019

Kondisi jalan terbagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Selama tahun 2015 hingga tahun 2019 kondisi jalan berkategori baik di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2015 adalah sepanjang 373,66 km dan setiap tahunnya meningkat menjadi sepanjang 405,54 km pada tahun 2019. Di satu sisi panjang jalan yang baik bertambah, namun pada tahun 2018 masih terdapat jalan yang rusak yaitu sepanjang 1,47 km.

Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistem pemeliharaan rutin, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan, secara umum kondisi jalan di Kota Madiun telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang memadai.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal

yang mendukung potensi perdagangan dan perindustrian dalam rangka menunjang sasaran meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal (investasi) di Kota Madiun saat ini masih berada dalam Dinas Penanaman Modal, PTSP dan KUMKM. Perkembangan jumlah realisasi investasi di Kota Madiun mulai 2015 – 2020 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan KUMKM, Tahun 2020

Gambar 2.24
Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2015 – 2020

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Tahun 2020

Gambar 2.25
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2015 – 2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2.45
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2020

Indeks	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
IPM	79,48	80,01	80,13	80,33	80,88	80,91
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Umur Harapan Hidup	72,41	72,44	72,48	72,59	72,75	72,81
Indeks Pengetahuan	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77
Harapan Lama Sekolah	14,06	14,19	14,20	14,21	14,39	14,40
Rata-rata Lama Sekolah	11,08	11,09	11,10	11,11	11,13	11,14
Indeks Pengeluaran	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	14.723	15,30 0	15.41 5	15.61 6	16.04 0	16.01 8

Sumber: BPS KotaMadiun, Tahun 2020

IPM Kota Madiun pada Tahun 2020 mencapai 80,91, mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,03 poin dibanding Tahun 2019 yang mencapai 80,88. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berfungsi untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaiannya dengan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah di Kota Madiun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Untuk mengetahui ketercapaian target yang direncanakan oleh pemerintah dengan realisasi yang terjadi, dapat ditinjau dari urusan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam urusan wajib ataupun urusan pilihan. Tabel 2.46 menampilkan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah Kota Madiun sebagai berikut:

1	1 0 2	1020 1	2 0	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase penurunan kasus Kejadian Luar Biasa	%	5	8.131.5 92	0	0	5	4.402.8 58	35	972.89 1	- 194 0	2.131. 926	- 194 0	3.104. 817	- 388 00%	71%	- 194 0	3.104.8 17	- 388 00%	38%	Dinas Kesehata n dan Keluarga Berencana
			1	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	%	100	4.415.7 00	0	-	60	504.083	0	148.93 1	80	297.55 3	80	446.48 5	133 %	88,5 7%	80	446.485	80%	10,1 1%	Dinas Kesehata n dan Keluarga Berencana
			2	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular	Prosentase penemuan masyarakat beresiko PTM dan Keswa dari hasil deteksi dini	%	100	3.123.5 36	0	-	50	447.475	0	293.99 5	50	74.943	50	368.93 8	100 %	82,4 5%	50	368.938	50%	11,8 1%	Dinas Kesehata n dan Keluarga Berencana
			3	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi	Prosentase capaian indikator surveillance dan imunisasi mencapai target	%	100	592.356	0	-	100	3.451.3 00	11,1 1	529.96 5	66	1.759. 429	77,1 1	2.289. 394	77%	66,3 3%	77,1 1	2.289.3 94	77%	386, 49%	Dinas Kesehata n dan Keluarga Berencana
1	1 0 2	1020 1	2 1	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	48,2 7	144.01 5.683	0	-	48,2 7	24.156. 569	55, 17	6.757. 437	75	14.551 .621	75	21.309 .057	155 %	88%	75	21.309. 057	155 %	15%	Dinas Kesehata n dan Keluarga Berencana
			1	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase Obat kadaluarsa < 1%	%	1	810.290	0	-	1	126.389	0	29.650	1	92.257	1	121.90 8	100 %	96,4 5%	1	121.908	100 %	15,0 4%	Dinas Kesehata n dan Keluarga Berencana
			2	Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan (DAK)	Persentase kegiatan penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas pelayanan kesehatan terlaksana	%	100	11.571. 009	0	-	100	3.171.0 09	0	-	100	3.001. 377	100	3.001. 377	100 %	94,6 5%	100	3.001.3 77	100 %	25,9 4%	Dinas Kesehata n dan Keluarga Berencana
			3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Sumber Daya Kesehatan	Prosentase sumber daya kesehatan yang sesuai standar	%	98	2.882.4 82	0	-	90	146.353	11,2	104.22 4	78	30.279	89,2	134.50 3	99%	91,9 0%	89,2	134.503	91%	4,67 %	Dinas Kesehata n dan Keluarga Berencana
			5	Kegiatan Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dasar dan Rujukan	Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	%	100	3.905.8 60	0	-	100	463.185	0	70.554	75	292.65 2	75	363.20 7	75%	78,4 2%	75	363.207	75%	9,30 %	Dinas Kesehata n dan Keluarga Berencana
			6	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Manguharjo (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	%	86	11.134. 159	0	-	84	2.129.4 64	0	824.88 2	68	1.241. 408	68	2.066. 290	81%	97,0 3%	68	2.066.2 90	79%	18,5 6%	Dinas Kesehata n dan Keluarga Berencana

				7	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Patihan (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	%	90	5.971.856	0	-	90	1.291.463	0	522.660	95	683.806	95	1.206.466	106%	93,42%	95	1.206.466	106%	20,20%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				8	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Oro-Oro Ombo (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	%	83	10.594.173	0	-	81	1.867.500	0	721.160	89	1.076.090	89	1.797.250	110%	96,24%	89	1.797.250	107%	16,96%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				9	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Tawangrejo (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	%	89	8.211.104	0	-	89	1.665.405	68,5	710.833	83,39	720.129	83,39	1.430.962	94%	85,92%	83,39	1.430.962	94%	17,43%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				10	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Banjarejo (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	%	95	16.050.109	0	-	94	2.131.744	48	919.482	89	1.032.618	89	1.952.100	95%	91,57%	89	1.952.100	94%	12,16%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				11	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Puskesmas Demangan (BLUD)	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas UKP dan Manajemen	%	83	11.154.545	0	-	81	1.981.738	75,51	849.903	91,31	869.671	91	1.719.574	112%	86,77%	91	1.719.574	110%	15,42%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				12	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Patihan	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	%	95	8.116.537	0	-	93	1.009.680	49,2	221.909	88	669.603	137,2	891.512	148%	88,30%	137,2	891.512	144%	10,98%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				13	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Oro-Oro Ombo	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	%	94	6.767.120	0	-	94	938.112	80	197.958	92	583.913	92	781.870	98%	83,35%	92	781.870	98%	11,55%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				14	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tawangrejo	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	%	93	7.927.623	0	-	91	1.130.976	72	233.758	85	711.075	85	944.833	93%	83,54%	85	944.833	91%	11,92%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				15	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Banjarejo	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	%	91	8.063.083	0	-	91	1.120.224	59	221.487	88,49	669.949	88,49	891.436	97%	79,58%	88,49	891.436	97%	11,06%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				16	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Demangan	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	%	95	8.630.370	0	-	93	881.160	58,49	175.691	83	498.360	83	674.051	89%	76,50%	83	674.051	87%	7,81%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				17	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Manguharjo	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	%	94	7.031.180	0	-	93	942.984	52,44	208.237	70	580.187	70	788.424	75%	83,61%	70	788.424	74%	11,21%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

			18	Kegiatan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (Bk Prov)	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	dokter	1	150.000	0	-	1	30.000	0	25.000	1	17.500	1	42.500	100%	141,67%	1	42.500	100%	28,33%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			20	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Manguharjo (DAK)	Prosentase SPM mencapai target	%	100	2.238.002	0	-	100	463.002	8,33	66.828	50	240.941	58,33	307.768	58%	66,47%	58,33	307.768	58%	13,75%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			21	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Patihan (DAK)	Prosentase SPM Puskesmas mencapai target	%	100	2.239.810	0	-	100	459.810	0	103.780	42	198.578	42	302.357	42%	65,76%	42	302.357	42%	13,50%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			22	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Demangan (DAK)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	%	100	2.345.000	0	-	100	535.000	50	79.965	50	362.719	50	442.684	50%	82,74%	50	442.684	50%	18,88%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			23	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Banjarejo (DAK)	Prosentase SPM Puskesmas mencapai target	%	100	2.690.632	0	-	100	580.632	33	205.492	83	304.239	83,3	509.730	83%	87,79%	83,3	509.730	83%	18,94%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			24	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Oro-oro Ombo (DAK)	Prosentase SPM Puskesmas mencapai target	%	100	2.596.964	0	-	100	496.964	17	90.081	91,67	395.619	91,67	485.700	92%	97,73%	91,67	485.700	92%	18,70%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			25	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tawangrejo (DAK)	Prosentase SPM puskesmas mencapai target	%	100	2.904.295	0	-	100	564.295	67	153.739	83	270.881	83	424.620	83%	75,25%	83	424.620	83%	14,62%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			26	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Prosentase Obat kadaluarsa < 1%	%	1	29.480	0	-	1	29.480	0	20.165	1,24	7.770	1,24	27.935	124%	94,76%	1,24	27.935	124%	94,76%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
208	10201	15		Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase peserta KB aktif MKJP	%	42,74	15.513.814	0	-	42,74	2.496.224	44,5	597.556	42,74	1.258.906	43	1.856.462	100%	74%	43	1.856.462	100%	12%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			1	Kegiatan Pembinaan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	Prosentase keluarga yang menjadi anggota tribina	%	67	3.100.633	0	-	67	282.967	0	148.657	59	124.011	59	272.668	88%	96,36%	59	272.668	88%	8,79%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2	Kegiatan Advokasi, Penggerakkan dan Informasi KB	Prosentase cakupan penyediaan informasi dan data mikro	%	100	1.286.136	0	-	100	149.565	0	61.891	100	72.899	100	134.790	100%	90,12%	100	134.790	100%	10,48%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

				3	Kegiatan Pengendalian Penduduk	Prosentase usia kawin pertama perempuan	%	3	6.471.955	0	-	3	382.439	0	240.455	3,5	126.335	3,5	366.790	117%	95,91%	3,5	366.790	117%	5,67%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				4	Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Kampung KB Aktif	Kampung	7	3.914.740	0	-	7	940.904	0	146.554	7	704.911	7	851.465	100%	90,49%	7	851.465	100%	21,75%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
				5	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah paket sarana prasarana penyuluhan yang diadakan	paket	4	740.350	0	-	2	740.350	0	-	2	230.750	2	230.750	100%	31,17%	2	230.750	50%	31,17%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	1				Pendidikan.																					
1	1	1010	1	15	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	%	100	3.019.759	0	0	100	271.710	0	54.098	100	185.710	100	239.807	100%	88%	100	239.807	100%	8%	Dinas Pendidikan
				1	Kegiatan Operasional BOS Tingkat Kota	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	lembaga	460	464.154	0	-	92	38.188	0	25.900	92	9.399	92	35.299	100%	92%	92	35.299	20%	8%	Dinas Pendidikan
				2	Kegiatan Pembinaan Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan	jumlah komite yang memahami pendidikan meningkat	orang	920	551.182	0	-	184	-	0	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
				3	Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Informasi Pendidikan Berbasis IT	jumlah lembaga yang sesuai dengan SPM	lembaga	710	1.105.126	0	-	142	109.488	0	28.198	142	66.578	142	94.776	100%	87%	142	94.776	20%	9%	Dinas Pendidikan
				4	Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov	jumlah lembaga yang mendapat BOS	lembaga	245	580.192	0	-	49	99.575	0	-	49	91.690	49	91.690	100%	92%	49	91.690	20%	16%	Dinas Pendidikan
				5	Kegiatan BOP Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM)	jumlah mahasiswa berprestasi yang menerima bantuan	orang	1500	319.105	0	-	300	24.460	0	-	234	18.042	234	18.042	78%	74%	234	18.042	16%	6%	Dinas Pendidikan
1	1	1010	1	16	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Lulus Pelatihan	%	100	9.640.804	0	0	100	700.064	0	196.950	100	341.801	100	538.751	100%	77%	100	538.750,985	100%	6%	
				1	Kegiatan Sertifikasi Guru	jumlah guru yang bersertifikasi	Orang	625	1.238.041	0	-	125	80.047	0	26.049	125	41.524	125	67.573	100%	84%	125	67.573	20%	5,46%	Dinas Pendidikan
				2	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	jumlah guru yang mengikuti penilaian angka kredit	Orang	2500	797.763	0	-	500	114.715	0	14.500	370	85.961	370	100.461	74%	88%	370	100.461	15%	12,59%	Dinas Pendidikan

				3	Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi, OGN, Inobel, Literasi, Media Pembelajaran Berbasis IT serta Lomba Guru	jumlah guru/kasek berkinerja baik	Orang	2500	2.500.000	0	0	500	148.097	0	92.698	394	22.530	394	115.229	79%	78%	394	115.229	16%	4,61%	Dinas Pendidikan	
				5	Kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan S1/S2/S3	jumlah guru yang berkualifikasi S1	Orang	90	1.080.000	0	-	10	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				6	Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Guru Kelas dan Mapel Online serta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	jumlah guru yang memahami materi	Orang	2500	2.000.000	0	0	500	127.501	0	38.813	421	72.278	421	111.090	84%	87%	421	111.090	17%	5,55%	Dinas Pendidikan	
				7	Kegiatan Peningkatan SDM Tenaga Kependidikan (TU)	jumlah TU yang taat aturan	Orang	400	400.000	0	-	80	201.752	0	24.890	80	95.460	80	120.350	100%	60%	80	120.350	20%	30,09%	Dinas Pendidikan	
				8	Kegiatan Outdoor Learning Guru	jumlah guru yang mengikuti outdoor learning	Orang	2000	1.625.000	0	-	400	27.952	0	-	0	24.048	0	24.048	0%	86%	0	24.048	0%	1,48%	Dinas Pendidikan	
1	1	10	1	1	7	Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	%	100	628.872.208	0	0	100	109.912.735	60	16.428.609	135	67.998.920	135	84.427.529	135%	77%	135	84.427.529	135%	13%	
				1	Kegiatan Penyelenggaraan SMP Terbuka	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	434.071	0	-	1	-	0	-	-	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan	
				2	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 1	jumlah lembaga yang operasional dengan baik	Lembaga	5	1.807.273	0	-	1	1.002.643	0	300.902	1	673175,978	1	974.078	100%	97%	1	974.078	20%	53,90%	Dinas Pendidikan	
				3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 2	jumlah lembaga yang operasional dengan baik	Lembaga	5	1.555.369	0	-	1	873.107	0	230.652	1	515439,818	1	746.092	100%	85%	1	746.092	20%	47,97%	Dinas Pendidikan	
				4	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 3	jumlah lembaga yang operasional dengan baik	Lembaga	5	1.071.885	0	-	1	657.699	0	169.632	1	418769,624	1	588.402	100%	89%	1	588.402	20%	54,89%	Dinas Pendidikan	
				5	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 4	jumlah lembaga yang operasional dengan baik	Lembaga	5	1.391.293	0	-	1	815.349	0	291.798	1	265806,602	1	557.605	100%	68%	1	557.605	20%	40,08%	Dinas Pendidikan	
				6	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 5	jumlah lembaga yang operasional dengan baik	Lembaga	5	836.852	0	-	1	406.610	0	180.702	1	186801,721	1	367.503	100%	90%	1	367.503	20%	43,91%	Dinas Pendidikan	
				7	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 6	jumlah lembaga yang operasional dengan baik	Lembaga	5	1.264.776	0	-	1	770.962	0	330.937	1	356021,626	1	686.959	100%	89%	1	686.959	20%	54,31%	Dinas Pendidikan	
				8	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 7	jumlah lembaga yang operasional dengan baik	Lembaga	5	1.458.032	0	-	1	778.248	0	260.649	1	433612,798	1	694.261	100%	89%	1	694.261	20%	47,62%	Dinas Pendidikan	

			9	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 8	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.204.131	0	-	1	588.674	0	208.882	1	322690,27	1	531.572	100%	90%	1	531.572	20%	44,15%	Dinas Pendidikan
			10	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 9	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	5.237.723	0	-	1	881.811	0	333.296	1	508758,096	1	842.054	100%	95%	1	842.054	20%	16,08%	Dinas Pendidikan
			11	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 10	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	13.092.700	0	-	1	900.803	0	384.718	1	490346,503	1	875.064	100%	97%	1	875.064	20%	6,68%	Dinas Pendidikan
			12	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 11	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	990.536	0	-	1	532.862	0	163.376	1	326886,204	1	490.262	100%	92%	1	490.262	20%	49,49%	Dinas Pendidikan
			13	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 12	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.376.177	0	-	1	716.467	0	210.372	1	428588,223	1	638.960	100%	89%	1	638.960	20%	46,43%	Dinas Pendidikan
			14	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 13	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.286.469	0	-	1	656.246	0	281.861	1	292742,066	1	574.603	100%	88%	1	574.603	20%	44,67%	Dinas Pendidikan
			15	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 14	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	4.368.905	0	-	1	499.852	0	86.183	1	227314,543	1	313.498	100%	63%	1	313.498	20%	7,18%	Dinas Pendidikan
			16	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.684.142	0	-	1	371.656	0	164.051	1	133160,007	1	297.211	100%	80%	1	297.211	20%	11,07%	Dinas Pendidikan
			17	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kartoharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	977.993	0	-	1	158.387	0	104.369	1	47512,131	1	151.881	100%	96%	1	151.881	20%	15,53%	Dinas Pendidikan
			18	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kartoharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	869.677	0	-	1	144.286	0	63.907	1	73608,929	1	137.516	100%	95%	1	137.516	20%	15,81%	Dinas Pendidikan
			19	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.906.526	0	-	1	399.925	0	185.961	1	204161,234	1	390.122	100%	98%	1	390.122	20%	13,42%	Dinas Pendidikan
			20	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.408.241	0	-	1	214.425	0	125.798	1	82629,791	1	208.428	100%	97%	1	208.428	20%	14,80%	Dinas Pendidikan
			21	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.834.699	0	-	1	397.722	0	226.593	1	148267,251	1	374.860	100%	94%	1	374.860	20%	13,22%	Dinas Pendidikan
			22	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Klegen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.138.556	0	-	1	171.529	0	77.977	1	89495,558	1	167.473	100%	98%	1	167.473	20%	14,71%	Dinas Pendidikan
			23	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Oro Oro Ombo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.405.146	0	-	1	367.437	0	145.467	1	215747,511	1	361.215	100%	98%	1	361.215	20%	15,02%	Dinas Pendidikan
			24	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Rejomulyo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.004.363	0	-	1	139.076	0	44.682	0	90586,01	0	135.268	0%	97%	0	135.268	0%	13,47%	Dinas Pendidikan
			25	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Rejomulyo	jumlah lembaga yang	Lembaga	5	159.546	0	-	1	114.703	0	52.741	1	58160,785	1	110.902	100%	97%	1	110.902	20%	69,51%	Dinas Pendidikan

			4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.221.332	0	-	1	204.608	0	104.435	1	89346,194	1	193.781	100%	95%	1	193.781	20%	15,87%	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	986.633	0	-	1	165.139	0	79.210	1	82204,701	1	161.414	100%	98%	1	161.414	20%	16,36%	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.337.990	0	-	1	349.747	0	124.844	1	17643,4687	1	301.279	100%	86%	1	301.279	20%	12,89%	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.210.406	0	-	1	171.462	0	51.402	1	11795,9976	1	169.362	100%	99%	1	169.362	20%	13,99%	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Winongo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.481.836	0	-	1	283.282	0	191.375	1	83396,875	1	274.772	100%	97%	1	274.772	20%	11,07%	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Winongo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	990.340	0	-	1	165.817	0	78.123	1	79721,892	1	157.845	100%	95%	1	157.845	20%	15,94%	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Ngegong	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.091.021	0	-	1	150.459	0	71.960	1	70336,633	1	142.297	100%	95%	1	142.297	20%	13,04%	Dinas Pendidikan
			4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Patihan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	521.015	0	-	1	366.204	0	148.320	1	20864,3758	1	356.964	100%	97%	1	356.964	20%	68,51%	Dinas Pendidikan
			5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pangongangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	223.037	0	-	1	164.800	0	58.466	1	98435,844	1	156.902	100%	95%	1	156.902	20%	70,35%	Dinas Pendidikan
			5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pangongangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.312.416	0	-	1	272.287	0	99.818	1	15599,7237	1	255.815	100%	94%	1	255.815	20%	11,06%	Dinas Pendidikan
			5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sogaten	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	300.555	0	-	1	215.707	0	103.492	1	10492,0833	1	208.413	100%	97%	1	208.413	20%	69,34%	Dinas Pendidikan
			5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Taman	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	3.701.142	0	-	1	407.965	0	208.454	1	18827,5072	1	396.729	100%	97%	1	396.729	20%	10,72%	Dinas Pendidikan
			5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Taman	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	780.787	0	-	1	126.794	0	47.794	1	72546,28	1	120.340	100%	95%	1	120.340	20%	15,41%	Dinas Pendidikan
			5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Taman	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.052.706	0	-	1	196.839	0	89.978	1	10332,3154	1	193.301	100%	98%	1	193.301	20%	18,36%	Dinas Pendidikan
			5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pandean	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	5.797.153	0	-	1	335.422	0	132.640	1	17235,9472	1	304.999	100%	91%	1	304.999	20%	5,26%	Dinas Pendidikan
			5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pandean	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.572.254	0	-	1	388.913	0	159.875	1	19665,4215	1	356.529	100%	92%	1	356.529	20%	13,86%	Dinas Pendidikan
			5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Banjarejo	jumlah lembaga yang	Lembaga	5	3.390.215	0	-	1	438.739	0	194.553	1	23617,2566	1	430.725	100%	98%	1	430.725	20%	12,70%	Dinas Pendidikan

				75	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.024.135	0	-	1	1.019.544	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				76	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	531.156	0	-	1	517.153	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				77	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	764.211	0	-	1	805.482	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				78	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	958.995	0	-	1	905.813	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				79	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	579.513	0	-	1	630.798	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				80	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	3.643.844	0	-	1	738.037	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				81	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	738.899	0	-	1	711.987	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				82	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	697.083	0	-	1	786.995	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				83	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	988.205	0	-	1	815.533	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				84	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	915.317	0	-	1	897.073	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				85	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.758.507	0	-	1	459.977	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				86	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.773.320	0	-	1	318.038	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				87	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	406.331	0	-	1	51.359	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				88	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	397.477	0	-	1	62.387	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				89	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.766.241	0	-	1	333.620	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				90	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.408.241	0	-	1	131.795	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
				91	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.720.035	0	-	1	311.355	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan

			1 0 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	793.626	0	-	1	130.369	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 0 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.387.909	0	-	1	487.499	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 1 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.864.902	0	-	1	317.920	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 1 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.111.032	0	-	1	398.818	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 1 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	787.934	0	-	1	127.142	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 1 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	550.062	0	-	1	164.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 1 4	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.490.627	0	-	1	282.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 1 5	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	750.774	0	-	1	124.553	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 1 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.616.762	0	-	1	291.667	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 1 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	449.334	0	-	1	63.542	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 1 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	664.227	0	-	1	219.111	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 1 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	320.119	0	-	1	306.916	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 2 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	97.123	0	-	1	73.150	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 2 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	276.666	0	-	1	282.967	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 2 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	157.701	0	-	1	156.989	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 2 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.160.526	0	-	1	403.283	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
			1 2 4	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	320.591	0	-	1	76.056	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan

			1 4 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	405.287	0	-	1	75.573	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan		
			1 4 2	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru	jumlah partisipasi murni sd smp, jumlah siswa yang memenuhi kriteria lembaga yang dituju	Lembaga	470	25.532.065	0	-	94	2.877.040	0	77.961	94	2.346.688	94	2.424.649	100%	84%	94	2.424.649	20%	9,50%	Dinas Pendidikan
			1 4 3	Kegiatan Pelaksanaan Uji Coba USBN SD, SMP, Kegiatan USBN Pendidikan Agama SD dan SMP, Kegiatan USBN SD, SMP dan UN SMP	jumlah lembaga yang mengikuti ujicoba USBN dan UN SD dan SMP	Lembaga	465	5.809.049	0	-	93	519.331	0	461.996	84	22.266	84	484.262	90%	93%	84	484.262	18%	8,34%	Dinas Pendidikan
			1 4 4	Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP	jumlah siswa yang berprestasi	Siswa	2610	2.268.420	0	-	522	122.317	341	90.618	167	27.386	508	118.004	97%	96%	508	118.004	19%	5,20%	Dinas Pendidikan
			1 4 5	Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD dan SMP	jumlah siswa yang berprestasi	Siswa	1545	3.108.891	0	-	309	60.090	189	28.050	87	26.087	276	54.137	89%	90%	276	54.137	18%	1,74%	Dinas Pendidikan
			1 4 6	Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice	jumlah lembaga yang terakreditasi	Lembaga	530	4.864.656	0	-	106	30.979	0	-	93	25.080	93	25.080	88%	81%	93	25.080	18%	0,52%	Dinas Pendidikan
			1 4 7	Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP, Workshop Peningkatan Kualitas KKG dan MGMP, Komunitas Pembelajar	jumlah lembaga yang memahami materi pemberdayaan pengembang kurikulum 2013	Lembaga	465	5.719.756	0	-	93	656.906	0	-	79	375.689	0	375.689	0%	57%	0	375.689	0%	6,57%	Dinas Pendidikan
			1 4 8	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat	jumlah lembaga yang sesuai dengan SPM	Lembaga	530	3.399.358	0	-	106	30.979	0	-	79	24.008	79	24.008	75%	77%	79	24.008	15%	0,71%	Dinas Pendidikan
			1 5 1	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Sekolah	jumlah gedung sekolah yang dibangun sesuai kebutuhan	Paket	100	110.512.625	0	-	20	19.324.233	0	6.013.553	15	13.103.930	15	19.117.483	75%	99%	15	19.117.483	15%	17,30%	Dinas Pendidikan
			1 5 3	Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan	jumlah paket	Paket	25725	258.700.000	0	-	5145	39.585.000	0	47.825	4989	39.067.205	4989	39.115.030	97%	99%	4989	39.115.030	19%	15,12%	Dinas Pendidikan

1	101	10101	18		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	100	20.085.713	0	0	100	4.871.669	60	104.479	100	4.598.715	100	4.703.194	100%	97%	100	4703194,291	100%	23%	
				1	Kegiatan Penyelenggaraan TK Pembina	jumlah lembaga yang beroperasi	lembaga	5	966.985	0	-	1	232.730	0	41.527	1	152.683	1	194.209	100%	83%	1	194.209	20%	20,08%	Dinas Pendidikan
				2	Kegiatan Workshop Kurikulum PAUD	jumlah lembaga yang memahami kurikulum PAUD	lembaga	845	2.266.669	0	-	169	29.610	0	-	93	15.425	93	15.425	55%	52%	93	15.425	11%	0,68%	Dinas Pendidikan
				3	Kegiatan Pusat Kegiatan Gugus PAUD Terpadu Kota Madiun	jumlah gugus yang berprestasi	gugus	110	2.591.134	0	-	22	44.630	6	37.961	6	-	12	37.961	55%	85%	12	37.961	11%	1,47%	Dinas Pendidikan
				4	Kegiatan Bantuan BOP PAUD	jumlah lembaga yang mendapat BOP	lembaga	845	967.759	0	-	169	33.469	0	19.981	156	11.760	156	31.741	92%	95%	156	31.741	18%	3,28%	Dinas Pendidikan
				6	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan PAUD	jumlah gedung PAUD yang direhab	lembaga	5	10.000.000	0	-	1	4.487.800	0	5.010	1	4.386.308	1	4.391.318	100%	98%	1	4.391.318	20%	43,91%	Dinas Pendidikan
				7	Kegiatan Pagelaran Hari Anak Nasional	jumlah anak yang mengikuti HAN	anak	10000	3.293.165	0	-	81	43.430	0	-	65	32.540	65	32.540	80%	75%	65	32.540	1%	0,99%	Dinas Pendidikan
1	101	10101	19		Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga yang Terakreditasi	%	100	10.869.058	0	0	100	756.210	10	55.598	100	408.523	100	464.120	100%	61%	100	464.120	100%	4%	
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	jumlah peserta lulus ujian	peserta	25	1.623.375	0	-	5	232.790	0	4.360	2	49.017	2	53.377	40%	23%	2	53.377	8%	3,29%	Dinas Pendidikan
				2	Kegiatan Pembinaan Lembaga PAUD dan PNF	jumlah lembaga yang sesuai dengan aturan yang berlaku	lembaga	1150	2.157.206	0	-	230	47.504	0	4.060	139	25.898	139	29.958	60%	63%	139	29.958	12%	1,39%	Dinas Pendidikan
				3	Kegiatan Bimbingan Teknis Ekstra Kurikuler Pembina Pramuka	jumlah peserta yang mengikuti bimtek ekskul pembina pramuka	peserta	1315	3.365.110	0	-	263	354.100	0	-	129	286.626	129	286.626	49%	81%	129	286.626	10%	8,52%	Dinas Pendidikan
				4	Kegiatan Workshop Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	jumlah peserta yang memahami workshop pengelolaan perpustakaan	peserta	695	2.176.635	0	-	169	121.816	0	47.178	54	46982,3	54	94.160	32%	77%	54	94.160	8%	4,33%	Dinas Pendidikan
				5	Kegiatan Workshop Penyusunan Bahan Ajar Mulok Bahasa Daerah	Persentase saran dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	%	470	1.546.732	0	-	94	-	0	-	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Dinas Pendidikan
2	17				Perpustakaan.																					
2	217	21701	15		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah bahan pustaka yang dipinjam	eks	78	1.285.000	0	-	70	986.624	0	241.288	87	702.915	87	944.203	124%	96%	87	944.203	112%	73%	
				1	Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	kali	1760	395.000	0	-	180	256.120	33	42.702	147	210.490	180	253.192	100%	99%	180	253.192	10%	64,10%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

				7	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Permukiman	Jumlah lokasi	lokasi	30	4.200.000	0	0	10	734.000	0	32.570	42	606.833	42	639.403	420%	87%	42	639.403	140%	15,22%	Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3				Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota																					
1	103	10301	15		Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	%	100	183.634.550	0	-	100	16.409.899	0	3.787.779	95,04	10.289.411	95,04	14.077.191	95%	86%	95	14.077.191	95%	8%	
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/bangunan	gedung	4	14.423.950	0	-	8	3.811.150	2	366.566	4	3.145.752	6	3.512.318	75%	92%	6	3.512.318	150%	24,35%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
				2	Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta	Orang	200	2.500.000	0	-	200	271.056	0	38.535	88	194.350	88	232.885	44%	86%	88	232.885	44%	9,32%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
				3	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi	kelurahan	30	166.710.600	0	-	27	12.327.693	0	3.382.678	16	6.949.310	16	10.331.988	59%	84%	16	10.331.988	53%	6,20%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1	103	10301	17		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalankota dalam kondisi baik	%	94	545.209.428	0	-	94	60.122.282	0	19.342.214	95	37.696.088	95	57.038.302	101%	95%	95	57.038.302	101%	10%	
				1	Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah lokasi	lokasi	10	338.787.238	0	-	10	11.476.641	0	5.897.029	6	5.239.961	6	11.136.990	60%	97%	6	11.136.990	60%	3,29%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
				2	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen perencanaan	doc	45	15.238.400	0	-	17	4.062.250	1	744.444	29	2.676.830	29	3.421.274	171%	84%	29	3.421.274	64%	22,45%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
				3	Kegiatan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan	Jumlah lokasi	lokasi	14	52.176.750	0	-	5	24.027.424	1	3.749.988	11	18.614.464	12	22.364.452	240%	93%	12	22.364.452	86%	42,86%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
				4	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	Jumlah lokasi	lokasi	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
				5	Kegiatan Peningkatan Jalan	Jumlah lokasi	lokasi	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum

					dan Badan-badan Sungai																			Ruang Kota		
				3	Kegiatan Pengadaan Pompa Pengendalian Banjir	Jumlah pompa	unit	3	10.000.000	0	-	3	5.000.000	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
				4	Kegiatan Penataan Rumah Jaga dan Kawasan Rumah Pompa Pandan	Jumlah lokasi	Lokasi	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota		
2	9				Perhubungan																					
2	2	2090	1	5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	80	33.699.951	0	-	80	4.053.147	0	543.488	80	3.317.311	80	3.860.799	100%	95%	80	3.860.799	100%	11%	
				1	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	Jumlah yang dipelihara	unit	3160	2.286.859	0	-	632	551.859	315	140.926	317	387209,77	632	528.136	100%	96%	632	528.136	20%	23,09%	Dinas Perhubungan
				2	Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Kegiatan	kali	30	8.306.755	0	-	6	1.177.360	1	297.625	1	812841,903	2	1.110.466	33%	94%	2	1.110.466	7%	13,37%	Dinas Perhubungan
				3	Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen	doc	16	2.760.338	0	-	4	349.378	0	40.137	1	288783,949	1	328.921	25%	94%	1	328.921	6%	11,92%	Dinas Perhubungan
				4	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	Panjang Marka Jalan	meter	18000	3.000.000	0	-	6000	853.213	1000	25.600	19000	757.911	20000	783.511	333%	92%	20000	783.511	111%	26,12%	Dinas Perhubungan
				5	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	Jumlah peralatan dan perlengkapan lalu lintas	unit	4667	17.346.000	0	-	934	1.121.337	0	39.200	40	1070563,9	40	1.109.764	4%	99%	40	1.109.764	1%	6,40%	Dinas Perhubungan
2	2	2090	1	6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	539916	16.368.200	0	-	117100	2.146.576	43655	674.894	27000	1.085.412	70655	1.760.306	60%	82%	70655	1.760.306	13%	11%	
				1	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang	Jumlah penumpang	penumpang	596.280	7.193.925	0	-	119256	818.905	89166	283.360	19440	319.090	108606	602.449	91%	74%	108606	602.449	18%	8,37%	Dinas Perhubungan
				2	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Barang	Jumlah angkutan barang yang di data	kendaraan	23000	899.526	0	-	23000	141.161	9336	15.848	7010	103.322	16346	119.170	71%	84%	16346	119.170	71%	13,25%	Dinas Perhubungan
				3	Kegiatan Pelatihan SDM Perhubungan	Jumlah SDM yang terampil	orang	120	710.850	0	-	120	31.570	0	-	87	23.150	87	23.150	73%	73%	87	23.150	73%	3,26%	Dinas Perhubungan
				4	Kegiatan Pembangunan Halte	Luas halte	m2	135	451.000	0	-	12	9.400	0	7.600	0	-	0	7.600	0%	81%	0	7.600	0%	1,69%	Dinas Perhubungan
				5	Kegiatan Kalibrasi Pengujian Alat Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat yang dikalibrasi	alat	12	530.000	0	-	12	106.000	0	-	12	102.850	12	102.850	100%	97%	12	102.850	100%	19,41%	Dinas Perhubungan
				6	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru	Jumlah awak kendaraan yang diberi penghargaan	peserta	35	211.910	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Dinas Perhubungan

					Penerangan Jalan Umum																			Permukiman		
			9		Kegiatan Perencanaan, Pemantauan dan Pembuatan Data/Kajian Pemakaman	Jumlah dokumen	doc	0	-	0	-	2	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
			10		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah lokasi	lokasi	20	10.500.000	0	-	4	82.500	0	68.725	0	68.725	0%	83%	0	68.725	0%	0,65%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
			11		Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Pemakaman	Jumlah lokasi	lokasi	7	2.780.000	0	-	7	200.000	5	110.321	7	80.828	191.149	100%	96%	7	191.149	100%	6,88%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	3				Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota																					
1	103	103010	20		Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	1.940.000	-	100	860.270	0	100.721	85,59	635.590	85,59	736.311	86%	86%	86	736.311	86%	38%		
			1		Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)	Jumlah rekom	doc	100	800.000	0	-	200	165.670	4	40.512	12	104.843	16	145.356	8%	88%	16	145.356	16%	18,17%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			2		Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)	Persentase surat teguran yang diterbitkan	%	83	140.000	0	-	70	300.000	16	52.946	64	171.391	64	224.338	91%	75%	64	224.338	77%	160,24%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			3		Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah dokumen	doc	5	1.000.000	0	-	1	394.600	0	7.262	1	359.356	1	366.618	100%	93%	1	366.618	20%	36,66%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																					
2	4				Pertanahan																					
2	204	104015	15		Program Pelayanan Pertanahan	Persentase pelayanan pertanahan	%	100	100.000	0	-	100	116.650	100	49.699	100	59.655	100	109.355	100%	94%	100	109.355	100%	109%	
			1		Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/Kajian Pertanahan	Jumlah dokumen	doc	2	100.000	0	-	2	116.650	1	49.699	1	59.655	2	109.355	100%	94%	2	109.355	100%	109,35%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	5				Lingkungan Hidup																					
2	205	205015	15		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi SDA dan lingkungan hidup yang tersedia	%	79	3.252.000	0	-	64	482.786	64	155.424	64	290.554	64	445.978	100%	92%	64	445.978	81%	14%	
			1		Kegiatan penyusunan data dan informasi Perlindungan dan	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	doc	19	1.256.000	0	-	5	199.354	1	112.576	5	81.964	6	194.541	120%	98%	6	194.541	32%	15,49%	Dinas Lingkungan Hidup

			2	Kegiatan Pelayanan Tindaklanjutan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	kasus/pengaduan	8	180.000	0	-	8	34.874	3	3.201	8	30.719	11	33.920	138%	97%	11	33.920	138%	18,84%	Dinas Lingkungan Hidup
			3	Kegiatan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Jumlah perusahaan yang taat PROPER	perusahaan	3	430.000	0	-	3	4.980	0	480	3	3.750	3	4.230	100%	85%	3	4.230	100%	0,98%	Dinas Lingkungan Hidup
			4	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah adiwiyata	sekolah	20	1.650.000	0	-	7	70.356	0	60.002	7	10.200	7	70.202	100%	100%	7	70.202	35%	4,25%	Dinas Lingkungan Hidup
			5	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan Yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)	Jumlah kelompok masyarakat berbudaya lingkungan hidup	kelompok	36	5.085.500	0	-	4	205.400	0	89.002	6	84.573	6	173.575	150%	85%	6	173.575	17%	3,41%	Dinas Lingkungan Hidup
			6	Kegiatan Adopsi Regulasi tentang Izin Lingkungan	Jumlah yang mengikuti sosialisasi	orang	20	80.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
			7	Kegiatan Pembinaan Perusahaan yang Mempunyai Izin Lingkungan	Jumlah usaha / kegiatan yang taat membuat laporan	perusahaan	25	828.000	0	-	5	63.192	0	-	6	56.511	6	56.511	120%	89%	6	56.511	24%	6,83%	Dinas Lingkungan Hidup
			8	Kegiatan Edukasi dan Kader lingkungan yang Aktif	Jumlah kader lingkungan yang aktif	peserta	100	238.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
2	205	20501	18	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	75	44.257.000	0	-	75	6.679.697	74,57	1.825.314	74,9	3.703.465	74,9	5.528.779	100%	83%	75	5.528.779	100%	12%	
			1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	jenis	59	7.189.000	0	-	13	781.467	9	122.145	12	524.164	12	646.309	92%	83%	12	646.309	20%	8,99%	Dinas Lingkungan Hidup
			2	Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah	Jumlah ruas jalan yang ditangani	ruas jalan	11	19.219.000	0	-	11	3.229.000	11	1.230.676	11	1.668.835	11	2.899.511	100%	90%	11	2.899.511	100%	15,09%	Dinas Lingkungan Hidup
			3	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Jumlah kelurahan dalam pengelolaan sampah	kelurahan	27	4.449.000	0	-	27	366.800	0	31.032	27	287.546	27	318.578	100%	87%	27	318.578	100%	7,16%	Dinas Lingkungan Hidup

				1	Kegiatan Fasilitas Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jenis Kegiatan Promosi	jenis	2	1.790.000	0	-	2	-	0	-	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
3	7				Perindustrian																					
3	307	20101	15		Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase IKM yang berstandart	%	17,9	7.131.250	0	-	17	687.624	0	159.615	19,63	281.365	19,63	440.980	115%	64%	20	440.980	110%	6%	Dinas Tenaga Kerja
				1	Kegiatan Sosialisasi Penerapan dan Fasilitas Standart Produk Industri (HKI) bagi IKM/IRT Kota Madiun	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi HKI	Usaha Mikro	20	745.000	0	-	20	56.237	20	10.767	0	36.582	20	47.349	100%	84%	20	47.349	100%	6%	Dinas Tenaga Kerja
				2	Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Kuliner dan Diversifikasi Produk Industri Manufaktur dan Fasilitas Ijin Teknis	Jumlah IKM yang mempunyai ijin PIRT	Usaha Mikro	20	251.000	0	-	20	39.425	0	-	20	37.918	20	37.918	100%	96%	20	37.918	100%	15%	Dinas Tenaga Kerja
				3	Kegiatan Fasilitas Pameran Industri Mikro, Kecil, Menengah Tk. Nasional; INACRAFT	Jumlah produk unggulan yang dipamerkan	Jenis	15	1.856.250	0	-	3	40.543	0	-	3	35.655	3	35.655	100%	88%	3	35.655	20%	2%	Dinas Tenaga Kerja
				4	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan IKM/IRT oleh DEKRANASDA	Jumlah produk unggulan kerajinan handmade yang dipamerkan	Produk	28	1.500.000	0	-	5	103.420	2	55.827	0	38.718	2	94.545	40%	91%	2	94.545	7%	6%	Dinas Tenaga Kerja
				5	Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi IKM / IRT	Jumlah dokumen IKM yang belum berijin	Doc	1	130.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja
				6	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan bagi IKM / IRT	Jumlah IKM/IRT yang meningkat SDM nya	Usaha Mikro	700	2.649.000	0	-	140	448.000	30	93.020	0	132.492	30	225.512	21%	50%	30	225.512	4%	9%	Dinas Tenaga Kerja
3	307	20101	16		Program Pembinaan Industri	Persentase IKM yang melaksanakan GMP	%	80	650.000	0	-	80	41.523	0	41.523	100	0	100	41.523	125%	100%	100	41.523	125%	6%	Dinas Tenaga Kerja
				1	Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin rendah melalui fasilitas pengujian TAR dan Nikotin bagi industri kecil dan	Jumlah pengujian kadar TAR dan Nikotin	Kegiatan	20	650.000	0	-	1	41.523	1	41.523	0	0	1	41.523	100%	100%	1	41.523	5%	6%	Dinas Tenaga Kerja

2	2111	21201	16		Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	0,41	1.010.000	0	-	0,41	1.111.900	111.045	0,42	375.393	0,42	486.438	102%	44%	42%	486.438	102%	48%	Usaha Mikro Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	
			1		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Madiun	Jumlah Wira Usaha Baru	WUB	460	1.010.000	0	-	87	1.111.900	3	111.045	88	375393,05	91	486.438	105%	44%	91	486.438	20%	48,16%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
3	302	21601	15		Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Jumlah promosi dan peningkatan sumber daya wisata	kali	37	12.650.000	0	-	2	916.103	0	91.437	5	751.650	5	843.086	250%	92%	5	843.086	14%	7%	
			1		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	event	10	3.250.000	0	-	2	398.254	0	45.096	5	302.604	5	347.700	250%	87%	5	347.700	50,00%	10,70%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			2		Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam Negeri	Jumlah Promosi Pariwisata	jumlah promosi	17	5.200.000	0	-	3	204.723	0	-	7	190.352	7	190.352	233%	93%	7	190.352	41,18%	3,66%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			3		Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pemberdayaan Pariwisata yang diselenggarakan	event	13	4.200.000	0	-	2	313.126	1	46.341	3	258.694	4	305.034	200%	97%	4	305.034	30,77%	7,26%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
1	106	10601	15		Sosial Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	%	100	31.592.714	0	0	100	3.571.173	50	698.050	80	2.457.893	80	3.155.943	80%	88%	80	3.155.943	80%	10%	Dinas Sosial
			1		Kegiatan Pembinaan Perintis	Jumlah janda perintis yang mendapat	orang	103	244.281	0	-	103	6.350	0	-	3	6.350	3	6.350	3%	100%	3	6.350	3%	2,60%	Dinas Sosial

				4	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah lembaga fakom dan panti asuhan anak yang aktif	lembaga	10	3.795.723	0	-	7	284.384	0	117.694	7	163.265	7	280.959	100%	99%	7	280.959	70%	7%	Dinas Sosial
				5	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	orang	415	3.650.680	0	-	415	8.448.488	30	3.118.592	378	5.085.371	408	8.203.963	98%	97%	408	8.203.963	98%	225%	Dinas Sosial
2	203	30301	15		Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan	indeks	95,6	7.587.000	0	-	95,6	718.143	0	278.973	95,4	434.513	95,4	713.486	100%	99%	95	713.486	100%	9%	
				1	Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah Produksi pangan hasil pekarangan/ka wasan Rumah Pangan Lestari	Kg	2500	740.000	0	-	1700	248.924	140	72.796	160	175.377	300	248.173	18%	100%	300	248.173	12%	34%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				2	Kegiatan Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Jumlah Dokumen Ketersediaan dan kerawanan pangan	doc	15	475.000	0	-	3	28.998	0	28.648	3	-	3	28.648	100%	99%	3	28.648	20%	6%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				3	Kegiatan Promosi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, Sehat dan Aman	Jumlah Menu Konsumsi Olahan Pangan yang tercipta	produk	250	2.420.000	0	-	180	129.493	0	59.899	97	68.004	97	127.904	54%	99%	97	127.904	39%	5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				4	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan	Prosentase sample pangan segar dan olahan aman dikonsumsi	%	86,4	2.500.000	0	-	86,2	185.977	0	101.965	82.944	0	184.909	0%	99%	0	184.909	0%	7%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
				5	Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah Dokumen Informasi Harga, Pasokan, Dan Akses Pangan	doc	4	502.000	0	-	4	68.026	0	12.205	4	55.521	4	67.726	100%	100%	4	67.726	100%	13%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				6	Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat	ton	128	950.000	0	-	120	56.726	0	3.460	120	52.666	120	56.126	100%	99%	120	56.126	94%	6%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																										
					Kelautan dan Perikanan																					
3	301	30301	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	%	5	4.840.000	-	1	511.783	1	134.266	1	362.252	1	496.519	100%	97%	1	496.519	20%	10%		
				1	Kegiatan Pendampingan, Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap	ton	401	1.560.000	0	-	367	412.505	120	126.001	100	281.363	220	407.364	60%	99%	220	407.364	55%	26%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				2	Kegiatan Peningkatan Mutu, Pengolahan	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/ perkapita/ tahun	15,85	3.280.000	0	-	15,25	99.278	0	8.265	15,5	80.889	15,5	89.154	102%	90%	15,5	89.154	98%	3%	Dinas Pertanian dan

				1	Kegiatan Perencanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen	doc	7	1.150.000	0	-	7	833.004	1	441.361	6	379.300	7	820.661	100%	99%	7	820.661	100%	71%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2	Kegiatan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah Dokumen	doc	30	120.000	0	-	6	174.313	3	39.346	3	123.669	6	163.015	100%	94%	6	163.015	20%	136%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				3	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan Aplikasi Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	1	97.525	0	-	1	97.525	1	96.575	0	-	1	96.575	100%	99%	1	96.575	100%	99%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	404	404016	1		Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	263.000	0	-	100	370.355	0	104.317	100	251.181	100	355.498	100%	96%	100	355.498	100%	135%	
				1	Kegiatan Perencanaan Bidang Ekonomi	jumlah dokumen	doc	2	138.000	0	-	2	189.709	0	73.525	2	114.758	2	188.283	100%	99%	2	188.283	100%	136%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2	Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	jumlah dokumen	doc	1	125.000	0	-	1	180.646	0	30.792	1	136.423	1	167.215	100%	93%	1	167.215	100%	134%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	404	404017	1		Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota	Persentase Capaian Target Program Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	%	100	541.962	0	-	100	526.585	0	56.079	100	459.246	100	515.326	100%	98%	100	515.326	100%	95%	
				1	Kegiatan Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	jumlah dokumen	doc	1	418.256	0	-	1	422.065	0	28.604	1	385.208	1	413.812	100%	98%	1	413.812	100%	99%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2	Kegiatan Perencanaan Sarana dan Prasarana Perkotaan	jumlah dokumen	doc	1	123.706	0	-	1	104.520	0	27.476	1	74.038	1	101.514	100%	97%	1	101.514	100%	82%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	6				Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																					
4	406	406015	1		Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Sesuai SOP	%	100	342.856	0	-	100	227.368	62,79	51.177	49,09	146.658	111,8	197.836	112%	87%	112	197.836	112%	58%	
				1	Kegiatan Pelayanan	Prosentase Terselaikanny	%	467	40.048	0	-	95	40.048	74,5	600	83,54	28.750	83,54	29.350	88%	73%	83,54	29.350	18%	73%	Badan Kepegawa

				4	Kegiatan Latihan Dasar CPNS	Jumlah Peserta	PNS	990	1.050.000	0	-	198	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Badan Kepegawaian Daerah		
				5	Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Workshop	Jumlah Peserta	peserta	500	67.200	0	-	100	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Badan Kepegawaian Daerah		
				6	Kegiatan Assesment Pegawai	Jumlah Peserta	PNS	200	488.500	0	-	40	488.500	0	-	26	287.308	26	287.308	65%	59%	26	287.308	13%	59%	Badan Kepegawaian Daerah
4	9				Kecamatan																					
4	4	4090	1	5	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase Terelesainya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan Sesuai Ketentuan	%	100	17.181.881	0	-	100	16.314.981	0	4.893.508	105	9.923.811	105	14.817.319	105%	91%	105	14.817.319	105%	86%	
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor	Prosentase terelesainya a permohonan rekomendasi di kelurahan madiun lor	%	99,6	606.063	0	-	100	638.443	50	244.206	50	365.050	100	609.257	100%	95%	100	609.257	100%	100,53%	Kecamatan Manguharjo
				2	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo	prosentase terelesainya a permohonan rekomendasi di kelurahan manguharjo	%	99,6	634.835	0	-	100	660.465	49,8	227.753	49,8	391.711	99,6	619.464	100%	94%	99,6	619.464	100%	97,58%	Kecamatan Manguharjo
				3	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul	Prosentase terelesainya a permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Kidul	%	99,6	673.326	0	-	100	697.827	49,8	262.834	120	390.374	120	653.208	120%	94%	120	653.208	120%	97,01%	Kecamatan Manguharjo
				4	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor	prosentase terelesainya a permohonan rekomendasi di kelurahan nambangan lor	%	99,6	751.035	0	-	100	789.885	49,8	224.223	49,8	485.822	99,6	710.045	100%	90%	99,6	710.045	100%	94,54%	Kecamatan Manguharjo
				5	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong	Prosentase terelesainya a permohonan rekomendadi di kelurahan ngegong	%	99,6	496.325	0	-	100	517.875	49,8	129.994	49,8	340.603	99,6	470.598	100%	91%	99,6	470.598	100%	94,82%	Kecamatan Manguharjo
				6	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	Prosentase terelesainya a permohonan rekomendasi di kelurahan pangongangan	%	99,6	515.310	0	-	100	546.387	49,8	159.867	124	328.075	124	487.942	124%	89%	124	487.942	124%	94,69%	Kecamatan Manguharjo
				7	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Patihan	Prosentase terelesainya a permohonan rekomendasi di kelurahan patihan	%	99,6	523.047	0	-	100	548.427	49,8	190.924	124	304.174	124	495.098	124%	90%	124	495.098	124%	94,66%	Kecamatan Manguharjo
				8	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten	prosentase terelesainya a permohonan rekomendasi di	%	99,6	564.459	0	-	100	586.389	49,8	155.224	124	394.369	173,8	549.593	174%	94%	173,8	549.593	174%	97,37%	Kecamatan Manguharjo

				9	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Winongo	kelurahan sogaten prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan winongo	%	99,6	638.319	0	-	100	658.619	49,8	214.946	49,8	383.114	99,6	598.060	100%	91%	99,6	598.060	100%	93,69%	Kecamatan Manguharjo
				10	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kartoharjo	%	500	2.715.874	0	-	100	647.082	49,8	161.820	48,9	439.522	98,7	601.342	99%	93%	98,7	601.342	20%	22,14%	Kecamatan Kartoharjo
				11	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kanigoro	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kanigoro	%	500	630.449	0	-	100	717.379	49,8	209.811	48,9	357.486	98,7	567.296	99%	79%	98,7	567.296	20%	89,98%	Kecamatan Kartoharjo
				12	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pilangbango	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Pilangbango	%	500	530.965	0	-	100	629.415	49,8	191.409	48,9	380.539	98,7	571.948	99%	91%	98,7	571.948	20%	107,72%	Kecamatan Kartoharjo
				13	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro Ombo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Oro-Oro Ombo	%	500	581.025	0	-	100	662.113	49,8	216.513	48,9	401.378	98,7	617.890	99%	93%	98,7	617.890	20%	106,34%	Kecamatan Kartoharjo
				14	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Klegen	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Klegen	%	500	626.495	0	-	100	695.616	49,8	179.646	48,9	404.475	98,7	584.121	99%	84%	98,7	584.121	20%	93,24%	Kecamatan Kartoharjo
				15	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Sukosari	%	500	473.621	0	-	100	585.751	49,8	173.618	48,9	336.059	98,7	509.677	99%	87%	98,7	509.677	20%	107,61%	Kecamatan Kartoharjo
				16	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Tawangrejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Tawangrejo	%	500	504.397	0	-	100	593.352	49,8	149.893	48,9	394.085	98,7	543.978	99%	92%	98,7	543.978	20%	107,85%	Kecamatan Kartoharjo
				17	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kelun	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kelun	%	500	529.547	0	-	100	615.097	49,8	157.772	48,9	398.084	98,7	555.856	99%	90%	98,7	555.856	20%	104,97%	Kecamatan Kartoharjo
				18	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Rejomulyo	%	500	604.125	0	-	100	646.995	49,8	174.667	48,9	387.274	98,7	561.940	99%	87%	98,7	561.940	20%	93,02%	Kecamatan Kartoharjo
				19	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di	%	100	569.187	0	-	100	601.987	50	204.887	50	388.193	100	593.080	100%	99%	100	593.080	100%	104,20%	Kecamatan Taman

				20	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean	kelurahan mojorejo Prosentase terselesaikannya a permohonan rekomendasi di Kelurahan Pandean	%	100	544.210	0	-	100	577.010	50	165.450	50	363.686	100	529.136	100%	92%	100	529.136	100%	97,23%	Kecamatan Taman
				21	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo	Prosentase terselesaikannya a permohonan rekomendasi di Kelurahan Banjarejo	%	100	482.411	0	-	100	515.211	50	168.063	50	256.842	100	424.905	100%	82%	100	424.905	100%	88,08%	Kecamatan Taman
				22	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen	Prosentase terselesaikannya a permohonan rekomendasi di Kelurahan Kuncen	%	100	352.108	0	-	100	384.908	50	127.566	50	254.077	100	381.642	100%	99%	100	381.642	100%	108,39%	Kecamatan Taman
				23	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo	Prosentase terselesaikannya a permohonan rekomendasi di kelurahan Manisrejo	%	100	611.276	0	-	100	644.076	50	204.584	50	366.140	100	570.724	100%	89%	100	570.724	100%	93,37%	Kecamatan Taman
				24	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron	Prosentase terselesaikannya a permohonan rekomendasi di Kelurahan Kejuron	%	100	530.256	0	-	100	563.056	50	154.357	50	374.494	100	528.851	100%	94%	100	528.851	100%	99,73%	Kecamatan Taman
				25	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Josenan	Prosentase terselesaikannya a permohonan rekomendasi di Kelurahan Josenan	%	100	463.825	0	-	100	496.625	50	126.176	50	333.427	100	459.603	100%	93%	100	459.603	100%	99,09%	Kecamatan Taman
				26	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Demangan	Prosentase terselesaikannya a permohonan rekomendasi di Kelurahan Demangan	%	100	468.208	0	-	100	501.008	50	151.352	50	307.552	100	458.904	100%	92%	100	458.904	100%	98,01%	Kecamatan Taman
				27	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Taman	Prosentase terselesaikannya a permohonan rekomendasi di Kelurahan Taman	%	100	561.184	0	-	100	593.984	50	165.954	50	397.208	100	563.162	100%	95%	100	563.162	100%	100,35%	Kecamatan Taman
4	9				Unsur Staf																					
4	40101	4010102	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	%	100	17.625.000	0	-	100	695.551	42,2	351.031	100	242.714	100	593.745	100%	85%	100	593.745	100%	3%	
				1	Kegiatan Keprotokolan Pemerintah Kota Madiun	jumlah kegiatan Pemerintah Kota	kegiatan	500	16.250.000	0	-	500	594.272	221	349.631	537	147.979	537	497.610	107%	84%	537	497.610	107%	3%	Bagian Umum
				2	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jasmani	Jumlah pelaksanaan kesehatan jasmani	kali	45	1.375.000	0	-	45	101.279	9	1.400	40	94.735	49	96.135	109%	95%	49	96.135	109%	7%	Bagian Umum

				5	Kegiatan Reses	Jumlah dokumen laporan hasil reses anggota DPRD yang disusun	doc	14	5.447.933	0	-	3	723.808	1	133.170	2	511.914	3	645.084	100%	89%	3	645.084	21%	12%	Sekretariat DPRD
				6	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah lokasi kunjungan kerja anggota DPRD yang terfasilitasi	instansi	225	12.393.820	0	-	45	6.196.965	21	419.030	24	4.153.415	45	4.572.445	100%	74%	45	4.572.445	20%	37%	Sekretariat DPRD
				7	Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah informasi kegiatan DPRD yang disusun dan dipublikasikan	acara	250	3.914.445	0	-	50	1.651.819	27	529.487	23	1.113.792	50	1.643.278	100%	99%	50	1.643.278	20%	42%	Sekretariat DPRD
2	6				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																					
2	206	20601	15		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Prosentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	89	349.539	0	-	82	269.148	0	47.319	82	159.506	82	206.826	100%	77%	82	206.826	92%	59%	
				1	Kegiatan Pelayanan Keliling	Jumlah Pelayanan Keliling	kali	50	167.949	0	-	50	111.508	4	15.064	6	38.287	10	53.351	20%	48%	10	53.351	20%	32%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan	Prosentase Penerbitan KK dan KTP	%	99	181.590	0	-	96	157.640	4	32.255	93	121.220	93	153.475	97%	97%	93	153.475	94%	85%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	206	20601	16		Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Presentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	%	92	1.647.273	0	-	92	1.406.410	0	464.417	92	867.886	92	1.332.304	100%	95%	92	1.332.304	100%	81%	
				1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan AL,AM dan AK	%	98	685.254	0	-	94	444.390	6	208.405	94	232.561	100	440.966	106%	99%	100	440.966	102%	64%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen	Lembar	8000	130.488	0	-	4000	130.488	300	17.532	500	111.605	800	129.137	20%	99%	800	129.137	10%	99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				3	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	Prosentase Penerbitan KTP dan Akte Kelahiran	%	209950	831.532	0	-	209800	831.532	15000	238.481	96	523.720	15096	762.201	7%	92%	15096	762.201	7%	92%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	206	20601	17		Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	Persentase Uptime Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	99	510.943	0	-	99	344.664	0	91.890	99	238.136	99	330.026	100%	96%	99	330.026	100%	65%	
				1	Kegiatan Implementasi SLAK dan Penyebaran Informasi	Jumlah iklan adminduk dan capil	kali	85	390.399	0	-	26	263.361	5	69.408	9	186.941	14	256.350	54%	97%	14	256.350	16%	66%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

				2	Kegiatan Peningkatan Inovasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen	doc	8	120.544	0	-	2	81.303	1	22.481	2	51.195	3	73.676	150 %	91%	3	73.676	38%	61%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	3				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																					
4	4	4030	1	5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang Maturitas SPInya Level 3	%	42	11.210.548	0	-	25	1.443.283	0	465.509	25	876.146	25	1.341.656	100 %	93%	25	1.341.656	60%	12%	
				1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan	Obrik	18	2.777.048	0	-	18	269.253	6	60.061	18	204.527	24	264.588	133 %	98%	24	264.588	133 %	10%	Inspektoral
				2	Kegiatan Evaluasi SPIP Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dievaluasi SPIP-nya	OPD	34	269.830	0	-	34	16.600	0	-	34	15.335	34	15.335	100 %	92%	34	15.335	100 %	6%	Inspektoral
				3	Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil reviu	doc	30	633.500	0	-	6	91.400	3	58.035	8	32.964	11	90.999	183 %	100 %	11	90.999	37%	14%	Inspektoral
				4	Kegiatan Pembinaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan	orang	750	226.150	0	-	150	-	0	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Inspektoral
				6	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan	doc	25	1.946.270	0	-	5	293.625	1	68.103	5	184.585	6	252.688	120 %	86%	6	252.688	24%	13%	Inspektoral
				7	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Laporan	doc	1	1.631.150	0	-	1	86.725	0	-	1	74.236	1	74.236	100 %	86%	1	74.236	100 %	5%	Inspektoral
				8	Kegiatan Optimalisasi Saber Pungli	Jumlah Laporan	doc	1	3.726.600	0	-	1	685.680	0	279.310	1	364.500	1	643.810	100 %	94%	1	643.810	100 %	17%	Inspektoral
4	4	4030	1	6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Aparatur Pengawas yang Bersertifikat	%	100	3.203.063	0	-	100	383.238	100	184.819	100	188.163	100	372.982	100 %	97%	100	372.982	100 %	12%	
				1	Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawas yang bersertifikat tehnik	orang	25	3.203.063	0	-	25	383.238	25	184.819	25	188.163	25	372.982	100 %	97%	25	372.982	100 %	12%	Inspektoral
4	4	4030	1	9	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	%	100	138.150	0	-	100	6.000	0	-	100	5.996	100	5.996	100 %	100 %	100	5.996	100 %	4%	
				1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sisdur Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur	doc	2	138.150	0	-	2	6.000	2	-	2	5.996	4	5.996	200 %	100 %	4	5.996	200 %	4%	Inspektoral

				3	Kegiatan Cetak Masal dan Penyampaian SPPT	Jumlah penerbitan SPPT PBB dan DHKP	SPPT	5500	25.000	0	-	5500	14.150	0	3.300	5000	10.188	5000	13.488	91%	95%	5000	13.488	91%	54%	Badan Pendapatan Daerah
				4	Kegiatan Pemeliharaan Frame Reklame	Tersedianya frame yang bersih dan rapi	Titik	32	75.000	0	-	32	-	0	-	0	-	-	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
				5	Kegiatan Monitoring Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan BPHTB	Jumlah pihak yang terkait (BPN dan notaris)	orang	50	6.200	0	-	50	3.750	10	-	0	35.000	10	35.000	20%	933%	10	35.000	20%	565%	Badan Pendapatan Daerah
				6	Kegiatan Evaluasi Penyampaian SPPT PBB	Petugas penyampaian SPPT kelurahan	orang	300	25.000	0	-	300	-	0	-	0	-	-	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
4	405	40502	20		Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	%	100	1.022.705	0	-	100	457.164	0	326.628	12	127.101	12	453.729	12%	99%	12	453.729	12%	44%	
				1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Berprestasi dan Gebyar Undian PBB	Pemberian penghargaan wajib pajak berprestasi dan gebyar undian PBB	WP	207	300.000	0	-	207	60.000	0	-	192	58.740	192	58.740	93%	98%	192	58.740	93%	20%	Badan Pendapatan Daerah
				2	Kegiatan Verifikasi Data Piutang Pajak	Penyelesaian piutang pajak	WP	22	1.000	0	-	22	-	0	-	0	-	-	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
				3	Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan kesadaran petugas pungut PBB	petugas pungut	150	166.980	0	-	150	-	0	-	0	-	-	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
				4	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Pemberian souvenir kepada wajib pajak PBB	sovenir	5500	497.475	0	-	5500	321.129	5000	321.128	0	-	5000	321.128	91%	100%	5000	321.128	91%	65%	Badan Pendapatan Daerah
				5	Kegiatan Rekonsiliasi dan Pembinaan Petugas Pungut	Peningkatan capaian penerimaan pajak daerah	petugas pungut	326	56.250	0	-	326	76.035	0	5.500	279	68.361	279	73.861	86%	97%	279	73.861	86%	131%	Badan Pendapatan Daerah
				6	Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Peningkatan kepatuhan WP terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah	orang	10	1.000	0	-	2	-	0	-	0	-	-	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
4	5				Unsur Staf																					
4	401	4010101	15		Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengadaan Barang/jasa sesuai Regulasi	%	100	5.278.448	0	-	100	564.832	0,93	56.490	100	436.936	100	493.425	100%	87%	100	493.425	100%	9%	
				1	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah personil PD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses	orang	250	1.349.365	0	-	170	118.958	170	56.490	0	57.036	170	113.526	100%	95%	170	113.526	68%	8%	Bagian Administrasi Pembangunan

			5	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngegong	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	150.000	0	-	4	436.350	0	-	4	424.267	4	424.267	100%	97%	4	424.267	100%	282,84%	Kecamatan Manguharjo
			6	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangongangan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250.000	0	-	4	511.350	0	-	4	490.216	4	490.216	100%	96%	4	490.216	100%	196,09%	Kecamatan Manguharjo
			7	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patihan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250.000	0	-	4	511.350	0	-	4	498.428	4	498.428	100%	97%	4	498.428	100%	199,37%	Kecamatan Manguharjo
			8	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sogaten	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250.000	0	-	4	611.350	0	-	4	592.901	4	592.901	100%	97%	4	592.901	100%	237,16%	Kecamatan Manguharjo
			9	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Winongo	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250000	0	0	4	511.350	0	-	4	494.391	4	494.391	100%	97%	4	494.391	100%	197,76%	Kecamatan Manguharjo
			10	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kartoharjo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	611.350	0	-	2	582.266	2	582.266	100%	95%	2	582.266	100%	275,69%	Kecamatan Kartoharjo
			11	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klegen	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	611.350	0	-	2	563.803	2	563.803	100%	92%	2	563.803	100%	266,95%	Kecamatan Kartoharjo
			12	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukosari	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	476.150	0	-	2	459.039	2	459.039	100%	96%	2	459.039	100%	217,35%	Kecamatan Kartoharjo
			13	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	483.705	0	-	2	480.464	2	480.464	100%	99%	2	480.464	100%	227,49%	Kecamatan Kartoharjo

			3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngegong	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	30	200.000	0	-	30	205.000	0	-	30	201.128	30	201.128	100%	98%	30	201.128	100%	100,56%	Kecamatan Manguharjo
			3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangongangan	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	30	100.000	0	-	30	130.000	0	-	30	125.683	30	125.683	100%	97%	30	125.683	100%	125,68%	Kecamatan Manguharjo
			3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patihan	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	35	100.000	0	-	35	130.000	0	-	35	122.436	35	122.436	100%	94%	35	122.436	100%	122,44%	Kecamatan Manguharjo
			3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sogaten	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	30	100.000	0	-	30	30.000	0	-	30	-	30	-	100%	0%	30	-	100%	0,00%	Kecamatan Manguharjo
			3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Madiun Lor	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	35	200.000	0	-	35	130.450	0	-	35	124.850	35	124.850	100%	96%	35	124.850	100%	62,43%	Kecamatan Manguharjo
			3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	40	100.000	0	-	40	130.000	0	-	40	118.540	40	118.540	100%	91%	40	118.540	100%	118,54%	Kecamatan Manguharjo
			3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	Prosentase masyarakat yang partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	30.000	0	-	10	30.000	10	30.000	100%	100%	10	30.000	100%	21,31%	Kecamatan Kartoharjo
			3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klegen	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	30.000	0	-	10	30.000	10	30.000	100%	100%	10	30.000	100%	21,31%	Kecamatan Kartoharjo
			3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukosari	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	165.200	0	-	9	129.802	9	129.802	90%	79%	9	129.802	90%	92,19%	Kecamatan Kartoharjo
			4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase masyarakat yang berpartisipasi	%	10	140.800	0	-	10	157.645	0	-	10	157.645	10	157.645	100%	100%	10	157.645	100%	111,96%	Kecamatan Kartoharjo

				5	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manisrejo	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	%	10	252.941	0	-	10	108.491	0	-	10	103.841	10	103.841	100%	96%	10	103.841	100%	41,05%	Kecamatan Taman
				5	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	%	10	252.941	0	-	10	107.964	0	-	10	107.654	10	107.654	100%	100%	10	107.654	100%	42,56%	Kecamatan Taman
				5	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojorejo	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	%	10	252.941	0	-	10	108.541	0	-	10	102.087	10	102.087	100%	94%	10	102.087	100%	40,36%	Kecamatan Taman
				5	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandean	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	%	10	252.941	0	-	10	107.942	0	-	10	101.192	10	101.192	100%	94%	10	101.192	100%	40,01%	Kecamatan Taman
				5	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjarejo	Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	%	10	252.941	0	-	10	107.960	0	-	10	105.396	10	105.396	100%	98%	10	105.396	100%	41,67%	Kecamatan Taman
4	409	40903	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	%	100	719.636	0	-	100	692.742	100	647.617	0	31.311	100	678.928	100%	98%	100	678.928	100%	94%	
				1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kecamatan manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	%	100	212.922	0	-	100	212.922	100	206.199	0	-	100	206.199	100%	97%	100	206.199	100%	96,84%	Kecamatan Manguharjo
				1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang Kecamatan Kartoharjo yang diprioritaskan dalam Musrenbang Kota	%	100	300.000	0	-	100	279.306	100	273.741	0	-	100	273.741	100%	98%	100	273.741	100%	91,25%	Kecamatan Kartoharjo
				1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang kecamatan taman yang diprioritaskan	%	10	206.715	0	-	10	200.515	10	167.676	0	31.311	10	198.988	100%	99%	10	198.988	100%	96,26%	Kecamatan Taman

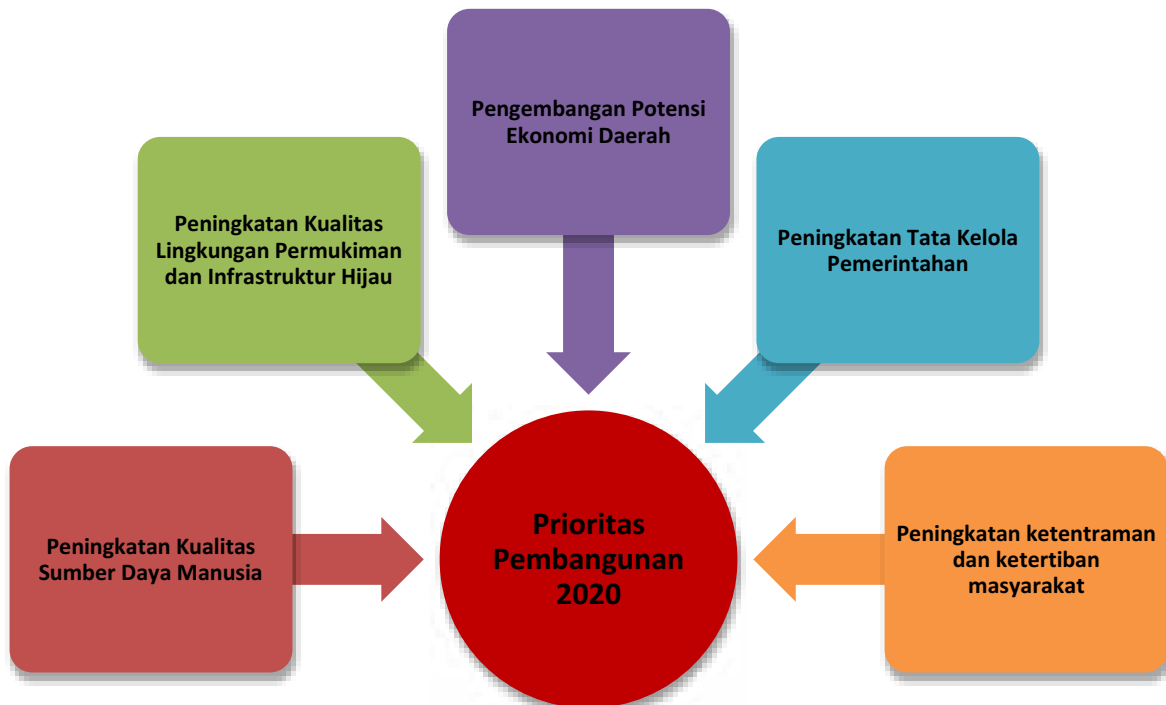
				3	Kegiatan Pemantapan Ketahanan dan Kebijakan Strategis	Jumlah peserta rakor	orang	776	403.764	0	-	776	671.126	64	166.156	86	442.134	150	608.290	19%	91%	150	608.290	19%	150,65%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	408	40801	17		Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	Persentase parpol dan orkemas yang memahami regulasi	%	100	344.825	0	-	100	209.320	0	54.459	100	123.838	100	178.297	100%	85%	100	178.297	100%	52%	
				1	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	Jumlah peserta pembinaan	orang	600	231.840	0	-	600	129.861	0	-	475	101.787	475	101.787	79%	78%	475	101.787	79%	43,90%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				2	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	Jumlah peserta pengelolaan keuangan Parpol	orang	33	25.000	0	-	33	25.000	0	-	33	22.051	33	22.051	100%	88%	33	22.051	100%	88,20%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				3	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Orkesmas	Jumlah peserta	orang	300	87.985	0	-	300	54.459	100	54.459	0	-	100	54.459	33%	100%	100	54.459	33%	61,90%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	5				Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																					
1	105	10501	15		Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	persentase perda yang ditegakan	%	100	1.810.000	-	-	100	296.770	100	121.525	100	148.499	100	270.024	100%	91%	100	270.024	100%	15%	
				1	Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal	100%	500	670.000	0	0	100	114.103	100	35.186	100	69.237	100	104.422	100%	92%	100	104.422	20%	16%	Satuan Polisi Pamong Praja
				2	Kegiatan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase Peserta yang paham terhadap Perda dan Perwal	100%	500	1.140.000	0	0	100	182.667	41	86.339	100	79.263	141	165.601	141%	91%	141	165.601	28%	15%	Satuan Polisi Pamong Praja
1	105	10501	16		Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	96	10.845.840	-	-	96	1.823.792	100	476.126	100	974.753	100	1.450.879	104%	80%	100	1.450.879	104%	13%	
				1	Kegiatan Peningkatan SDA dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Prosentase Aparatur Satpol PP dan Damkar yang mengikuti kegiatan	80%	420	2.750.000	0	-	80	117.100	50	67.556	80	49.456	80	117.012	100%	100%	80	117.012	19%	4%	Satuan Polisi Pamong Praja
				2	Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Prosentase kegiatan pengamanan	100%	500	1.582.055	0	-	100	390.327	100	36.565	100	306.338	200	342.903	200%	88%	200	342.903	40%	22%	Satuan Polisi Pamong Praja

				3	Kegiatan Penertiban dan Evaluasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	96%	483	6.513.785	0	-	96	1.316.365	55	372.006	100	618.959	155	990.965	161%	75%	155	990.965	32%	15%	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	105	10501	17		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	org	1,3	3.725.100	0	-	1,3	302.785	1,3	20.431	1,3	267.342	1,3	287.773	100%	95%	1,3	287.773	100%	8%		
				1	Kegiatan Pemberdayaan dan Evaluasi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Masyarakat pesilat yang berpartisipasi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	90%	470	2.975.100	0	-	60	31.730	0	15.231	40	13.791	40	29.022	67%	91%	40	29.022	9%	1%	Satuan Polisi Pamong Praja	
				2	Kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Prosentase Personil Satlinmas yang mengikuti kegiatan	75%	385	750.000	0	-	75	271.055	4	5.200	68	253.551	72	258.751	96%	95%	72	258.751	19%	35%	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	105	10501	18		Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat wktu tanggap	%	100	7.234.198	0	-	100	1.092.380	100	447.387	100	745.785	100	1.193.172	100%	109%	100	1.193.172	100%	16%		
				1	Kegiatan Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Prosentase Anggota Damkar yang bersertifikat	100%	420	5.186.585	0	-	80	815.910	94	299.150	94	491.075	94	790.225	118%	97%	94	790.225	22%	15%	Satuan Polisi Pamong Praja	
				2	Kegiatan Operasi dan Evaluasi Penanggulangan Pemadam Kebakaran	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran	100%	500	2.047.613	0	-	100	276.470	60	148.237	100	254.710	100	402.947	100%	146%	100	402.947	20%	20%	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	4				Penanggulangan Bencana Daerah																						
1	105	10502	19		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase penganggulan bencana	%	500	7.810.000	0	-	100	1.555.252	235	650.263	505	835.194	740	1.485.457	740%	96%	740	1.485.457	148%	19%		
						Persentase tingkat pemenuhan atau kecakupan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	%	100											#DIV/0!	#DIV/0!	0%	-	0%	#DIV/0!			
				1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana	shift	3650	4.110.000	0	-	730	909.260	364	384.589	368	487.017	732	871.606	100%	96%	732	871.606	20%	21%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				2	Kegiatan Identifikasi	Jumlah Dokumen	doc	3	100.000	0	-	1	10.480	0	6.878	1	2.789	1	9.667	100%	92%	1	9.667	33%	10%	Badan Penanggu	

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan tahun 2020, ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Identifikasi permasalahan meangacu pada prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2020. Prioritas pembangunan tahun 2020 dapat dilihat dalam diagram berikut:



Gambar 2.26
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Madiun tahun 2020

Sesuai dengan lima prioritas pembangunan diatas, identifikasi permasalahan pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.47
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2020

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Permasalahan
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas mutu pendidikan Indeks pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerataan kualitas sarana dan prasarana sekolah sesuai SPM perlu ditingkatkan kualifikasi tenaga pendidik perlu ditingkatkan distribusi tenaga pengajar dan mutu pelayanan pendidikan yang perlu ditingkatkan
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Kualitas layanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapatnya angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Cakupan jaminan kesehatan masyarakat kurang rendah Cakupan kesehatan rujukan perlu ditingkatkan Perlu ditingkatkannya Pertolongan tenaga kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan ekonomi • Kualitas SDM Tenaga Kerja • Rasio Ketergantungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kemiskinan mengalami peningkatan akibat pandemic Covid-19 • Penanganan PMKS perlu dioptimalkan • Kualitas SDM tenaga kerja perlu ditingkatkan • Penyediaan lapangan pekerjaan perlu peningkatan jaringan ketenagakerjaan
2.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas untuk masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik perlu ditingkatkan dan dipelihara • Drainase perkotaan perlu ditingkatkan • Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat perlu pemeliharaan kualitas • Sarana sanitasi masyarakat perlu ditingkatkan • Sarana dan prasarana persampahan perlu di tingkatkan
		<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas Bencana alam • Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Pengelolaan Sumber Daya alam yang berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Luasan RTH perlu ditingkatkan • Pemanfaatan pengelolaan air tanah perlu ditingkatkan • Mitigasi bencana perlu ditingkatkan
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan produk unggulan • Iklim investasi • Kinerja BUMD • Daya Saing UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Iklim investasi / usaha perlu peningkatan daya saing • Belum optimalnya kinerja BUMD • Belum optimalnya daya saing produk dan akses pasar bagi produk UMKM • Masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana usaha untuk UMKM
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi Birokrasi • Pelayanan Publik yang Murah, Tepat, Cepat dan Akurat. • Kualitas SDM (aparatur) dalam pelayanan public • Partisipasi public dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi Birokrasi belum optimal sehingga kinerja pemerintah belum dapat terukur dengan jelas • Perijinan satu pintu belum optimal • Kualitas SDM Aparatur masih perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik. • Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
5.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kerukunan dan toleransi antar umat beragama • Pembinaan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban • Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih perlu ditingkatkannya peran FKUB dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat - Peran tokoh masyarakat dan ulama masih perlu ditingkatkan - Masih terbatasnya keterlibatan dan pelestarian budaya adat masyarakat

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, (2021)

Capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2020 dapat dilihat dari capaian indikator kerjanya baik dari sisi target terhadap realisasinya tahun 2020 maupun perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.48
Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Kota Madiun 2020

No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	2020		
				Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	-	80,51	80,91	100,50
2.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	-	87,85	80,65	91,80
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB	-	6,02	-3,39	-56,31
		PDRB Perkapita	-	79,78	79,70	99,90
		Penurunan Angka Kemiskinan	-	4,46	4,98	89,56
4.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	-	67	65,5	97,76
5.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat demi Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Ketentraman	-	75	77	102,67

Sumber Data: PD dan BPS

Realisasi capaian target indikator kinerja prioritas pembangunan sebagian besar memiliki nilai diatas 95 persen. Peningkatan kualitas sumber daya alam yang diindikasikan oleh IPM telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian lebih dari 100 persen. Prioritas pembangunan lain yang capaiannya melebihi 100 persen adalah Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat demi Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan.

Prioritas pembangunan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan mencapai target sebesar 97,76 persen, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau mencapai 91,80 persen. Sedangkan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan indikator pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sehingga

capaian realisasinya minus 56,31 persen. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19.

3) Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Permasalahan pembangunan daerah di Kota Madiun tidak terlepas dari kondisi nasional, provinsi dan lingkungan eksternal lainnya. Hasil identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel. 2.49
Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
1	Adanya Wabah Corona Virus	Adanya Wabah Corona Virus	Adanya Wabah Corona Virus
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia termasuk permasalahan gizi buruk	Peningkatan Kualitas Pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana	Regionalisasi dari ekonomi global dengan peningkatan keterkaitan antara perdagangan antar regional dan keuangan
3	Mengantisipasi Perekonomian yang bergerak dengan sangat dinamis terkait dengan kebijakan moneter AS maupun fluktuasi harga	Penigkatan Kualitas Kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidk menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih	Meningkatnya ekonomi regional akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja
4	Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan stake holder khususnya dunia usaha	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Ketenagakerjaan serta " <i>Link and Match</i> " antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja	Negara ASEAN diharapkan akan semakin meluas dan mendalam
5	Penciptaan nilai tambah sektor pertanian, manufaktur dan jasa	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh	Isu-isu HAM dan lingkungan hidup akan meningkat dan akan semakin menarik
6	Peningkatan sektor pariwisata untuk meningkatkan kontribusi penyumbang devisa	Penguatan konektifitas darat, laut dan udara untuk mendukun kawasan ekonomi potensial	
7	Perbaiki tenaga kerja yang tidak hanya dengan pendidikan vokasi tapi juga standar kerja dan kompetensi tenaga kerja	Pengembangan dan Pengelolaan Telekomunikasi dan Informatika	

8	Peningkatan ketahanan pangan dan energi khususnya energi baru dan terbarukan	Peningkatan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	
9	Kelastarian lingkungan daya sumber daya air	Peningkatan nilai tambah agroindustri, agromaritim dan daya saing koperasi dan UMKM	
10		Optimalisasi Kepariwisata	
11		Peningkatan Produktifitas Tenaga	
12		Industrialisasi berbasis ekonomi digital	
13		Peningkatan ketahanan pangan	
14		Peningkatan ketahanan energi	
15		Peningkatan ketentraman dan ketertiban terhadap isu potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba	
16		Kesuksesan Pemiou serentak	

Pada tahun 2020 dimana di seluruh dunia mengalami pandemi covid-19, yang sangat mempengaruhi pada seluruh sektor kehidupan tidak terkecuali sektor ekonomi. Dengan adanya kontraksi di sektor ekonomi, maka sangat mempengaruhi di sisi pendapatan pemerintahan daerah, yang akhirnya berpengaruh pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pembangunan. Dengan adanya pandemi Covid 19 pemerintah pusat membuat kebijakan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran, dimana 35 % dari kemampuan APBD direalokasi dan difokuskan untuk program dan kegiatan dalam penanganan Covid 19, dimana hasil realokasi tersebut di tempatkan di Belanja Tidak Terduga (BTT), dengan alasan fleksibilitas penggunaan anggaran untuk penanggulangan covid 19, yang tidak bisa direncanakan sebelumnya.

Dengan adanya refocusing dan realokasi tentunya banyak kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran yang optimal sehingga proses pencapaian target kinerja pasti akan sangat terganggu. Di Tahun 2021 perkiraan secara global maupun nasional dampak dari pandemi Covid 19 masih akan dirasakan, sehingga proyeksi pendapatan baik Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tidak bisa diharapkan melampaui atau bahkan sama dengan tahun sebelumnya.

Sehingga rencana belanja di Tahun 2021 juga tidak akan melampaui atau sama dengan tahun sebelumnya. Akhirnya akan berdampak pada belanja program dan kegiatan yang tidak akan bisa maksimal dan akan bermuara pada pencapaian target kinerja yang tidak maksimal juga.

Tabel 2.50
Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
1.	Pendidikan	<p>DINAS PENDIDIKAN</p> <p>a. Terdapat beberapa kegiatan perlombaan dengan anggaran sampai tingkat Nasional, namun dikarenakan kejuaraan sampai tingkat Provinsi maka anggaran tidak dapat diserap.</p> <p>b. Terdapat perbedaan penganggaran honorarium narasumber.</p> <p>c. Kegiatan Lomba dianggarkan sampai dengan lomba ke tingkat Nasional namun kejuaraan hanya menang sampai tingkat propinsi sehingga anggaran untuk tingkat Nasional tidak terserap.</p> <p>d. Pelaksanaan ujian Paket A, B dan C yang semula dianggarkan dua tahap namun pelaksanaannya hanya sampai dengan tahap I karena peserta UNBK sudah lulus pada tahap I.</p>	<p>DINAS PENDIDIKAN</p> <p>Kegiatan tahun yang akan datang dilaksanakan sesuai DPA yang ada dan akan mengadakan perubahan di PAK apabila ada perubahan pelaksanaan kegiatan</p>
2.	Kesehatan	<p>DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</p> <p>a. Adanya Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun sebesar Rp. 26.132.356.000.00 dan terserap sebesar Rp. 18.518.516.567,22. Pagu anggaran tersebut digunakan untuk membiayai premi asuransi peserta PBID sebanyak 20.188 orang dan perkiraan jumlah penduduk yang belum terdaftar peserta BPJS sebanyak 73.300 orang. Dalam pelaksanaannya masyarakat ber KTP Kota Madiun dan masyarakat yang sudah memiliki kartu BPJS/KIS tertunggak tidak bisa secara otomatis menjadi anggota BPJS yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Madiun.</p> <p>b. Selain itu adanya potongan pembayaran langsung oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang</p>	<p>DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</p> <p>a. Rapat koordinasi baik Forum Kepesertaan, Tim Koordinasi Tingkat Kota serta BPJS Kesehatan.</p>

		<p>disetorkan kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp. 3.484.493.683,00 sehingga mengurangi serapan dari pagu yang sudah direncanakan.</p> <p>RSUD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil survey akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dari target Paripurna, tercapai Madya 2. Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit belum optimal 3. Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kecukupan Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum dan Tenaga Fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedik, Fisikawan Medik, Radiografer, Nutrisisionis, Dietisien Tenaga Terapi Okupasi, Tenaga Teknik Kefarmasian, Tenaga Teknis Transfusi Darah, Perawat Terampil bersertifikat keahlian khusus (Untuk kebutuhan Pelayanan Anaestesi, Hemodialisis, dan ICU) dan Tenaga Administrasi di ruangan 4. Implementasi SIMRS belum optimal 5. Jaminan Kesehatan Nasional <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019 Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dimana rumah sakit harus melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya agar tidak terjadi “defisit” tanpa meninggalkan kualitas layanan atau memberikan layanan yang sub-standar b. Setiap tahun terdapat hutang klaim pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan RSUD Kota Madiun terhadap pasien peserta BPJS, sehingga kemungkinan hutang BPJS juga akan semakin besar dan dikhawatirkan akan mempengaruhi pelayanan di RSUD Kota Madiun 	<p>RSUD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1 melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit baik penambahan sarana prasarana baru maupun untuk mengganti sarana prasarana yang sudah rusak atau perlu peremajaan; b. Pemenuhan kekurangan Sumber Daya Manusia, baik jumlah maupun jenis tenaganya melalui beberapa cara yaitu melaksanakan reposisi dan/atau rekrutmen pegawai non PNS BLUD, mengusulkan rekrutmen PNS, dan menerima mutasi pegawai dari luar RSUD; c. Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit untuk memastikan tersedianya sarana prasarana kesehatan yang aman, bermutu dan layak pakai serta efisien sehingga meminimalkan resiko yang terkait penggunaan sarana prasarana yang ada; d. Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap Standar Prosedur Operasional yang telah ditetapkan melalui kegiatan <i>assessment</i> internal dan kegiatan monitoring dan evaluasi; e. Membentuk Unit SIM RS serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIM RS untuk mendukung pelayanan. 2. Komitmen seluruh SDM mulai dari pimpinan sampai dengan seluruh staf dan unsur pendukung terhadap implementasi SNARS Edisi 1.1 sehingga bisa memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien/patient safety dan meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan; 3. Mengoptimalkan budaya organisasi melalui kelompok
--	--	--	---

			<p>budaya kerja untuk meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan publik;</p> <p>4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan ;</p> <p>5. Menyelenggarakan Forum Pertemuan dan Focus Group Discussion (FGD) untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai penerima layanan untuk memberikan saran, pendapat dan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan sehingga berperan aktif dalam mengawasi kinerja pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang telah ditetapkan;</p> <p>6. Melakukan evaluasi penilaian kinerja secara terus menerus melalui kegiatan rapat evaluasi, pertemuan dan audit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kota Madiun baik antar bidang maupun lintas sektor dengan <i>stake holder</i> serta Dewan Pengawas.</p>
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</p> <p>a. Kegiatan Pengadaan Pompa Banjir tahun anggaran 2019 tidak dapat terserap karena barang yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan barang import dari Amerika dan mengingat barang tersebut datangnya bulan maret tahun 2020 maka pengadaannya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena melewati tahun anggaran dan melebihi dari 50 hari kalender setelah melewati tahun anggaran. Apabila dilanjutkan maka akan menyalahi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah</p>	<p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</p> <p>a. Pengadaan pompa banjir diusulkan di tahun anggaran selanjutnya</p>
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<p>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>a. Terdapat permasalahan gagal tender pada RTH Cokrobasonto (Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota) dikarenakan rekanan/penyedia tidak memenuhi kualifikasi serta rencananya akan dilakukan retender waktu tidak mencukupi</p> <p>b. RTH saat ini masih terasa kurang</p>	<p>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>a. RTH cokrobasonto tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2020</p> <p>b. kedepan akan dilakukan pembangunan secara bertahap</p> <p>c. warga melakukan perbaikan sendiri serta adanya penolakan dari penerima bantuan yang menolak program tersebut</p>

		<p>c. Pada tahun 2019 dari 430 unit rumah yang tidak layak masih terdapat 20 unit rumah yang tidak menerima bantuan RTLH disebabkan beberapa hal antara lain : target sasaran penerima bantuan yang tidak masuk pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017</p>	
5.	<p>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat data sampai dengan bulan Desember 2019 diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran Reklame (baik Rusak, melanggar dan ijin sudah habis) sebanyak 2.520 buah. b. Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan jumlah pelanggaran 516 kasus. c. Anak jalanan sejumlah 277 orang ; dan d. Anak Bolos Sekolah sejumlah 114 pelajar. 2. Adanya perubahan iklim dengan kemarau panjang yang mengakibatkan intensitas kebakaran tinggi dengan jumlah kasus kebakaran sebanyak 86 kasus kejadian kebakaran. 3. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dimana semenjak urusan Pemadam Kebakaran bukan lagi menjadi tugas dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang beralih ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdampak berkurangnya personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun. <p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua</p>	<p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seiring kemajuan teknologi yang rentan pelanggaran maka langkah-langkah yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan adanya kebijakan Bapak Walikota Madiun yang tidak mengizinkan pemasangan reklame secara fisik karena akan diganti dengan videotron, maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan patroli kawasan pemasangan reklame di wilayah Kota Madiun. Sehingga pelanggaran reklame dapat diatasi dan diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penertiban. b. Sehubungan dengan implementasi Panca Karya Program Kegiatan Bapak Walikota Madiun, utamanya karya membangun. Banyak kebijakan yang dikeluarkan Bapak Walikota Madiun, diantaranya pembangunan taman dan infrastuktur Kota Madiun. Sehingga perlu penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk ditertibkan dan berjualan di tempat yang telah disediakan. Seperti yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan jajaran samping untuk penertiban pra yustisi pelanggaran Perda dan Perwal. c. Untuk mengatasi pelanggaran anak jalanan Satuan Polisi Pamong Praja mengoptimalkan patroli wilayah Kota Madiun utamanya di perempatan traficligh di wilayah Kota Madiun. Sehingga setiap penertiban anak jalanan

		<p>Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang rincian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Disebutkan bahwa urusan Kebakaran beralih menjadi tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga berdampak pada berkurangnya personil BPBD sampai saat ini.</p>	<p>diberikan pembinaan dan pengarahan untuk tidak mengamen di lampu merah dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</p> <p>d. Dengan mengoptimalkan patroli dan jejaring sosial untuk mendapatkan informasi pelanggaran anak sekolah yang bolos sekolah, Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan operasi penertiban anak sekolah yang bolos sekolah di jam belajar. Dan dilakukan pembinaan yang selanjutnya diserahkan kepada pihak sekolahan melalui Dinas Pendidikan dan memanggil orang tua pelajar.</p> <p>2. Dengan banyaknya kasus kebakaran di Kota Madiun maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemadaman kejadian kebakaran sesuai SOP dan melakukan pencegahan dan pelatihan pemadaman kebakaran.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah mengoptimalkan petugas yang ada dan memanfaatkan Relawan sejumlah 30 (tiga puluh) orang yang direkrut dari warga masyarakat peduli kebencanaan dan kemanusiaan guna melaksanakan Piket Siaga Bencana di Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.</p> <p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p>Dengan mengoptimalkan petugas yang ada dan memanfaatkan relawan sejumlah 30 (tiga puluh) orang yang direkrut dari warga masyarakat peduli kebencanaan dan kemanusiaan untuk piket siaga bencana di posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p>
6.	Sosial	<p>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>a. Belum optimalnya sinergi Komda PPKS, masih terdapat beberapa celah penghambat dalam penanganan PPKS seperti mekanisme rujukan ke RSJ Spesialis.</p> <p>b. Terbatasnya daya tampung UPT Panti Sosial Provinsi, sehingga menyulitkan daerah untuk menyalurkan Orang Terlantar, dimana</p>	<p>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>a. Meningkatkan sinergi Komda PPKS sehingga masing-masing berperan maksimal dalam penanganan PPKS.</p> <p>b. Koordinasi dengan provinsi untuk menambah daya tampung panti.</p> <p>c. Pemberian bantuan sosial mengikuti syarat dan ketentuan masing-masing bantuan, terus diupayakan pemutakhiran data</p>

		<p>kewenangan panti ada di provinsi bukan di kab/kota.</p> <p>c. Masih ada fakir miskin yang belum mendapat bantuan. Kecepatan update data daerah belum dapat di akomodir oleh Pusat, sehingga secara administrasi fakir miskin sudah tercatat dalam DTKS dan layak mendapat bantuan tetapi belum mendapatkan bantuannya karena penetapan penerima bantuan dari Pusat belum dapat seiring dengan proses finalisasi dari daerah.</p>	<p>agar masyarakat yang terdata dalam DTKS tepat sasaran</p>
7.	Ketenaga kerjaan	<p>DINAS TENAGA KERJA</p> <p>Masih banyaknya Jumlah pengangguran terbuka sebanyak 3.776 orang yang didominasi oleh mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan sejumlah 2.735 orang</p>	<p>DINAS TENAGA KERJA</p> <p>Dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan dan kerjasama dengan perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan diharapkan dapat mengurangi pengangguran terbuka di Kota Madiun</p>
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	<p>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pangarusutamaan Gender (PUG)</p>	<p>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>Pengusulkan Peraturan Daerah dan Atau Peraturan Walikota tentang Pangarusutamaan Gender (PUG) serta menyusun Profil gender kerjasama dengan pihak ketiga</p>
9.	Pangan	<p>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</p> <p>a. Semakin terbatasnya lahan untuk pertanian, peternakan dan perikanan sehingga produksi pangan domestik semakin menurun dan hanya mencukupi sepertiga dari konsumsi pangan utama penduduk.</p> <p>b. Masih perlunya ditingkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang dan aman melalui kegiatan sosialisasi B2SA, lomba cipta menu, promosi ketahanan pangan, serta jambore ketahanan pangan dan pemilihan duta keamanan pangan sekolah di tahun 2020.</p> <p>c. Belum termanfaatnya produk hasil pekarangan sebagai sumber pendapatan keluarga.</p>	<p>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</p> <p>a. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan dari sisi akses dan distribusi pangan melalui kegiatan koordinasi dewan ketahanan pangan, survey harga pangan, serta dari sisi produksi pangan rumah tangga yaitu kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) dan karang kitri pada Tahun 2020.</p> <p>b. Selain itu perlu dilakukan pemantauan konsumsi pangan masyarakat melalui kegiatan penyusunan neraca bahan makanan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan survey pola pangan harapan pada Tahun 2020.</p> <p>c. sehingga perlu dikembangkan pemasaran produk olahan hasil pekarangan melalui kegiatan pameran yang diakomodasi dari Kegiatan Promosi Ketahanan Pangan pada Tahun 2020.</p>
10.	Pertanahan	<p>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>a. Dengan Pelaksanaan Program penataan, penguasaan,</p>	<p>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>a. Terkait permasalahan konflik pertanahan diperlukan</p>

		<p>pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta didukung oleh kegiatan baik yang bersifat layanan maupun sosialisasi masih terdapat berbagai macam permasalahan terutama konflik pertanahan dan rekomendasi ijin</p> <p>b. Mengingat Kota Madiun adalah Kota yang strategis dalam iklim investasi wilayah Jawa Timur Bagian Barat, terdapat permintaan rekomendasi ijin pertanahan cukup tinggi yakni 25 rekomendasi ijin (2 ijin lokasi dan 23 IPPT). Dengan pemberian 25 rekomendasi ijin tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun mengacu regulasi (Peraturan Walikota Madiun No.9 Tahun 2017 tentang Ijin lokasi dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah) agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010 – 2030</p>	<p>pendekatan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan konflik antara pemerintah Kota Madiun dan warganya serta dibutuhkan fasilitasi yang optimal agar tidak terjadi konflik pertanahan secara berkelanjutan. Pada tahun 2019 ini telah dilakukan penertiban dan pembongkaran bangunan illegal di 2 lokasi dan dengan total sekitar 54 KK hanya 28 KK yang bersedia pindah ke Rusunawa dan yang lainnya memilih untuk menempati hunian yang lain</p> <p>b. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan layanan tersebut demi memberikan kemudahan/kenyamanan bagi investor serta dapat mensejahterakan masyarakat Kota Madiun</p>
11.	Lingkungan Hidup	<p>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>a. Meningkatnya pencemaran baik tanah, air maupun udara yang diakibatkan adanya penambahan jumlah industri dan/atau usaha lainnya;</p> <p>b. Meningkatnya volume harian sampah sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi dimasyarakat (pendatang musiman), industri/ kegiatan usaha ,dll;</p> <p>c. Kurang optimalnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan sehingga terjadi pencemaran baik air dan udara;</p> <p>d. Adanya usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan wajib usaha;</p> <p>e. Adanya badan usaha/instansi yang belum memenuhi mengelola limbah B3 sesuai prosedur</p>	<p>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>a. Dengan makin banyaknya industri maka Dinas Lingkungan Hidup harus lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi terhadap industri-industri tersebut mulai dari awal pendirian sampai dengan pelaksanaan operasional kegiatan ;</p> <p>b. Sarana dan prasarana sudah banyak di penuhi dan meningkatnya volume sampah dapat ditekan karena banyak berdiri bank-bank sampah baik yang sudah berbadan hukum atau belum, dengan sarana prasarana yang tersedia kinerja meningkat, kerjasama yang baik dengan satgas kebersihan yang masuk ke TPS serta pekerja profesional di TPA yang memilah sampah. Sehingga sampah dari tahun ke tahun yang masuk ke TPA di Winongo dapat di tekan;</p> <p>c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan/pelestarian lingkungan hidup maka Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan sosialisasi dan pendekatan serta</p>

			<p>meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, Dinas terkait dan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan yang terbaik berkenaan dengan lingkungan hidup Kota Madiun agar semakin baik dan sehat</p> <p>d. Menghadapi permasalahan adanya badan usaha/instansi yang belum mempunyai dokumen lingkungan maka ditingkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta pendekatan kepada pelaku usaha agar segera memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>e. Adanya usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis tentang pengelolaan limbah B3. Tahun 2018 sudah banyak yang melakukan koordinasi pada DLH tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga akan lebih intensif melakukan pembinaan, sosialisasi dan pemantauan</p> <p>f. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas terkait</p>
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat akan kepemilikan kelengkapan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil) belum maksimal. 2. Seiring dengan kemajuan roda transportasi antar wilayah kab/kota dan antar provinsi, perpindahan penduduk seringkali tidak disertai dan diikuti dengan administrasi kependudukan yang benar, sehingga banyak perpindahan penduduk yang tidak terdeteksi. 3. Integrasi dan pemanfaatan data yang masih tergantung pada koneksi jaringan SIAK Daerah ke pusat dikarenakan semua data harus melalui server pusat, padahal kegiatan pelayanan di Daerah harus tetap dilaksanakan. 4. Data Base Kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan keakuratan dan validitasnya 	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi dan pelayanan keliling. <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi kepada masyarakat kota Madiun mengenai pentingnya kelengkapan dokumen Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil. Sosialisasi dilaksanakan secara rutin baik melalui media pertemuan langsung dengan mengundang RT, RW, wakil kelurahan, tokoh masyarakat, sosialisasi melalui media cetak dan sosialisasi melalui media elektronik b. Layanan Pecel Andok (Pelayanan Cepat Keliling Administrasi dan Dokumen Kependudukan). Adalah layanan Keliling Dinas Dukcapil melalui mobil keliling yang menjangkau semua kelurahan dan kecamatan se-Kota Madiun. Di layanan Pecel Andok masyarakat bisa mendapatkan layanan kependudukan di hari Sabtu/Minggu, baik pengurusan KK maupun perekaman biometrik untuk KTP-elektronik. Inovasi ini

			<p>utamanya ditujukan bagi penduduk Kota Madiun yang berdomisili di luar kota dan kembali ke Kota Madiun di akhir pekan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. mengadakan pendataan penduduk non permanen melalui RT/RW di masing-masing kelurahan. 3. secara rutin mengadakan koordinasi dengan pusat berkaitan dengan jaringan, aplikasi dan regulasi pelaksanaan pelayanan adminduk dan capil 4. setiap triwulan mengadakan validasi data dengan kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan keakuratan data kependudukan
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kegiatan yang tergantung dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat Provinsi yaitu Kegiatan Pramuka Saka Kencana (Pertida dan Pertinas), Lomba Tribina Tingkat Provinsi dan Lomba UPPKS Tingkat Provinsi. Pada Tahun 2019 di tingkat provinsi tidak melaksanakan kegiatan tersebut sehingga di Kota Madiun juga tidak melaksanakan. 2. Adanya honor kader dalam pemberian KIE di Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB) (DAK) tidak terserap karena sudah dimasukkan anggaran ke poin reward kader kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat. 3. Adanya petunjuk teknis pemakaian dana BOKB (DAK) yang tidak fleksibel sesuai dengan kebutuhan Kota Madiun yaitu menu kegiatan sudah ditentukan oleh BKKBN Pusat sehingga tidak dapat terserap dengan maksimal. 	<p>DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoodinasi dengan Provinsi terkait penyelenggaraan kegiatan sehingga kegiatan yang dianggarkan bisa selaras. 2. Mengusulkan petunjuk teknis yang lebih fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan Kota Madiun ke BKKBN Provinsi dan Pusat.
14.	Perhubungan	<p>DINAS PERHUBUNGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada kegiatan Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dilakukan realisasi anggrah dikarenakan kegiatan ini menyesuaikan Kementerian Perhubungan, pada tahun 2019 Kementerian Perhubungan tidak melakukan akreditasi pengujian kendaraan bermotor. 2. Anggaran belanja pegawai dalam hak Uang Kinerja 	<p>DINAS PERHUBUNGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran akreditasi akan dimunculkan kembali pada anggaran 2020. 2. Pada tahun 2020 jumlah pejabat struktural di Dinas Perhubungan Kota Madiun sudah tercukupi. 3. Untuk penilaian lomba Wahana Tata Nugraha akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.

		<p>Kegiatan tidal optimal dikarenakan banyaknya jabatan struktural yang kosong.</p> <p>3. Harga BBM non subsidi yang fluktuatif menyebabkan anggaran yang tersedia tidak dapat diserap dengan maksimal, akan tetapi hal ini telah sesuai dengan aturan karena jumlah liter BBM untuk kendaraan dinas telah diatur dan tidak dapat melebihi jumlah yang ditetapkan.</p> <p>4. Untuk penilaian lomba Wahana Tata Nugraha pada tahun 2019 terjadi perubahan sistem penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Semula direncanakan penilaian dilakukan sebanyak 2 kali di masing-masing daerah kemudian berubah menjadi terpusat di Jakarta dengan mengundang Pemerintah Daerah untuk melakukan paparan di Jakarta.</p>	
15.	Komunikasi dan Informatika	<p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Madiun; 2. Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax; 3. Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat; 4. Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat; 5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi program dan kegiatan pemerintah; 6. Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kota Madiun; 7. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE; 8. Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat; 	<p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengintegrasian sistem <i>e-government</i>; 2. Pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publikasi informasi ke masyarakat; 4. Menjalin kerjasama dan hubungan yang lebih harmonis dengan media massa dan instansi terkait; 5. Menyediakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi; 6. Menyediakan saluran informasi dan komunikasi yang memadai bagi masyarakat berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota; 7. Mengoptimalkan PPID; 8. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder masyarakat

		<p>9. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju <i>e-commerce</i>;</p> <p>10. Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya <i>Smart City</i>;</p> <p>11. Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika</p>	
16.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</p> <p>a. Kurangnya Sosialisasi tentang Fasilitas Permodalan bagi UMKM</p> <p>b. Masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah.</p> <p>c. Masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyediaan barang dan jasa.</p> <p>d. Masih kurangnya fasilitas kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha besar.</p> <p>e. Belum tersedianya ruang Pamer Produk UMKM</p>	<p>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</p> <p>a. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro telah melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Madiun terkait dengan fasilitasi permodalan dengan bunga lunak, diantaranya yaitu kredit UMKM dari PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Bank Pemerintah dan Perguliran Dana Pinjaman PKBL (Program Kerja Bina Lingkungan) dari PT. INKA.</p> <p>b. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro telah menyelenggarakan berbagai macam bimbingan manajemen kepada para pelaku UMKM yang dibiayai oleh APBD maupun bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui berbagai macam pelatihan diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pembuatan makanan olahan 2. Pelatihan pembuatan <i>handycraft</i> 3. Pelatihan batik tingkat lanjutan 4. Pelatihan internet marketing 5. Pelatihan manajerial 6. Pelatihan kewirausahaan <p>c. Beberapa koperasi sudah bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa perusahaan - perusahaan induknya antara lain, KOPINKA, Kopkar Siyvia Cendikia, Primkopad Yon 501, KPRI RSU Sudono, Kopkar RSI, Kopegtel, Koperasi Cahaya PLN, Koperasi Sejahtera PLN. Dinas</p>

			<p>Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro terus melakukan upaya pembinaan dan pengarahan pada waktu pelatihan, sosialisasi maupun Rapat Anggota Koperasi untuk memperluas kegiatan usahanya diluar unit simpan pinjam seperti penyediaan barang dan jasa sehingga akan meningkatkan pendapatan dan SHU yang diterima oleh anggota sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan anggota.</p> <p>d. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun telah berupaya untuk memfasilitasi kerjasama antara UMKM degan pelaku usaha yang berskala besar, yaitu menjalin kerjasama dengan Toko Modern dan Perhotelan diantaranya Carrefour, PT. INKA, Hotel Aston dan Hotel Merdeka. Disamping itu Pemerintah Kota Madiun telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, yang juga mengatur masalah kemitraan antar KUMKM dengan pelaku usaha besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha.</p> <p>e. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro telah mengajukan permohonan bantuan CSR ke PT. INKA untuk merenovasi salah satu gedung yang ada di Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun menjadi gedung pameran produk unggulan UMKM.</p>
17.	<p>Penanaman modal</p>	<p>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</p> <p>Kurangnya pemahaman calon investor akan adanya insentif penanaman modal</p>	<p>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</p> <p>Memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk mengakses informasi mengenai insentif pada halaman awal <i>Online Single Submission</i> (OSS), disitu pelaku usaha dapat mengetahui insentif apa saja yang akan diperoleh.</p>

18.	Kepemudaan dan Olah Raga	<p>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Madiun memiliki banyak atlit yang potensial untuk dikembangkan bakat dan minat olahraganya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi dikarenakan untuk pembinaan dan pelatihan kepada para atlit belum terlalu optimal, maka diperlukan pembinaan dan pelatihan agar lebih mengasah keahliannya agar lebih bisa berprestasi baik tingkat provinsi, regional maupun nasional ; 2. Belum adanya penganggaran untuk pembinaan dan pelatihan 10 cabang olahraga unggulan. 	<p>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun memfasilitasi para atlit dengan melengkapi sarana prasarana olahraga secara bertahap pada setiap cabang olahraga serta memberikan sarana prasarana akomodasi bagi para atlit yang akan bertanding tingkat provinsi, regional maupun nasional ; 2. Telah disusunya penganggaran Tahun 2020 untuk pembinaan dan pelatihan 10 cabang olahraga unggulan.
19.	Statistik	<p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah; 2. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah; 3. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah; 4. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah 	<p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan BPS dalam penyediaan data statistik daerah; 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang terstruktur dengan seluruh Perangkat Daerah dalam pengumpulan dan penyusunan data statistik daerah, sehingga tercipta data terbuka pemerintah; 3. Melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan kewenangan urusan statistik.
20.	Persandian	<p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun; 2. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan; 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi; 4. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah 	<p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Persandian; 2. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam bidang persandian.
21.	Kebudayaan	<p>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pelimpahan wewenang baik aset maupun kepegawaian dari Dinas 	<p>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seiring dengan telah dilimpahkannya wewenang dalam kepengurusan GOR,

		<p>Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sedangkan di dalam APBD telah disiapkan anggarannya baik untuk gaji Tenaga Kontrak dan Gaji Tenaga Upahan nya serta pemeliharaan GOR, Stadion dan Wisma Haji.</p> <p>2. Kota Madiun memiliki kurang lebih ada 146 benda/bangunan yang diduga cagar budaya, namun benda/bangunan tersebut ada kendala dalam pelestarian dan penjagaannya dikarenakan masih menunggu proses ketetapan Kepala Daerah untuk benda/bangunan tersebut menjadi cagar budaya yang dipelihara dan dirawat oleh Pemerintah Kota Madiun, sehingga belum optimal dalam pemeliharaan cagar budaya yang ada di Kota Madiun yang bisa lebih menarik wisatawan</p>	<p>Stadion dan Wisma Haji dan telah dilantiknya Pejabat yang berwenang mengurus GOR, Stadion dan Wisma Haji maka telah kami siapkan penganggaran untuk penggajian pegawai nya baik Tenaga Kontrak dan Tenaga Upahan serta anggaran untuk pemeliharaan nya.</p> <p>2. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun Melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya terutama Masjid dan Makam Kuncen serta Masjid dan Makam Taman agar lebih terawat dan menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya serta berusaha untuk melakukan penelitian keabsahan benda/bangunan yang diduga cagar budaya yang masih tersisa untuk ditetapkan sebagai benda/bangunan cagar budaya yang bisa dilestarikan.</p>
22.	Perpustakaan	<p>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</p> <p>a. Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan;</p> <p>b. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola Perpustakaan;</p> <p>c. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan;</p> <p>d. Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi;</p> <p>e. Kemampuan SDM pengelolaan perpustakaan belum optimal.</p>	<p>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</p> <p>a. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur yaitu tenaga administrasi, operator dan programmer pengolahan;</p> <p>c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan;</p> <p>d. Meningkatkan Jumlah Bahan Pustaka berupa konvensional dan Digital baik kualitas maupun kuantitas.</p>

23.	Kearsipan	<p>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</p> <p>a. Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan maupun Kearsipan.</p> <p>b. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola Kearsipan</p> <p>c. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya kearsipan</p> <p>d. Belum semua perangkat daerah memiliki unit pengelola arsip tersendiri sehingga keberadaan arsip baik dinamis dan statis belum mendapatkan penanganan secara khusus;</p> <p>e. Kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan rendah. Pengadaan formasi pegawai belum mengacu kebutuhan personil sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan;</p> <p>f. Fasilitas-fasilitas pendukung kearsipan belum sesuai standar kearsipan baik di depo arsip dan unit kearsipan;</p> <p>g. Kemampuan SDM pengelolaan kearsipan belum optimal</p>	<p>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</p> <p>a. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yaitu tenaga administrasi, operator dan programmer pengolahan</p> <p>c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya kearsipan.</p>
24.	Kelautan dan Perikanan	<p>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</p> <p>a. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM perikanan;</p> <p>b. Kurangnya penerapan teknologi perikanan;</p> <p>c. Kurangnya akses permodalan;</p> <p>d. Kurang optimalnya kelembagaan perikanan</p>	<p>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</p> <p>a. Dalam upaya meningkatkan minat dan pengetahuan SDM perikanan dilakukan bimtek/sosialisasi dan studi banding yang mengikutsertakan masyarakat petani ikan serta petugas perikanan. Petani ikan akan dilatih mengenai teknologi budidaya ikan serta teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui kegiatan pengembangan olahan berbahan dasar ikan dan lomba masak ikan</p> <p>b. Penerapan teknologi perikanan khususnya teknologi perbenihan ikan di Balai Benih Ikan akan lebih dimaksimalkan sesuai dengan prosedur dan teknik budidaya yang benar, misalnya pengelompokan ikan/grading berdasarkan ukuran ikan yang lebih baik, perhitungan kepadatan ikan dalam kolam untuk efektifitas penyerapan makanan dan pembakaran energi bagi ikan sehingga mengoptimalkan ukuran/ bobot ikan, pengukuran PH dan kualitas air</p>

			<p>kolam secara periodik, seleksi induk ikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah produksi benih yang dihasilkan. Adapun penerapan teknologi budiadaya dan pengolahan ikan di masyarakat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis/ pelatihan diantaranya bimtek kolam bundar, penananganan rantai dingin produk perikanan untuk menjaga kualitas dan kesegaran ikan saat dikirim dan sebagainya. Pendampingan dan monitoring ke pembudidaya ikan dan penangkap ikan akan dilakukan secara rutin untuk updating data, untuk melakukan pembinaan/ anjongsana kepada petani ikan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada</p> <p>c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun mendukung kegiatan usaha perikanan melalui pemberian rekomendasi kredit bagi petani ikan. Selain itu juga memberikan dukungan sarana kios, kafe dan kolam ikan dengan biaya sewa yang cukup terjangkau</p> <p>d. Peningkatan peran kelembagaan perikanan dilakukan dengan memfasilitasi pertemuan kelompok pembudidaya ikan dalam kegiatan penyuluhan/ sosialisasi yang diadakan di dinas. Selain itu akan dilakukan upaya peningkatan kelas terhadap kelompok petani ikan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha secara bersama-sama dengan tujuan peningkatan produktivitas sekaligus peningkatan kesejahteraan yang lebih baik</p>
25.	Pariwisata	<p>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHA RAGA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terlaksananya event Gebyar Batik dan Fashion Show. 2. Di Kota Madiun belum banyak memiliki obyek wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan untuk berkunjung di Kota Madiun, sehingga diperlukan promosi 	<p>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2020 direncanakan dilaksanakan gebyar batik dengan format berbeda yaitu Batik Fashion on The Street. 2. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun menyelenggarakan event

		<p>kepariwisataan terutama di dalam Kota Madiun yang mampu menarik minat wisatawan luar kota untuk berkunjung ke Kota Madiun. Sehingga yang harus dilakukan adalah meningkat dan menimbulkan ketertarikan yang besar baik bagi masyarakat Kota Madiun sendiri maupun di luar Kota Madiun dengan menghadirkan destinasi wisata yang baru dan menarik.</p>	<p>promosi di dalam Kota Madiun salah satunya adalah “Madiun Tempo Doeloe” untuk menggali sejarah Kota Madiun agar bisa menarik wisatawan luar Kota Madiun untuk menyaksikan dan menikmati acara tersebut</p>
26.	Pertanian	<p>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Bidang Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas sumberdaya lahan pertanian semakin menurun dikarenakan struktur tanah yang telah jenuh dengan bahan kimia anorganik atau pupuk kimia/ buatan, maupun pestisida (obat tanaman) anorganik yang dapat mempengaruhi struktur, tekstur dan kesuburan tanah. Penggunaan bahan kimia dapat memperkeras tekstur tanah, mengganggu keseimbangan PH tanah, serta membunuh mikroorganisme yang bermanfaat bagi kesuburan tanah 2. terdapat kendala dalam pembayaran penggunaan abonemen, yaitu terjadi kesalahpahaman antara petani dan dinas mengenai sistem pembayaran penggunaan sumur pompa dalam yang merupakan sarana/ prasarana produksi pertanian yang dibangun dengan biaya APBD Pemerintah Kota Madiun TA. 2016. Petani merasa keberatan dalam pembayaran abonemen listrik PLN untuk sumur pompa dalam 3. Masih lemahnya sistem alih teknologi pertanian 4. Terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan senantiasa memberikan fasilitasi dalam pengajuan permohonan kredit petani dengan memberikan 	<p>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Bidang Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan adalah membatasi penggunaan bahan kimia dan mengimbangi dengan penggunaan bahan organik dengan tetap melaksanakan kegiatan dan pendampingan pembuatan pupuk organik serta penggunaan agens hayati maupun pestisida nabati. Penggunaan pupuk organik yang dapat memperbaiki struktur dan tekstur tanah, memperbanyak daya jerap air, dan memperbanyak suplai makanan bagi mikroorganisme tanah. Sedangkan penggunaan agens hayati yaitu mikroorganisme (nematode, jamur, bakteri dsb) yang bermanfaat dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman atau hama dan penyakit tanaman serta penggunaan pestisida nabati (dari rimpang toga, jarak, alang-alang dsb) yang lebih ramah lingkungan, dapat menggantikan penggunaan pestisida kimia 2. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah berupaya melakukan mediasi yang menghadirkan petani, PLN, dinas dan pejabat terkait. Berdasarkan hasil mediasi, terdapat wacana bahwa pembayaran abonemen listrik akan diupayakan didanai APBD Pemerintah Kota Madiun, namun sampai saat ini masih belum ada ketetapan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu

		<p>rekomendasi kredit pertanian kepada petani yang memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit modal usaha tani</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik dan lemahnya daya saing. Belum optimalnya fungsi gapoktan sebagai unit usaha petani menyebabkan masih lemahnya nilai tawar petani 6. Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke industri dan perumahan Alih fungsi lahan di perkotaan tidak dapat dihindari dalam suatu perkembangan wilayah perkotaan 7. Terjadinya fluktuasi iklim yang tidak dapat diprediksi Fluktuasi iklim yang tidak dapat diprediksi sedikit banyak akan mempengaruhi produktivitas tanaman dan produksi tanaman pangan 8. Kemampuan SDM petani masih rendah, sehingga pola produksi belum berorientasi bisnis Kemampuan petani dapat ditingkatkan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan/ bimbingan teknis serta melalui sosialisasi dan penyuluhan dari tenaga penyuluh lapangan pertanian mengenai teknologi baru <p>Bidang Peternakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya penerapan teknologi peternakan tepatguna dan rendahnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan Peningkatan penerapan teknologi peternakan serta teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dapat dilakukan melalui kegiatan transfer teknologi peternakan kepada masyarakat peternak, pedagang daging dan susu dalam kegiatan penyuluhan/ bimtek/ pelatihan dan studi banding peternakan 2. Muncul penyakit hewan menular yang bersifat 	<p>untuk ke depannya, penyerahan bantuan kepada masyarakat hendaknya disertai pemberian informasi yang jelas mengenai hak kewajiban penerima. Selain itu pemberian bantuan pompa air yang menggunakan mesin diesel dirasa lebih efektif dan lebih dapat diterima serta tidak memberatkan petani</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan tetap melakukan kegiatan penyuluhan rutin kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan), sebagai upaya untuk memberikan informasi teknologi terbaru dan sarana transfer teknologi kepada petani 4. tetap dilaksanakan pendampingan kepada gapoktan yang mengelola dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), sehingga dana tersebut dapat lebih bermanfaat terutama sebagai pinjaman modal bagi anggota gapoktan 5. perlu dilakukan pengoptimalan fungsi gapoktan yang tidak hanya sebagai tempat bertukar ide dan permasalahan pertanian namun juga sebagai unit bisnis pertanian. Sebagai contoh pengoptimalan penggunaan RMU (Rice Milling Unit) dan lantai jemur bagi anggota kelompok tani sehingga dapat menghasilkan gabah kering yang lebih berkualitas dan produk beras siap jual sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani 6. perlu dilakukan pemetaan lahan produktif yang akan dipertahankan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sehingga lokasi yang telah ditetapkan tersebut tidak boleh dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian. Adapun pemetaan dan penetapan lahan LP2B masih sedang berproses dan akan mengacu pada Perda RTRW tentang lahan pertanian abadi. Penetapan LP2B hendaknya memperhatikan tata
--	--	---	---

		<p>emergensi Penyakit hewan menular yang bersifat emergensi dapat dikendalikan dengan pemeriksaan rutin hewan/ ternak yang dibudidayakan di masyarakat serta pemeriksaan hewan/ ternak yang masuk di Kota Madiun melalui monitoring lalu lintas ternak</p> <p>3. Belum optimalnya pengawasan produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) Pengoptimalan pengawasan produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dilakukan dengan pemeriksaan <i>post mortem</i> (ternak yang akan diembelih) dan <i>ante mortem</i> (daging hasil sembelihan) pada pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan. Sedangkan pengawasan produk daging hasil pemotongan yang dilakukan di luar RPH, dilakukan melalui kegiatan periksa ulang daging harian di Pasar Besar dan Pasar Sleko Kota Madiun</p> <p>4. Ancaman penurunan populasi ternak sapi Populasi ternak cenderung semakin menurun setiap tahunnya karena semakin terbatasnya lahan dan peran kepentingan masyarakat dengan usaha peternakan di pemukiman terhadap limbah dan polusi udara yang dihasilkan</p> <p>5. Masih belum tertibnya peredaran obat hewan dan pakan ternak di masyarakat Pengawasan peredaran obat dan pakan ternak telah dilakukan dengan mengambil sample obat dan pakan di toko/kios dan poultry shop secara periodik</p>	<p>letak lokasi yang tidak rawan untuk dialihfungsikan, infrastruktur pertanian yang telah terbangun, serta tingkat kesuburan tanah di wilayah tersebut</p> <p>7. Untuk mengatasi dampak kerugian gagal panen karena anomali iklim seperti banjir, kekeringan maupun ledakan organisme pengganggu tanaman, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah meluncurkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Adapun biaya premi asuransi tersebut 80% ditanggung oleh pemerintah sedangkan petani hanya diwajibkan membayar 20%-nya. Namun untuk Kota Madiun 20% biaya premi tersebut akan dibayar menggunakan dana APBD II Pemerintah Daerah Kota Madiun melalui kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun TA. 2019 kepada pihak penyedia jasa layanan yang ditunjuk yaitu PT. Jasindo</p> <p>8. perlu dilakukan pendampingan dalam kegiatan produksi pertanian untuk menghasilkan produk sekunder melalui teknologi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, misalnya produksi beras organik atau beras sehat yang siap dilepas di pasar. Konsistensi kegiatan penyuluhan dan kontinuitas kegiatan pendampingan kepada petani, harus dipertahankan demi perubahan dan perbaikan pola pikir petani terhadap pemanfaatan teknologi baru</p> <p>9. Penyuluhan tidak hanya bersifat teknis budidaya namun juga akan menyangkut bidang pengolahan hasil peternakan seperti pembuatan kefir, yogurt, abon, nugget, dendeng. Selain itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus memfasilitasi pengajuan kredit peternakan melalui penerbitan rekomendasi permohonan kredit usaha peternakan</p>
--	--	--	---

			<p>Bidang Peternakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesehatan hewan pada ternak besar meliputi pemeriksaan gigi dan mulut, air liur, mata, kebersihan kandang, serta pemberian vaksinasi pada unggas. Pencegahan penyakit hewan peliharaan telah dilakukan sejak tahun 2018 dengan memberikan vaksin rabies gratis. Selain itu penanganan pengaduan/ pelaporan dari masyarakat harus dilakukan dengan tepat dan cepat agar mencegah terjadinya penyebaran wabah penyakit 2. Pengawasan produk peternakan juga dilakukan dengan pengambilan dan pemeriksaan sample makanan seperti bakso, mie ayam, rawon, soto menggunakan <i>pork screening test</i> untuk diketahui kandungan babi atau kehalalannya 3. Oleh karena itu perlu dikembangkan usaha peternakan ramah lingkungan/ bebas polusi limbah. Peternakan ramah lingkungan dapat dikembangkan melalui pemberian pakan fermentasi yang mampu mengurangi bau kotoran ternak, peningkatan kebersihan kandang dan perlakuan/ pemberian prebiotik terhadap limbah peternakan, sehingga keberlanjutan usaha peternakan di Kota Madiun dapat terjaga 4. Untuk pemeriksaan tanggal kadaluarsa dan kesesuaian label dengan isi cukup diberikan teguran lisan atau teguran tertulis. Sedangkan khusus pemeriksaan kandungan sample pakan ternak dikirim ke laboratorium pengawasan mutu pakan di Provinsi 5. Dengan mengotimalkan peran petugas lapangan dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada petani dan peternak, serta penggunaan teknologi pertanian dan peternakan ramah lingkungan,
--	--	--	--

			diharapkan keberlanjutan kegiatan pertanian dan peternakan di Kota Madiun akan terjaga, sehingga target kinerja tahun yang akan datang dapat tercapai
27.	Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN	<p>DINAS PERDAGANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun relatif stabil dengan nilai diatas 5 persen. Bila dibandingkan dengan kabupaten lain di wlayah Karesidenan Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun merupakan yang tertinggi. (data demografi ekonomi dan social budaya Kota Madiun Tahun 2018) sehingga sebagai Dinas yang mengurus urusan perdagangan maka mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dengan mengetahui jumlah pertumbuhan ekonomi melalui data perputaran uang yang beredar di Kota Madiun. 2. Dengan adanya beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Kota Madiun, antara lain API (Akademi Perkereta Apian) akan ikut memacu dalam Pertumbuhan Ekonomi. 3. Dengan berdirinya beberapa Mall seperti Sun City, Madiun Plaza, Timbul Jaya Plaza, Carrefour, President Plaza, Lawu Plaza semakin mengisyaratkan status Kota Madiun ini sebagai Kota Perdagangan sehingga menambah dan membuat iklim Investasi di kota ini menjadi tumbuh subur. Maka tidak heran jika di Kota ini banyak ditemukan Mall dan Pusat Perdagangan, begitu juga sentra Kuliner dan Hiburan yang semakin menjamur, dan mengisyaratkan Kota ini seakan tidak ada matinya. Sarat akan aktivitas perekonomian yang semakin dinamis berubah mengikuti arah kemajuan zaman
28.	Perindustrian	<p>DINAS TENAGA KERJA</p> <p>Permasalahan yang sampai saat ini dihadapi adalah merubah sebagian mindset pengusaha untuk melakukan inovasi usaha sesuai perkembangan.</p>	<p>DINAS TENAGA KERJA</p> <p>Adapun solusi saat ini memberikan pemberdayaan, pembinaan serta melakukan promosi guna mengembangkan mindset pengusaha.</p>
29.	Transmigrasi	<p>DINAS TENAGA KERJA</p> <p>a. Target penempatan transmigrasi ditentukan oleh pemerintah propinsi</p>	<p>DINAS TENAGA KERJA</p> <p>a. Mengirim data calon transmigrasi ke propinsi</p> <p>b. Memberikan rekomendasi kepada peserta transmigrasi</p>

		<p>b. Penempatan transmigrasi semakin menurun karena adanya otonomi daerah</p> <p>c. Diutamakan disektor pertanian</p>	<p>yang memenuhi syarat setelah adanya verifikasi dari pemerintah provinsi</p>
30.	Unsur Staf	<p>PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>a. Hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kota Madiun yang mendapat kategori B pada Tahun 2019. Pada dasarnya nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 mengalami kenaikan dari nilai 67,21 pada Tahun 2018 menjadi 68,20 pada Tahun 2019. Namun secara kategori nilai hasil evaluasi bernilai tetap yaitu berkategori B. Secara Umum Pemerintah Kota Madiun telah menerapkan Sistem Sakip sebagai pelaksanaan manajemen kinerja, namun penerapan tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan efektifitas penggunaan anggaran dikaitkan dengan kinerja pada perumusan sasaran strategis kualitas indikator kinerja serta kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja</p> <p>b. Jumlah dan kualitas tenaga analisa kelembagaan yang belum memadai</p> <p>c. Jumlah dan kualitas tenaga analisa jabatan yang belum memadai</p> <p>d. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD akan arti penting anjab, ABK dan Penataan Kelembagaan</p> <p>e. masih belum terpenuhinya tenaga administrasi dan keuangan;</p> <p>f. masih kurangnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. masih belum terpenuhinya tenaga teknis untuk publikasi produk hukum;</p> <p>h. masih belum terpenuhinya tenaga teknis untuk penyuluhan hukum</p>	<p>PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>a. menyesuaikan seluruh dokumen perencanaan kinerja RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan tetap mengacu pada mekanisme penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti orientasi pada manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (<i>result oriented</i>), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan (<i>integrated development plan</i>) serta mekanisme cascade kinerja.</p> <p>b. Menyempurnakan rumusan tujuan dan sasaran seluruh perangkat daerah sehingga penyusunan IKU mestinya mengacu pada kinerja tersebut.</p> <p>c. Cascade kinerja agar dibangun berdasarkan pada proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD, sehingga penyusunan IKU semestinya mengacu kepada Cascade kinerja tersebut.</p> <p>d. Menyempurnakan aplikasi Simonev, E-Sakip dan E-Planning sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal, disamping itu perlu mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada baik yang terkait dengan kinerja, keuangan maupun penilaian individu, agar memudahkan manajemen maupun Pegawai dalam penerapan manajemen kinerja.</p> <p>e. Menyempurnakan penyajian laporan kinerja Perangkat Daerah Kota Madiun sehingga penyajian analisis terhadap tidak tercapainya target sudah memadai dan memanfaatkan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan</p> <p>f. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internal dengan meningkatkan kapasitas evaluator inpektorat sehingga mampu memberikan saran perbaikan yang konstruktif kepada Peraturan Daerah.</p> <p>g. Mendorong penerapan budaya kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan menyusun indikator kinerja yang selaras dengan kinerja Organisasi serta dijadikan acuan dalam</p>

			<p>penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan budaya kinerja ini sebaiknya dilakukan dengan pelaksanaan review kinerja berjenjang secara berkala pada seluruh Perangkat daerah - perlu meningkatkan kualitas dan memberdayakan SDM yang tersedia secara optimal
31.	Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	<p>PELAYANAN LEGISLATIF</p> <p>Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun sudah berjalan tiga tahun. Ada beberapa masukan, perlu adanya penyesuaian besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD</p>	<p>PELAYANAN LEGISLATIF</p> <p>Sekretariat DPRD bekerja sama dengan pihak ketiga (Penyedia Jasa Penilai) telah melaksanakan appraisal sebagai dasar penyesuaian tunjangan dimaksud. Hasil penyesuaian terhadap tunjangan tersebut berlaku mulai Tahun Anggaran 2020</p>
32.	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<p>PENGAWASAN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bukti pendukung parameter sub unsur SPIP belum sepenuhnya dipenuhi oleh Perangkat Daerah yang dimonitoring, sehingga Tim monitoring Pelaksanaan SPIP kesulitan dalam melaksanakan karena kekurangan data dukung; b. Perangkat Daerah belum mendokumentasikan kegiatan yang termasuk dalam sub unsur SPIP dengan baik dan terstruktur; c. Tim Assesor APIP masih perlu peningkatan kualitas untuk persiapan sebagai Tim penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Madiun 	<p>PENGAWASAN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan sub unsur yang menjadi bahan penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan mendokumentasikan dengan baik terhadap bukti pendukung atas pemenuhan parameter sub unsur SPIP dalam bentuk softcopy dan hardcopy secara rapi dan terstruktur; b. Mengadakan Bimbingan Teknis guna mengoptimalkan kualitas Tim Assesor APIP untuk persiapan sebagai Tim penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
33.	Perencanaan	<p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>Dalam melaksanakan urusan perencanaan, BAPPEDA terkendala dengan terbitnya Peraturan baru yang terkait dengan perencanaan. Dengan adanya peraturan baru tersebut, berdampak pada dokumen-dokumen perencanaan secara menyeluruh, baik dokumen perencanaan tingkat kota maupun tingkat OPD. Seperti yang terjadi pada Tahun 2017 terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara</p>	<p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>Dengan adanya perubahan tersebut maka harus diikuti penyesuaian yang sangat cepat dikarenakan terbatasnya waktu pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran. Jika tidak, maka akan menghambat proses pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Hambatan pada masa transisi/perubahan dokumen tersebut telah dilakukan pemecahan masalah (solusi) yaitu dengan memberikan perintah merubah dokumen tersebut secara segera dan melakukan panduan dalam pengerjaannya (pengendalian dan monitoring), serta koordinasi yang intensif antara BAPPEDA dengan OPD terkait.</p>

		Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dengan adanya perubahan tersebut, maka terdapat penyesuaian RPJMD Kota Madiun dan tentunya diikuti oleh perubahan Renstra Perangkat Daerah	
34.	Keuangan	<p>ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Kegiatan Perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah dengan anggaran sebesar Rp. 220.950.000,00 dan mengalami realisasi sebesar Rp. 61.011.515,00. Hal ini disebabkan karena proses kerjasama dengan pihak ke III dalam penilaian appraisal aset daerah dengan mendatangkan tenaga ahli tidak dapat dilaksanakan. 2. Kurangnya kuantitas SDM petugas pungut 3. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan 4. Belum optimalnya penggalan potensi terhadap pajak daerah 5. Kurangnya akurasi data pajak daerah 	<p>ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solusi atas pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : - Kegiatan pelayanan perpajakan daerah di tempat pelayanan pajak daerah terpadu dengan harapan dapat membantu penyelesaian pengajuan permohonan oleh wajib pajak - Kegiatan sosialisasi penyebarluasan informasi perpajakan daerah, dengan sasaran bahwa penyebarluasan informasi sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan daerah. <p>b. Solusi terhadap belum optimalnya penggalan potensi terhadap pajak daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengamanan penerimaan pajak daerah dengan hasil yang diharapkan sebagai upaya untuk pengamanan target penerimaan pajak daerah - Kegiatan pemberian hadiah gebyar undian PBB dan wajib pajak prestasi merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran yang tepat waktu <p>c. Solusi terhadap keakurasian data pajak daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemeliharaan basis data obyek pajak merupakan upaya untuk mewujudkan pemutakhiran data obyek pajak daerah serta tersedianya dokumen formulir pendaftaran SPTPD dan peremajaan - Kegiatan pemeliharaan basis data PBB merupakan

			<p>upaya untuk mewujudkan keakuratan data subyek dan obyek pajak dalam basis data SPOP, LSPOP, Peta dan pemutakiran basis data SISMIOP.</p> <p>d. Pada tahun anggaran berikutnya akan kami cermati dalam perencanaan kerjasama agar realisasi anggaran bisa sesuai capaian kerja yang diharapkan.</p> <p>e. Kwantitas SDM petugas pungut yang ada merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian realisasi pajak diatas target yang ada, dengan tuntutan selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Sesuai tingkat kondisi kwantitas SDM di Pemerintah Kota Madiun maka untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Mengambil langkah yaitu memaksimalkan kwantitas SDM yang ada semaksimal mungkin dengan pembagian tugas secara tepat dan terbagi habis.</p>
35.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	<p>KEPEGAWAIAN</p> <p>Untuk Anggaran Kegiatan Pengadaan CPNS Tahun 2019 sebesar Rp. 885.534.300,00 hanya dapat terserap sebesar Rp. 263.333.593,00 yaitu hanya sebesar 29,73 %. Hal tersebut disebabkan Jadwal untuk Pengadaan CPNS tahun 2019 dari BKN mundur dari rencana jadwal semula, sehingga rangkaian dari kegiatan Pengadaan CPNS untuk pelaksanaan Test Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (SKB) baru dapat dilaksanakan di Tahun 2020</p>	KEPEGAWAIAN
36.	Penelitian dan Pengembangan	<p>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</p> <p>Dalam pengumpulan data maupun proses penelitian/kajian, perlu melibatkan pihak-pihak lain. Berkoordinasi dengan pihak lain terkadang tidak selancar seperti yang direncanakan. Hal tersebut membuat proses pengumpulan data dan proses penelitian/kajian agak sedikit lama dan sulit</p>	<p>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</p> <p>Selanjutnya diharapkan adanya hubungan antarkelembagaan lebih ditingkatkan, sehingga dalam proses koordinasi dalam rangka pengumpulan data/penelitian/kajian dapat berjalan lancar sesuai rencana.</p>
37.	Kesatuan Bangsa & Politik	<p>Badan Kesatuan Bangsa & Politik</p> <p>1. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama tidak dapat diserap secara maksimal karena FKUB ada</p>	<p>Badan Kesatuan Bangsa & Politik</p> <p>Untuk Perencanaan kedepannya lebih ditingkatkan dan untuk pengajuan anggaran lebih teliti lagi sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti diatas untuk kedepannya</p>

		<p>dana hibah dan bentuk kegiatan hampir sama oleh karena itu yang diserap dari anggaran hibah sedangkan di kegiatan tidak diserap untuk efisiensi penggunaan anggaran.</p> <p>2. Ada kegiatan yang isinya hanya Uang Kinerja Kegiatan, karena UKK sudah tercukupi di kegiatan lain sehingga tidak diserap, sedangkan yang anggarannya masih/tidak serap itu sisa UKK di masing-masing kegiatan (ada 1 kegiatan yang isinya hanya UKK yang seharusnya sudah dihilangkan pada waktu RDP dengan DPRD ternyata waktu keluar DPA masih muncul sehingga anggaran tidak diserap yaitu Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)</p>	
38.	Kecamatan	<p>PENYELENGGARAAN KECAMATAN</p> <p>a. Permasalahan umum dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang ditentukan oleh kemauan dan kepedulian sosial dari warga masyarakat. Di era saat ini semangat kepedulian dari warga masyarakat semakin menurun sebagai akibat dari berkembangannya semangat matrealistis dan individualis.</p> <p>b. Kurang optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat disebabkan karena kurangnya sumberdaya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang masih kurang baik dari segi kuantitas dan kualitas, masih kurang optimalnya koordinasi baik antar instansi maupun antara kecamatan/kelurahan dengan masyarakat, kurang optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan masih kurangnya fasilitas-fasilitas pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>PENYELENGGARAAN KECAMATAN</p> <p>a. Adapun Solusi yang diambil yaitu diusahakan menumbuhkembangkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, termasuk meningkatkan interaksi sosial diantara sesama warga masyarakat, melalui program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan BBGRM, kegiatan lomba-lomba di kelurahan, kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya dan lain-lain,</p> <p>b. Untuk mengatasi permasalahan kurang optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan meningkatkan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan baik dari kuantitas maupun kualitas, mengoptimalkan koordinasi baik antar instansi maupun antara kecamatan/kelurahan dengan masyarakat mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan menambah ketersediaan fasilitas-fasilitas pelayanan kepada masyarakat.</p>

39.	BUMD	<p>PENGELOLAAN BUMD PDAM</p> <p>a. Semakin sulitnya menambah jumlah pelanggan. Hal ini disebabkan karena tingkat pelayanan pada akhir tahun 2019 telah mencapai 96,10 %, hampir mencapai titik jenuh karena telah mendekati 100 %. Kondisi Kota Madiun yang sangat mudah mengambil air tanah membuat sebagian besar masyarakat menggunakan sumur dangkal sebagai alternative dalam mendapatkan air bersih. Sehingga semakin berat untuk mendapatkan pelanggan baru.</p> <p>b. Tingginya koefisien jam puncak (c=2,5). Koefisien jam puncak menunjukkan meningkatnya pemakaian air pada saat jam puncak hingga mencapai 2,5 kali rata-rata pemakaian air. Hal ini mengakibatkan berkurangnya tekanan air pada saat jam puncak walaupun kedua reservoir sudah dioptimalkan, sehingga pada saat jam puncak akan mengalami sedikit penurunan tekanan air terutama di daerah kritis.</p> <p>Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Kota Madiun</p> <p>a. Jaringan kantor seperti Kantor Cabang sangat diperlukan untuk lebih mendekatkan kepada pelayanan, dan memperluas daerah operasional BPR, selama ini kantor Operasional yang dimiliki adalah 1 (Satu) Kantor Pusat, dan 8 (Delapan) Kantor Kas semua di Kota Madiun belum memiliki Kantor Cabang.</p> <p>b. SDM adalah merupakan pilar utama dalam menjaga eksistensi suatu BPR untuk bisa terus tumbuh dan eksis dalam industri perbankan, peran SDM sangat besar dalam rangka pencapaian perusahaan.</p> <p>c. Banyaknya kompetitor sebagai pesaing seperti Bank Umum yang membiayai untuk pangsa pasar BPR, sama-sama BPR, Lembaga Keuangan Non Bank seperti Koperasi, Danamon KSP, Pegadaian dan Lembaga Pembiayaan Keuangan, begitu pula lembaga tidak resmi seperti ijon, rentenir.</p>	<p>PENGELOLAAN BUMD PDAM</p> <p>a. Solusi untuk mengatasi semakin sulitnya menambah jumlah pelanggan yaitu:</p> <p>b. Bekerjasama dengan pengembang perumahan (developer) untuk pemasangan jaringan perpipaan dan sambungan rumah baru.</p> <p>c. Mengadakan penyuluhan akan pentingnya air bersih bagi kesehatan kepada masyarakat kota Madiun.</p> <p>d. Mengadakan program pasang baru gratis.</p> <p>e. Disamping dengan membangun sumur baru yang diharapkan bisa menambah kapasitas produksi, PDAM Melaksanakan rehabilitasi jaringan pipa distribusi untuk meningkatkan debit air sehingga kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi setiap saat.</p> <p>Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Kota Madiun</p> <p>a. Meningkatkan kepuasan kepada customer dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan nasabah dengan sistem tangkap bola.</p> <p>b. Meningkatkan pemasaran / promosi BPR baik dengan penyebaran dan pengenalan langsung oleh petugas kepada sasaran masyarakat yang potensial, guna meningkatkan Image/ Citra BPR lebih baik lagi, juga memiliki Edukasi / Literasi Keuangan.</p> <p>c. Memberikan imbalan suku bunga yang memadai sesuai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam produk Tabungan dan Deposito.</p>
-----	------	---	---

		<p>PD. ANEKA USAHA</p> <p>a. Bidang SDM Perilaku pegawai dalam pelayanan kepada konsumen belum maksimal, kedisiplinan dan ketrampilan pegawai masih rendah</p> <p>b. Bidang Menejemen Sistem pelaporan keuangan belum sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku</p> <p>c. Bidang Sarana dan Prasarana/Peralatan Bangunan bekas cucian mobil belum dimanfaatkan.</p>	<p>d. Mengupayakan untuk Ekspansi jaringan kantor dengan membuka Kantor Cabang baru.</p> <p>e. Inovasi dan pengembangan produk baru.</p> <p>f. Mengupayakan penurunan NPL (Non Performing Loan) dengan berbagai cara seperti melakukan pengeplangan agunan, pelelangan agunan melalui KPKNL dan melakukan gugatan ke pengadilan</p> <p>PD. ANEKA USAHA</p> <p>a. Telah dilakukan pelatihan kedisiplinan pegawai melalui pembinaan, pelatihan akuntansi guna penyempurnaan sistem pelaporan, pelatihan perpajakan dan pelatihan-pelatihan lain yang dapat mendukung peningkatan kedisiplinan pegawai;</p> <p>b. Memotivasi kepada pegawai SPBU untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada konsumen;</p> <p>c. Telah dilakukan penggantian mesin dispenser untuk menjamin kualitas dan ketepatan takaran BBM;</p> <p>d. Segera diupayakan pemanfaatan lokasi bekas cucian mobil dengan menggandeng pihak ketiga agar dapat memberi manfaat dan menambah pendapatan Perumda Aneka Usaha</p>
--	--	--	--

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi global pada tahun 2022 diproyeksikan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2020, kondisi perekonomian pada berbagai level masih menghadapi ketidakpastian akibat COVID-19 yang menyebabkan krisis kesehatan. Dampak dari adanya krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 menghambat laju mobilisasi barang jasa. Salah satunya adalah hilangnya mata pencaharian dan berkurangnya pendapatan penduduk. Sehingga, berimplikasi terhadap tingkat konsumsi dan daya beli penduduk. Pada tingkat dunia, pertumbuhan diprediksi menurun tajam sebesar -3,5 persen pada tahun 2020. Kondisi ini lebih buruk dibandingkan dengan krisis keuangan tahun 2008. Sehingga, nilai pertumbuhan ekonomi, baik di level global maupun di Indonesia juga akan turun.



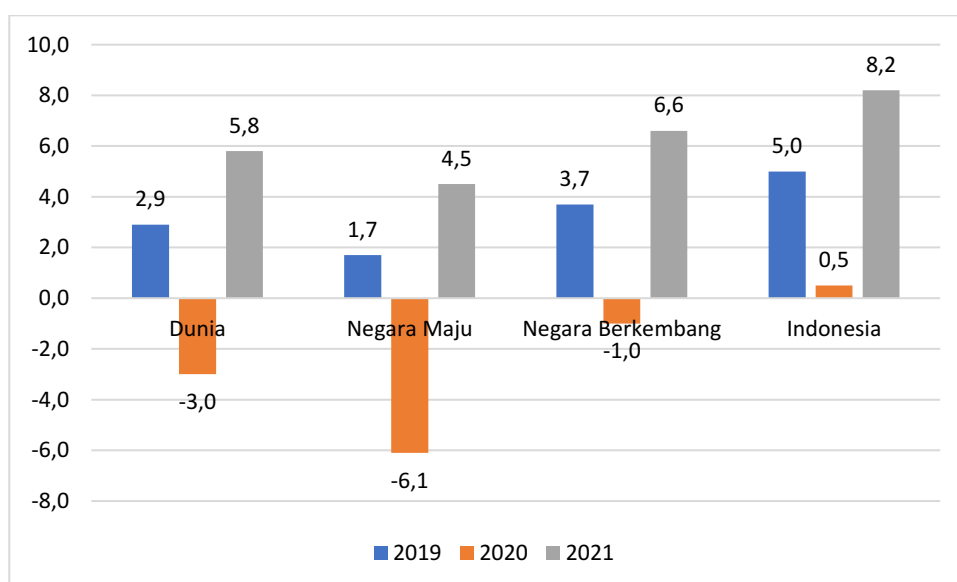
Sumber: IMF (2021)

Gambar 3.1
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2021 – 2022

Pada tahun 2021, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global diprediksi meningkat sebesar 5,5 persen ketika terdapat dukungan kebijakan untuk rumah tangga ataupun pelaku bisnis yang terdampak pandemic COVID-19 dari sisi fiskal ataupun moneter. Seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2021, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi global di

prediksikan tumbuh sebesar 4,2 persen. Pada tahun 2022, negara berkembang di proyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen dan jauh lebih tinggi dari Negara maju yang di proyeksikan hanya sebesar 3,1 persen.

Berbeda dengan IMF, kondisi ekonomi global tahun 2020 akibat adanya ketidakpastian membuat divergensi prediksi pertumbuhan ekonomi pada beberapa Lembaga. Menurut JP Morgan dan *The Economist Intelligence Unit* (EIU) masing-masing sebesar -1,1 persen dan -2,2 persen. Kemudian menurut Fitch, akan terjadi kontraksi, sehingga nilai pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 sebesar -3,9 persen. Kontraksi tersebut diprediksi akan dialami oleh beberapa negara maju di dunia, seperti AS, Euro Area dan Jepang. Perkiraan nilai pertumbuhan ekonomi pada level dunia, negara maju, negara berkembang dan Indonesia, menurut IMF adalah sebagai berikut:



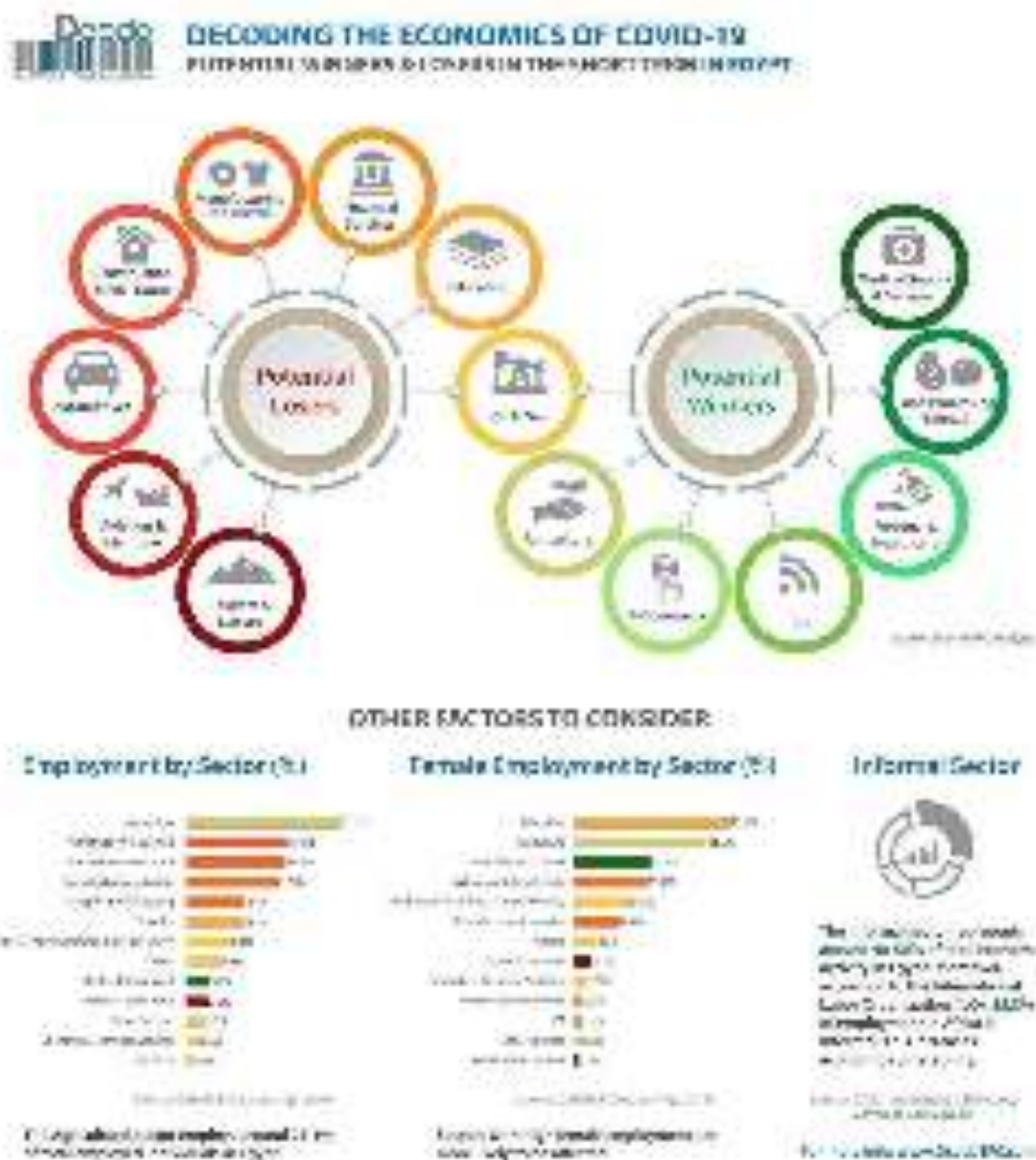
Sumber: IMF, 2021

Grafik 3.1
Perkembangan GDP Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang dan Indonesia Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020-2021

Dampak dari pandemi COVID-19 pada penurunan GDP sangat signifikan dirasakan oleh negara maju, dengan penurunan secara agregat sebesar 6,1 persen. Dari keseluruhan negara yang tergabung dalam negara maju, Italia menunjukkan penurunan yang tertinggi sebesar 9,1 persen, akibat wabah COVID-19. Sedangkan pada negara berkembang, nilai pertumbuhan diproyeksi turun 1 persen. Penurunan nilai pertumbuhan tersebut disebabkan aktivitas perekonomian terganggu karena terganggu dan terhambatnya *supply chain* berbagai komoditas, pengetatan pasar keuangan, pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, potensi kebangkrutan, pergeseran pola pengeluaran dan konsumsi, perubahan perilaku (gaya hidup). Selain faktor pandemi, beberapa faktor lain yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan penurunan pertumbuhan adalah pemilihan presiden di Amerika Serikat dan ketegangan

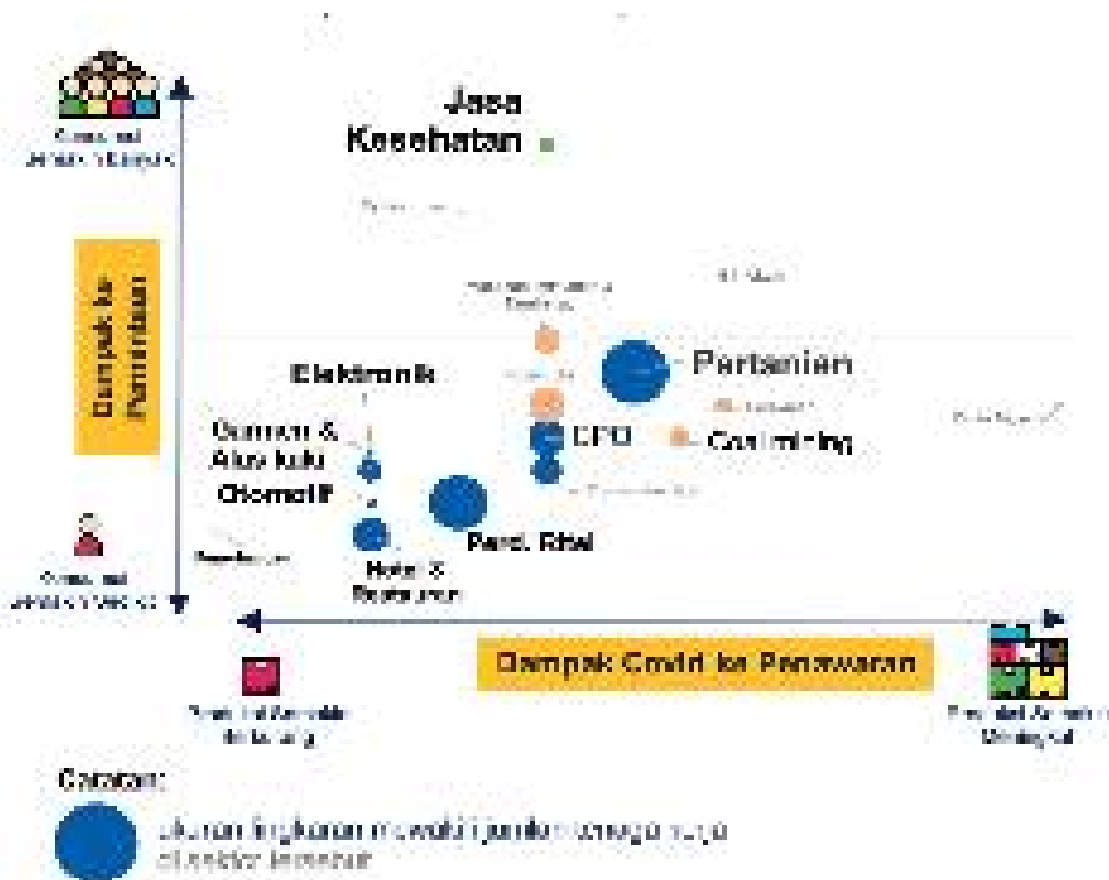
politik di Timur Tengah. Kemudian, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi diprediksi kembali meningkat signifikan. Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi dunia, negara maju, berkembang pada tahun 2021, masing-masing sebesar 5,8 persen; 4,5 persen; 6,6 persen.

Penurunan nilai pertumbuhan ekonomi akibat adanya COVID-19, disebabkan adanya beberapa sektor yang mengalami kebangkrutan. Di Mesir misalnya, beberapa sektor yang mengalami kerugian antara lain: sektor pariwisata, penerbangan dan maritim, otomotif, konstruksi dan *real estate*, manufaktur, jasa keuangan, serta Pendidikan. Hal tersebut disebabkan adanya himbauan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah, untuk memutus rantai penyebaran virus. Sebaliknya, sektor yang diuntungkan dari adanya COVID-19 antara lain pemenuhan dan layanan kesehatan, pengolahan makanan dan retail, personal dan perlindungan kesehatan, ICT, *e-commerce*, serta pertanian. Di sisi lain, sektor minyak dan gas bisa menjadi sektor yang diuntungkan ataupun dirugikan. Hal ini disebabkan, minyak dan gas merupakan kebutuhan utama masyarakat. Akan tetapi, ketika terdapat kebijakan untuk membatasi mobilitas, maka permintaan untuk komoditas tersebut akan berkurang. Artinya, kerugian. Keuntungan dari komoditas minyak dan gas tergantung pada kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat.



Gambar 3.2
Sektor yang Mengalami Potensi Keuntungan dan Kerugian akibat COVID-19

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor dengan tenaga kerja wanita yang tinggi, dalam hal ini Pendidikan merupakan sektor yang dikategorikan paling terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi, dari sisi persentase tenaga kerja dalam berbagai sektor, jumlah tenaga kerja di Mesir sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Akan tetapi, persentase untuk sektor konstruksi, transportasi, pendidikan juga cukup besar. Sehingga, nilai pertumbuhan ekonomi di Mesir diprediksi menjadi 2 persen pada tahun 2020 dan 2,8 persen pada tahun 2021, dimana pada tahun 2019 nilainya sebesar 5,6 persen (IMF,2021).



Gambar 3.3
Dampak COVID-19 terhadap Permintaan dan Penawaran

Berbagai tantangan pada tahun 2020, menyebabkan kondisi perekonomian penuh dengan ketidakpastian. Namun demikian, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian. Berdasarkan fenomena tersebut, maka proyeksi asumsi makro tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Kerangka Makro Ekonomi Indonesia 2020-2024

	2020	2021f*	2022f*	2023f*	2024f*
Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	-2,1	5,0	5,4 – 6,0	5,2 – 6,1	5,2 – 6,3
Investasi	-4,9	4,3	6,5 – 7,2	8,1 – 9,1	5,8 – 7,0
Ekspor	-7,7	7,3	6,5 – 7,1	5,6 – 6,5	5,2 – 6,3
Industri Pengolahan	-2,9	5,2	5,6 – 6,3	5,2 – 6,2	5,2 – 6,4
Jasa-Jasa	-1,4	6,0	6,2 – 6,9	5,9 – 6,9	6,0 – 7,1
Stabilitas Makro-Ekonomi					
Inflasi (% akhir periode)	1,7	2,5	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0	1,5 – 3,5
Nilai Tukar (USD/IDR)	14.577	14.450	13.900 – 15.000	13.800 – 15.000	13.600 – 15.000
Defisit Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,5	- 1,0	(1,6) – (1,7)	(1,8) – (2,1)	(2,2) – (2,7)
Cadangan Devisa (USD Miliar)	135,9	136,1	138,2 – 141,4	138,5 – 144,4	140,3 – 141,2

Sumber: Kemenkeu, 2021

Secara umum, indikator makro ekonomi pada *outlook* tahun 2020 menunjukkan ketidakpastian dan penurunan yang signifikan. Meskipun demikian, laju inflasi cukup kuat di tahun 2020 namun masih relatif terjaga pada level yang rendah berkisar 2,0-4,0 persen. Kemudian, nilai tukar rupiah bergerak dinamis pada kisaran Rp14.900 hingga Rp15.300 per USD. Harga minyak juga rendah, lemahnya permintaan global. Selanjutnya pada tahun 2021, secara umum indikator makro ekonomi mulai menunjukkan perbaikan. Tentunya, hal ini tidak lepas dari upaya menggiatkan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama multilateral yang kuat untuk mengatasi dampak pandemi, termasuk membantu negara-negara yang mengalami kendala finansial/pendanaan, dan penyaluran bantuan ke negara-negara dengan kondisi kesehatan yang lemah. Selain kerjasama multilateral, stimulus dalam mitigasi ekonomi Indonesia juga dilakukan dari sisi fiskal maupun moneter.

Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam masa resesi ekonomi pada sisi moneter antara lain: (i) penurunan suku bunga; (ii) *Quantitative Easing (QE) Liquidity Swap*; (iii) pemberian fasilitas pinjaman; (iv) menurunkan *reserve requirement ratio*. Selanjutnya dari sisi fiskal, dukungan kebijakan yang diberlakukan antara lain: (i) peningkatan anggaran kesehatan penanganan COVID-19; (ii) *social safety net*; (iii) insentif perpajakan; (iv) bantuan subsidi upah bagi perusahaan; dan (v) *cash transfer* bagi UMKM.

Pada level Provinsi, kondisi perekonomian Jawa Timur tahun 2020 mengalami kontraksi sampai dengan -2,39 persen sebagai dampak virus Covid-19. Perekonomian Jawa Timur 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 2.299.464,87 juta, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 1.610.419,65 juta. Nilai ini jelas menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dimana Perekonomian Jawa Timur 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebelumnya mencapai Rp 2.345.790,59 juta, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 1.649.768,12 juta.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Gambar 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur tahun 2020

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur memang sudah terlihat melambat dari kuartal I 2020 terhadap kuartal IV 2019, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai angka 3,04. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur 2020 diperkirakan dikarenakan bergesernya masa panen dari Maret ke April yang diakibatkan adanya serangan hama, terhambatnya pasokan bahan baku dari Cina ke Jawa Timur akibat pandemi Corona Virus (Covid-19) di Cina, dan juga imbauan berdiam di rumah (stay at home) dan bekerja dari rumah (work from home) yang diakibatkan pandemi Corona Virus (Covid-19) di Indonesia.

Penurunan pertumbuhan ekonomi ini juga terjadi di kuartal II 2020, bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada Kuartal ini menembus -5,45. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi Corona Virus (Covid-19) di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh yang cukup masif pada perekonomian Provinsi Jawa Timur pada Kuartal ini. Uraian secara detail tentang kondisi ekonomi di Jawa Timur akan dijelaskan sebagai berikut.

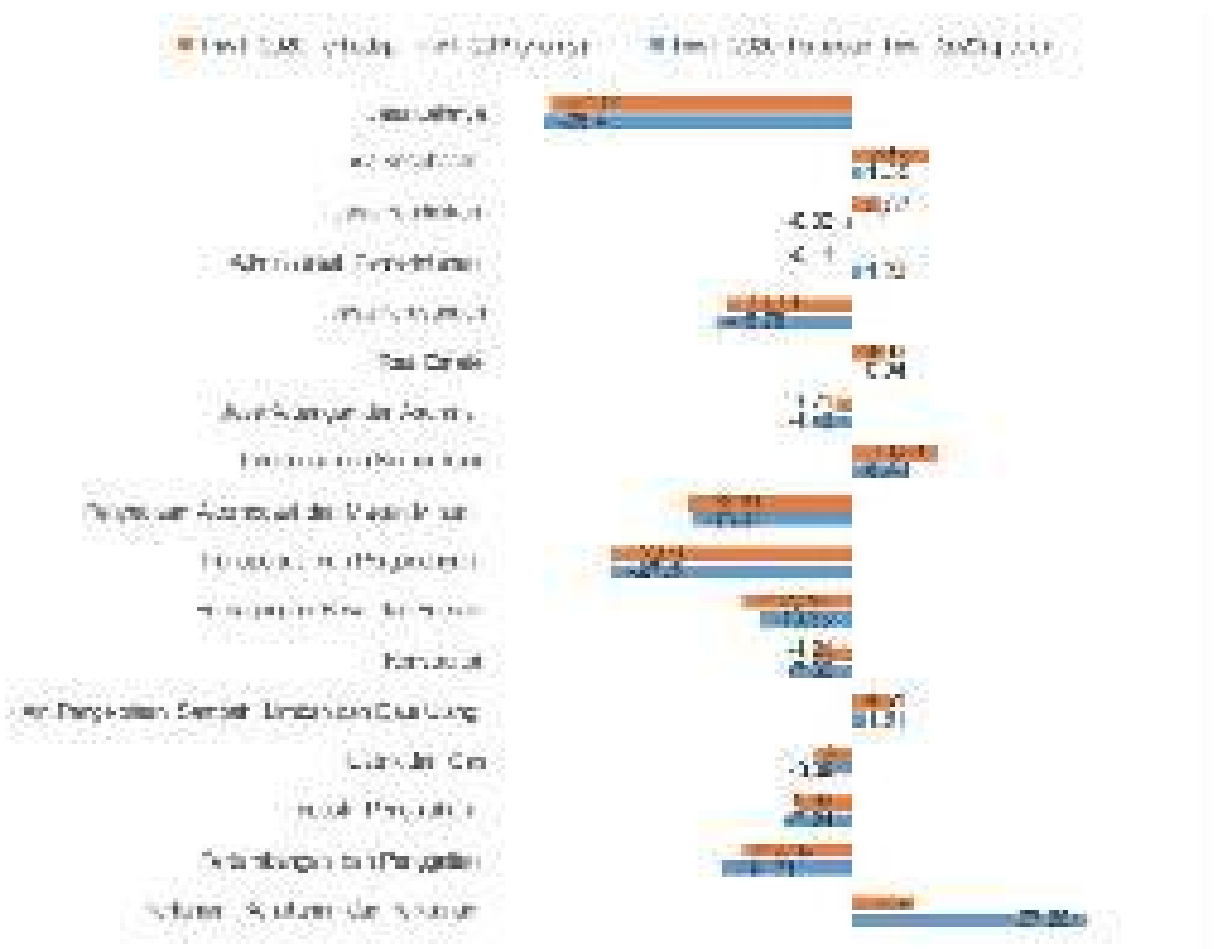
Perekonomian Jawa Timur Triwulan II-2019 turun sebesar 5,45 persen dari kuartal sebelumnya. Berdasarkan struktur PDRB menurut lapangan usaha, berdasarkan perbandingan per kuartal (q to q) terlihat memang pada kuartal II ini, sektor-sektor mengalami penurunan kinerja yang diakibatkan oleh Pandemi Corona Virus (Covid-19). Selain dampak kesehatan, dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat, dan juga guna memutus rantai penyebaran virus, maka munculah imbauan berdiam di rumah (stay at home) dan bekerja dari rumah (work from home) yang mana inti aktivitas ini adalah mengurangi

aktivitas di luar rumah, sehingga imbauan ini, yang kemudian ditindak lanjuti dengan beberapa kebijakan seperti lockdown dan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), memperlambat roda perekonomian yang umumnya membutuhkan banyak interaksi langsung.

Hal ini terlihat pada kinerja sector-sektor andalan Provinsi Jawa Timur yang menurun, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Jasa Perusahaan, dan Penyediaan Makan dan Minum. Kecuali sector pertanian, kehutanan dan perikanan, seluruh sector andalan mengalami penurunan pertumbuhan akibat pandemi, penurunan sector jasa perusahaan, perdagangan, dan industry pengolahan, mengindikasikan perusahaan terpaksa mengurangi atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya, yang mana hal ini mengakibatkan perusahaan harus merumahkan atau memutus kontrak para pekerja.

Kebijakan ini perlu dilakukan oleh perusahaan untuk memangkas biaya akibat turunnya permintaan (demand) yang mana hal ini, justru juga berpartisipasi dalam mengurangi tingkat daya beli masyarakat. Permintaan pada awalnya sudah terdampak oleh kecenderungan masyarakat untuk tetap di rumah, namun ketika imbauan dan kebijakan seperti lockdown, work from home, stay at home, dan PSBB diterapkan, dampaknya menyebar pada pemutusan hubungan kerja para pekerja terutama pekerja yang berada di sector-sektor andalan Jawa Timur.

Masyarakat yang kehilangan pekerjaan maka akan berkurang pula daya belinya, sehingga mereka cenderung mengurangi konsumsi dan enggan dan berjaga-jaga dalam membelanjakan uangnya, sehingga hal ini memperparah penurunan permintaan masyarakat.

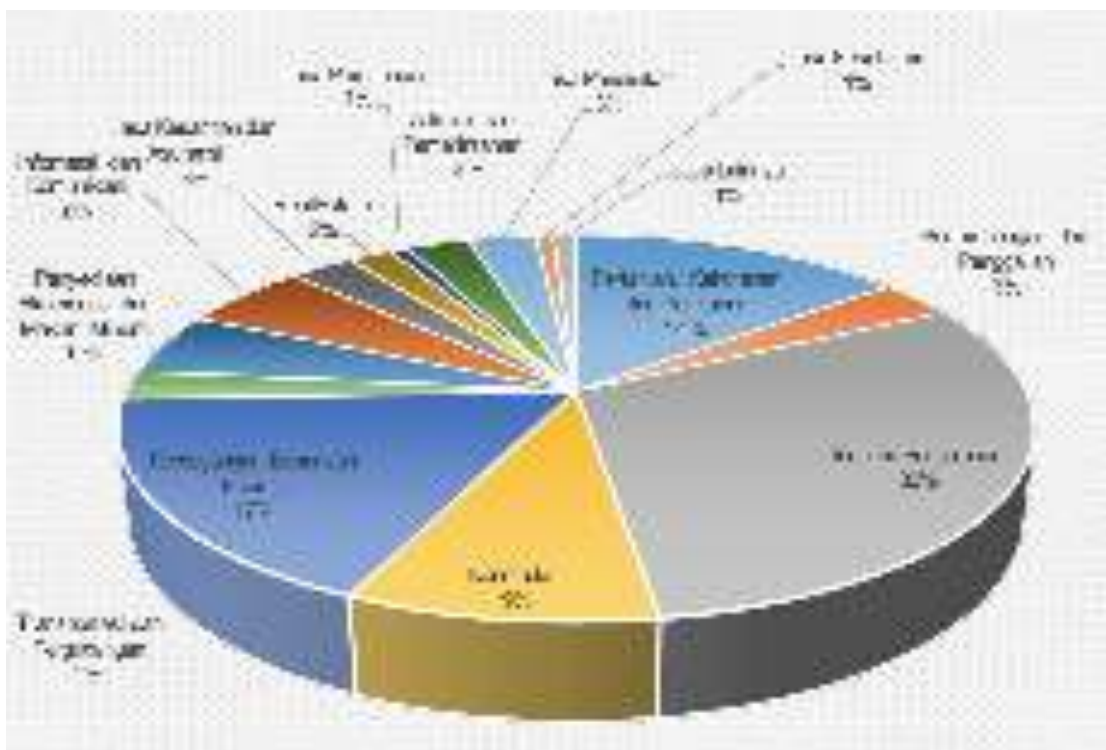


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Gambar 3.5
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ditengah tren penurunan aktivitas pada sector-sektor utama pada PDRB Provinsi Jawa Timur yang diakibatkan oleh pandemic COVID-19, pandemi ini memberikan pengaruh positif pada sector informasi dan komunikasi, berdasarkan data Triwulan II 2020 terhadap Triwulan II 2019 (y on y), sector ini justru tumbuh 10,39 dan berdasar data q to q, nilai ini tumbuh menjadi 6,41. Peningkatan ini disebabkan bahwa ketika beraktifitas dan bekerja dialihkan di rumah, maka penggunaan internet dan media elektronik lainnya meningkat dengan pesat. Interaksi social dan bahkan bekerja dilakukan melalui daring, sehingga kebutuhan dan penggunaan akan internet tentu meningkat dengan pesat dan terefleksikan dari peningkatan pertumbuhan pada sector ini.

Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha Triwulan II-2020 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,05 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,40 persen, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,11 persen.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Gambar 3.6
Struktur PDRB Jawa Timur Triwulan II 2020

Kendati dua dari tiga sektor utama mengalami penurunan pertumbuhan, akan tetapi kontribusi sector-sector ini dalam struktur PDRB cukup besar disbanding sector lainnya, terlihat dua sector tersebut adalah sector industry pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor pertanian memiliki capaian yang menarik, bahwa pertumbuhan dan kontribusi pada PDRB memiliki angka positif, hal ini mengindikasikan bahwa ditengah pandemi Covid-19, pandemi ini tidak memberikan dampak buruk pada sektor pertanian. Maka, ketika orientasinya tidak hanya pada produksi namun pemerintah diharapkan mampu mendorong peningkatan ekspor pertanian, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kesejahteraan para petani sehingga persediaan pangan juga tercukupi dalam suasana pandemi Covid-19.

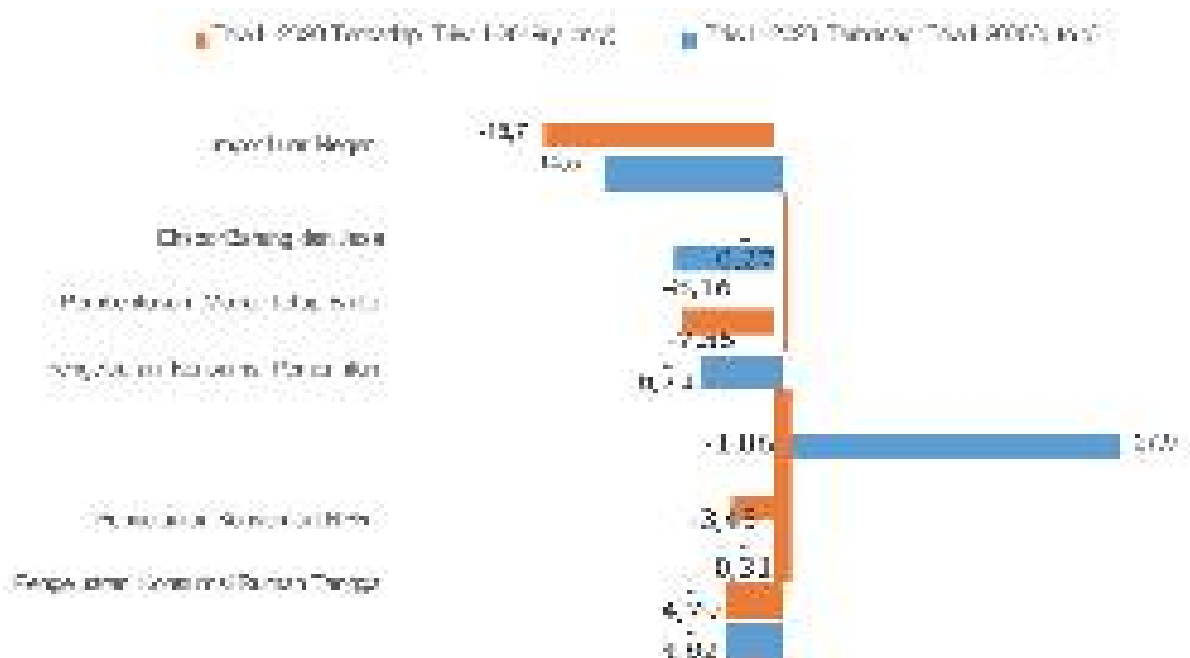
Ekonomi Jawa Timur pada Triwulan II-2020 terkontraksi cukup dalam bila dibandingkan Triwulan II-2019 (y-on-y) yaitu sebesar 5,90 persen. Semua komponen PDRB Menurut Pengeluaran mengalami kontraksi. Kontraksi terendah pada Ekspor Luar Negeri 0,27 persen; disusul Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,06 persen; Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3,45 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga 4,79 persen; PMTB 7,55 persen dan Impor Luar Negeri 18,70 persen.

Terkontraksinya semua komponen dipengaruhi oleh pandemi covid 19 yang menyebabkan adanya kebijakan pemerintah dengan memberlakukan PSBB sehingga membatasi ruang gerak masyarakat maupun perusahaan dalam beraktivitas sehingga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah terkontraksi hampir disemua pos anggaran seperti belanja pegawai, barang, modal dan sosial baik pada anggaran APBD maupun APBN. Ekspor migas unggulan Jawa Timur seperti lemak dan minyak hewan, tembakau, produk kimia, bahan kimia organik, kertas kanton, migas serta ekspor jasa mengalami kontraksi.

Struktur PDRB Jawa Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Triwulan II-2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga yang mencapai separuh lebih PDRB Jawa Timur (61,02 persen), komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Jawa Timur berturut-turut adalah PMTB (27,74 persen), Ekspor Luar Negeri (12,70 persen), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (5,91 persen), Lainnya (6,56 persen) dan sebagai pengurang yakni Impor Luar Negeri (13,93 persen).

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021



Gambar 3.7
Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Triwulan II-2020 (y-on-y) dan (q to q)

PDRB per kapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk Jawa Timur. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

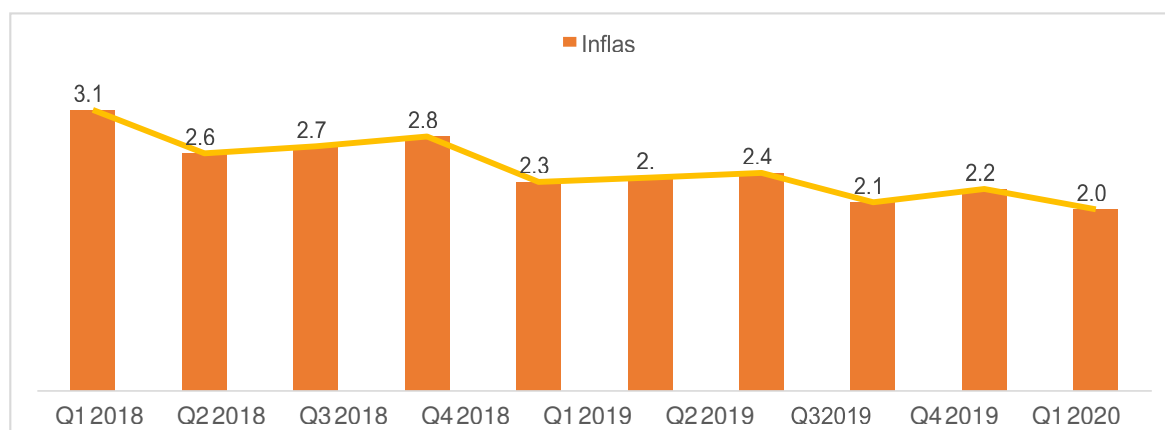


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Gambar 3.8
PDRB per Kapita Jawa Timur Tahun 2014-2019

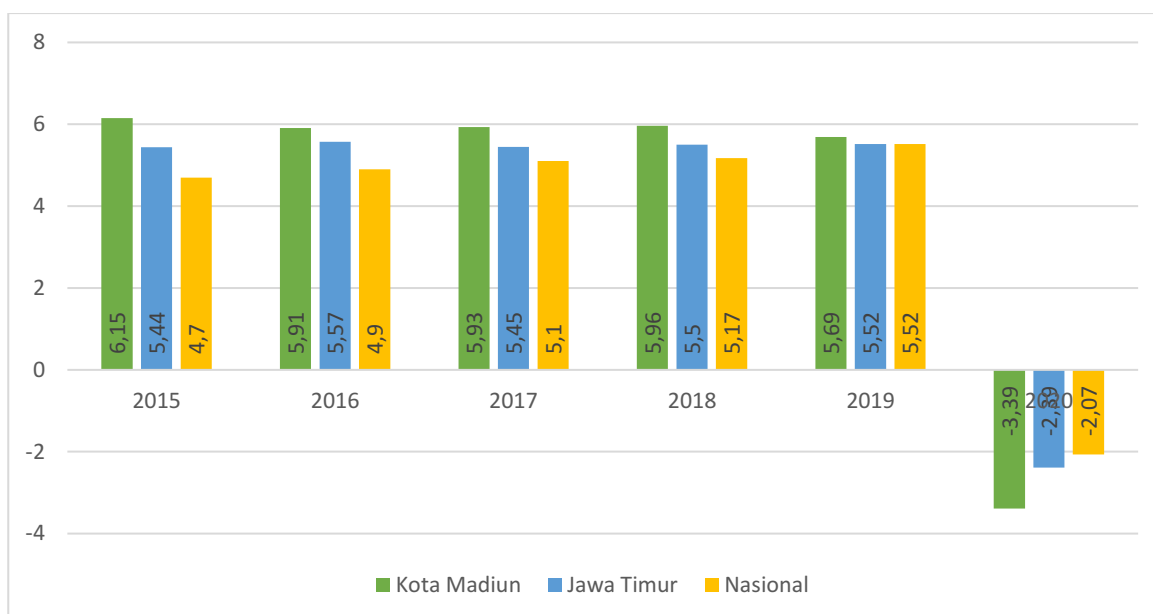
Dalam enam tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Jawa Timur selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB perkapita Jawa Timur mencapai Rp. 39,83 juta, pada Tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 43,54 juta. Pada tahun 2016 PDRB perkapita menjadi Rp. 47,53 juta; tahun 2017 sebesar Rp. 51,22 juta, Tahun 2018 menjadi Rp. 55,43 Juta dan tahun 2019 menjadi Rp. 59,25 Juta. Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan karena perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan meningkatnya PDRB per kapita tersebut, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dari segi ekonomi semakin baik.

Inflasi Jawa Timur pada triwulan II 2020 sebesar 2,04% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni 2,27%. Penurunan ini disebabkan oleh terkendalinya inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, yang mana dipengaruhi oleh panen raya padi dan hortikultura di beberapa wilayah Jawa Timur. Selain itu, pelanggaran PSBB turut memberikan andil dengan kelancaran pengiriman barang. Atas dua factor tersebut maka pasokan bahan makan terjaga, sehingga menjadi fondasi utama dalam terkendalinya inflasi di Jawa Timur.



Sumber: Bank Indonesia, 2021

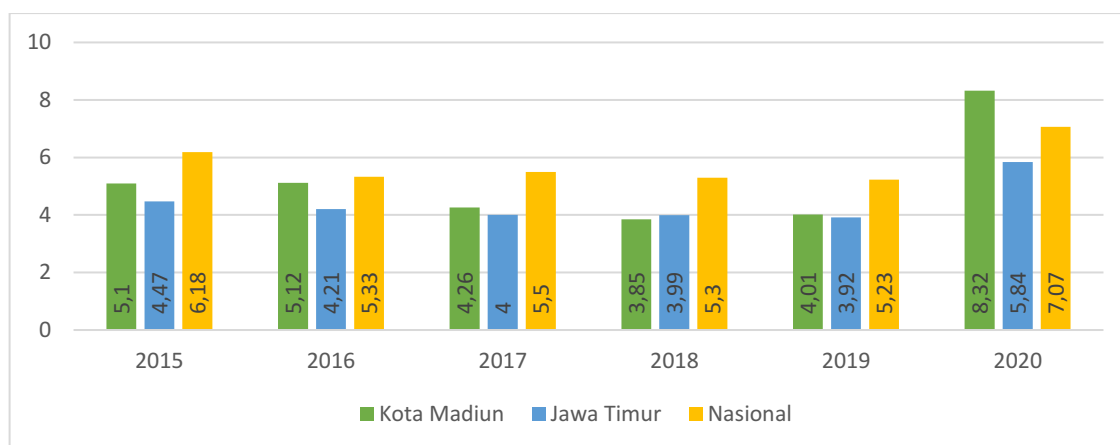
Gambar 3.9
Laju Inflasi Provinsi Jawa Timur (Q1 2018 – Q2 2020)



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Grafik 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2020

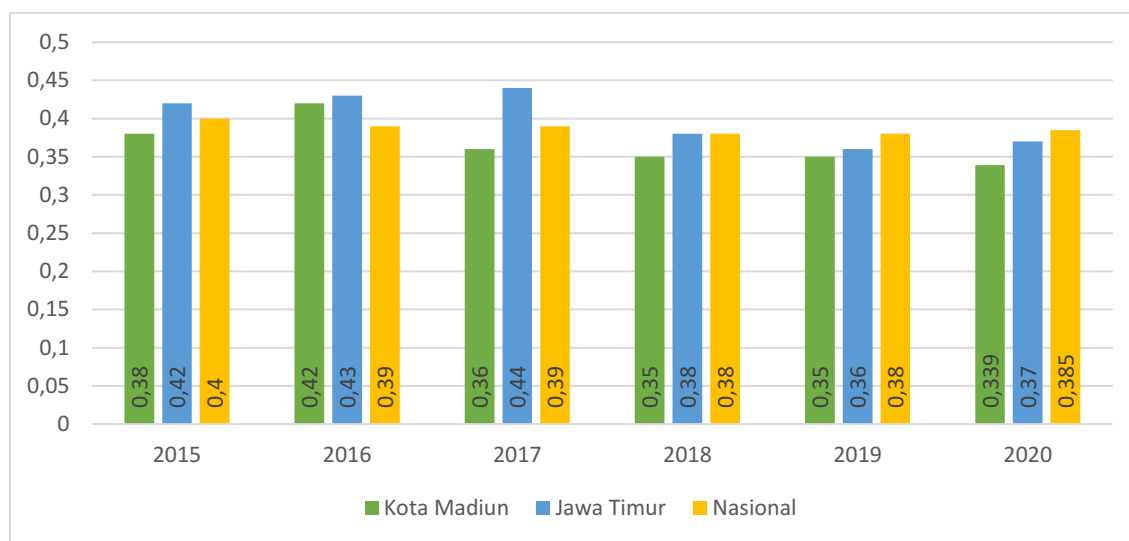
Sebelum terjadinya Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2015 sebesar 6,15 persen jauh diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang hanya sebesar 5,44 persen dan 4,7 persen. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan hingga 5,69 persen namun masih diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Sebagai dampak pandemic Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota madiun mengalami kontraksi yang dalam yaitu sebesar -3,39 persen di bandingkan Jawa Timur dan Nasional dengan nilai pertumbuhan masing-masing sebesar -2,39 persen dan -2,07 persen. Penurunan yang sangat drastis pada pertumbuhan ekonomi sebagai dampak Covid-19, mengindikasikan bahwa kondisi fundamental makro ekonomi Kota Madiun masih rentan terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Grafik 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2020

Dalam lima tahun terakhir sebelum terjadinya pandemic covid-19, TPT kota Madiun selalu berada di bawah TPT nasional. Pada tahun 2015 TPT Kota Madiun sebesar 5,10 persen berada di atas TPT Jawa Timur (4,47 persen) namun masih di bawah TPT Nasional (6,18 persen). Pada tahun 2019, TPT Kota Madiun sedikit diatas Jawa Timur tapi jauh di bawah Nasional. Namun, pandemic covid-19 tahun 2020 menyebabkan TPT Kota Madiun mengalami peningkatan sebesar 8,32 persen. Nilai tersebut diatas TPT Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,84 persen dan 7,07 persen.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

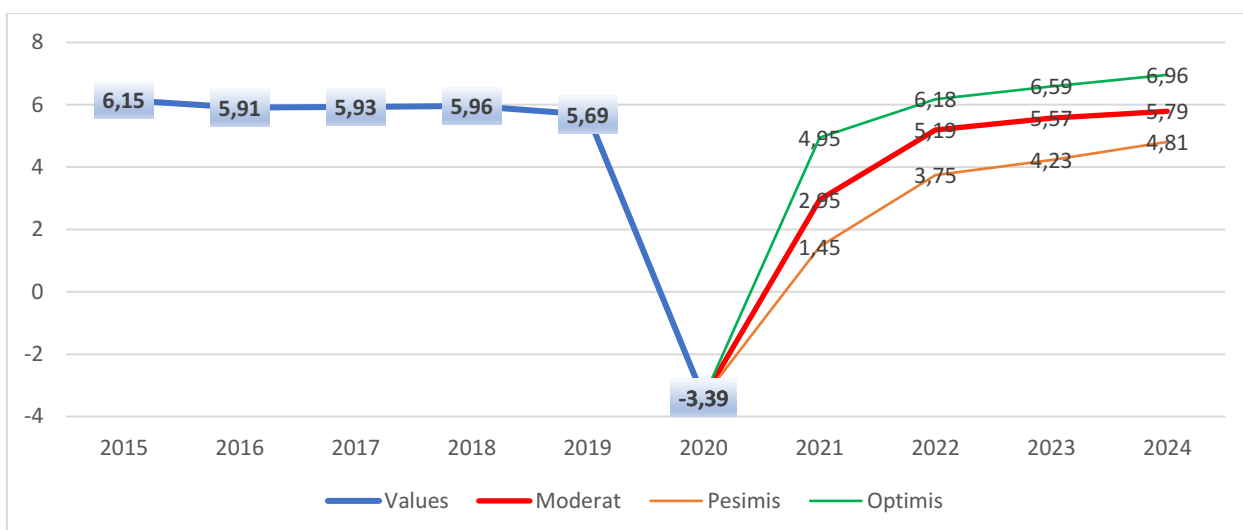
Grafik 3.4

Gini Rasio Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2020

Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi saja namun juga dilihat dari aspek pemertaan pembangunan yang salah satunya di tunjukan oleh gini ratio. Gini ratio Kota Madiun dalam tiga tahun terakhir selalu di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada Tahun 2017, gini rasio Kota Madiun Sebesar 0,36 lebih rendah dari pada Jawa Timur (0,44) dan Nasional (0,39). Ketika terjadi Pandemi Covid-19, ketimpangan pendapatan Kota Madiun justru mengalami penurunan menjadi sebesar 0,339. Nilai tersebut terendah dalam enam tahun terakhir

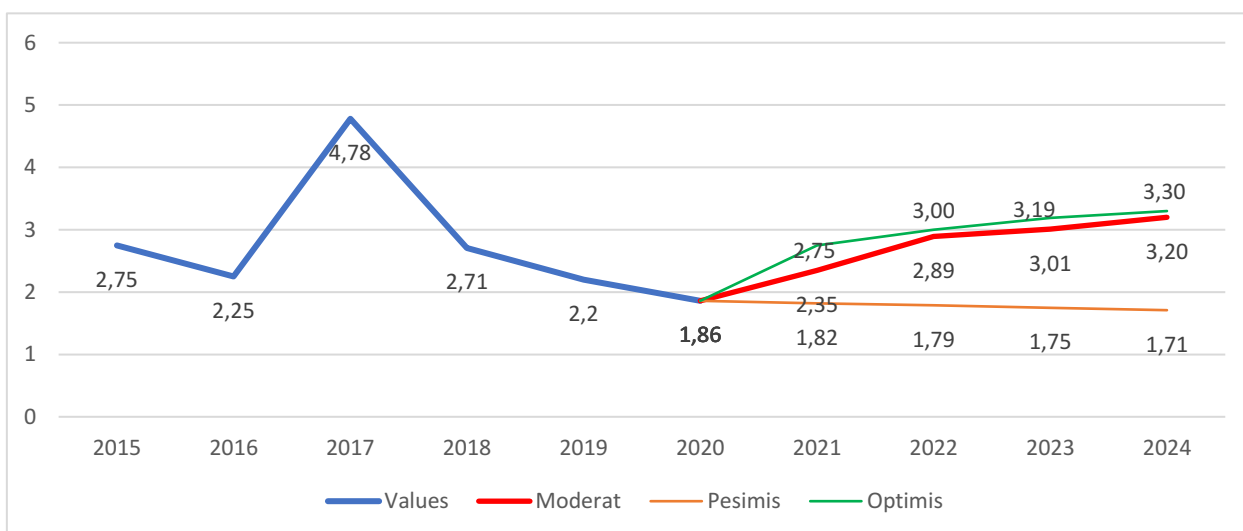
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Madiun Tahun 2021 dan Tahun 2022

Pada tahun 2020, tantangan utama perekonomian Kota Madiun adalah penanganan pandemi COVID-19. Sedangkan pada tahun selanjutnya, tantangan terbesar adalah pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dampak dari pandemi tersebut. Hasil proyeksi dengan berbagai skenario yang digunakan, prospek perekonomian Kota Madiun Pasca COVID-19 menunjukkan proyeksi kondisi ekonomi yang mengalami perbaikan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.



Grafik 3.5
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

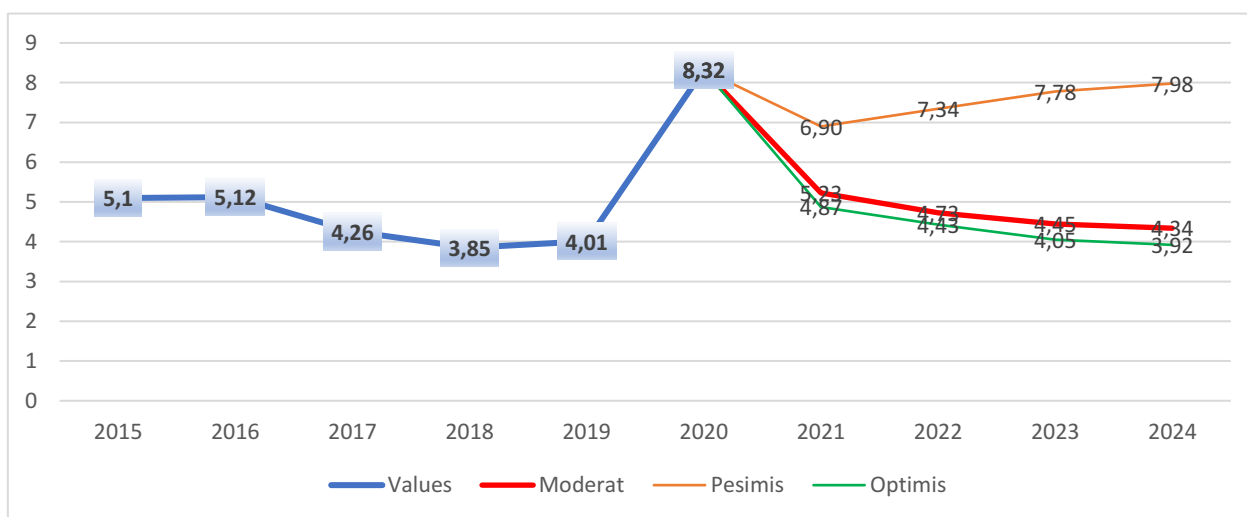
Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan. Pada tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan ekonomi masih cukup progresif dengan adanya peningkatan yakni dari 5,93 ke 5,96. Namun demikian terjadi penurunan di tahun 2019 menjadi 5,69 persen dan mengalami kontraksi sebagai akibat adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 yaitu menjadi minus 3,39 persen. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mengalami peningkatan hingga 2,95 persen dengan skema moderat, seiring dengan proses pemulihan ekonomi meskipun masih di bayangi oleh meningkatnya kasus Covid19. Pada tahun 2022, dengan asumsi program vaksinasi Covid19 telah berhasil menurunkan kasus Covid19, maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat menjadi 5,19 persen dengan skema moderat.



Grafik 3.6
Proyeksi Inflasi Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

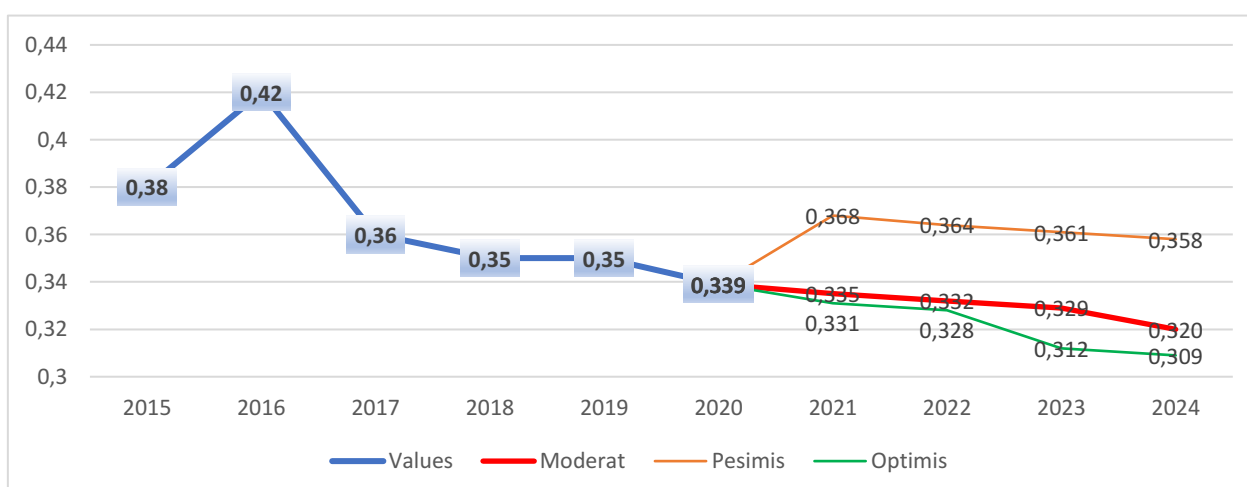
Inflasi Kota Madiun dalam tiga tahun terakhir mengalami nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2015, inflasi sebesar 2,75 persen dan mengalami peningkatan sebesar 4,78 persen tahun 2017. Setelah tahun 2017, nilai inflasi

mengalami trend yang semakin menurun. Pada tahun 2019, tingkat inflasi mengalami penurunan sebesar 2,20 persen. Selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap inflasi tahun 2020 mengalami penurunan hingga 1,86 persen. Penurunan tersebut mengindikasikan kondisi daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak luas COVID-19. Pada tahun 2021, tingkat inflasi diproyeksikan mengalami perbaikan dan berada pada angka 2,25 dengan skenario moderat. Sedangkan tahun 2022, nilai inflasi di proyeksikan sebesar 2,89 persen dengan skema moderat. Sedangkan dengan skema optimis sebesar 3 persen. Nilai inflasi yang stabil dalam perekonomian, jika nilainya berada pada rentang 3 – 5 persen.



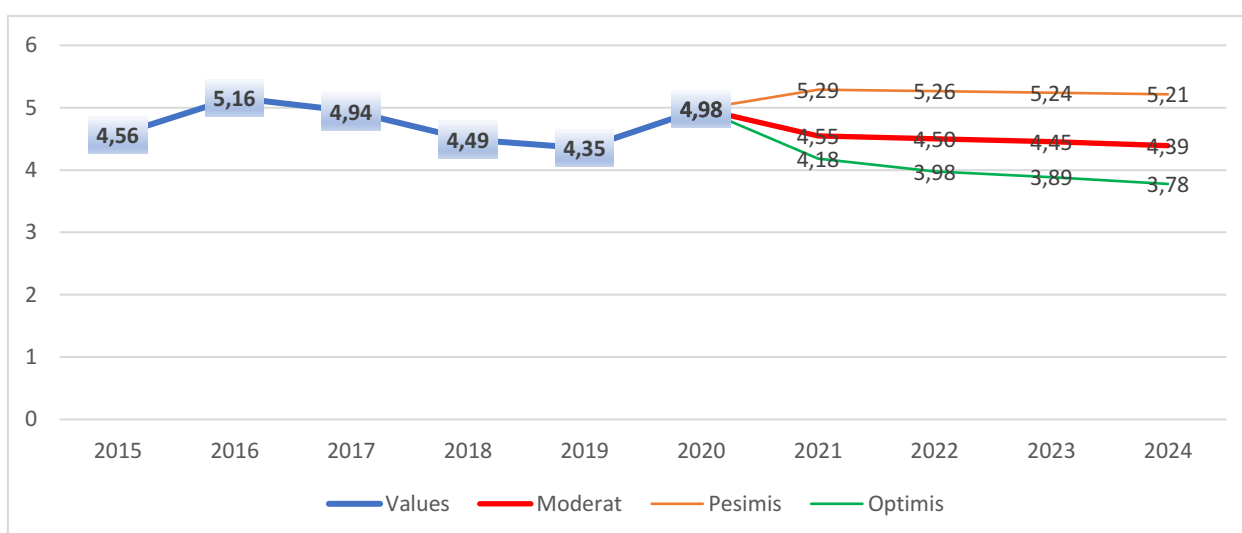
Grafik 3.7
Proyeksi TPT Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dan tahun 2020, TPT mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, TPT Kota Madiun sebesar 4,01 persen. Kemudian, pada tahun 2020, TPT mengalami peningkatan sebesar 8,32 persen. Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, TPT diproyeksikan akan mengalami penurunan hingga mencapai 5,23 persen dengan skema moderat.



Grafik 3.8
Proyeksi Ketimpangan pendapatan Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Meski terdapat pelemahan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya TPT sebagai dampak COVID19, ketimpangan pendapatan tahun 2020 justru mengalami penurunan hingga 0,339. Kemudian di tahun 2021 sampai 2024, rasio gini diproyeksikan akan berada pada rentang 0,30 – 0,33. Oleh karena itu, risiko terkait melebarnya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi sebagai akibat dari gejolak akibat pandemi Covid19.



Grafik 3.9
Proyeksi Tingkat kemiskinan Kota Madiun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tingkat kemiskinan di Kota Madiun sejak tahun 2016 – 2019 terus mengalami penurunan. Pada periode tersebut, tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang relatif cepat. Namun pada tahun 2019, penurunan kemiskinan mengalami perlambatan. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan sebagai dampak pandemic COVID-19 yaitu sebesar 4,98 persen. Pada tahun 2021, dengan menurunnya eskalasi pandemic, tingkat kemiskinan diproyeksikan mengalami penurunan hingga sebesar 4,55 persen dengan skenario moderat. Jika digunakan skenario optimis, maka tingkat kemiskinan pada tahun 2021 menjadi sebesar 4,18 persen dan tahun 2022 diproyeksikan sebesar 3,98 persen.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2022

Arah kebijakan ekonomi Kota Madiun tahun 2022 diprioritaskan pada upaya stabilisasi dan pemulihan ekonomi Kota Madiun sebagai dampak COVID-19. Beberapa kebijakan tersebut fokus pada pemulihan (*recovery*) kondisi perekonomian pasca wabah COVID-19, peningkatan infrastruktur daerah, dan penguatan kondisi ekonomi daerah. Secara rinci, arah kebijakan Kota Madiun Tahun 2022 berdasarkan kondisi ekisting dan permasalahan pembangunan antara lain:



Grafik 2.10
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2022

1. Peningkatan kondisi perekonomian pasca COVID-19
Orientasi pergerakan ekonomi difokuskan pada pemulihan/*recovery* dampak COVID-19 pada semua sektor ekonomi. Dalam rangka percepatan *recovery* perekonomian, maka difokuskan pada sektor unggulan dan potensial, khususnya sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri berbasis sumber daya lokal, dan pariwisata untuk mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,19 persen dengan skenario moderat Tahun 2022. Pertumbuhan ini diharapkan dapat disertai dengan pemerataan pendapatan pada semua lapisan masyarakat (pertumbuhan inklusif). Inflasi daerah dijaga pada posisi 3–5 %, inflasi yang terkendali diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur
Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan infrastruktur kawasan baik kelurahan maupun kecamatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah
3. Peningkatan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif
Kebijakan menarik investasi dalam rangka mengakselerasi *recovery* dari dampak COVID-19 difokuskan pada peningkatan promosi investasi pada sektor pariwisata, pertanian dan agroindustry.
4. Peningkatan kemandirian ekonomi berbasis kelurahan

Mendorong pergerakan ekonomi di kawasan kelurahan dengan fokus pada pemanfaatan potensi dan sumberdaya lokal serta mengoptimalkan penggunaan program pengembangn keluarahn untuk menstimulus perekonomian

5. Peningkatan kapasitas fiskal daerah

Kebijakan relaksasi dalam rangka *recovery* COVID-19 dapat difokuskan pada stimulus fiskal bagi perekonomian dan dunia usaha, salah satunya dengan kebijakan *sunset policy*. Kebijakan relaksasi ini dapat diikuti dengan peningkatan program pemberdayaan Usaha Mikro dan koperasi

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Madiun mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Madiun dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

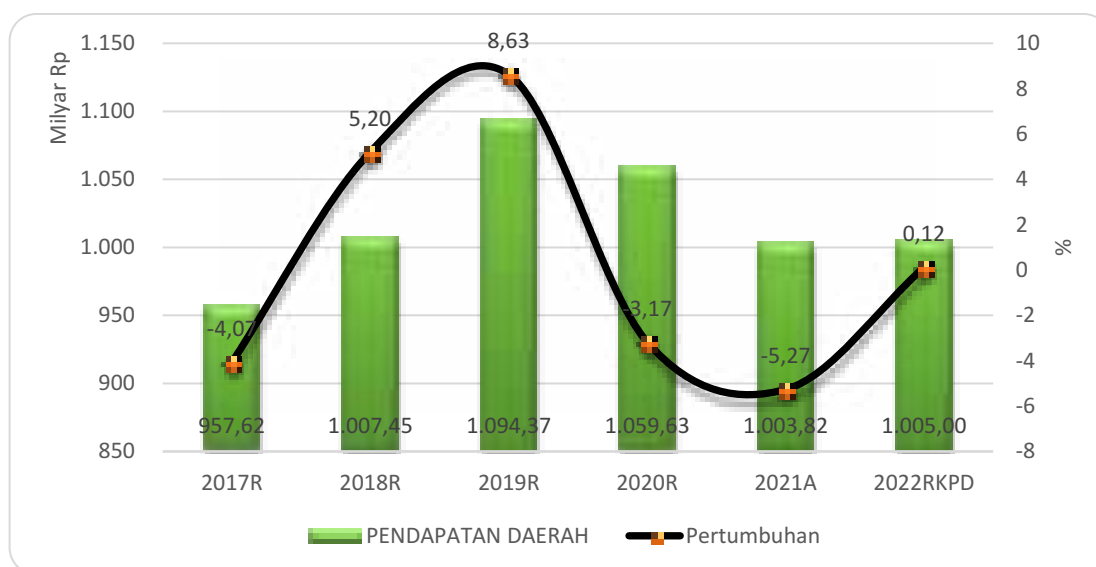
Kerangka pendanaan berisi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan transfer bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selanjutnya pendapatan yang sah terdiri dari Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemda Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan Kota. Proyeksi keuangan daerah Kota Madiun Tahun 2022 memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Asumsi Makro RKPD Kota Madiun 2022

No	Indikator Makro	Satuan	Target RKP 2022	Target RKPD Kota Madiun 2022
1	Laju pertumbuhan Ekonomi	%	5,4 – 6,0	3,75 – 6,18
2	Tingkat kemiskinan	%	8,5 – 9,0	3,98 – 5,26
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,5 – 6,2	4,43 – 7,34
4	Indek Pembangunan Manusia	-	73,44 – 73,48	80,76 – 80,97
5	Gini Rasio	-	0,376 – 0,378	0,328 – 0,364

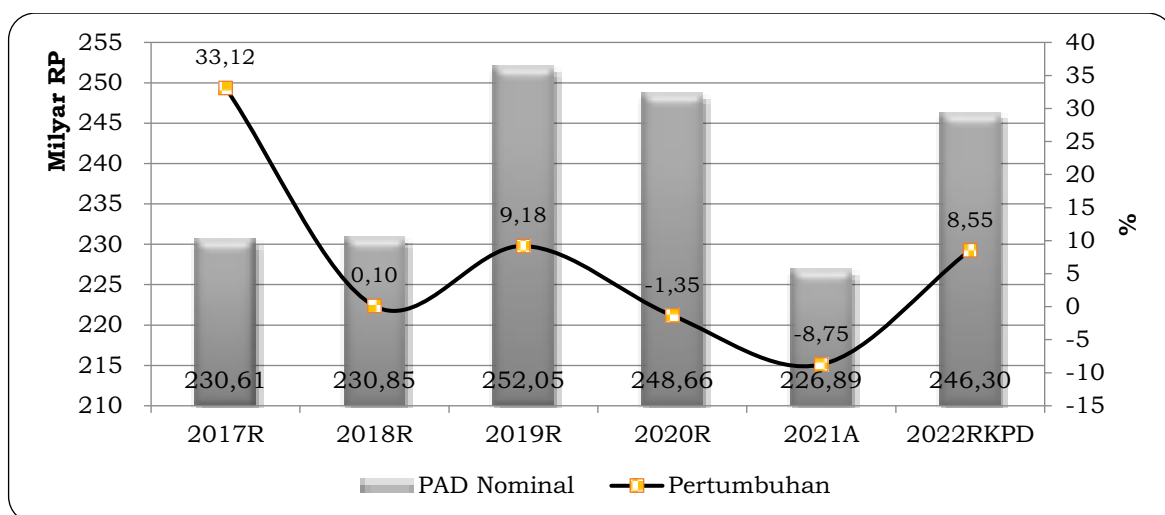
Asumsi diatas, didasarkan pada rentang skenario pesimis ke optimis seperti yang sudah dijelaskan dalam sub bab 3.1.2. Selain asumsi makro diatas, beberapa asumsi lainnya adalah tingkat inflasi kisaran 2 – 3 persen; Pendapatan Transfer diproyeksikan turun sebesar 2,41 persen; dan target anggaran tahun 2022 diproyeksikan memiliki SiLPA Rp 0.



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021

Grafik 3.11
Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2017-2022

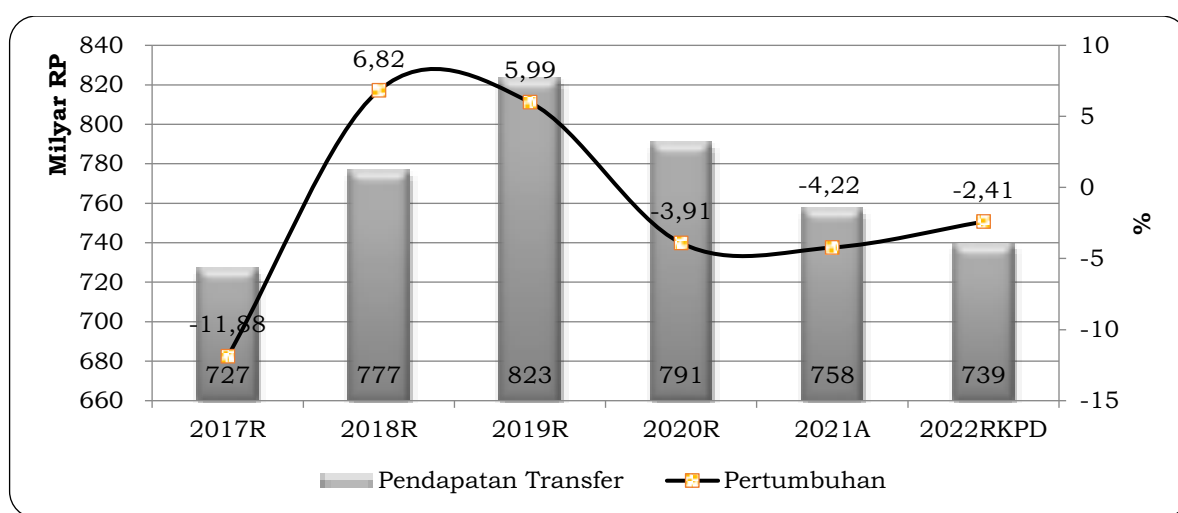
Pertumbuhan pendapatan nominal Kota Madiun sampai dengan tahun 2019 menunjukkan tren yang semakin meningkat. Namun pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan trend yang menurun. Realisasi pendapatan pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 5,20 persen, dimana pada tahun sebelumnya, nilainya turun sebesar 4,07 persen. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,63 persen. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan daerah pertumbuhannya menunjukkan penurunan sebesar 3,17. Selanjutnya, pada Tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan semakin menurun menjadi sebesar -5,27 persen dan sedikit meningkat sebesar 0,12 persen dengan nilai pendapatan daerah sebesar Rp 1.004.999.753.910,00.



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021

Grafik 3.12
Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2017-2022

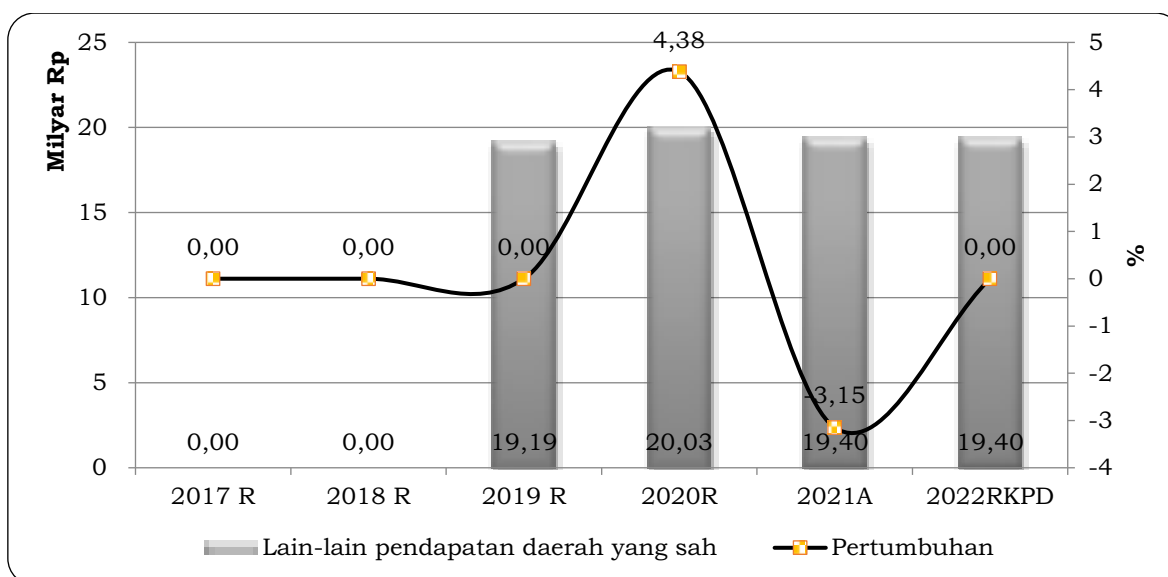
Pertumbuhan PAD tahun 2019 mengalami peningkatan yang relatif tinggi dibandingkan tahun 2018 namun diikuti penurunan selama 2 tahun ke depan. Tahun 2019 merupakan capaian pertumbuhan PAD tertinggi dengan nilai pertumbuhan sebesar 9,18 persen. Kemudian PAD terus tertekan dengan pertumbuhan -1,35 dan -8,75 masing masing untuk realisasi APBD tahun 2020 dan target APBD 2021. PAD diproyeksikan meningkat kembali di tahun 2022 dengan nilai pertumbuhan yang mencapai 8,55 persen. Selanjutnya, perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat dalam grafik berikut:



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021

Grafik 3.13
Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2017-2022

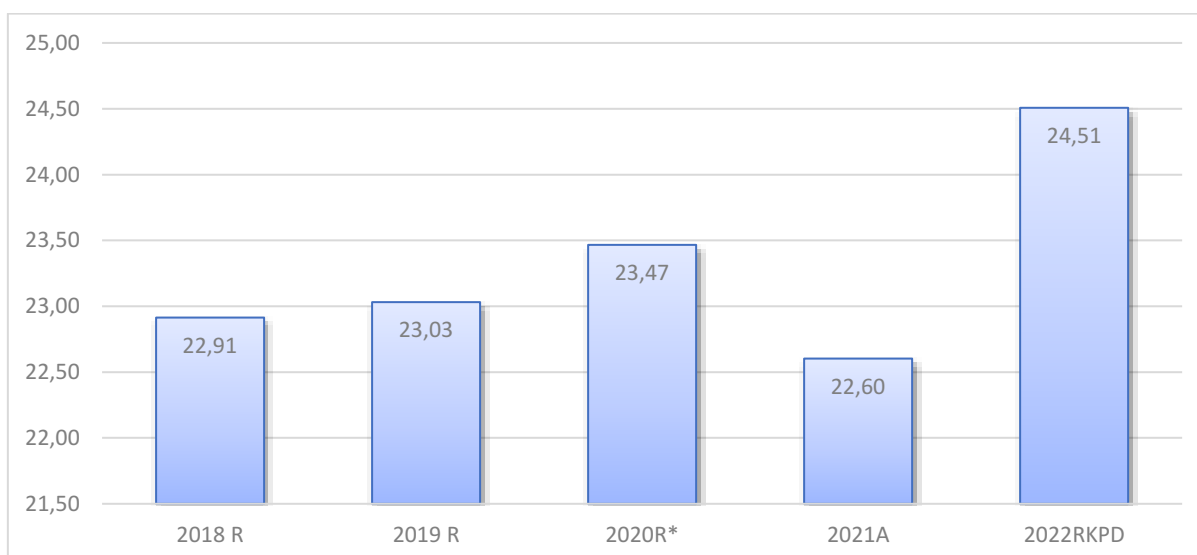
Secara nominal, realisasi pendapatan transfer sampai dengan tahun 2019 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018, persentase peningkatan pendapatan transfer sebesar 6,82 persen dan terus mengalami penurunan pada tahun tahun berikutnya. Tahun 2022 diperkirakan realisasi pendapatan transfer kembali meningkat dibandingkan tahun 2021, dari minus 4,22 persen menjadi minus 2,41 persen. Selanjutnya, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021

Grafik 3.14
Perkembangan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Madiun Tahun 2017-2022

Selama periode 2019 dan 2020, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2019, realisasinya sebesar Rp. 19,19 milyar dan meningkat menjadi Rp. 20,03 Milyar tahun 2020. Pada tahun 2021, nilai lain-lain pendapatan daerah yang sah di targetkan sebesar Rp. 19,40 Milyar. Sedangkan pada RKPD 2022, nilai komponen pendapatan ini di proyeksikan sama dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah, maka perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021

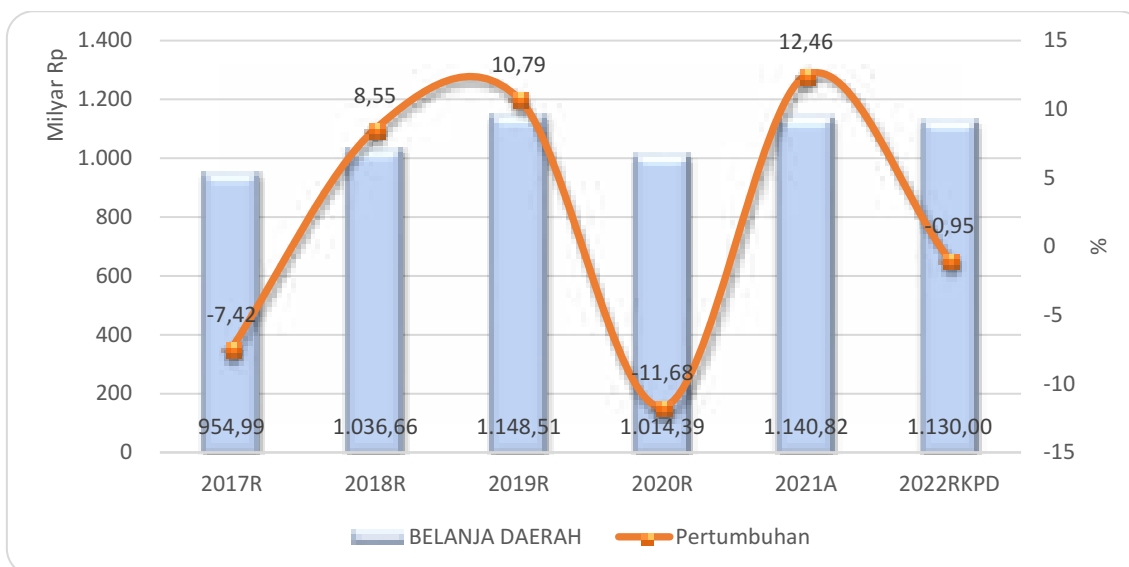
Grafik 3.15
Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %)
Kota Madiun Tahun 2017-2022

Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Madiun pada Tahun 2022 diproyeksikan meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun tersebut, Derajat Desentralisasi Fiskal diproyeksikan sebesar 24,51 persen. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 22,60 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proyeksi yang ditetapkan mengarah pada peningkatan derajat desentralisasi fiskal ditengah pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat pandemi covid19. Realisasi Pendapatan Kota Madiun Tahun dari 2017 sampai dengan 2020, target 2021 dan proyeksi Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2017 s.d Tahun 2022

	Uraian	JUMLAH					
		2017R	2018R	2019R	2020R*	2021A	2022RKPD
1	PENDAPATAN DAERAH	957.624.973.325,14	1.007.446.240.137,64	1.094.367.497.996,59	1.059.625.581.411,32	1.003.822.143.093,00	1.004.999.753.910,00
01.01	Pendapatan Asli Daerah	230.608.717.369,14	230.847.977.146,73	252.048.754.413,59	248.656.192.759,32	226.891.939.093,00	246.298.823.859,00
01.01.01	Pajak daerah	75.224.831.585,44	83.454.704.361,41	91.077.191.655,45	90.286.840.987,07	76.978.000.000,00	86.255.000.000,00
01.01.02	Retribusi daerah	18.407.218.016,50	19.138.960.648,50	20.301.325.919,00	15.291.324.019,00	16.731.224.667,00	17.841.947.807,00
01.01.03	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.320.249.415,39	13.365.402.573,59	14.641.711.340,55	15.216.268.562,40	15.092.455.426,00	15.216.268.562,00
01.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	123.656.418.351,81	114.888.909.563,23	126.028.525.498,59	127.861.759.190,85	118.090.259.000,00	126.985.607.490,00
01.02	Pendapatan Transfer	727.016.255.956,00	776.598.262.990,91	823.129.463.583,00	790.939.408.652,00	757.530.604.000,00	739.301.330.051,00
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	646.473.881.834,00	678.417.066.007,00	737.079.907.650,00	705.872.676.797,00	692.146.911.000,00	677.911.879.000,00
1.2.1.01.01.1	Dana bagi hasil pajak	27.325.331.947,00	25.390.798.853,00	16.076.390.385,00	34.444.290.949,20	19.174.345.664,00	19.174.345.664,00
1.2.1.01.01.2	Dana bagi hasil bukan pajak	18.680.122.868,00	67.464.332.495,00	52.685.578.633,00	51.666.436.423,80	43.349.063.336,00	43.349.063.336,00
1.2.1.01.01.3	Dana Bagi hasil cukai	13.308.934.159,00	13.119.146.000,00	13.939.983.813,00	0,00	16.345.513.000,00	16.345.513.000,00
1.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	502.392.070.000,00	501.753.246.649,00	522.596.024.000,00	473.852.439.000,00	480.897.030.000,00	480.897.030.000,00
1.2.1.01.01.5	Dana Alokasi khusus	77.267.422.860,00	70.689.542.010,00	76.239.204.819,00	72.596.481.424,00	79.356.096.000,00	79.356.096.000,00
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	0	55.542.726.000,00	73.313.029.000,00	53.024.863.000,00	53.024.863.000,00
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
01.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.542.374.122,00	98.181.196.983,91	86.049.555.933,00	85.066.731.855,00	65.383.693.000,00	61.389.451.051,00
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	79.825.524.122,00	79.153.128.616,00	84.934.976.933,00	84.049.652.855,00	64.366.614.000,00	60.321.518.101,00
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	716.850.000,00	19.028.068.367,91	1.114.579.000,00	1.017.079.000,00	1.017.079.000,00	1.067.932.950,00
01.03	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00
01.03.01	Hibah	0,00	0,00	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00
01.03.02	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

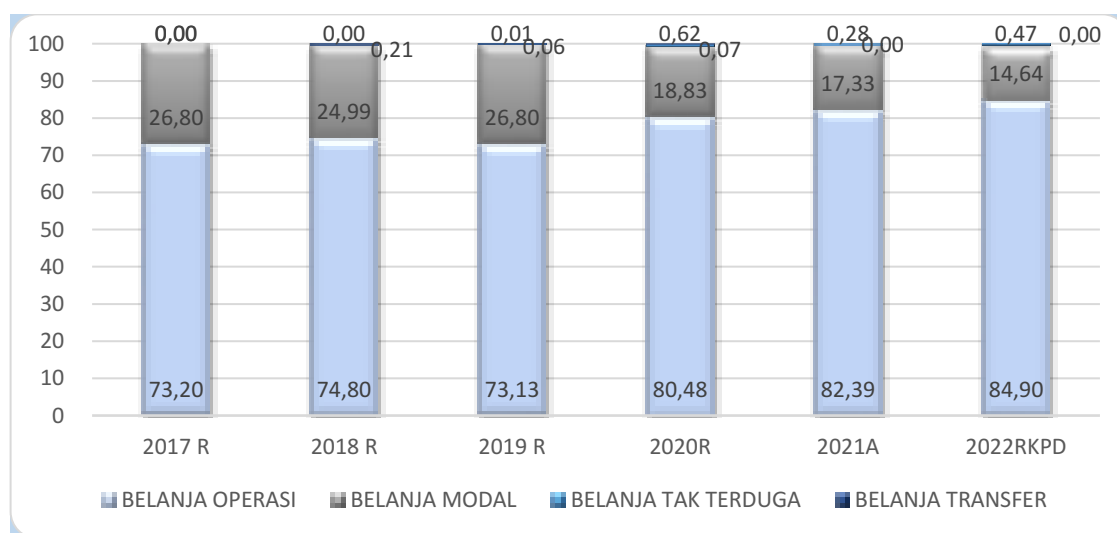
Sumber: BPPKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2021



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021

Grafik 3.16
Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2017-2022

Pertumbuhan belanja daerah pada Tahun 2022 diproyeksikan menurun dibandingkan target tahun sebelumnya. Penurunan tersebut sebesar 0,95 persen. Pada tahun 2022, belanja daerah di proyeksikan sebesar Rp 1,130 triliun. Dengan demikian, beberapa pos belanja, baik belanja operasi, modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer akan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021

Grafik 3.17
Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2017-2022

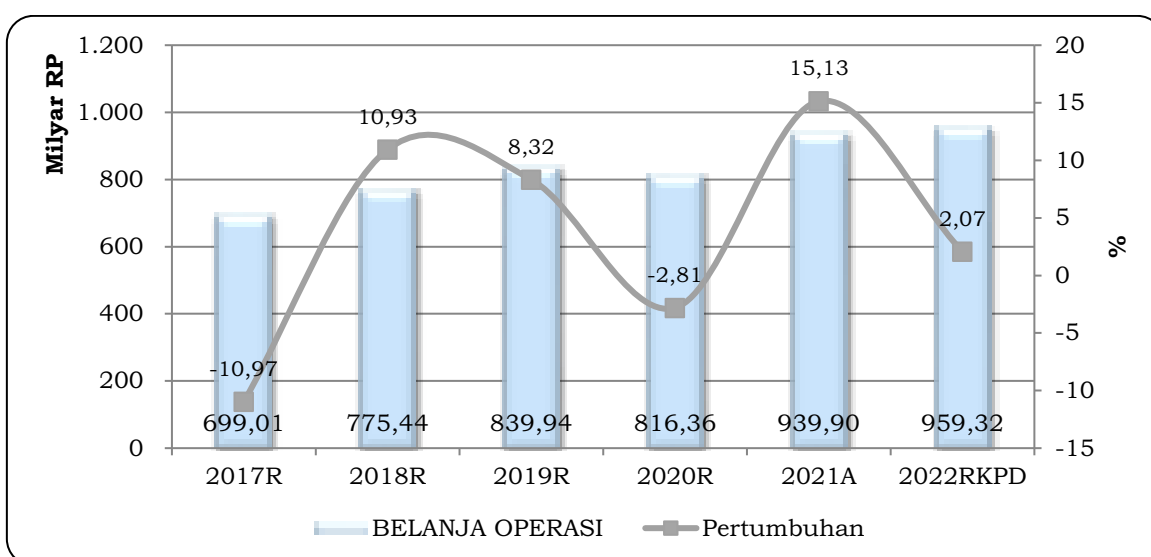
Proyeksi komposisi belanja pemerintah Kota Madiun Tahun 2022, sebagian besar masih dialokasikan pada belanja operasi. Dalam 5 tahun terakhir, kondisi yang sama juga terjadi pada perbandingan komposisi belanja. Pada Tahun 2022, persentase belanja operasi diproyeksikan sebesar 84,90 persen. Nilai tersebut dapat dikategorikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan persentase belanja operasi Kota Madiun tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021

Grafik 3.18
Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2017-2022

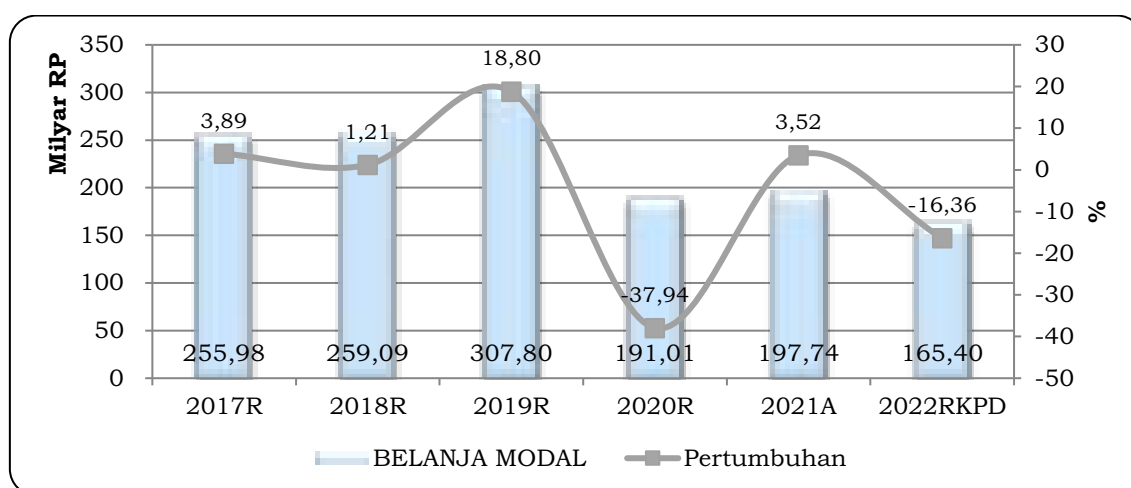
Komposisi Belanja operasi dari tahun ke tahun memiliki tren yang relatif sama. Meskipun secara nominal nilainya berubah dari tahun ke tahun, komposisi terbesar masih terdapat pada belanja pegawai. Persentase belanja pegawai pada Tahun 2022 diproyeksikan sebesar 50,58 persen. Angka tersebut tergolong sedikit menurun, baik secara persentase maupun secara nominal dibanding periode anggaran 2021. Keseluruhan kondisi tersebut merupakan proyeksi belanja yang menyesuaikan dengan situasi, kondisi, serta prospek Keuangan Kota Madiun Tahun 2022.



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021

Grafik 3.20
Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2017-2022

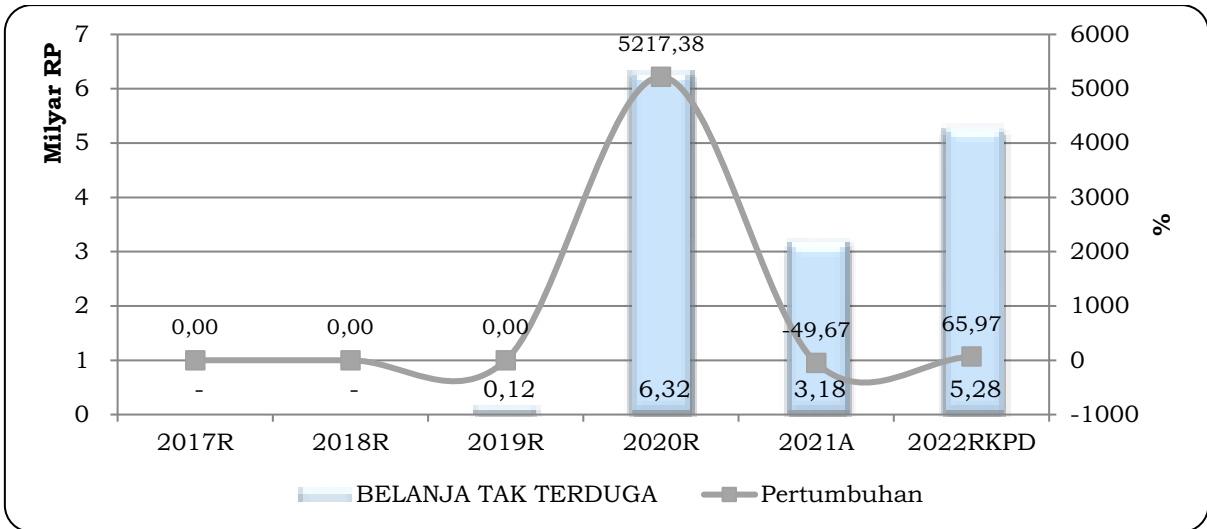
Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir belanja operasi menunjukkan tren fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 15,13 persen dengan nominal Rp 939,90 Milyar. Pada anggaran RKPD tahun 2022 belanja operasi ditargetkan sebesar Rp 959,32 milyar. Selanjutnya adalah grafik perkembangan pertumbuhan Belanja Modal tahun 2017 hingga 2022:



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021

Grafik 3.20
Perkembangan Belanja modal Kota Madiun Tahun 2017-2022

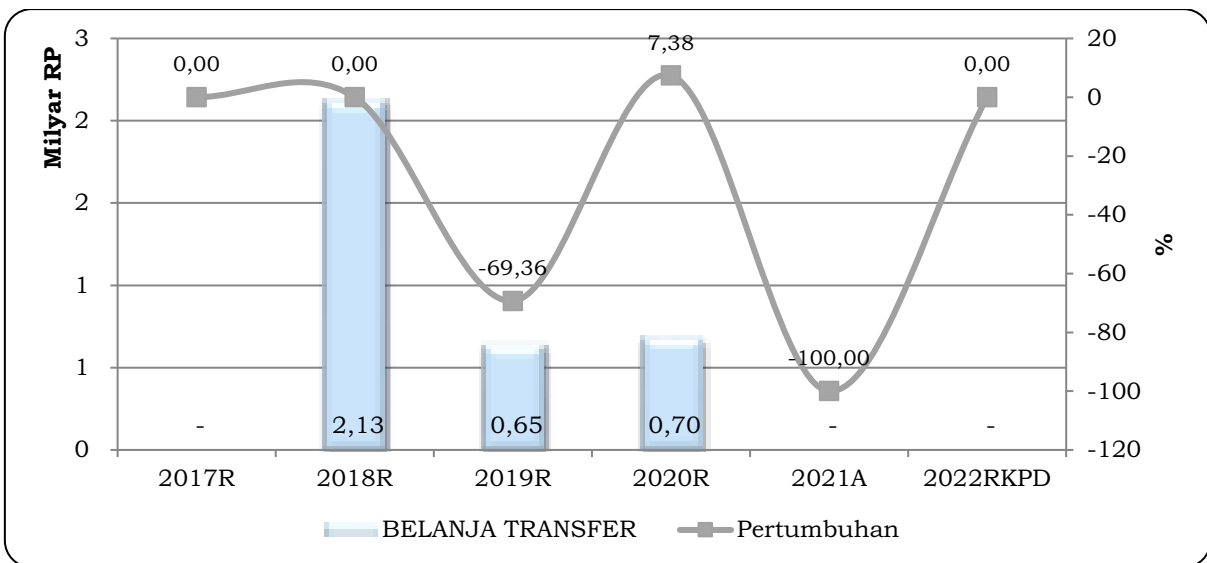
Komposisi Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Bangunan Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan terakhir Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir belanja modal mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2020, belanja modal mengalami penurunan sebesar minus 37,94 persen sebagai dampak refocusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan dampak Covid19. Pada anggaran tahun 2021, belanja modal di targetkan meningkat hingga 3,52 persen atau sebesar Rp 197 Milyar. Sedangkan pada tahun 2022, pada RKPD di proyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar minus 16,36 persen atau Rp 165 Milyar. Perkembangan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021

Grafik 3.22
Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2017-2022

Selama enam tahun terakhir proporsi Belanja Tak Terduga terhadap Belanja Daerah relatif sangat kecil. Peningkatan yang signifikan belanja tak terduga terjadi pada tahun 2020 seiring dengan terjadinya pandemic Covid19. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 0,12 Milyar meningkat menjadi 6,32 Milyar pada tahun 2020. Peningkatan terjadi karena penyesuaian anggaran akibat adanya pandemi. Pada tahun anggaran 2021 dan anggaran RKPD tahun 2022 belanja tak terduga mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,18 dan 5,28 Milyar. Selanjutnya perkembangan Belanja Transfer dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021

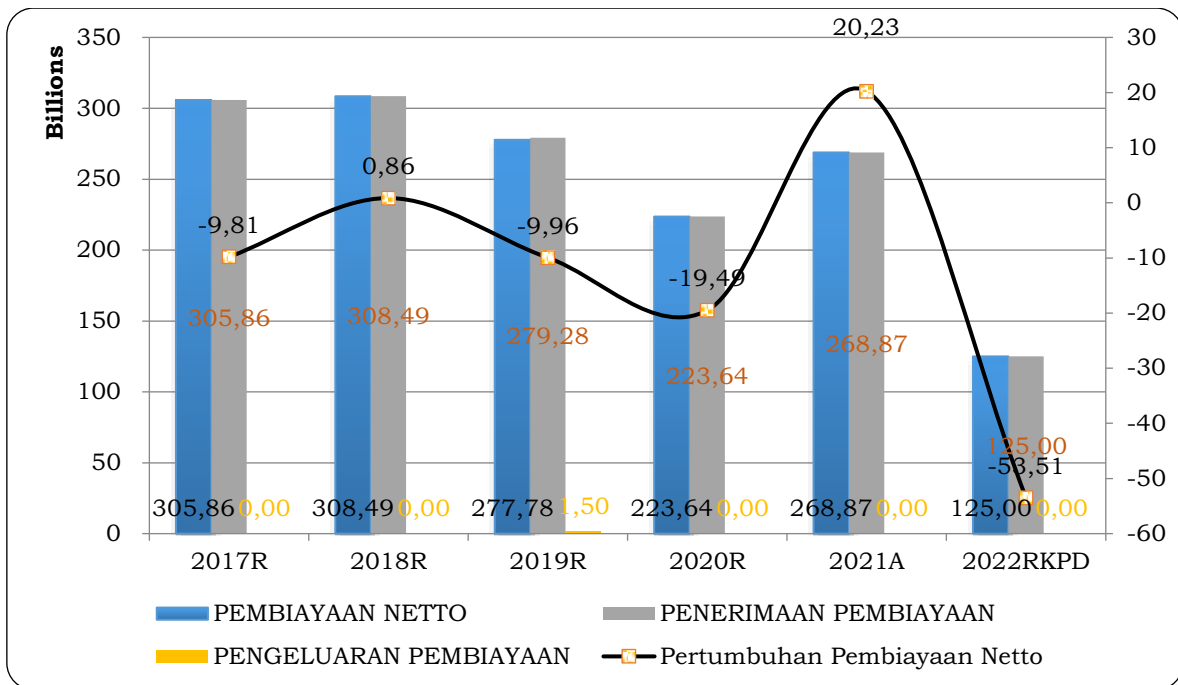
Grafik 3.23
Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun Tahun 2017-2022

Belanja transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan keuangan. Perkembangan Belanja Transfer tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 belanja transfer mengalami penurunan di bandingkan tahun 2018 yaitu dari sebesar Rp 2,13 Milyar menjadi Rp 0,70 milyar tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 dan dalam RPKPD 2022, belanja transfer tidak dianggarkan. Selanjutnya, perkembangan nilai dan pertumbuhan belanja daerah Kota Madiun tahun 2017-2020 dan proyeksi anggaran tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2016 s.d Tahun 2022

	Uraian	JUMLAH					
		2017R	2018R	2019R	2020R	2021A	2022RKPD
2	BELANJA DAERAH	954.991.703.029,81	1.036.658.830.595,88	1.148.511.321.355,75	1.014.391.890.792,10	1.140.822.143.093,00	1.129.999.753.910,00
05.01	BELANJA OPERASI	699.013.726.516,58	775.443.371.637,41	839.939.781.749,69	816.358.776.801,53	939.902.569.530,00	959.324.726.172,00
05.01.01	Belanja Pegawai	391.631.558.502,00	435.126.974.606,00	440.222.382.579,38	441.683.138.649,00	478.425.879.983,00	485.258.678.433,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	280.472.821.815,27	305.475.751.519,41	366.995.675.620,23	349.882.673.481,00	425.059.231.547,00	436.594.527.461,00
05.01.03	Belanja Bunga	0	0	0		0	0,00
05.01.04	Belanja Subsidi	0	0	0		0	0,00
05.01.05	Belanja Hibah	11.924.689.389,31	21.318.545.231,00	15.603.619.810,08	11.938.091.671,53	13.765.706.000,00	13.572.686.278,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	14.984.656.810,00	13.522.100.281,00	17.118.103.740,00	12.854.873.000,00	22.651.752.000,00	23.898.834.000,00
05.02	BELANJA MODAL	255.977.976.513,23	259.087.612.258,47	307.800.742.344,06	191.011.897.074,57	197.738.448.365,00	165.395.287.479,00
05.02.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0	0,00	0,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.557.504.743,48	47.310.430.082,75	68.460.669.520,00	47.752.974.268,64	50.500.943.323,00	28.304.237.988,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.416.541.452,75	64.833.894.806,80	48.758.211.485,26	38.202.379.414,91	56.229.035.949,00	39.281.239.379,00
05.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	102.648.521.200,00	138.271.368.268,92	184.022.541.935,80	100.281.245.964,15	88.974.356.300,00	95.695.457.752,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.188.874.942,00	3.542.965.670,00	2.888.082.876,00	4.775.297.426,86	2.034.112.793,00	2.114.352.360,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Lainnya	3.166.534.175,00	5.128.953.430,00	3.671.236.527,00	0,00	0,00	0,00
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	-	-	118.877.262,00	6.321.154.916,00	3.181.125.198,00	5.279.740.259,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	0	0	118.877.262,00	6.321.154.916,00	3.181.125.198,00	5.279.740.259,00
05.04	BELANJA TRANSFER	-	2.127.846.700,00	651.920.000,00	700.062.000,00	-	-
5.4.1	Belanja Transfer Ke Daerah Lain		2.127.846.700,00	651.920.000,00	700.062.000,00	0,00	0
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	954.991.703.029,81	1.036.658.830.595,88	1.148.511.321.355,75	1.014.391.890.792,10	1.140.822.143.093,00	1.129.999.753.910,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.633.270.295,33	-29.212.590.458,24	-54.143.823.359,16	45.233.690.619,22	-137.000.000.000,00	-125.000.000.000,00

Sumber: BPPKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2021



Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021

Grafik 3.19
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun Berjalan
Kota Madiun Tahun 2017–2022 (Milyar Rupiah)

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan diproyeksikan menurun mencapai 50,31 persen pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan hanya dianggarkan dari penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp 125 Milyar. Selanjutnya, rincian perkembangan nilai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta pembiayaan netto Kota Madiun tahun 2017 sampai dengan proyeksi tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2017 s.d Tahun 2022

	Uraian	JUMLAH					
		2017R	2018R	2019R	2020R*	2021A	2022RKPD
3	PEMBIAYAAN						
03.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	305.857.486.594,13	308.491.416.889,46	279.278.826.431,22	223.635.003.072,06	268.868.693.691,28	125.000.000.000,00
03.01.01	Penggunaan SiLPA	305.857.486.594,13	308.490.756.889,46	279.278.826.431,22	223.635.003.072,06	268.868.693.691,28	125.000.000.000,00
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
03.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
03.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	660.000,00	0	0	0	0
03.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	1.500.000.000,00	-	-	-
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
03.02.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	1.500.000.000,00	0	0	0
03.02.03	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	305.857.486.594,13	308.491.416.889,46	277.778.826.431,22	223.635.003.072,06	268.868.693.691,28	125.000.000.000,00
03.03	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	308.490.756.889,46	279.278.826.431,22	223.635.003.072,06	268.868.693.691,28	131.868.693.691,28	0,00

Sumber: BPPKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2021

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kota Madiun. Secara rinci, arah dan kebijakan keuangan Kota Madiun Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2022, terdapat beberapa arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan target pendapatan daerah dilakukan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian;
2. Penguatan kondisi ekonomi daerah sebagai dampak COVID19 membutuhkan berbagai insentif fiskal baik dari sisi pendapatan maupun belanja;
3. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah;
4. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
5. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Optimalisasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
7. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
8. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan

10. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Merintis penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur PD penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja PD penghasil.
3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.

- c. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
- d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Pendapatan transfer

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

- a. Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah, bagi hasil pajak dari provinsi maupun bantuan keuangan.

Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
 - b. Meningkatkan kualitas SDM (aparatur daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;
 - c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta;
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan transfer dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK dan DBH;
3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat; dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi, yang diperoleh Kota Madiun;
 - b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik orientasi *output* maupun *outcomenya*. Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2022 disusun untuk mendukung tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan belanja

daerah Kota Madiun Tahun 2022 didasarkan pada tujuh kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
2. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program* prioritas);
3. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Kota Madiun pada Tahun 2022
4. Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah.
6. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi *mandatory spending* atau belanja-belanja yang sudah di-*earmark*, seperti pendidikan 20% dan kesehatan 10%. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
7. Belanja daerah lainnya dalam rangka recovery dan penanganan dampak atas pandemi COVID-19 pada semua bidang. Dalam kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir di tahun 2020, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas tahunan maupun program non prioritas yang telah direncanakan, dapat difocusing dan realokasi untuk penanganan pandemi COVID 19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, arah kebijakan belanja daerah diuraikan pada masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
 - a. Alokasi Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar 50,58 persen dari Belanja operasi, dengan mempertimbangkan penerimaan tenaga P3K dan pemberian TPP bagi ASN sesuai dengan kemampuan daerah;
 - b. belanja Barang dan Jasa yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan pelayanan publik.
 - c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Namun pada RKPD Kota Madiun 2022, belanja subsidi tidak dianggarkan.

- d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Namun dalam RKPD 2022, kebutuhan belanja ini tidak dianggarkan;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- f. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak

memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan dipos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force major*, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.

1. Belanja Bantuan Keuangan adalah diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
2. Belanja Hibah adalah belanja Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Madiun Tahun 2022 terdiri atas empat kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;

3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan
4. apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

3.2.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah yang diambil yaitu dengan Peningkatan pembiayaan kreatif, melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pentingnya pembiayaan non-APBD disebabkan karena terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan pemerintah daerah. Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah dalam penyediaan sarana publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat beragam. Sehingga, hanya kebutuhan prioritas yang dibiayai oleh pemerintah. Melalui kerjasama dengan pihak swasta, diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa ter-cover oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan ada sinergitas antara peranan swasta dan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Rincian realisasi dan rencana pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Pembiayaan Pembangunan melalui CSR Kota Madiun 2019-2020

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			2019	2020
1	2	3	4	5
1	Hotel Merdeka	Penerangan jalan gang Lodayan	100.000	
		Pembangunan Poskamling RT 18 RW 7	250.000	
		Bantuan untuk warga tidak mampu	1.000.000	
		Bantuan untuk warga tidak mampu	500.000	
		Partisipasi HUT RI Gang Lodayan	300.000	
		Partisipasi Bersih Desa Kel Pangongangan	1.800.000	
		Bantuan untuk warga tidak mampu	500.000	
		Partisipasi Peringatan Maulid Nabi SAW	300.000	
		Penerangan Jl. Lodayan		1.200.000
		Bantuan kepada penyandang Disabilitas		100.000
		Santunan keluarga pinggir sungai Bantaran		2.500.000

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			2019	2020
1	2	3	4	5
		Takjil buka Puasa di Masjid Agung Baitul Hakim		1.500.000
		Bantuan untuk Kampung Tangguh		500.000
		Partisipasi kegiatan warga gang Lodayan (Kel. Pangongangan)		1.000.000
2	PT. Nitama Madiun	Sumbangan Sosial	500.000	
		Sumbangan Sosial	500.000	
		Sumbangan Sosial	2.000.000	
		Sumbangan Sosial	500.000	
		Sumbangan Sosial	500.000	
		Iuran sumbangan HUT Satpam ke 38	500.000	
		Sumbangan Hewan Kurban	5.100.000	
		Sumbangan Sosial	500.000	
		Berbagi Takjil bersama Polres	5.000.000	
		Berbagi Takjil	2.500.000	
		Berbagi Takjil	2.500.000	
		Sumbangan Sosial	500.000	
		Sumbangan Sosial	500.000	
		Aksi Cepat Tanggap	1.000.000	
		Sumbangan Sosial	500.000	
		TV Kita	1.000.000	
		Sumbangan untuk Masjid Al Fattah	2.401.000	
		Sumbangan HUT RI ke 74	1.000.000	
		Penanaman Pohon Tabebuya	20.000.000	
		Pocari Sweat untuk tenaga medis		3.600.000
		Masker berlogo Nitama		3.800.000
		Tanaman buah		
		Pohon Jambu Citra 5 buah		1.125.000
		Pohon Jambu Camplong 5 buah		1.125.000
		Pohon Jeruk 5 buah		2.250.000
		Pohon Leci 2 buah		750.000
		Pohon Sawo Mentega 3 buah		1.350.000
		Metan plus ongkos tanaman 20 buah		1.500.000
		Planter Bag PT. Nitama dan Madiun Kota Pendekar 20 buah		1.800.000
		Pembersihan sungai sekitar Planter bag		480.000
		Takjil Ramadhan 1.000 pcs		
		Donasi Persatuan Tuna Netra Indonesia		6.000.000
		Beras CSR untuk warga sekitar		2.064.000
		Proses pelapisan hot dip galvanize gratting makam		700.000
		Proses pelapisan hot dip galvanize gratting makam		700.000
		Hut Satpam		750.000
		Mural dan pengecatan gapura dengan logo Perusahaan dan tulisan (logo) RW.06		6.000.000

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			2019	2020
1	2	3	4	5
3	PT. INKA	Mural Tangkis di Taman Bantaran	339.600.000	
		Perbaikan Gapura Selamat Datang di Monumen Selamat Datang	80.784.955	
		Pengadaan Pot Bunga	1.400.000	
		Pengedukan saluran air dan pengadaan tempat sampah	231.499.000	
		Bantuan Sarana Pendidikan Pojok Baca	47.500.000	
		Kelas Kreatif	29.102.070	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	69.816.000	
		Pengedukan sungai	224.999.000	
		Santunan Panti Asuhan	408.000.000	
		Pembagia Sembako Gratis bersama Kodim	15.000.000	
		Bantuan Pinjaman Program Kemitraan	295.000.000	
		Bantuan Sponsorship kampus dan stakeholder	359.132.335	
		Bantuan Bedak Kaca		750.000
		Bantuan Program kemitraan 5 mitra		250.000.000
		Rehab Ruang Kelas		2.000.000
		Bantuan Pembangunan Perpustakaan		1.000.000
		Paket Hand sanitizer 60.000 ml		7.300.000
		Vitamin		1.000.000
		Suplemen dan Vitamin		8.255.400
		Bantuan Masker dan Faceshield 500 bh		5.250.000
		Masker 1000 bh		6.500.000
		Sosialisasi Bahaya Narkoba		51.900.700
		Penyuluhan Pencegahan COVID		53.589.400
		Bantuan Sarpras Posko Covid		9.170.000
		Bantuan Bilik Desinfektan		2.200.000
		Bantuan Bilik Desinfektan		10.000.000
		Tempat Cuci Tangan , Masker dan Hand sanitizer		2.887.500
		Rapid tenaga medis		46.500.000
		Pule dan bungur		184.750.000
		Pohon Tabebuaya		3.000.000
		Pot, Media dan Bunga		2.500.000
		Bibit Tanaman Bunga dan Buah		2.000.000
		Tempat sampah 3 unit		2.397.000
Sarpras Poskamling Kel. Patihan		2.246.000		
Pembelian Pot Bunga		1.000.000		
Pembelian Pot Bunga		1.200.000		
Pemeliharaan mural		20.090.000		
Bantuan Kebersihan makam		3.000.000		
Bantuan Paket sembako 200 paket		37.300.000		
Bantuan Sembako		1.000.000		
Baksos Sembako		5.000.000		
Bantuan Sembako 50 paket		10.500.000		

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			2019	2020
1	2	3	4	5
		Bantuan untuk disabilitas 50 paket		8.749.587
		Bantuan Baju Koko dan Mukena		35.407.990
		Kegiatan Baksos		1.000.000
		Santunan Yayasan Panti Asuhan		272.000.000
		Renovasi Masjid		5.000.000
		Bantuan Terpal Tenda		5.000.000
		Bantuan Cover tenda		4.200.000
		Renovasi masjid		2.000.000
		Pembangunan Masjid		5.000.000
		Pembelian Tanah Wakaf		2.000.000
		Pembuatan Tempat Parkir PHBI		4.000.000
		RTLH Bp. Firman		86.125.000
		Ruang Pelayanan Masyarakat		68.186.060
		Pembelian material pipa besi dan cat		2.000.000
		Pembelian material Kelas lapangan		29.785.000
		Bantuan Laptop		35.200.000
		bantuan Kodim		24.744.000
		Pembuatan 200 Kaos		10.130.000
		Bantuan AC Standing 5 PK 2 unit		28.730.000
		Pengadaan portal		3.950.000
		Bantuan Sarpras Posko Kampung Tangguh		2.775.200
		Bantuan Kampung Tangguh di Kel. Sukosari, Manguharjo dan Nambangan Kidul		11.009.000
		Bantuan Kampung Tangguh di Kel. Banjarejo, Mojorejo dan Nambangan Lor		13.250.000
4	PT. KAI DAOP 7	Bantuan Bina Lingkungan Sosial Kemasyarakatan Paket Pangan Murah dalam rangka HUT Kementerian BUMN Ke21	39.375.000	
		Bantuan Bina Lingkungan Sosial Kemasyarakatan Paket Pangan Murah dalam rangka HUT Kementerian BUMN Ke21	39.375.000	
		Bantuan Bina Lingkungan Sosial Kemasyarakatan Pasar Murah dalam rangka Memperingati HUT Persit Kartika Chandra Kirana Ke-73 dan HUT Kementerian BUMN Ke21	25.000.000	
		Bantuan Bina Lingkungan Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Memperingati Hari Kartini	9.090.000	
		Bantuan Bina Lingkungan Sosial Kemasyarakatan Santunan dan Beasiswa LKSA Panti Asuhan	37.150.000	

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			2019	2020
1	2	3	4	5
		Muhammadiyah Kota Madiun		
		Bantuan Bina Lingkungan Pelestarian Alam Pengadaan Kontainer Pengangkut Sampah Kota Madiun	40.018.000	
		Bantuan Bina Lingkungan Sarana Ibadah Pembangunan Masjid Al Fattah	40.000.000	
		Bantuan Bina Lingkungan Sosial Kemasyarakatan Sembako dan Bingkisan Panti Asuhan Islamiyah Rejomulyo Madiun	15.000.000	
		Alat Peraga Edukasi		25.000.000
		Pule dan Bungur		5.000.000
				92.500.000
5	Hotel Amaris	CSR santunan kepada Anak Yatim Piatu Yayasan Putra-Putra Pahlawan Jl. Kemiri Madiun	3.000.000	
		CSR Pembagian Parcel Sembako di Lingkungan Hotel Amaris Madiun	900.000	
		Sumbangan Anak Yatim		3.000.000
		Pembelian Hewan Qurban yang diserahkan pada Masjid Nurul Abror Jalan Kalimantan (1 ekor kambing)		2.800.000
		CSR kepada masyarakat Jalan Kalimantan		2.000.000
6	ALFAMART	pohon berbunga	200.000.000	
		Alat Pemotong rumput	10.800.000	
		Gerobak untuk UKM	16.500.000	
		Dana Hibah untuk UKM	6.000.000	
		biaya pangkas pule barito		15.000.000
		tanaman hias sumber wangi (bugenvil varigata, kamboja besar, kelapa gading)		27.875.000
		sulaman pohon sogo		2.400.000
		Lampu Plenton		29.750.000
		Lampu Penjor		150.000.000
7	PT. BRI	Pohon berbunga	47.500.000	
		Masker Non Medis 1250 pcs		12.500.000
		Paket sembako 100 paket		15.000.000
		Sembako (Mie telur 2 bungkus, Minyak 1 liter, Kecap, Gula Pasir 1 Kg, Beras 5 Kg)		
8	PT. TELKOM	Pembinaan Usaha Kecil, Mikro (Bantuan Pinjaman Bergulir)	960.000.000	
		Bantuan Pinjaman Bergulir		820.000.000
		Booth untuk UMKM		100.000.000
		300 buah Hazmat untuk Satgas COVID		14.250.000
		300 psng Sepatu Boots		22.500.000
		300 bh faceshield		5.850.000
		320 box Masker medis		48.800.000
		80 box sarung tangan karet		8.200.000
		2000 bh masker non medis		13.300.000

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)			
			2019	2020		
1	2	3	4	5		
		Bantuan Sembako untuk warga Kota Madiun		15.000.000		
9	Bank Jatim	Bantuan Bulan Dana PMI Tahun 2019	400.000			
		Bantuan Doorprize ke 15	2.340.000			
		Bantuan pekan Panutan PBB tahun 2019	6.250.000			
		Bantuan kaos PPIH dan spanduk	1.875.000			
		Bantuan acara hari Adhyaksa ke 59	735.000			
		Bantuan Pasang Tenda	1.750.000			
		Bantuan acara pemilihan duta wisata	6.000.000			
		Bantuan Acara golf Walikota Madiun Cup	20.000.000			
		Bantuan Gebyar Undian PBB tahun 2019	46.250.000			
		Bantuan seminar nasional NU Kota Madiun	1.000.000			
		Bantuan Acara Hari Kesehatan Nasional ke 55	225.250.000			
		Bantuan Acara Pengukuhan Pengurus	1.700.000			
		Bantuan acara HUT ke 55 Hari Kesehatan	930.000			
		Bantuan Acara Hari Guru Nasional KORPRI	1.600.000			
		Bantuan HUT KORPRI ke 48	14.250.000			
		Bantuan Pengadaan Tanaman Taman Bantaran	195.437.000			
		Bantuan Taman Selamat Datang Kota Madiun	689.725.000			
				Sembako (Beras 4kg, Gula 2 kg, Minyak 1lt, kecap 1, sambel pecel 500gr)		66.896.000
				Sembako (Beras 4kg, Gula 2 kg, Minyak 1lt, kecap 1, sambel pecel 500gr)		134.329.000
		10	PT. REFINDO INTISELARAS INDONESIA	Bantuan Pembangunan Jembatan ke Makam tawangrejo	200.000.000	
Tanah Wakaf Makam Umum	227.500.000					
Bantuan Pohon mangga madu Probolinggo	500.000					
Bantuan Perlengkapan Ibadah	5.640.000					
Bantuan Peringatan HUT RI ke-74	500.000					
Bantuan Peringatan HUT RI ke-74	1.000.000					
bantuan renovasi musholla Al. Muhajirin	1.155.000					
Bantuan Almari Buku Kaca	750.000					
Bantuan Peringatan HUT RI ke-74	1.000.000					
Bantuan Peringatan hari Stroke sedunia	500.000					
Bantuan Pembuatan Pos Polisi	15.467.000					
Bantuan Pembuatan Lapak PKL	60.000.000					
11	PT. PPI			Bazar Paket Sembako	60.000.000	

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			2019	2020
1	2	3	4	5
12	INDOMARET	Pohon berbunga	200.000.000	
		gerobak	7.200.000	
13	BPR TUNAS ARTHA	Inklusi Keuangan		1.500.000
		Sedekah Jumat		4.800.000
		Sumbangan Kematian		1.000.000
		Sumbangan Bencana Alam		1.500.000
		Takjil Ramadhan		1.000.000
		Parsel Lebaran		1.000.000
		Sumbangan HUT RI		500.000
		HUT BPR Tunas Artha		1.000.000
		Sumbangan lain-lain		1.000.000
14	PT. INDRACO SUN CITY	Sewa Bazar UMKM dari Dinkop		2.000.000
		Penerimaan Peserta Didik magang		15.000.000
		Penanaman Pohon		20.000.000
		Bukber anak yatim Piat		12.000.000
		Parsel Lebaran		5.000.000
		Sumbangan HUT RI		2.000.000
		Hewan Qurban		20.000.000
		Takjil Ramadhan		5.000.000
15	Hotel Aston	Donor Darah Umum		500.000
		Takjil Ramadhan		1.500.000
		Berbagi Sahur		1.500.000
		Bakti Sosial		300.000
		Natal Bersama Panti Asuhan		2.000.000
		Hewan Qurban		3.500.000
16	PD. BPR	Penyaluran tenda pedagang kaki lima		60.000.000
		Penanaman dan Penghijauan lingkungan serta PD BPR Bank Daerah Kota Madiun		50.000.000
		Program Bisafari Dhuafa		5.000.000
17	PT. PNM	Penanaman Pohon		10.000.000
18	BANK WOORI BERSAUDARA	Penanaman Pohon		5.000.000
19	PT. BCA	Penghijauan lingkungan kantor		3.000.000
		Buka bersama anak yatim		3.000.000
		Takjil Ramadhan		2.000.000
		Bingkisan lebaran		7.000.000
		Sumbangan HUT RI		1.000.000
20	BRI KANCAB MAGETAN	Pule		42.000.000
		Tiang lampu penjor klasik Badungan		50.000.000
21	PG. REDJOAGUNG	Bantuan untuk pendidikan		1.400.000
		Penanganan COVID		231.716.237
		Penanaman Pohon Flamboyan		45.500.000
		bantuan Sarana Ibadah		3.950.000
		Khitatan massal		25.000.000
		Bantuan Sosial		25.334.587
		Bantuan sarana umum		2.550.000
		Program Kemitraan		1.055.000.000
22	PT. PERTAMINA	Pule dan Bungur		150.040.000
23	BANK BUKOPIN	Buka bersama anak yatim		20.000.000
24	CV. SOHANTO ADI PERKASA, PT. SARI MELATI KECANA, PT. INUL VIZTA MADIUN.	Gate Videotrone		330.000.000

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			2019	2020
1	2	3	4	5
25	PT. REZKY ANUGRAH SEJAHTERA	Mobil Golf Yamaha 4 Seat		170.000.000
26	PDAM	TRAFFIC LIGHT Tempo doeloe dan Lampu Hijr Ismail		85.000.000
27	PT. TASPEN	Bantuan kemitraan		280.000.000
28	INDOSAT	Lampu Penjor		162.793.000
29	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	Lampu heritange di madiun		15.000.000
30	PT. PLN (persero) UP3 MADIUN	RUMAH PINTAR		202.555.000
31	PT. PENERBIT ERLANGGA CABANG MADIUN	Pompa Elektrik 4 unit		3.000.000
		Chlorin 7 jerigen @ 20 liter		4.200.000
		Chlorin 2 jerigen @ 10 liter		700.000
		Karbol/wipol 2 jerigen @10 liter		700.000
		Harpic/pembersih lantai 1 jerigen @ 10 liter		700.000
		Harpic/pembersih lantai 2 jerigen @ 5 liter		700.000
32	PT. BRI (Persero) CABANG MADIUN	Masker kain 1300 buah		6.500.000
		Alat Pelindung Diri 75 buah		6.375.000
		Sarung tangan 10 box/500 psng		1.150.000
		Hand Sanitizer 20 liter		3.600.000
		Wastafel aluminium 4 buah		2.800.000
		Thermogun 4 buah		6.000.000
JUMLAH			5.639.996.360	6.251.135.661

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021 | Keterangan: *belum termasuk CSR yang nilainya tidak tersedia

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Prioritas pembangunan di daerah harus bersinergi dengan pemerintah di tingkat atasnya. Prioritas pembangunan daerah di Kota Madiun sejalan dengan prioritas pembangunan di level provinsi Jawa Timur dan pemerintah Pusat. Keterkaitan ini dapat dilihat dari visi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah baik nasional maupun daerah. Keterkaitan visi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 4.1

Keterkaitan Visi antar Level Pemerintahan

Secara umum, visi Kepala daerah Kota Madiun tahun 2019 – 2024 memiliki keterkaitan erat dengan visi Gubernur dan Presiden. Selanjutnya, tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Madiun menjelaskan keterkaitan dengan visi dan misi dalam dokumen RPJMD tahun 2019-2024. Visi Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah: **“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**. Terdapat dua pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kota Madiun 2019-2024. Pilar pertama adalah mewujudkan Pemerintahan Kota Madiun Bersih dan berwibawa. Kota Madiun berusaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih berwibawa, profesional dan melayani

masyarakat. Dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, proses dan jalannya pembangunan diharapkan akan lebih cepat dan terlaksana serta mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Pilar selanjutnya adalah mewujudkan masyarakat sejahtera. Kota Madiun berusaha untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang sejahtera yang dicirikan oleh terwujudnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, serta tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif, serta masyarakat yang mandiri, maju, berakhlak mulia yang senantiasa berlandaskan taqwa kepada Allah SWT/Tuhan yang maha esa.



Gambar 4.2
Hubungan antara Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019–2024. Keempat misi tersebut adalah 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*); 2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan; 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun; dan 4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Dalam rangka pencapaian misi ditas diperlukan tujuan dan sasaran pembangunan. Keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan RPJMD 2019-2024

Tujuan dan Sasaran		
1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		
T1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	IT1.1. Indeks Reformasi Briokrasi
S1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun

Tujuan dan Sasaran		
		IS1.2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
S2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun IS2.2. Indeks Inovasi Daerah
2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan		
T2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	IT2.1. livable city
S3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1. Indeks Infrastruktur
S4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun		
T3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	IT3.1. Indeks Pembangunan Manusia IT3.2. Indeks Pembangunan Gender
S5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1. Harapan Lama Sekolah IS5.2. Rata-rata Lama Sekolah
S6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	IS6.1. Angka Harapan Hidup
S7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1. Indeks Pemberdayaan Gender
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun		
T4	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	IT4.1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
S8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	IS8.1. Tingkat Pengangguran Terbuka
S9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS9.1. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan IS9.2. Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa
T5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IT5.1. Indeks Ketentraman IT5.2. Indek Gini
S10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1. Angka Kemiskinan
S11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS11.1. Indeks Kerukunan IS11.2. Indeks rasa aman

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 di rumuskan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan isu-isu strategis pembangunan; aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan; pokok pikiran DPRD; serta arah kebijakan pembangunan tahunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD. Penyusunan prioritas pembangunan didasarkan pada isu strategis Kota Madiun pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

Penentuan prioritas pembangunan Kota Madiun mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut berfungsi untuk menciptakan sinergitas pembangunan di pusat dan daerah. Prioritas pembangunan Kota Madiun diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Proses perencanaan pembangunan daerah Kota Madiun Tahun 2022 memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, Provinsi yang tertuang dalam RKP Tahun 2022, RKPD Provinsi Jawa-Timur 2022 serta kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Madiun 2019–2024. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sinkronisasi antar kebijakan pusat, provinsi dan daerah.

4.2.1 Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2022

Penentuan prioritas pembangunan nasional mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20120 – 2024. terdapat sembilan misi dalam upaya penjabaran dari visi pemerintah yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.



Gambar 4.3
Hubungan antara Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Lima arahan presiden diatas, selanjutnya di transformasikan menjadi tujuh agenda pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan beserta sasarannya. Dalam upaya mencapai 7 agenda pembangunan pemerintah menetapkan proyek dengan daya ungkit tinggi. Proyek tersebut diantaranya 41 proyek prioritas strategis. Tujuh agenda pembangunan utama pemerintah pusat adalah sebagai berikut

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6)

Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural



Gambar 4.4
Tema, dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Sejalan dengan kondisi terkini khususnya terkait COVID-19, pemerintah menetapkan tema pembangunan dalam RKP 2022 yaitu **Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**. Selanjutnya, prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2022 terdiri dari yaitu

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk berkualitas, sasaran yang akan dicapai adalah 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan; 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; 3) Terpenuhinya layanan dasar; 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda; Terwujudnya pengentasan kemiskinan; dan 5) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

Sasaran terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang akan dicapai yaitu 1) menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.; 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

5. Memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

Dalam rangka memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; 2) Meningkatnya konektivitas wilayah; 3) Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan; 4) Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien; 5) Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;

Ditetapkan sasaran untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup adalah 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; 3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik;

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukam, ditetapkan sasaran yaitu memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Menguatnya stabilitas Polhukam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik.



Gambar 4.5
Major Project dalam RKP Tahun 2022

Selain menetapkan prioritas pembangunan nasional, pemerintah pusat juga memberikan informasi beberapa *major project* yang akan menjadi fokus pendanaan di Tahun 2022. beberapa *major project* tersebut linier dengan fokus-fokus pembangunan 2022. *Pertama*, untuk fokus pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, beberapa *major project* yang memperoleh penekanan adalah: 1) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas; 2) 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter; 3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas (termasuk kimia dan farmasi); 4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; dan 5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu. *Kedua*, terkait penguatan sistem kesehatan nasional, akan ada *major project* baru untuk penguatan sistem kesehatan nasional. *Ketiga*, terkait jaring pengaman sosial, akan ada *major project* yang akan diprioritaskan, yaitu integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh. Dan *keempat*, untuk penguatan sistem peringatan bencana, akan diperluas cakupannya sehingga mencakup juga bencana pandemi.

4.2.2 Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Visi pembangunan Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 adalah **“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi pembangunan Provinsi Jawa Timur, yaitu: 1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah; 2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan,

Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan; 3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan; dan 4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.



Gambar 4.6
Hubungan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019–2024

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provisini Jawa timur, pemerintah provinsi menetapkan 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional seperti terlihat dalam gambar berikut



Gambar 4.7
Keselarasn Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dan Jawa Timur Tahun 2022

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuh agenda prioritas pembangunan untuk Tahun 2022. Ketujuh prioritas pembangunan tersebut adalah 1) Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata; 2) Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur; 3) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI); 4). Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal; 5). Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan; 6). Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim; 7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Dalam upaya mencapai agenda dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur, Pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Timur menerapkan klastering wilayah. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi daerah sehingga meningkatkan nilai tambah pada wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan untuk peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran.



Gambar 4.8
Pembagian Kawasan percepatan Pembangunan di Jawa Timur

Percepatan pembangunan Kawasan di Jawa Timur diatur melalui Peraturan Presiden no 80 Tahun 2019. Perpres ini mengatur tentang percepatan pembangunan ekonomi Kawasan gerbang Kertassusila dan sekitarnya, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Selain itu, pembangunan Kawasan di tujukan di daerah hinterland utama Gerbangkertassusila. Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo,

Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan dengan fokus utama agroproduksi dan agroindustri, serta sektor pariwisata.

Pengembangan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan mempunyai tema peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan. Terna yang digunakan untuk pembangunan kawasan prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan tersebut melihat dari kondisi ekonomi saat ini yang memberikan kontribusi ekonomi yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian hortikultura, petkebunan dan nilai tambah Agroindustri utamanya pada komoditas perkebunan dan hortikultura, serta biofarmaka dan Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Selain itu Pengembangan Pariwisata berbasis agro dan sumberdaya alam lainnya (geopark dan lainnya) diharapkan dapat mengungkit perkembangan sektor ekonomi lainnya, didukung peningkatan Sumber Daya Manusia, peningkatan aksesibilitas infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan.



Gambar 4.9
Pembagian Klaster Wilayah Pembangunan Jawa Timur

Di Jawa Timur, penetapan klaster dirumuskan atas dasar RPJMD tahun 2019–2024 dan juga arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka. Klaster kewilayahan difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Klaster kewilayahan yang ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Salah satu pengembangan klaster adalah klaster 2 yaitu Wilis Utara.

Klaster Wilis Utara terdiri dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo,

Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan kehutanan.

Arahan pengembangan pada Klaster Wilis Utara adalah:

- a. Aspek Sosial: Klaster Wilis Utara terbentuk dari latar belakang yang sama sebagai turunan dari budaya Matraman. Seperti halnya budaya Matraman dari Keraton Solo dan Surakarta, dalam kehidupan sosial masyarakatnya masih ada sistem pelapisan sosial atau stratafikasi sosial. Mayoritas wilayah Matraman masih menganut garis keturunan Patrilineal, dimana laki – laki mendapatkan keistimewaan lebih banyak dari wanita dalam hak tahta maupun harta. Berbeda dengan wilayah Klaster Wilis Selatan, di wilayah Wilis Utara tidak ada daerah pesisir pantai seperti Wilis Selatan, melainkan daerah dataran rendah dan pegunungan. Hal tersebut yang membentuk mata pencaharian masyarakatnya yang agraris atau sebagai petani. Selain itu yang membedakan Wilis Utara dengan Wilis Selatan adalah masyarakat di daerah Wilis Utara lebih bersifat Pluralistik atau majemuk. Hal itu disebabkan karena di beberapa wilayah Wilis Utara sudah menjadi daerah industri, sehingga terjadi interaksi sosial antara pendatang yang bekerja disektor industri dengan masyarakat lokal. Masyarakat di wilayah Wilis Utara merupakan masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang awal mulanya masyarakat desa kemudian bertransisi menuju masyarakat perkotaan. Masyarakat transisi ini sangat mudah untuk menerima hal – hal baru tanpa ada seleksi, sehingga akan merubah kebudayaan yang lebih dulu ada termasuk adat istiadat dan mata pencaharian. Adanya perubahan yang terjadi di wilayah ini sangatlah cepat, munculnya istilah Orang Kaya Baru akibat industrialisasi karena berkurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka di wilayah Wilis Utara memerlukan pendampingan terhadap Sumber Daya Manusia ataupun pengelolaan potensi Sumber Daya Alamnya. Pendampingan tersebut haruslah berkelanjutan karena menghindari perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Di daerah klaster Wilis utara ini, masih terdapat kondisi wilayah tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pergerakan perekonomian khususnya di daerah-daerah pegunungan, terpencil dan terdalam, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;
- b. Aspek Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan enkubator

ekonomi (anjuan cerdas); Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan

Aspek Infrastruktur: Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.

4.2.3 Prioritas dan Tema Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022

Perumusan prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2022 di dasarkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan nasional di level nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas pembangunan mangacu pada startegi dana rah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2019–2020. Selanjutnya, perumusan prioritas pembangunan juga melihat permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta pokok pikiran anggota dewan perwakilan daerah. Telaah terhadap Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019–2024 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 4.2
Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019-2024

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian • Program Pengembangan Umkm • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Hubungan Industrial • Program Pengembangan Umkm • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan lingkungan, dan	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
<p>Pengendalian lingkungan hidup</p> <p>Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.</p>	<p>Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Pengelolaan Pendidikan ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan) ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Dan Kb) ● Program Pemberdayaan Sosial ● Program Rehabilitasi Sosial ● Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial ● Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan ● Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman ● Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ● Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan ● Program Pengembangan Kesenian Tradisional ● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat) ● Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
<p>Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu</p>	<p>Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Kepegawaian Daerah ● Pendidikan Dan Pelatihan ● Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) ● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah) ● Program Aplikasi Informatika ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) ● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum Sekretariat Daerah) ● Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah ● Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pengendalian Dan Evaluasi ● Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan ● Program Informasi Dan Komunikasi Publik ● Program Aplikasi Informatika

Telaah selanjutnya dalam proses perumusan prioritas pembangunan adalah dari hasil Pokok-pokok pikiran DPRD, yang dilaksanakan melalui serap aspirasi masyarakat baik lewat mekanisme Reses masa sidang maupun Kunjungan kerja. Kemudian, hasilnya dituangkan dalam POKIR DPRD yang mencakup beberapa aspek yang mendukung pada prioritas pembangunan. Selain itu terdapat berbagai usulan dari anggota dewan berdasarkan hasil serap aspirasi masyarakat antara lain sebagai berikut

Tabel 4.3

Beberapa Usulan Anggota Dewan Berdasarkan Serap Aspirasi Masyarakat

No	Urusan	Usulan	OPD Tujuan
1	Lingkungan Hidup	Bantuan Peralatan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
2	Sosial	Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Sekretariat Daerah	Papan Nama RT RW	Sekretariat Daerah
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Paving Jalan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan / Perbaikan Pagar Makam	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan / Perbaikan Trotoar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan RTH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Saluran Air / Gorong – Gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Lampu Jalan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Saluran Air / Gorong – Gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Pertanian	Rehab saluran pengairan sawah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Penentuan prioritas pembangunan selanjutnya di dasarkan pada hasil penelaahan permasalahan pembangunan dan perumusan Isu Strategis. Beberapa isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan pemulihan dan peningkatan ekonomi daerah yang inklusif dan pengembangan kawasan pariwisata daerah

- b. Peningkatan pembangunan infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu
- c. Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta terciptanya kondusi masyarakat yang aman dan tentram
- d. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik



Gambar 4.10
Isu Strategis Kota Madiun Tahun 2022

Secara detail, isu strategis serta masalah Kota Madiun Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Isu Strategis dan Masalah Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
Isu Strategis 1: Percepatan pemulihan dan peningkatan ekonomi daerah yang inklusif dan pengembangan kawasan pariwisata daerah	Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan mengalami perbaikan pada tahun 2021 jika kasus Covid19 menurun dan vaksinasi berhasil
	Kontribusi sektor unggulan belum optimal
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) meningkat, namun belum dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja baru
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi system
	Masih rendahnya peningkatan PAD
	Masih rendahnya jejaring pasar perdagangan antar produsen
	Kurangnya mutu produk industri kecil
	Rendahnya keterampilan industri kecil dalam melakukan diversifikasi dan inovasi dalam

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	<p>pengolahan komoditas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan</p> <p>Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki industri kecil untuk mendapatkan sertifikat SNI dan ISO sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industry</p> <p>Beberapa pelaku usaha setelah mendapatkan izin usaha-nya belum mengurus izin komersial-nya, sehingga izin usahanya belum efektif dan belum dapat melakukan usaha, akibatnya nilai investasinya tidak bisa di masukkan sebagai realisasi investasi</p> <p>Masih terbatasnya pemahaman dunia usaha untuk menggunakan OSS</p> <p>Masih rendahnya kontribusi BUMD</p> <p>Masih terbatasnya kontribusi PAD</p> <p>Infrastruktur pendukung investasi belum memadai</p> <p>Kurangnya cakupan data perdagangan di Kota Madiun</p> <p>Masih terbatasnya prasarana ruang kreatif sebagai ruang ekspresi, promosi bagi masyarakat kreatif Kota Madiun</p> <p>Kurang optimalnya pengelolaan pasar yang menciptakan perbaikan dan pembaruan pasar sebagai wisata pasar rakyat di Kota Madiun</p> <p>Masih terbatasnya fasilitas sarana prasarana seni budaya untuk masyarakat seni Kota Madiun</p> <p>Masih sedikitnya destinasi wisata yang ada di Kota Madiun</p> <p>Skor Pola Pangan Harapan belum tercapai</p> <p>Produksi, pengolahan , budaya/regenerasi petani peternak, UPJA/Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian, dan daya saing sektor pertanian (peternakan dan kesehatan hewan) belum optimal</p> <p>Produksi, pengolahan , budaya/regenerasi petani pembudidaya ikan, dan daya saing sektor perikanan belum optimal</p> <p>Pengangguran yang meningkat.</p>
<p>Isi Strategis 2: Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu</p>	<p>Kurang optimalnya penyusunan dokumen kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW kota</p> <p>Kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan-undangan bidang penataan ruang</p> <p>Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang</p> <p>Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah</p> <p>Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakkan hukum bidang penataan ruang</p> <p>banyaknya parkir di tepi jalan dan meningkatnya pengguna jalan dengan kendaraan pribadi membuat penurunan kinerja ruas jalan</p> <p>Permukiman kumuh di Kota Madiun yang sebelumnya 0% setelah dilakukan konversi ke 16 parameter sebagaimana ditentukan dalam Permen</p>

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	<p>PUPR No.14 Tahun 2018 masih terdapat 64,2 ha yang tersebar di beberapa kelurahan dengan status kumuh ringan dan masih terdapat beberapa area yang mendekati kumuh. Untuk mencegah berkembangnya permukiman kumuh serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman maka terhadap komponen-komponen pembentuk permukiman kumuh perlu penanganan secara terus menerus</p> <p>Rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai 99,00%. Namun demikian jika diteliti lebih jauh kondisi sanitasi rumah tinggal belum semua kondisinya layak dan memadai sesuai standar bangunan sanitasi yang sehat dan aman bagi lingkungan sekitarnya terutama pada keluarga kurang mampu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sanitasi yang layak dan memadai</p> <p>Masih terdapat kekurangan kebutuhan rumah baik backlog kependudukan dan backlog kepemilikan.</p> <p>Belum optimalnya penyediaan PSU dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>Belum optimalnya sarana dan prasarana 83 makam aset Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Masih terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan darat</p> <p>Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana</p> <p>Pemahaman masyarakat dalam kesiapsiagaan akan risiko bencana masih rendah</p> <p>Dokumen atau Kajian yang berhubungan dengan Kebencanaan belum tersusun</p> <p>Belum adanya SOP Penanganan Bencana</p> <p>Jumlah pegawai penanggulangan bencana yang terbatas</p>
<p>Isu Strategis 3: Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta terciptanya kondusi masyarakat yang aman dan tentram</p>	<p>Belum optimalnya SPM dan SNP. Belum terstandarnya SNP sarpras sekolah</p> <p>Masih kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga PAUD, lembaga swasta SD dan SMP (khususnya gedung dan bangunan)</p> <p>Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (sertifikasi dan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan)</p> <p>Kurangnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran abad 21 khususnya dalam penggunaan teknologi dan informasi</p> <p>Kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar, termasuk belum terpenuhinya rasio jumlah lembaga dengan jumlah pengawas sekolah. (kurangnya jumlah guru pendidikan dasar dan pengawas sekolah)</p> <p>Jumlah dan kompetensi tenaga pendidik tidak merata di setiap sekolah</p>

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	Belum banyaknya prestasi nasional yang diraih oleh peserta didik di bidang sains dan kesenian.
	Akses Internet yang kurang memadai
	Kuarangnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu sarana prasarana, dan guru.
	Belum berkembangnya metode kurikulum daring
	Kegemaran membaca buku belum menjadi kebutuhan utama
	Perlunya penambahan ruang penunjang fungsi perpustakaan
	Jumlah tenaga pengelola perpustakaan belum memenuhi standard nasional perpustakaan
	Belum semua tenaga pengelola perpustakaan yang ada memiliki kompetensi tenaga pengelola perpustakaan sesuai SNP
	Layanan berbasis TIK belum mengikuti perkembangan iptek dan kebutuhan
	Belum optimalnya Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit
	Keterlambatan pembayaran Klaim oleh BPJS namun pelayanan tetap harus optimal
	Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kecukupan Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum dan Tenaga Fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedik, Fisikawan Medik, Radiografer, Nutrisisionis, Dietisien, Tenaga Terapi Okupasi, Tenaga Teknik Kefarmasian, Tenaga Teknis Transfusi Darah, Perawat Terampil bersertifikat keahlian khusus (Untuk kebutuhan Pelayanan Anaestesi, Hemodialisis, dan ICU) dan akuntan
	Implementasi SIMRS belum optimal, yang terkoneksi ke seluruh unit terutama billing system
	Terbatasnya jangkauan pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan
	Meningkatnya kunjungan pasien geriatri menjadi peluang rumah sakit untuk mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut
	Perkembangan tingkat sosial ekonomi, teknologi dan informasi mengakibatkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit
	Kemajuan Teknologi dan Informasi, mengharuskan rumah sakit untuk menuju digitalisasi layanan kesehatan sehingga tidak tertinggal
	Semakin banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di Kota Madiun semakin tinggi
	Tidak semua perempuan mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam kewirausahaan dan menurunnya pendapatan perempuan terutama perempuan sebagai kepala keluarga pada pelaku usaha Mikro akibat pandemi Covid-19
	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Masih terjadinya konflik yang timbul di masyarakat yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan
	Masih terdapatnya perkawinan anak
	Masih adanya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
	Kurangnya sosialisasi Perda dan peraturan perundang-undangan
	SDM Satlinmas yang belum memenuhi kualifikasi sesuai Perwal Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
	Kurangnya SDM ASN Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
	Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga faktor kelalaian manusia yang banyak menyebabkan kejadian kebakaran
	Belum adanya manajemen inspeksi peralatan proteksi kebakaran
	<p>Isu Strategis 4: Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik</p>
Belum adanya dokumen evaluasi jabatan untuk jabatan administrator, pengawas dan pelaksana	
Evaluasi internal belum berjalan optimal	
Jadwal pelaksanaan Diklat dan jenis Diklat harus menyesuaikan Instansi Vertikal	
Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait kewenangan urusan pada perangkat daerah dalam penyusunan SOTK maupun Tata Kerja Perangkat Daerah	
Kurangnya Pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang kelembagaan	
Kurangnya Informasi tentang Standart Pelayanan dari penyelenggara layanan ke masyarakat	
Belum sinkronnya antar dokumen SAKIP	
Belum terintegrasinya antara aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan	
Penyusunan Anggaran belum berdasarkan Cascading maupun Proses Bisnis	
Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait perencanaan, penganggaran yang berpengaruh terhadap dokumen SAKIP	
Kurangnya pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan, dan Kompetensi Jabatan	

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021

Sesuai dengan berbagai telaahan RPJMD, Pokir DPRD, permasalahan pembangunan dan isu strategis, diperlukan suatu langkah strategis melalui berbagai arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Madiun Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 4.5
Isu Strategis, Strategi, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan
Kota Madiun Tahun 2022

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022
Isu Strategis 1: Percepatan pemulihan dan peningkatan ekonomi daerah yang inklusif dan pengembangan kawasan pariwisata daerah	Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital
Isi Strategis 2: Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu	Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan
Isu Strategis 3: Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta terciptanya kondusi masyarakat yang aman dan tentram	Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	Peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif
Isu Strategis 4: Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Percepatan reformasi birokrasi

Sesuai dengan tabel diatas, terdapat empat prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 4.11
Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.6
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2022

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
Prioritas Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Pembangunan 1: Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	Prioritas Pembangunan 1: Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital
Prioritas Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamain pemerataan	Prioritas Pembangunan 2: Penguatan Konektivitas Antarwilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Prioritas Pembangunan 2: Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence (AI)</i>	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan ketahanan sosial masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan ketahanan sosial masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar
Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Prioritas Pembangunan 1: Pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah guna mendukung proses transformasi ekonomi
Prioritas Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 3: peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif
Prioritas Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Prioritas Pembangunan 4: Percepatan Reformasi Birokrasi

Sumber: Bappenas RI, Bapperov Jatim dan Bapelitbangda Kota Madiun, 2021

Berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkronisasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2022 adalah **“Peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial menuju masyarakat sejahtera melalui keunggulan lokal”**. Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2022 ini adalah ketahanan ekonomi dan sosial diharapkan meningkat setelah terjadinya penurunan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak COVID19 yang pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama pembangunan yaitu masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, Perkembangan tema pembangunan dalam RKPD Kota Madiun tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021

Gambar 4.12
Perkembangan Tema Pembangunan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2018-2022

4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022 disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022. Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2022 yang berkorelasi dengan pencapaian pembangunan secara umum. Rincian dari Sasaran Pembangunan Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 4.7
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RKPD 2022
PRIORITAS 1	PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN, EKONOMI KREATIF, DAN EKONOMI DIGITAL		
	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,63
	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	6,12
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RKPD 2022
PRIORITAS 2	PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN		
	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks infrastruktur	85 (baik)
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,17
PRIORITAS 3	PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DAN HARMONISASI KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN KONDISI MASYARAKAT YANG KONDUSIF		
	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,45
	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,81
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,24
		Rata-rata Lama Sekolah	11,14
	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,07%
	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	B (74,40) harmonis
		Indeks rasa aman	76,2
PRIORITAS 4	PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI		
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	BB (76)
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,1100
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	83 (baik)
		Indeks Inovasi Daerah	2086

Keterangan: *Target Kinerja RKPD Tahun 2022 merupakan hasil penyesuaian dengan capaian tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi eksisting

4.2.5 Inovasi Daerah dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis, inovasi daerah ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pemabangunan.

Selanjutnya beberapa program prioritas dan inovasi yang digagas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dan dikembangkan pada Tahun 2022 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/atau untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang diampu, antara lain:

Tabel 4.8
Inovasi Daerah dalam rangka Mempercepat Pencapaian Target Kinerja

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
Prioritas 1 : Penguatan Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif, Dan Ekonomi Digital			
1	Bus Wisata Gratis	<ul style="list-style-type: none"> Melayani rute di Kota Madiun pada lokasi-lokasi wisata religi, objek wisata, UMKM, dll 	Dishub
	Pembayaan Non Tunai Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pembayaran cashless selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga dapat meningkatkan pengawasan keuangan 	DISHUB
	Siaga Kita	<ul style="list-style-type: none"> sistem jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal (asuransi kecelakaan kerja dan/ atau kematian) 	Dinas Tenaga Kerja
	mall pelayanan publik virtual	<ul style="list-style-type: none"> sistem layanan perijinan berbasis virtual 	DPMPTSP
Prioritas 2: Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan			
1'	Marka Lajur Sepeda	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan keselamatan bagi pengguna sepeda 	DISHUB
Prioritas 3 : peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif			
1	Aplikasi Trcaking Bus Sekolah	Untuk memantau dan mengawasi posisi bus secara update	DISHUB
Prioritas 4 : Percepatan reformasi birokrasi			
		<ul style="list-style-type: none"> 	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Prioritas Daerah

Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Program prioritas daerah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

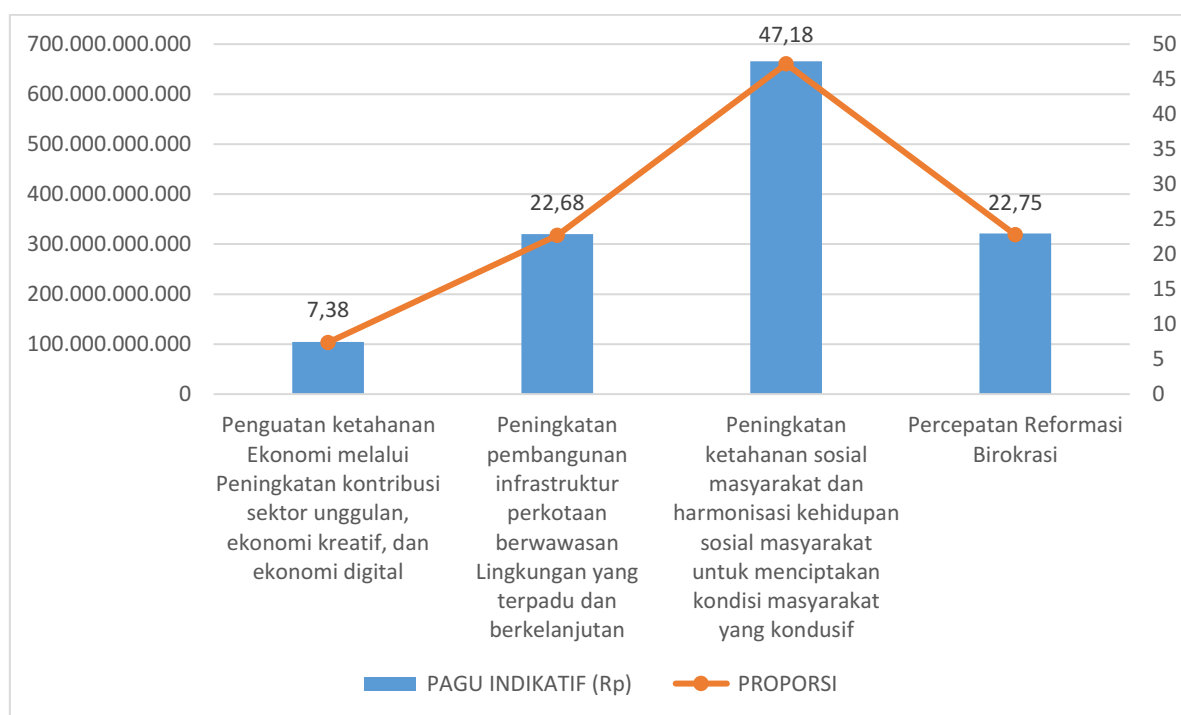
Perumusan program prioritas RKPD Tahun 2022 di tujukan untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024. Prioritas belanja daerah Kota Madiun mengacu pada prioritas pembangunan daerah Kota Madiun. Prioritas tersebut merupakan hasil sinkronisasi dengan perencanaan daerah berupa: 1) RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024; 2) Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022; 3) Isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah; 4) Evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Madiun Tahun 2020; dan 5) Tema Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022. Adapun komposisi belanja prioritas pembangunan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Belanja Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2022

No.	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI
a.	BELANJA PRIORITAS		
Prioritas 1	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	34.146.482.472	3,02
Prioritas 2	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	209.654.512.491	18,55
Prioritas 3	Peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	585.777.646.367	51,84
Prioritas 4	Percepatan Reformasi Birokrasi	300.421.112.580	26,59
TOTAL		1.129.999.753.910	

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021

Belanja prioritas Kota Madiun sebesar Rp 1.129.999.753.910,00. Belanja tersebut dialokasikan untuk mendukung empat prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2022 dengan program-program prioritas sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Prioritas pembangunan 3 yaitu Peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif memiliki proporsi terbesar, diikuti prioritas 4 dan 2. Gambaran lebih lengkap mengenai proporsi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut



Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun, 2021

Gambar 5.1
Nilai dan Proporsi Pendanaan berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Proporsi belanja daerah tahun 2022 sebagian besar di prioritaskan pada Peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif. Prioritas tersebut memiliki proporsi sebesar 47,18 persen dari total belanja prioritas pembangunan. Pendanaan terbesar selanjutnya diarahkan pada Percepatan Reformasi Birokrasi dengan proporsi sebesar 22,75 persen. Selanjutnya proporsi belanja di prioritaskan pada Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan sebesar 22,68 persen. Sedangkan, proporsi terkecil dari belanja prioritas diperuntukan untuk Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital sebesar 7,38 persen. Kerangka pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan beserta program dan indikator kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.2
Kompilasi Program, Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Sesuai
Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Kode	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target RKPD 2022	Pagu Anggaran
PRIORITAS 1	PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN, EKONOMI KREATIF, DAN EKONOMI DIGITAL				
	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,63	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	5.009.446.755
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang Dilatih	23%	862.016.290
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	79%	545.866.522
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	10%	1.719.514.240
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	5.420.298.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	100%	161.250.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	19%	294.755.750
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan terselesaikan	85%	626.851.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	160 perusahaan	525.800.000

Kode	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target RKPD 2022	Pagu Anggaran
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase jenis izin yang diproses secara elektronik	92%	174.061.400
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	20%	14.850.000
	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi		Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	6,12	
			Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi bersertifikat NIK	86,50%	624.176.900
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase koperasi aktif dengan omzet meningkat	30%	224.161.900
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi yang beromzet naik	7%	310.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Entitas Pengolahan Destinasi	2 destinasi	489.048.300
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1 event	547.528.750
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Pembekalan sektor Kepariwisataaan	19%	386.573.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	9.499.396.897
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	100%	107.083.000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar yang berstandar	1 pasar	5.202.899.418
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan Barang penting	100%	77.500.800
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100%	216.946.035
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	15 produk	243.973.850
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	100%	365.380.370
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk	12,80%	497.103.295
PRIORITAS 2	PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN				
	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota		Indeks infrastruktur	85 (baik)	

Kode	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target RKPD 2022	Pagu Anggaran
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	10.580.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase rawan banjir	15%	16.199.043.440
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	100%	101.669.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	90,50%	24.111.567.050
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100%	15.287.156.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100%	13.026.307.970
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	94.5 %	45.461.983.860
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	95,5%	540.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	10.713.951.926
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pengembangan Perumahan	100%	2.171.611.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	99%	4.757.500.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	11.030.976.600
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	88%	9.181.049.000
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,17	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RT/RW	100%	1.880.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	20.275.589.730
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	100%	17.800.000
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100%	36.200.000
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penatagunaan Tanah	100 persen	380.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	16.120.269.915
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Data Perencanaan	71,79%	430.000.000

Kode	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target RKPD 2022	Pagu Anggaran
			Lingkungan Hidup yang Tersedia		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	49%	1.165.137.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	94,32%	56.500.000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	71,5	41.500.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan Yang Taat Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	64,70	390.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	670.000.000
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	94.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73	4.934.700.000
PRIORITAS 3	PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DAN HARMONISASI KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN KONDISI MASYARAKAT YANG KONDUSIF				
	Pengurangan Kemiskinan		Angka Kemiskinan	4,45	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	6.923.449.755
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	91%	3.846.611.695
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19%	1.742.901.123
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	11.313.296.100
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100%	766.036.250
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	100%	186.106.080
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	5.307.071.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Persentase angka kecukupan Energi	102,1%	595.000.000

Kode	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target RKPD 2022	Pagu Anggaran
		KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	80	175.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	280	395.000.000
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	89 ton	80.000.000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/tahun)	15,7	450.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	55%	1.781.771.600
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	60%	321.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Menular (%)	10%	175.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	72%	111.750.000
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	10%	50.000.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	5%	154.477.400
	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	72,81	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	100.999.252.852
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Keluarga Sehat	0.41 nilai	17.779.376.216
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	33.356.884.556
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Keluarga Sehat	0.41 nilai	68.489.238.037
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan	91%	218.691.500
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	86%	226.563.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	62%	5.153.127.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	≤ 4.7 %	520.081.430

Kode	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target RKPD 2022	Pagu Anggaran
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmet Need	<7.9	2.806.958.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	71%	678.185.400
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Harapan Lama Sekolah	14,24	
			Rata-rata Lama Sekolah	11,14	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	200.130.881.282
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	wajib belajar 9 tahun	100%	67.103.553.847
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100%	3.480.307.746
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	20%	1.658.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda berprestasi	2 orang	475.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	30 medali	2.734.615.445
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	6.054.839.300
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	5%	1.259.314.150
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang dibina	100 orang	123.886.145
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	21%	91.547.225
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	4.543.547.447
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	5,95%	1.461.345.000
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	37%	100.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	42%	651.625.000

Kode	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target RKPD 2022	Pagu Anggaran
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	8.4	149.291.000
	Meningkatnya Pemberdayaan Gender		Indeks Pemberdayaan Gender	77,07%	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	15%	846.501.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	100%	250.155.865
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	10%	836.784.054
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Terpilah Gender dan Anak	1 dokumen	229.549.120
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	12,50%	409.276.685
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi kasus Kekerasan terhadap anak	0,003%	128.240.078
	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat		Indeks Kerukunan	B (74,40) harmonis	
			Indeks rasa aman	76,2	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	2.082.695.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	100%	1.717.305.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	A Skor	9.609.780.000
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	97%	4.643.545.000
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	1.289.528.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	560.045.300
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	597.606.270

Kode	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target RKPD 2022	Pagu Anggaran
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	608.688.850
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	A Skor	3.852.158.697
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	344.302.347
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik	100%	871.058.100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase status kelembagaan Orkesmas yang berbadan Hukum	68%	222.985.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100%	553.661.370
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Konflik horisontal di dalam masyarakat	0 konflik	1.503.198.050
PRIORITAS 4	PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI				
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	BB (76)	
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,11	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	A Skor	46.913.404.965
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	8.882.033.895
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	1.466.700.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	7.686.779.907
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sesuai Ketentuan	100%	1.263.338.885
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Persentase Pelaksanaan Program	100%	1.885.650.000

Kode	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target RKPD 2022	Pagu Anggaran
		PEMBANGUNAN DAERAH	Pembangunan Daerah		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	52.081.379.246
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100%	7.770.012.719
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	100%	1.837.189.040
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	10.009.082.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	100%	1.103.290.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	BB Skor	6.109.101.755
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	88 Score	2.708.746.620
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	12%	4.426.619.390
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	8.935.922.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	35%	1.237.019.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta asistensi yang Terpenuhi	100%	1.138.997.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	11.536.794.226
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	3.419.600.360
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	181.926.494
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	11.329.439.485
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	3.244.173.590
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	156.717.790
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	10.480.915.838

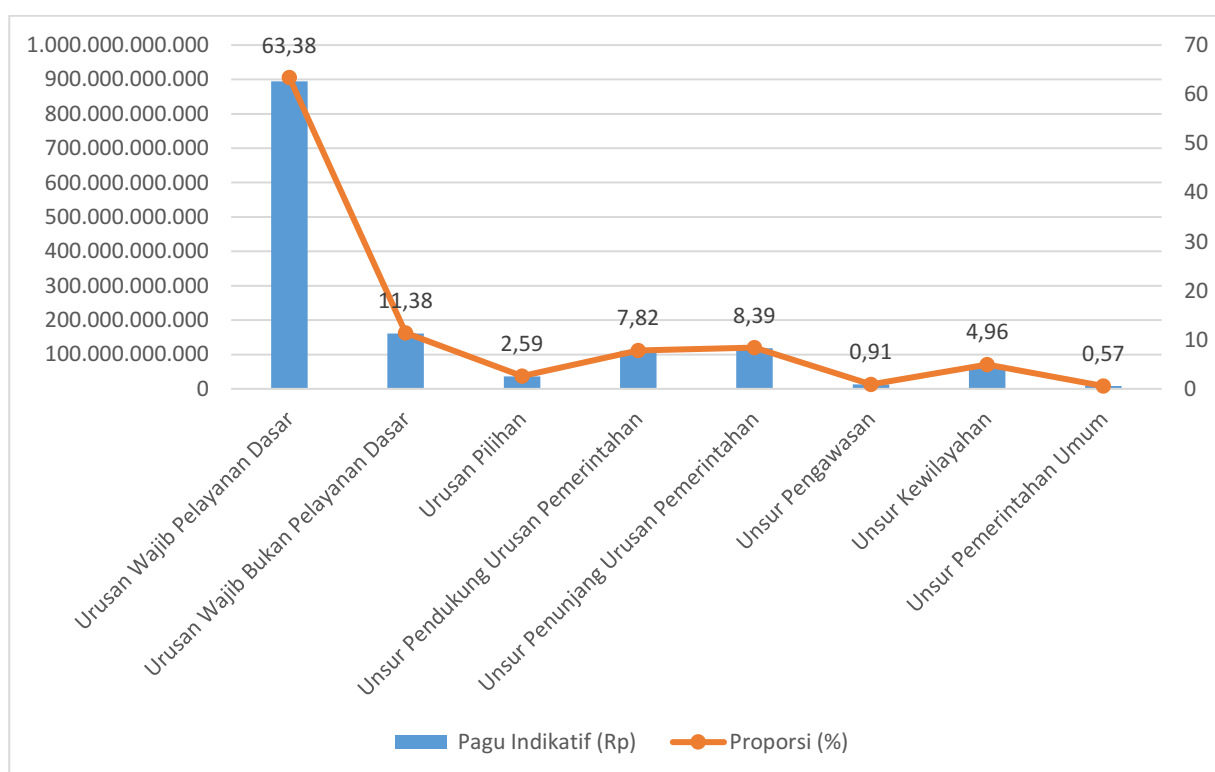
Kode	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target RKPD 2022	Pagu Anggaran
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	3.225.668.135
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	172.589.050
	Meningkatnya kualitas pelayanan public		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	83 (baik)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	5.886.374.935
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84%	233.627.050
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94%	402.719.632
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	akurasi database kependudukan	99,10	362.506.923
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	6.946.939.000
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	75%	4.789.955.000
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	10.587.483.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	500.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	350.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	A Skor	27.510.475.233
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	88 Skor	15.143.438.210
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87,75 Skor	5.738.924.224
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,05 skor	6.011.665.154

Kode	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target RKPD 2022	Pagu Anggaran
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88 skor	5.883.879.073
			Indeks Inovasi Daerah	2086	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	870.033.756

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021

5.2 Rencana Pendanaan Daerah

Rencana pendanaan daerah dapat dilihat berdasarkan urusan, dan perangkat daerah. Berdasarkan urusan pemerintahan, Terdapat dua urusan pemerintahan yang memiliki proporsi pendanaan lebih dari 10 persen tahun 2022. Urusan Wajib Pelayanan Dasar memiliki proporsi terbesar dari total belanja yaitu sebesar 63,38 persen. Selanjutnya Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar memiliki proporsi kedua terbesar dengan nilai proporsi sebesar 11,38 persen. Selanjutnya urusan pendukung urusan pemerintahan dan urusan penunjang urusan pemerintahan masing-masing memiliki proporsi sebesar 7,82 persen dan 8,39 persen. Sedangkan urusan lainnya di proyeksikan hanya memiliki proporsi di bawah lima persen.



Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021

Gambar 5.2

Pagu Indikatif dan Proporsi Pendanaan berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2022

Rincian lebih detail mengenai pagu indikatif berdasarkan urusan pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.3
Pagu Indikatif Belanja berdasarkan Urusan Tahun 2022

No	Usuran Pemerintahan	Pagu Indikatif	Proporsi
		(Rp)	(%)
A	Usuran Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	272.372.742.875	24,10
2	Kesehatan	226.223.133.161	20,02
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127.187.727.320	11,26
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37.918.652.656	3,36
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	19.342.853.000	1,71
6	Sosial	24.778.401.003	2,19
B	Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
7	Tenaga Kerja	8.136.843.807	0,72
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.700.506.802	0,24
9	Pangan	6.077.071.000	0,54
10	Pertanahan	434.000.000	0,04
11	Lingkungan Hidup	23.902.106.915	2,12
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.885.228.540	0,61
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.005.224.830	0,35
14	Perhubungan	20.212.025.600	1,79
15	Komunikasi dan Informatika	22.324.377.000	1,98
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.158.338.800	0,10
17	Penanaman Modal	7.203.016.150	0,64
18	Kepemudaan dan Olahraga	3.209.615.445	0,28
19	Statistik	500.000.000	0,04
20	Persandian	350.000.000	0,03
21	Kebudayaan	7.529.586.820	0,67
22	Perpustakaan	6.104.892.447	0,54
23	Kearsipan	800.916.000	0,07
B	Usuran Pilihan		
24	Kelautan dan Perikanan	925.000.000	0,08
25	Pariwisata	1.423.150.050	0,13
26	Pertanian	2.593.999.000	0,23
27	Perdagangan	15.347.800.000	1,36
28	Perindustrian	862.483.665	0,08
29	Transmigrasi	14.850.000	0,00
C	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
1	Unsur Sekretariat Daerah	57.262.138.860	5,07
2	Unsur Sekretariat DPRD	42.653.913.443	3,77

No	Urusan Pemerintahan	Pagu Indikatif	Proporsi
		(Rp)	(%)
D	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
1	Unsur Perencanaan	10.835.768.792	0,96
2	Unsur Keuangan	72.800.953.005	6,44
3	Unsur Kepegawaian	8.817.848.375	0,78
4	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	4.426.619.390	0,39
5	Unsur Penelitian dan Pengembangan	870.033.756	0,08
E	Unsur Pengawasan		
1	Inspektorat	11.311.938.000	1,00
F	Unsur Kewilayahan		
1	Kecamatan	63.148.633.839	5,59
G	Unsur Pemerintahan Umum		
1	Kesatuan bangsa dan Politik	7.347.363.564	0,65
TOTAL USULAN ANGGARAN		1.129.999.753.910	100

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021

Tabel 5.4
Pagu Indikatif Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	Proporsi (%)
1	Dinas Pendidikan	272.372.742.875	24,10
2	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	230.228.357.991	20,37
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127.187.727.320	11,26
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	38.352.652.656	3,39
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15.542.853.000	1,38
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.800.000.000	0,34
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.478.907.805	2,43
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10.157.666.272	0,90
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.596.070.000	0,85
10	Dinas Lingkungan Hidup	23.902.106.915	2,12
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.885.228.540	0,61
12	Dinas Perhubungan	20.212.025.600	1,79
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.174.377.000	2,05
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.217.866.150	0,64
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	12.162.352.315	1,08
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.905.808.447	0,61
17	Dinas Perdagangan	15.347.800.000	1,36
18	Sekretariat Daerah	57.262.138.860	5,07
19	Sekretariat DPRD	42.653.913.443	3,77
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.705.802.548	1,04
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	61.688.581.005	5,46
22	Badan Pendapatan Daerah	11.112.372.000	0,98
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.244.467.765	1,17
24	Inspektorat	11.311.938.000	1,00

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	Proporsi (%)
25	Kecamatan Taman	21.339.602.289	1,89
26	Kecamatan Kartoharjo	20.371.740.946	1,80
27	Kecamatan Manguharjo	21.437.290.604	1,90
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.347.363.564	0,65
TOTAL USULAN ANGGARAN		1.129.999.753.910	100

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021

Tabel 5.5
Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
PRIORITAS I Penguatan Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital																
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA (DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH)							8.136.843.807		9.163.435.432		
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.009.446.755		5.063.218.000		
2	7	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							71.280.000		71.280.000		
2	7	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	6 dokumen	27,93 Skor	71.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	71.280.000
2	7	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.597.300.000		3.633.273.000		
2	7	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan kebutuhan gaji Asn perangkat Dearah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	3.597.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.633.273.000
2	7	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							100.000.000				
2	7	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi Kepegawaian	jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan cukai	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100 orang	27,93 Skor	100.000.000		
2	7	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.119.850.000		1.231.835.000		

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	7	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	885.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	974.435.000
2	7	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	234.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	257.400.000
2	7	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									5.716.755		-
2	7	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/ jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	2.673.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	7	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	3.043.755	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	7	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									115.300.000		126.830.000
2	7	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	48.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53.405.000
2	7	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	39.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	43.175.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	7	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	27,93 Skor	27.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.250.000
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA									862.016.290		1.245.000.000
2	7	3	02.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi									812.016.290		1.190.000.000
2	7	3	02.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Presentase Pencari Kerja yang Dilatih	Tersedianya peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten bagi pencari kerja dan wirausaha baru	Presentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal	23%	220 orang	220 orang	70%	812.016.290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	1.190.000.000
2	7	3	02.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									50.000.000		55.000.000
2	7	3	02.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Presentase Pencari Kerja yang Dilatih	Presentase LPKS yang terakreditasi	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Presentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal	23%	20%	4 pembinaan	70%	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.000.000
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									545.866.522		581.083.392
2	7	4	02.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja									545.866.522		581.083.392
2	7	4	02.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Presentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan didalam Negeri maupun diLuar Negeri	Tersediannya aplikasi dan data ketenagakerjaan yang aktual	Presentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal	79%	225 orang	1 aplikasi dan dokumen	70%	217.347.107	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	275.967.272
2	7	4	02.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Presentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan didalam Negeri maupun diLuar Negeri	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan sosialisasi bursa kerja	Presentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal	79%	225 orang	175 orang	70%	128.245.575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	305.116.120
2	7	4	02.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Presentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan didalam Negeri maupun diLuar Negeri	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	Presentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal	79%	225 orang	50 orang	70%	200.273.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL																				1.719.514.240		2.274.134.040	
2	7	5	02.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																				268.952.240		546.831.240
2	7	5	02.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Prosentase perusahaan yang mengesahkan PP dan PKB	Jumlah dokumen peraturan perusahaan dan ketenagakerjaan	Prosentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sesuai standart	10%	25%	15 dokumen	60,50%	47.615.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	224.000.000										
2	7	5	02.01	3	Penyelenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Prosentase perusahaan yang mengesahkan PP dan PKB	Jumlah Perusahaan yang terdata dan mendapatkan Sosialisasi Sarana HI	Prosentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sesuai standart	10%	25%	200 perusahaan	60,50%	221.337.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	322.831.240										
2	7	5	02.02	Precegan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																				1.450.562.000		1.727.302.800
2	7	5	02.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	Jumlah Perselisihan Industri yang Diselesaikan melalui PB	Prosentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sesuai standart	10%	75%	15 Kasus Terselesaikan	60,50%	107.768.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120.692.440										
2	7	5	02.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	Jumlah Tenaga kerja Sektor Informal yang mendapatkan SIAGAKITA	Prosentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sesuai standart	10%	75%	4.000 orang	60,50%	1.342.793.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.606.610.360										
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH)																				1.158.338.800		1.658.058.000	
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN																				624.176.900		773.058.000	
2	17	5	02.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																				624.176.900		773.058.000
2	17	5	02.01	1	Peningkatan Pemahaman dan	Persentase koperasi bersertifikat NIK	jumlah koperasi bersertifikat NIK	jumlah koperasi yang dibina	Persentase koperasi aktif	86,50%	135 koperasi	156 koperasi	98,71%	624.176.900	Dana Transfer Umum-Dana	773.058.000										

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi										Alokasi Umum	
															Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI									224.161.900		170.000.000
2	17	6	02.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota									224.161.900		170.000.000
2	17	6	02.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase koperasi aktif dengan omzet meningkat	jumlah koperasi yang meningkat omsetnya	jumlah koperasi yang dibina	Persentase koperasi aktif	30%	50 koperasi	156 koperasi	98,71%	224.161.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	170.000.000
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									310.000.000		715.000.000
2	17	8	02.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									310.000.000		715.000.000
2	17	8	02.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi yang beromzet naik	jumlah pelaku usaha mikro terfasilitasi beromzet naik	jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi	Persentase Usaha Mikro yang beromzet naik	7%	4 orang	50 orang	0,045%	310.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	715.000.000
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)									7.203.016.150		7.369.650.165
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									5.420.298.000		5.851.386.800
2	18	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									47.370.000		62.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 dokumen	32,35 skor	47.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62.000.000
2	18	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3.900.000.000		4.202.386.800
2	18	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	32,35 skor	3.900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.202.386.800
2	18	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									200.000.000		200.000.000
2	18	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100 persen	100 persen	32,35 skor	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
2	18	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									108.600.000		190.000.000
2	18	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	32,35 skor	108.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	190.000.000
2	18	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									932.310.000		997.000.000
2	18	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	32,35 skor	932.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	997.000.000
2	18	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									232.018.000		200.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	32,35 skor	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.000.000
2	18	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	32,35 skor	132.018.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
2	18	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	32,35 skor	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.000.000
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									161.250.000		64.312.500
2	18	2	02.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									161.250.000		64.312.500
2	18	2	02.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	jumlah dokumen RUPM yang telah direvisi	Nilai Realisasi Penanaman Modal	100%	1 paket	1 dokumen	196 M	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	18	2	02.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	jumlah peta investasi yang memerlukan pemeliharaan	Nilai Realisasi Penanaman Modal	100%	1 paket	1 paket	196 M	61.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	64.312.500
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									294.755.750		300.650.865
2	18	3	02.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									294.755.750		300.650.865
2	18	3	02.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	Jumlah investor baru	jumlah kegiatan promosi penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	26%	20 investor	5 kegiatan	196 M	294.755.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.650.865
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									626.851.000		535.300.000
2	18	4	02.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									626.851.000		535.300.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	4	02.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pelayanan perizinan terselesaikan	Jumlah Pemohon Izin	Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan Elektronik	Nilai Realisasi Penanaman Modal	85%	1600 izin	80 orang	196 M	240.442.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
2	18	4	02.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan terselesaikan	Jumlah Pemohon Izin	jumlah pemenuhan komitmen berusaha yang dievaluasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal	85%	1600 izin	15 persen	196 M	236.409.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	246.500.000
2	18	4	02.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan perizinan terselesaikan	Jumlah Pemohon Izin	jumlah layanan konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Nilai Realisasi Penanaman Modal	85%	1600 izin	55 kali	196 M	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	38.800.000
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									525.800.000		535.000.000
2	18	5	02.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									525.800.000		535.000.000
2	18	5	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	Jumlah perusahaan yang dibina	jumlah perusahaan yang tertib melaporkan LKPM	Nilai Realisasi Penanaman Modal	110 perusahaan	110 perusahaan	30 perusahaan	196 M	50.815.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	54.000.000
2	18	5	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	Jumlah perusahaan yang dibina	jumlah perusahaan yang memahami ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	110 perusahaan	110 perusahaan	50 perusahaan	196 M	454.985.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	384.000.000
2	18	5	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	Jumlah perusahaan yang dibina	jumlah perusahaan yang telah memenuhi kewajiban pelaksanaan penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	110 perusahaan	110 perusahaan	30 perusahaan	196 M	20.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	97.000.000
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									174.061.400		83.000.000
2	18	6	02.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									174.061.400		83.000.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	18	6	02.01	1	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Presentase jenis izin yang diproses secara elektronik	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	jumlah jenis izin yang terintegrasi menggunakan sistem elektronik	Nilai Realisasi Penanaman Modal	100%	70 jenis ijin	35 izin	196 M	174.061.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83.000.000			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA (DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA)										1.423.150.050		2.087.250.000		
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												489.048.300		453.750.000
3	26	2	02.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												489.048.300		453.750.000
3	26	2	02.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Entitas Pengolahan Destinasi	Jumlah Destinasi pariwisata yang dikelola	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	Jumlah kunjungan wisatawan	2 destinasi	2 destinasi	2 lokasi	400.000	224.048.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	302.500.000			
3	26	2	02.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Entitas Pengolahan Destinasi	Jumlah Destinasi pariwisata yang dikelola	Jumlah lokasi yg memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah kunjungan wisatawan	2 destinasi	2 destinasi	2 lokasi	400.000	265.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	151.250.000			
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												547.528.750		907.500.000
3	26	3	02.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												547.528.750		907.500.000
3	26	3	02.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah Promosi Pariwisata	Jumlah promosi pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	4 event	2 promos	2 promos	400.000	547.528.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	907.500.000			
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												386.573.000		726.000.000
3	26	5	02.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar												386.573.000		726.000.000
3	26	5	02.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata Pembekalan sektor Kepariwisataan	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor pariwisata	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisatawan	19%	18 %	1 event	400.000	386.573.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	726.000.000			
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN (DINAS PERDAGANGAN)										15.347.800.000		21.858.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.499.396.897		11.518.000.000			
3	30	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						54.007.200		99.000.000			
3	30	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 Dokumen	19,34 Skor	54.007.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	99.000.000
3	30	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.616.000.000		8.500.000.000			
3	30	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	19,34 Skor	7.616.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.500.000.000
3	30	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						174.699.000		225.000.000			
3	30	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	19,34 Skor	174.699.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	225.000.000
3	30	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						201.010.800		386.000.000			
3	30	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	19,34 Skor	201.010.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	386.000.000
3	30	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.016.681.807		1.150.000.000			
3	30	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	19,34 Skor	1.016.681.807	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.150.000.000
3	30	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						436.998.090		1.158.000.000			

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	19,34 Skor	260.515.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	360.000.000	
3	30	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	19,34 Skor	49.978.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	602.000.000	
3	30	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	19,34 Skor	126.503.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	196.000.000	
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN									107.083.000		-	
3	30	2	02.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan									107.083.000		-	
3	30	2	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	Prosentase ijin yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi perijinan yang dikeluarkan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	100%	100%	75 surat	5,88%	107.083.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									5.202.899.418		8.070.000.000	
3	30	3	02.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									1.275.495.040		3.256.000.000	
3	30	3	02.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pasar yang Dikelola Sarana Distribusinya	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	100%	17 pasar	3 pasar	5,88%	213.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.783.000.000	
3	30	3	02.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pasar yang Dikelola Sarana Distribusinya	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	100%	17 pasar	17 pasar	5,88%	1.062.145.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.473.000.000	
3	30	3	02.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									3.927.404.378		4.814.000.000	

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	3	02.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang berstandar	Jumlah peningkatan omset pasar rakyat	Jumlah Pelaksanaan Promosi Pasar	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	1 pasar	Rp. 3.200.000.000	2 kali	5,88%	670.330.383	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	932.000.000	
3	30	3	02.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang berstandar	Jumlah peningkatan omset pasar rakyat	Jumlah orang yang melaksanakan pengelolaan pasar	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	1 pasar	Rp. 3.200.000.000	118 orang	5,88%	3.257.073.995	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.882.000.000	
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING										77.500.800		817.000.000
3	30	4	02.02		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota										75.089.600		707.000.000
3	30	4	02.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan Barang penting	Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting	Jumlah pelaksanaan pemantauan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	100%	100%	3 kali	5,88%	75.089.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90.000.000	
3	30	4	02.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										2.411.200		10.000.000
3	30	4	02.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan Barang penting	Prosentase Tersalurinya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	Jumlah Pengawasan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	100%	100%	2 kali	5,88%	2.411.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.000.000	
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										216.946.035		287.000.000
3	30	6	02.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan										216.946.035		287.000.000
3	30	6	02.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditera/tera ulang	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	100%	12 bulan	7000 uttp	5,88%	204.753.055	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	262.000.000	
3	30	6	02.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	Jumlah pelaksanaan pengawasan produk dalam kemasan yang telah diawasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	100%	12 bulan	9 lokasi	5,88%	12.192.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.000.000	

1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI																	243.973.850		1.166.000.000		
3	30	7	02.01		Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																	243.973.850		1.166.000.000		
3	30	7	02.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	Jumlah terlaksananya Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah terlaksananya promosi produk perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	15 produk	4 kali	4 kali	5,88%	135.387.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	566.000.000										
3	30	7	02.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	Jumlah terlaksananya Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah Sistem Informasi baik baru dan pemeliharannya	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	15 produk	4 kali	2 jenis	5,88%	108.586.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600.000.000										
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN (DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH)																	862.483.665		1.375.000.000		
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																	365.380.370		765.000.000		
3	31	2	02.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																	365.380.370		765.000.000		
3	31	2	02.01	3	Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	Tersedianya Dokumen Perindustrian	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Standarisasi HKI dan peraturan perundangan Bea Cukai	Prosentase pertumbuhan industri	100%	2 dokumen	20 IKM	0,03%	84.269.040	DBH CHT	290.000.000										
3	31	2	02.01	4	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	Tersedianya Dokumen Perindustrian	Jumlah Bimbingan Teknik dan pengembangan sarana standar pengawasan mutu diversifikasi produk	Prosentase pertumbuhan industri	100%	2 dokumen	40 IKM	0,03%	55.713.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	111.000.000										
3	31	2	02.01	5	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	Tersedianya Dokumen Perindustrian	Jumlah peserta pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Prosentase pertumbuhan industri	100%	2 dokumen	65 IKM	0,03%	225.398.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	364.000.000										
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL																	497.103.295		610.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
3	31	4	02.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						497.103.295		610.000.000			
3	31	4	02.01	2	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Prosentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk	Jumlah Penyebarluasan informasi produk IKM	Jumlah Publikasi Produk IKM berbasis SIINas	Prosentase pertumbuhan industri	12,80%	4 kegiatan	4 kali publikasi	0,03%	497.103.295	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	610.000.000
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)						14.850.000		16.335.000			
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						14.850.000		16.335.000			
3	32	3	02.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						14.850.000		16.335.000			
3	32	3	02.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Sosialisasi Penataan Persebaran	jumlah sosialisasi ketransmigrasian	Persentase pendaftar Transmigrasi Yang Terfasilitasi	20%	10 Orang	1 kegiatan	3%	14.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16.335.000
PAGU PRIORITAS I Penguatan Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital											34.146.482.472					
PRIORITAS II Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan																
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)						127.187.727.320		141.285.000.000			
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.580.000.000		12.150.000.000			
1	3	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000		50.000.000			
1	3	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokuem Perencanaan, Pemngendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	8 dokumen	30,89 skor	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000
1	3	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.000.000.000		7.000.000.000			
1	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,89 skor	6.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7.000.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	3	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										240.000.000		250.000.000
1	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Jumlah Kebutuhan Perjalanan Dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	60 kali	30,89 skor	240.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
1	3	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										90.000.000		600.000.000
1	3	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kebutuhan sarpras gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	5 jenis	30,89 skor	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
1	3	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3.480.000.000		3.500.000.000
1	3	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pemenuhan peralatan/perlengkapan an knator yg representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	10 jenis	30,89 skor	3.480.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.500.000.000
1	3	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										730.000.000		750.000.000
1	3	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Jumlah Kendaraan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	59 unit	30,89 skor	340.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350.000.000
1	3	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Jumlah gedung	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 gedung	30,89 skor	390.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400.000.000
1	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										16.199.043.440		14.850.000.000
1	3	2	02.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										16.199.043.440		14.850.000.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	2	02.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	persentase rawan banjir	persentase rawan genangan	Jumlah pintu air/bendung yg dibangun	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	14%	15%	2 pintu air	94.2%	4.561.050.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.000.000.000	
1	3	2	02.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	persentase rawan banjir	persentase rawan genangan	Jumlah stasiun pompa banjir yg direhab	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	14%	15%	1 stasiun	94.2%	3.992.153.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000	
1	3	2	02.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	persentase rawan banjir	persentase rawan genangan	Panjang sungai yg dinormalisasikan	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	14%	15%	1.5 km	94.2%	6.547.050.040	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	11.000.000.000	
1	3	2	02.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	persentase rawan banjir	persentase rawan genangan	Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	14%	15%	100 persen	94.2%	1.098.790.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	600.000.000	
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										101.669.000		60.000.000
1	3	3	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										101.669.000		60.000.000
1	3	3	02.01	1	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	Jumlah dokumen	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	1 dokumen	100%	101.669.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60.000.000	
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE										24.111.567.050		4.950.000.000
1	3	6	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										24.111.567.050		4.950.000.000
1	3	6	02.01	1	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	Panjang drainase kondisi baik	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	90,50%	19.433 km	8 dokumen	94.2%	997.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.200.000.000	
1	3	6	02.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	Panjang drainase kondisi baik	Panjang drainase yg dibangun	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	90,50%	19.433 km	1.5 km	94.2%	20.513.921.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.250.000.000	
1	3	6	02.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	Panjang drainase kondisi baik	Jumlah lokasi drainase yang dipelihara	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	90,50%	19.433 km	3 kecamatan	94.2%	2.600.246.010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.500.000.000	

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	3	8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											15.287.156.000		23.250.000.000
1	3	8	02.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung											15.287.156.000		23.250.000.000
1	3	8	02.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	jumlah permohonan yang ditindaklanjuti	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	50 pemohon	100%	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000	
1	3	8	02.01	2	Perencanaan, Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	Jumlah gedung yang ditindaklanjuti	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	5 gedung	100%	15.067.156.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	23.000.000.000	
1	3	9		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA											13.026.307.970		20.000.000.000
1	3	9	02.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota											13.026.307.970		20.000.000.000
1	3	9	02.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah lokasi	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100%	100%	30 lokasi	100%	13.026.307.970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000.000	
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											45.461.983.860		63.150.000.000
1	3	10	02.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											45.461.983.860		63.150.000.000
1	3	10	02.01	1	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95,00%	95,00%	10 dokumen	94.5 %	1.206.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.000.000.000	
1	3	10	02.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Luas lahan yang dibebaskan	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95,00%	95,00%	5 hektar	94.5 %	5.031.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	10	02.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah dokumen hasil survey	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95,00%	95,00%	2 dokumen	94.5 %	408.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500.000.000
1	3	10	02.01	5	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Panjang jalan yg dibangun	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95,00%	95,00%	1000 meter	94.5 %	16.338.318.240	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	32.000.000.000
1	3	10	02.01	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah ruas yang ditambah lajunya	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95,00%	95,00%	1 ruas	94.5 %	3.713.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.500.000.000
1	3	10	02.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95,00%	95,00%	6 km	94.5 %	13.384.620.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17.000.000.000
1	3	10	02.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95,00%	95,00%	28 ruas	94.5 %	2.525.135.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.000.000.000
1	3	10	02.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah jembatan yang dibangun	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95,00%	95,00%	1 jembatan	94.5 %	2.627.550.000		1.500.000.000
1	3	10	02.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Jumlah jembatan yang dipelihara	persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95,00%	95,00%	10 jembatan	94.5 %	225.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI									540.000.000		575.000.000
1	3	11	02.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi									270.000.000		275.000.000
1	3	11	02.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Peserta	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	95%	200 orang	200 orang	95%	270.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	275.000.000
1	3	11	02.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)									270.000.000		300.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	11	02.03	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah rekomendasi IUJK	Jumlah peserta	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	95%	200 orang	50 BUJK	95%	270.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									1.880.000.000		2.300.000.000
1	3	12	02.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota									1.110.000.000		1.500.000.000
1	3	12	02.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Terhadap RT/RW	Jumlah Dokumen tata ruang yang ditetapkan	Jumlah dokumen yang disusun	Persentase Ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	900.000.000
1	3	12	02.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Terhadap RT/RW	Jumlah Dokumen tata ruang yang ditetapkan	Jumlah dokumen yang disusun	Persentase Ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	850.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	500.000.000
1	3	12	02.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RT/RW	Jumlah Dokumen tata ruang yang ditetapkan	Jumlah terlaksananya sosialisasi peraturan daerah di bidang penataan ruang	Persentase Ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	1 dokumen	3 kali	100%	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
1	3	12	02.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									330.000.000		350.000.000
1	3	12	02.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Ketaatan Terhadap RT/RW	Dokumen Pemanfaatan Ruang	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	Persentase Ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	1 dokumen	100%	100%	330.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350.000.000
1	3	12	02.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									440.000.000		450.000.000
1	3	12	02.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RT/RW	Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase penanganan pelanggaran penataan ruang	Persentase Ketaatan pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	1 dokumen	100%	100%	440.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450.000.000
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN)									37.918.652.656		37.707.410.400

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	4	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10.713.951.926		8.197.410.400
1	4	1	02.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										45.000.000		45.000.000
1	4	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	20 dokumen	30,01 Skor	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.000.000
1	4	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6.135.000.000		5.061.000.000
1	4	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	6.074.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.000.000.000
1	4	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	13 dokumen	30,01 Skor	61.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	61.000.000
1	4	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										130.010.000		130.000.000
1	4	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	120.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120.000.000
1	4	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	Persentase peserta yang paham	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.000.000
1	4	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										183.880.000		183.880.000
1	4	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	32,35 skor	183.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	183.880.000
1	4	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										108.791.650		570.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/ jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	1.892.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500.000.000
1	4	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	106.899.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70.000.000
1	4	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2.174.500.844		140.000.000
1	4	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan peralatan dan/perengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	2.174.500.844	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	140.000.000
1	4	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.936.769.432		2.067.530.400
1	4	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	1.470.961.432	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.560.360.000
1	4	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35.000.000
1	4	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	30,01 Skor	425.808.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	472.170.400

1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																	2.171.611.000		4.790.000.000		
1	4	2	02.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																	87.500.000		100.000.000		
1	4	2	02.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Prosentase Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	Jumlah dokumen data rumah yang dihasilkan	Indeks Perumahan Permukiman	100%	1 Dokumen	1 dokumen	99,66%	87.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000										
1	4	2	02.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																	1.334.111.000		1.690.000.000		
1	4	2	02.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pengembangan Perumahan	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kota yang terpelihara	Indeks Perumahan Permukiman	100%	1 lokasi	1 lokasi	99,66%	1.334.111.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.690.000.000										
1	4	2	02.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																	750.000.000		3.000.000.000		
1	4	2	02.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Prosentase Pengembangan Perumahan	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun	Indeks Perumahan Permukiman	100%	100%	100%	99,66%	750.000.000		3.000.000.000										
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																	4.757.500.000		2.720.000.000		
1	4	3	02.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																	102.000.000		220.000.000		
1	4	3	02.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jumlah dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Indeks Perumahan Permukiman	99%	0,50%	1 dokumen	99,66%	102.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220.000.000										
1	4	3	02.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																	4.655.500.000		2.500.000.000		
1	4	3	02.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jumlah dokumen kajian/perencanaan	Indeks Perumahan Permukiman	99%	0,50%	3 dokumen	99,66%	212.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000										

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	3	02.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Prosentase RTLH yang dilakukan perbaikan yang sesuai kriteria	Indeks Perumahan Permukiman	99%	0,50%	100%	99,66%	1.458.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.200.000.000
1	4	3	02.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jumlah lokasi pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Indeks Perumahan Permukiman	99%	0,50%	3 lokasi	99,66%	2.985.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)									20.275.589.730		22.000.000.000
1	4	5	02.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan									20.275.589.730		22.000.000.000
1	4	5	02.01	2	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Prosentase Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	Jumlah lokasi prasaranasarana dan utilitas umum yang disediakan	Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Pemakaman	100 persen	100%	3 lokasi	78,48%	20.275.589.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22.000.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN (DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN)									434.000.000		40.000.000
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI									17.800.000		15.000.000
2	10	2	02.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									17.800.000		15.000.000
2	10	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	Prosentase pemberian izin lokasi	Persentase pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) sesuai ketentuan	Indeks Perumahan Permukiman	100%	100%	100%	99,66%	17.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN									36.200.000		25.000.000
2	10	4	02.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota									36.200.000		25.000.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	10	4	02.01	1	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah	Persentase penyelesaian sengketa konflikperkara pertanahan yang tertangani	Indeks Perumahan Permukiman	100%	100%	100%	99,66%	36.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.000.000	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH										380.000.000		-
2	10	10	02.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota										380.000.000		-
2	10	10	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Prosentase Penatagunaan Tanah	Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah	Persentase pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	Indeks Perumahan Permukiman	100%	100%	100%	99,66%	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2	10	10	02.01	2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Penatagunaan Tanah	Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah	Jumlah data yang dapat disajikan	Indeks Perumahan Permukiman	100%	100%	1 dokumen	99,66%	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)										23.902.106.915		77.197.150.000
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										16.120.269.915		24.753.150.000
2	11	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										75.000.000		110.000.000
2	11	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 dokumen	15,9	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110.000.000	
2	11	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8.856.372.010		12.595.000.000
2	11	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	8.856.372.010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.595.000.000	
2	11	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										201.000.000		375.500.000
2	11	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	255.500.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	Persentase peningkatan kapasitas pegawai	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	76.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120.000.000
2	11	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									137.883.000		211.750.000
2	11	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	137.883.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	211.750.000
2	11	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									5.696.195		1.397.000.000
2	11	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	5.696.195	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220.000.000
2	11	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									5.446.280.610		7.946.400.000
2	11	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	1.230.240.610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.475.000.000
2	11	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	4.216.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.471.400.000
2	11	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.398.038.100		2.117.500.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Presentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	1.205.994.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.512.500.000
2	11	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Presentase peralatan dan mesin yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	92.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	165.000.000
2	11	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	15,9	99.918.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	440.000.000
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP									430.000.000		583.000.000
2	11	2	02.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota									255.000.000		390.500.000
2	11	2	02.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Presentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	71,79%	4 dokumen	1 Dokumen	51,3 dan 83,28	255.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	390.500.000
2	11	2	02.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota									175.000.000		192.500.000
2	11	2	02.02	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Presentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	71,79%	1 dokumen	1 dokumen	51,3 dan 83,28	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	192.500.000
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									1.165.137.000		1.760.000.000
2	11	3	02.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									770.637.000		1.254.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	3	02.01	1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	49%	68 kegiatan/ usaha	15 Kali	51,3 dan 83,28	412.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	814.000.000
2	11	3	02.01	2	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian pencemaran	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	49%	68 kegiatan/ usaha	3 kegiatan	51,3 dan 83,28	357.787.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	440.000.000
2	11	3	02.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											506.000.000
														394.500.000		
2	11	3	02.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	49%	15 usaha/ kegiatan	10 kali	51,3 dan 83,28	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	319.000.000
2	11	3	02.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	jumlah kegiatan	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	49%	15 usaha/ kegiatan	2 kegiatan	51,3 dan 83,28	144.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	187.000.000
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											200.000.000
														56.500.000		
2	11	4	02.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											200.000.000
														56.500.000		
2	11	4	02.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	Jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	jumlah dokumen yang disusun	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,32%	332 jenis	1 Dokumen	51,3 dan 83,28	56.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											200.000.000
														41.500.000		
2	11	5	02.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3											200.000.000
														41.500.000		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	11	5	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang memenuhi syarat	Jumlah Kegiatan/Usaha yang mengurus izin	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	71,5	16 lokasi	5 kegiatan	98,50	41.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000	
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										390.000.000		532.000.000
2	11	6	02.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										390.000.000		532.000.000
2	11	6	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan Yang Taat Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	64,70	16 perusahaan	4 wajib usaha	51,3 dan 83,28	260.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	357.000.000	
2	11	6	02.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan Yang Taat Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat membuat laporan	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	64,70	16 perusahaan	15 usaha	51,3 dan 83,28	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	175.000.000	
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										670.000.000		1.060.000.000
2	11	8	02.01		Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										670.000.000		1.060.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	8	02.01	1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Prosentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	100	15	4 kegiatan	51,3 dan 83,28	670.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	950.000.000
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP											106.000.000
2	11	10	02.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota											106.000.000
2	11	10	02.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	100%	10 kasus	10 kasus	51,3 dan 83,28	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.000.000
2	11	10	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan	Jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentuk	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	100%	10 kasus	50 kader	51,3 dan 83,28	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	61.000.000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											48.003.000.000
2	11	11	02.01		Pengelolaan Sampah											47.865.000.000
2	11	11	02.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah sampah yang dikelola	Jumlah tempat/lokasi pelaksanaan pengurangan sampah yang ditangani DLH	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73	43,777	2 lokasi	98,50	235.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	435.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	11	02.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah sampah yang dikelola	jumlah volume sampah yang masuk TPA	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73	43,777	32280 ton	98,50	2.998.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.355.000.000
2	11	11	02.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah sampah yang dikelola	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73	43,777	3 jenis	98,5	1.609.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Penugasan - Lingkungan Hidup	44.000.000.000
2	11	11	02.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta										91.000.000	138.000.000
2	11	11	02.03	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi atau Jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja Pengelolaan Sampah (ADIPURA)	Jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja Pengelolaan Sampah (ADIPURA)	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73	35	3 kecamatan	98,50	91.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	138.000.000
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN (DINAS PERHUBUNGAN)										20.212.025.600	21.793.382.000
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11.030.976.600	11.245.250.000
2	15	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										140.200.000	140.200.000
2	15	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokuem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 Dokumen	26,67 Skor	140.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	140.200.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	15	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6.514.480.000		7.400.000.000
2	15	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	6.514.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.400.000.000
2	15	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										221.261.000		300.400.000
2	15	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
2	15	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase peserta yang memahami	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	96.261.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.400.000
2	15	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										200.000.000		20.000.000
2	15	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000
2	15	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										300.000.000		200.000.000
2	15	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
2	15	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2.570.385.600		1.700.000.000
2	15	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	2.570.385.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.700.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	15	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1.084.650.000		1.484.650.000
2	15	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	650.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	650.000.000	
2	15	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	284.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	684.650.000	
2	15	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	26,67 Skor	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000	
2	15	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											9.181.049.000		10.548.132.000
2	15	2	02.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota											50.000.000		50.000.000
2	15	2	02.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase terlaksananya kebijakan	Jumlah Sosialisasi	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000	
2	15	2	02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											3.639.975.000		4.687.600.000
2	15	2	02.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	persentasi perlengkapan jalan yang berfungsi baik	persentase jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	75%	100%	39 km/jam	1.490.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.398.500.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	2	02.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	persentasi perlengkapan jalan yang berfungsi baik	persentase perlengkapan jalan yang dipelihara	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	75%	100%	39 km/jam	2.149.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.289.100.000
2	15	2	02.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									38.250.000		94.350.000
2	15	2	02.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase Fasilitas terminal berfungsi baik	persentase fasilitas terminal yang layak	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	38.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	94.350.000
2	15	2	02.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									868.469.000		780.100.000
2	15	2	02.04	1	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase fasilitas parkir yang memiliki ijin	persentase pengurusan ijin	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	168.469.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	103.500.000
2	15	2	02.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase fasilitas parkir yang memiliki ijin	persentase monev penyelenggaraan parkir	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	676.600.000
2	15	2	02.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									745.480.000		828.300.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	2	02.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase kendaraan lulus uji	persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	155.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	188.550.000
2	15	2	02.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase kendaraan lulus uji	persentase pemohon yang paham	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	48.395.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	94.000.000
2	15	2	02.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase kendaraan lulus uji	persentase jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	105.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	105.950.000
2	15	2	02.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase kendaraan lulus uji	persentase laporan	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	435.585.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	439.800.000
2	15	2	02.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									140.200.000		299.500.000
2	15	2	02.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen MRL	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	6 kegiatan	39 km/jam	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92.000.000
2	15	2	02.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	persentase jumlah uji coba dan sosialisasi	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	60.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	123.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	15	2	02.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota										368.035.000		318.000.000
2	15	2	02.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase pengurusan rekomendasi andalalin	persentase pemenuhan rekomendasi	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	368.035.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	318.000.000
2	15	2	02.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										1.495.880.000		1.582.382.000
2	15	2	02.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah kegiatan keselamatan	Jumlah Peserta	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60.000.000
2	15	2	02.08	2	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah kegiatan keselamatan	persentase Jumlah kegiatan	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	1.386.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.480.000.000
2	15	2	02.08	4	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah kegiatan keselamatan	persentase Jumlah kegiatan	Kecepatan rata-rata Lalu Lintas (Km/jam)	88%	100%	100%	39 km/jam	49.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42.382.000
2	15	2	02.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										1.834.760.000		1.907.900.000
2	15	2	02.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase ketersediaan angkutan umum	jumlah kendaraan yang melayani	Kinerja Angkutan Umum	88%	100%	41 kend	41%	1.011.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.831.100.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	2	02.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Persentase ketersediaan angkutan umum	jumlah angkutan barang	Kinerja Angkutan Umum	88%	100%	23000 kend	41%	822.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	76.800.000	
PAGU PRIORITAS II PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN																209.654.512.491	
PRIORITAS III PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DAN HARMONISASI KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN KONDISI MASYARAKAT YANG KONDUSIF																	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														272.372.742.875		287.350.895.600	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														200.130.881.282		202.416.598.000	
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														7.739.590.464		7.925.625.000	
1	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 Dokumen	65 Skor	7.739.590.464	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.925.625.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														184.218.676.428		186.278.180.000	
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Skor	184.218.676.428	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	186.278.180.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah														7.493.389.290		6.412.793.000	
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Skor	7.212.439.290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.112.793.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Skor	280.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
1	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									679.225.100		800.000.000
1	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas Perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor		100%	65 Skor	147.242.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
1	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor		100%	65 Skor	382.278.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500.000.000
1	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarna dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor		100%	65 Skor	149.704.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									23.640.998.746		76.875.648.600
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									5.290.657.751		32.174.022.000
1	1	2	02.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga yang direhab	APM Paud, SD dan SMP	100%	35 Lembaga	35 Lembaga	100%	4.201.213.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	31.163.500.000
															DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	
1	1	2	02.01	25	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah prestasi siswa yang diraih	APM Paud, SD dan SMP	100%	14 Bidang Kreatifitas	14 Bidang Kreatifitas	100%	519.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	519.630.000
1	1	2	02.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	APM Paud, SD dan SMP	100%	73 Lembaga	73 Lembaga	100%	569.814.551	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	490.892.000
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									8.886.049.180		26.707.755.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	02.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga yang direhab	APM Paud, SD dan SMP	100%	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	4.590.763.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22.373.800.000
															DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	
1	1	2	02.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan sekolah	APM Paud, SD dan SMP	100%	5.960 Siswa	5.960 Siswa	100%	3.384.371.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.384.371.000
1	1	2	02.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	APM Paud, SD dan SMP	100%	25 Lembaga	25 Lembaga	100%	227.974.415	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	197.553.000
1	1	2	02.02	38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah prestasi siswa yang diraih	APM Paud, SD dan SMP	100%	14 Bidang Kreatifitas	14 Bidang Kreatifitas	100%	582.173.405	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	651.264.000
1	1	2	02.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	APM Paud, SD dan SMP	100%	25 Lembaga	25 Lembaga	100%	100.767.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.767.000
1	1	2	02.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								8.563.920.185		17.076.523.000	
1	1	2	02.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	wajib belajar 9 tahun	Lembaga Paud yang terakreditasi	Jumlah Lembaga yang terpenuhi anggaran pengelolaannya	APM Paud, SD dan SMP	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	319.425.865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	316.089.000
1	1	2	02.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	wajib belajar 9 tahun	Lembaga Paud yang terakreditasi	Jumlah tenaga pendidik yang memahami kurikulum PAUD	APM Paud, SD dan SMP	100%	163 Lembaga	163 Lembaga	100%	3.600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.600.000.000
1	1	2	02.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	wajib belajar 9 tahun	Lembaga Paud yang terakreditasi	Prosentase lembaga paud yang berizin	APM Paud, SD dan SMP	100%	30%	30%	100%	4.644.494.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.716.014.000
															DAK Non Fisik - BOP PAUD	
1	1	2	02.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								900.371.630		917.348.600	
1	1	2	02.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	wajib belajar 9 tahun	Persentase Lembaga Non Formal yang terakreditasi	Jumlah Peserta Lulus Ujian	APM Paud, SD dan SMP	100%	175 siswa	175 siswa	100%	900.371.630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	917.348.600

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	136.576.723	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	172.350.000	
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	46.530.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	42.300.000	
TOTAL														183.106.723		214.650.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.03 SDN 03 Kartoharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	208.175.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	237.320.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	60.390.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	54.900.000
TOTAL														268.565.500		292.220.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.04 SDN 01 Klegen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	285.565.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	395.531.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	344.520.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	313.200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL										630.085.150		708.731.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.05 SDN 02 Klegan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	167.915.638	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	224.129.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	126.720.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	115.200.000
TOTAL										294.635.638		339.329.000				

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.06 SDN 03 Klegan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	310.973.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	411.225.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	343.530.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	312.300.000
TOTAL										654.503.000		723.525.000				

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.07 SDN 04 Klegan

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		117.946.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	154.506.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		97.020.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	88.200.000
TOTAL														214.966.400		242.706.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.10 SDN 02 Rejomulyo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
Capaian Program						Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	154.184.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	175.605.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	52.470.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	47.700.000
TOTAL														206.654.250		223.305.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.11 SDN 01 Kanigoro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
Capaian Program						Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	212.441.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	248.952.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	78.210.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	71.100.000
TOTAL													290.651.450		320.052.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.12 SDN 02 Kanigoro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
										Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
														Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	204.491.885	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.637.000				
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	162.360.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	147.600.000				
TOTAL													366.851.885		398.237.000					

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.13 SDN 03 Kanigoro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
										Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
														Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	280.000.533	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	351.839.000				
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	163.350.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	148.500.000				
TOTAL													443.350.533		500.339.000					

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.14 SDN Sukosari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	118.396.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	151.748.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	34.500.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	31.500.000
TOTAL											152.896.200		183.248.000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.15 SDN Pilangbango

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	361.728.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	495.105.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	200.970.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	182.700.000
TOTAL											562.698.250		677.805.000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.16 SDN 01 Tawangrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	175.596.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	232.048.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	163.350.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	148.500.000
TOTAL													338.946.200		380.548.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.17 SDN 02 Tawangrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
										Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
														Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	120.669.218	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	168.951.000				
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	83.160.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	75.600.000				
TOTAL													203.829.218		244.551.000					

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.18 SDN Kelun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
										Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
														Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	167.888.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	236.224.000				

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	171.270.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	155.700.000
TOTAL													339.158.240		391.924.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.19 SDN 01 Manguharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/	
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	299.546.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	397.490.000	
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	286.110.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	260.100.000	
TOTAL													585.656.000		657.590.000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.20 SDN 01 Nambangan Lor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/	
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	268.426.113	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	355.519.000	
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	300.900.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	273.600.000	
TOTAL													569.326.113		629.119.000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.21 SDN 02 Nambangan Lor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	150.417.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	193.796.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	126.720.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	115.200.000
TOTAL											277.137.800		308.996.000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.22 SDN 01 Madiun Lor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	166.271.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	194.202.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	115.830.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	105.300.000
TOTAL											282.101.300		299.502.000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.23 SDN 02 Madiun Lor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	108.928.495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.449.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	116.820.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	106.200.000
TOTAL													225.748.495		263.649.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.24 SDN 03 Madiun Lor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
										Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
														Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	579.661.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	755.577.000				
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	493.020.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	448.200.000				
TOTAL													1.072.681.875		1.203.777.000					

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.25 SDN 04 Madiun Lor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
										Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
														Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	296.886.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	387.448.000				

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	333.630.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	303.300.000
TOTAL													630.516.200		690.748.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.26 SDN 05 Madiun Lor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/	
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	407.673.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	495.590.000	
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	445.500.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	405.000.000	
TOTAL													853.173.500		900.590.000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.27 SDN 01 Nambangan Kidul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/	
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	267.111.553	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	310.742.000	
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	123.750.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	112.500.000	
TOTAL													390.861.553		423.242.000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.28 SDN 02 Nambangan Kidul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	151.727.225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	170.272.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	92.070.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	83.700.000
TOTAL											243.797.225		253.972.000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.29 SDN 03 Nambangan Kidul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	296.431.395	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	360.382.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	323.730.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	294.300.000
TOTAL											620.161.395		654.682.000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.30 SDN 04 Nambangan Kidul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		125.281.715	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	163.641.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		126.720.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	115.200.000
TOTAL														252.001.715		278.841.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.31 SDN 01 Winongo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		247.103.986	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	339.752.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		322.740.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	293.400.000
TOTAL														569.843.986		633.152.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.32 SDN 02 Winongo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		132.349.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	153.215.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	53.460.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	48.600.000
TOTAL													185.809.750		201.815.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.33 SDN Ngegong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
										Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
														Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	102.975.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	139.024.000				
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	158.400.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	144.000.000				
TOTAL													261.375.600		283.024.000					

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.34 SDN Patihan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
										Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
														Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	250.205.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	330.056.000				
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	302.940.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	275.400.000				
TOTAL													553.145.150		605.456.000					

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.35 SDN 01 Pangongangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	152.333.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	169.959.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	72.270.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	65.700.000
TOTAL											224.603.350		235.659.000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.36 SDN 02 Pangongangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	330.011.468	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	373.277.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	299.970.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	272.700.000
TOTAL											629.981.468		645.977.000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.37 SDN Sogaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		136.464.705	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	199.313.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		171.270.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	155.700.000
TOTAL														307.734.705		355.013.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.38 SDN 01 Taman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
										Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
														Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	364.180.863	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	480.959.000				
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	430.650.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	391.500.000				
TOTAL														794.830.863		872.459.000				

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.39 SDN 02 Taman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
										Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
														Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	135.707.585	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	169.158.000				

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	76.230.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	69.300.000
TOTAL													211.937.585		238.458.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.40 SDN 03 Taman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/	
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	224.678.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	259.879.000	
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	105.930.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	96.300.000	
TOTAL													330.608.350		356.179.000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.41 SDN 01 Pandean

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/	
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	262.315.983	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	353.614.000	
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	335.610.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	305.100.000	
TOTAL													597.925.983		658.714.000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.42 SDN 02 Pandean

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	392.289.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	446.723.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	317.790.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	288.900.000
TOTAL											710.079.950		735.623.000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.43 SDN Banjarejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	394.878.770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	510.319.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	415.800.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	378.000.000
TOTAL											810.678.770		888.319.000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.44 SDN 01 Mojorejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		202.044.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	244.388.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		101.970.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	92.700.000
TOTAL														304.014.700		337.088.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.45 SDN 02 Mojorejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		422.377.865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	558.739.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		506.880.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	460.800.000
TOTAL														929.257.865		1.019.539.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.46 SDN 01 Manisrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		297.710.660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	415.163.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	334.620.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	304.200.000
TOTAL													632.330.660		719.363.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.47 SDN 02 Manisrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/	
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	256.967.263	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	329.382.000	
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	296.010.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	269.100.000	
TOTAL													552.977.263		598.482.000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.48 SDN 03 Manisrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/	
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	178.486.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	257.313.000	
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	164.340.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	149.400.000	
TOTAL													342.826.620		406.713.000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.49 SDN 04 Manisrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	261.444.983	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	373.444.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	192.060.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	174.600.000
TOTAL											453.504.983		548.044.000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.50 SDN 01 Demangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	149.302.075	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	186.138.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	131.670.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	119.700.000
TOTAL											280.972.075		305.838.000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.51 SDN 02 Demangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		143.761.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	192.692.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		161.370.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	146.700.000
TOTAL														305.131.800		339.392.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.52 SDN 01 Josenan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
Capaian Program						Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	219.139.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	258.738.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	177.210.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	161.100.000
TOTAL														396.349.700		419.838.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.53 SDN 02 Josenan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
Capaian Program						Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	150.900.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	214.955.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	173.250.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	157.500.000
TOTAL													324.150.750		372.455.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.54 SDN 03 Josenan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/	
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	116.238.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	151.428.000	
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	88.110.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	80.100.000	
TOTAL													204.348.200		231.528.000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.55 SDN Kejuron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/	
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	156.213.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	178.729.000	
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	52.470.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	47.700.000	
TOTAL													208.683.850		226.429.000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.56 SDN Kuncen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	178.078.001	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	214.482.000
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	76.230.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	69.300.000
TOTAL											254.308.001		283.782.000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.57 SMPN 1

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									1.895.740.000		
1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	771.088.858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.056.440.000
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	923.230.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	839.300.000
TOTAL											1.694.318.858		1.895.740.000			

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.58 SMPN 2

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
------	--	--	--	--	---------------------------------------	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	---

1					2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
					Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	1.007.728.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.222.751.000	
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	930.490.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	845.900.000	
TOTAL														1.938.218.150		2.068.651.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.59 SMPN 3

Kode					Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	532.463.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	711.714.000
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	677.600.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	616.000.000
TOTAL														1.210.063.100		1.327.714.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.60 SMPN 4

Kode					Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	689.638.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	961.383.000
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	986.150.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	896.500.000
TOTAL													1.675.788.950		1.857.883.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.61 SMPN 5

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/	
1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	614.326.505	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	814.908.000
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	532.400.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	484.000.000
TOTAL													1.146.726.505		1.298.908.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.62 SMPN 6

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/	
1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	681.836.545	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	868.369.000
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	768.350.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	698.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL										1.450.186.545		1.566.869.000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.63 SMPN 7

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	685.295.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	875.101.000
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	882.090.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	801.900.000
TOTAL										1.567.385.650		1.677.001.000				

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.64 SMPN 8

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	411.846.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	647.935.000
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	648.560.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	589.600.000
TOTAL										1.060.406.760		1.237.535.000				

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.65 SMPN 9

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kode					Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	638.529.255	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	918.886.000	
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	504.570.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	458.700.000	
TOTAL														1.143.099.255		1.377.586.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.66 SMPN 10

Kode					Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
							1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	613.470.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	557.700.000	
TOTAL														1.469.389.545		1.650.042.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.67 SMPN 11

Kode					Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	599.169.867	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	863.300.000
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	775.610.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	705.100.000
TOTAL													1.374.779.867		1.568.400.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.68 SMPN 12

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
										Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
														Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	697.774.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	896.016.000				
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	767.140.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	697.400.000				
TOTAL													1.464.914.350		1.593.416.000					

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.69 SMPN 13

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
										Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
														Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	575.359.233	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	762.371.000				

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%		854.260.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	776.600.000
TOTAL														1.429.619.233		1.538.971.000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.70 SMPN 14

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
											Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/
															Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)
1	1	2	02.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	415.520.818	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	591.863.000					
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	wajib belajar 9 tahun	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	Jumlah Lembaga	APM Paud, SD dan SMP	100%	100%	1 Lembaga	100%	425.920.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	387.200.000					
TOTAL														841.440.818		979.063.000					
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)										226.223.133.161		91.352.869.000				
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										33.356.884.556		34.994.386.000				
1	2	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										307.609.000		322.990.000				
1	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	11 dokumen	35,65 skor	307.609.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	322.990.000					
1	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										29.866.091.556		31.359.397.000				
1	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	29.866.091.556	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	31.359.397.000					

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										2.643.040.000		2.744.847.000
1	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	2.103.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.178.519.000
1	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	539.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	566.328.000
1	2	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										540.144.000		567.152.000
1	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	339.210.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	356.171.000
1	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	16.019.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16.820.000
1	2	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	184.915.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	194.161.000
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										50.100.283.157		53.849.298.000
1	2	2	02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										5.449.404.389		5.721.876.000
1	2	2	02.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indek Keluarga Sehat	Persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	2 kegiatan	100%	2.262.483.464	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.375.608.000
1	2	2	02.01	16	Pengadaan Obat Vaksin	Indek Keluarga Sehat	Persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah paket pengadaan obat dan vaksin	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	1 paket	100%	2.334.796.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.451.536.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	2	02.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Indek Keluarga Sehat	Persentase penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	2 kegiatan	100%	852.124.925	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	894.732.000
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									44.650.878.768		48.127.422.000
1	2	2	02.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan kunjungan ibu hamil paripurna	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	341.250.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	358.313.000
1	2	2	02.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	59.001.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	61.952.000
1	2	2	02.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	22.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23.762.000
1	2	2	02.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	204.380.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	214.600.000
1	2	2	02.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	26.899.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28.244.000
1	2	2	02.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	222.209.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	548.320.000
1	2	2	02.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	52.593.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.223.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	2	02.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (dinas kesehatan)	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	9.477.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.951.000
1	2	2	02.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	29.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.471.000
1	2	2	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	171.966.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	180.565.000
1	2	2	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis mencapai target	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	220.133.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	242.148.000
1	2	2	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV mencapai target	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	327.297.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	343.662.000
1	2	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	9.5 %	100%	16.852.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17.696.000
1	2	2	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Pekerja yang dilayani	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	41%	100%	86.024.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90.326.000
1	2	2	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase TTU Sehat	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	61%	100%	553.124.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	240.581.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	2	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase respon KLB < 24 jam	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	132.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	138.894.000
1	2	2	02.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	162.910.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	171.057.000
1	2	2	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	62,5%	100%	100%	213.562.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	224.241.000
							Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	Persentase Indikator SPM mencapai target		100%					
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	87520 orang	100%	38.558.233.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	42.102.474.000
1	2	2	02.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Kelurahan yg melaksanakan tatanan wajib dan pilihan	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	52%	100%	155.779.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	163.569.000
1	2	2	02.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Terpenuhinya kebutuhan operasional faskes	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	1.778.847.328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.509.645.000
1	2	2	02.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Terlaksananya kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	489.298.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	513.763.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	2	02.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Terlaksananya pelayanan gawat darurat	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	100%	100%	817.108.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	857.965.000
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									218.691.500		270.676.000
1	2	3	02.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									48.750.000		51.188.000
1	2	3	02.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	91%	1 dokter	1 dokter	82,21	48.750.000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	51.188.000
1	2	3	02.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									169.941.500		219.488.000
1	2	3	02.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan	Prosentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	Prosentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	91%	91%	91%	82,21	169.941.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	219.488.000
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									226.563.000		237.892.000
1	2	4	02.01		Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									196.057.000		205.860.000
1	2	4	02.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	86%	86%	86%	82,21	196.057.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	205.860.000
1	2	4	02.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									30.506.000		32.032.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	4	02.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	Prosentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) Baru yang mendapat Sertifikat Produksi Pangan dan Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang mendapat No.P-IRT	Prosentase IRT yang sehat		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	86%	86%	86%	82,21	30.506.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32.032.000
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										1.905.348.000		2.000.617.000
1	2	5	02.01		Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										354.582.000		245.231.000
1	2	5	02.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas	Jumlah jenis media promosi yang dihasilkan Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%	100%	6 jenis 3 kegiatan	82,21	354.582.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	245.231.000	
1	2	5	02.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										781.873.000		820.967.000
1	2	5	02.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya kegiatan promotif preventif tingkat daerah	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%	100%	100%	82,21	781.873.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	820.967.000	
1	2	5	02.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										768.893.000		934.419.000
1	2	5	02.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Persentase Puskesmas membina UKBM sesuai standar	Puskesmas membina UKBM sesuai standar	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%	100%	100%	82,21	768.893.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	934.419.000	

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										118.778.629.068		122.071.126.245
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										100.999.252.852		102.003.773.877

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								23.209.552.852		-	
1	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	23.209.552.852	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
1	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.239.700.000		1.296.540.000	
1	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	1.239.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.296.540.000
1	2	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								76.550.000.000		100.707.233.877	
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	35,65 skor	76.550.000.000	Pendapatan dari BLUD	100.707.233.877
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								17.779.376.216		20.067.352.368	
1	2	2	02.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								17.779.376.216		20.067.352.368	
1	2	2	02.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Indek Keluarga Sehat	Persentase sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai standart	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	2 unit	100%	2.758.714.000	Lain-lain PAD Yang Sah	846.270.000
1	2	2	02.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indek Keluarga Sehat	Persentase sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai standart	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	3 unit	100%	2.285.228.971	Lain-lain PAD Yang Sah	-
1	2	2	02.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indek Keluarga Sehat	Persentase sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai standart	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	21 jenis	100%	4.068.801.445	Lain-lain PAD Yang Sah	2.000.000.000
1	2	2	02.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Indek Keluarga Sehat	Persentase sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai standart	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	14 Jenis	100%	6.668.510.000	Lain-lain PAD Yang Sah	14.221.082.368

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Fasilitas Pelayanan Kesehatan			kesehatan yang diadakan							Lain-lain PAD Yang Sah	
															DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan	
															DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan	
1	2	2	02.01	16	Pengadaan Obat Vaksin	Indek Keluarga Sehat	Persentase sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai standart	Jenis obat/vaksin yang diadakan	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	2 jenis	100%	1.998.121.800	DBH CHT	3.000.000.000

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.02 Puskesmas Manguharjo

1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										3.130.646.000		3.273.876.000
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										3.130.646.000		3.273.876.000
1	2	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	10%	100%	266.050.000	DBH CHT	266.050.000	
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	89%	100%	2.864.596.000	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.007.826.000	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										513.002.000		818.006.000
1	2	5	02.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										513.002.000		538.653.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	5	02.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya kegiatan promotif preventif tingkat daerah	Persentase SPM mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%	100%	100%	82,21	513.002.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	538.653.000	

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.03 Puskesmas Ngegong

1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										2.572.583.000		2.657.211.000
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										2.572.583.000		2.657.211.000
1	2	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	12%	100%	212.330.000	DBH CHT	212.330.000	
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	88%	100%	2.360.253.000	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.444.881.000	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										509.810.000		683.797.880
1	2	5	02.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										509.810.000		460.850.880
1	2	5	02.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya kegiatan promotif preventif tingkat daerah	Persentase SPM mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%	100%	100%	82,21	509.810.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	460.850.880	

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.04 Puskesmas Sukosari

1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										3.090.917.000		3.163.562.840
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										3.090.917.000		3.163.562.840
1	2	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	7.9 %	100%	281.900.000	DBH CHT	281.900.000	

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	89.4 %	100%	2.809.017.000	Pendapatan dari BLUD		2.881.662.840
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										545.040.000		868.287.000
1	2	5	02.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										545.040.000		572.292.000
1	2	5	02.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya kegiatan promotif preventif tingkat daerah	Persentase SPM mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%	100%	100%	82,21	545.040.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		572.292.000

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.05 Puskesmas Tawangrejo

1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										2.857.348.000		1.979.423.500
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										2.857.348.000		1.979.423.500
1	2	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	9.5 %	100%	249.475.000	DBH CHT		249.475.000
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	90%	100%	2.607.873.000	Pendapatan dari BLUD		1.729.948.500
															Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										564.295.000		854.459.000
1	2	5	02.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										564.295.000		592.510.000
1	2	5	02.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya kegiatan promotif preventif tingkat daerah	Persentase SPM mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%	100%	100%	82,21	564.295.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		592.510.000

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.06 Puskesmas Banjarejo

1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							3.700.761.000		3.868.489.000		
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							3.700.761.000		3.868.489.000		
1	2	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	11.5 %	100%	346.215.000	DBH CHT	346.215.000
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	85%	100%	3.354.546.000	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.522.274.000
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							580.632.000		949.190.800		
1	2	5	02.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							580.632.000		585.664.800		
1	2	5	02.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya kegiatan promotif preventif tingkat daerah	Persentase SPM mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%	100%	100%	82,21	580.632.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	585.664.800

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.07 Puskesmas Demangan

1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							3.036.699.880		3.171.419.000		
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							3.036.699.880		3.171.419.000		
1	2	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Menurunnya Prevalensi stunting	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	11%	100%	326.000.000	DBH CHT	326.000.000
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indek Keluarga Sehat	Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	Persentase Indikator SPM mencapai target	0.41 nilai	100%	80%	100%	2.710.699.880	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.845.419.000
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							535.000.000		839.208.000		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	5	02.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										535.000.000		496.908.000
1	2	5	02.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Terlaksananya kegiatan promotif preventif tingkat daerah	Persentase SPM mencapai target	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	62%	100%	100%	82,21	535.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	496.908.000
1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)										3.800.000.000		4.310.000.000
1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.082.695.000		2.280.000.000
1	5	1	02.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										20.000.000		20.000.000
1	5	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	12 dokumen	18,02 Skor	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000
1	5	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1.276.195.000		1.325.000.000
1	5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	18,02 Skor	1.276.195.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.325.000.000
1	5	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										60.000.000		70.000.000
1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	18,02 Skor	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70.000.000
1	5	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												50.000.000
1	5	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 paket	18,02 Skor	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	5	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											510.000.000		560.000.000
1	5	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	18,02 Skor	510.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	560.000.000	
1	5	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											216.500.000		255.000.000
1	5	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	18,02 Skor	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	195.000.000	
1	5	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	18,02 Skor	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.000.000	
1	5	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	18,02 Skor	16.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000	
1	5	3		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											1.717.305.000		2.030.000.000
1	5	3	02.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota											210.565.000		225.000.000
1	5	3	02.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase dokumen yang disusun	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85.000.000	
1	5	3	02.01	2	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	125.565.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	140.000.000	
1	5	3	02.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											1.411.740.000		1.700.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	5	3	02.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase dokumen yang disusun	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	-	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85.000.000
1	5	3	02.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	141.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	155.000.000
1	5	3	02.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
1	5	3	02.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase dokumen yang disusun	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110.000.000
1	5	3	02.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	1.085.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.250.000.000
1	5	3	02.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								95.000.000		105.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	3	02.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pemenuhan atau kecukupan sarana dan Prasaran Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	105.000.000
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN)								15.542.853.000		22.574.909.000	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								9.609.780.000		12.728.287.000	
1	5	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								112.721.000		112.721.000	
1	5	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	12 Dokumen	33,40 Skor	112.721.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	112.721.000
1	5	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.458.061.000		6.548.510.000	
1	5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	33,40 Skor	5.458.061.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6.548.510.000
1	5	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								495.842.000		466.513.000	
1	5	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	33,40 Skor	495.842.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	466.513.000
1	5	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								100.585.000		250.000.000	
1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	33,40 Skor	100.585.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
1	5	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								4.965.000		500.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	5 Jenis	33,40 Skor	4.965.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500.000.000
1	5	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.870.506.000		4.115.543.000	
1	5	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	33,40 Skor	2.870.506.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.115.543.000
1	5	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								567.100.000		735.000.000	
1	5	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	33,40 Skor	467.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	550.000.000
1	5	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Gedung Yang Layak Digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	33,40 Skor	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	130.000.000
1	5	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Yang Layak Digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	33,40 Skor	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.000.000
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								4.643.545.000		7.587.413.000	
1	5	2	02.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								4.226.549.000		6.678.876.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	2	02.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	97%	100%	97%	2.063.016.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	276.041.000
1	5	2	02.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada yang tertangani	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	97%	97%	97%	1.247.315.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.800.925.000
1	5	2	02.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	97%	90%	97%	152.772.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	162.772.000
1	5	2	02.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	97%	92%	97%	403.895.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.882.544.000
1	5	2	02.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Yang Berkompeten	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	97%	80%	97%	359.551.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	556.594.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	5	2	02.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota										382.545.000		761.192.000
1	5	2	02.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peserta Sosialisasi Yang Pahami Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	100%	100%	100%	167.168.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	253.179.000
1	5	2	02.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota Yang Tertangani	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	100%	100%	100%	215.377.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	508.013.000
1	5	2	02.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota										34.451.000		147.345.000
1	5	2	02.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas	Persentase PPNS Yang Berkompeten	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	80%	100%	80%	34.451.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	147.345.000
1	5	4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										1.289.528.000		2.259.209.000
1	5	4	02.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										1.218.406.000		2.161.187.000
1	5	4	02.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100%	100%	80%	100%	918.928.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.650.492.000

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	4	02.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100%	100%	100%	100%	299.478.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	510.695.000
1	5	4	02.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran									71.122.000		98.022.000
1	5	4	02.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Yang Dldata	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100%	90%	100%	100%	71.122.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	98.022.000
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL (DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)									24.778.401.003		26.412.432.369
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									6.923.449.755		7.414.344.116
1	6	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									89.831.480		89.831.480
1	6	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	12 dokumen	24,00	89.831.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	89.831.480
1	6	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4.397.131.311		4.666.973.836
1	6	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	4.357.416.261	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.619.315.836
1	6	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	13 dokumen	24,00	39.715.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	47.658.000
1	6	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									35.774.400		54.356.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase peserta yang memahami	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	35.774.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54.356.000
1	6	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									228.901.000		247.500.000
1	6	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	228.901.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	247.500.000
1	6	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									296.550.000		59.791.600
1	6	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	296.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	59.791.600
1	6	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.479.495.914		1.860.693.580
1	6	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	1.149.315.914	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.535.883.580
1	6	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	330.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	324.810.000
1	6	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									395.765.650		435.197.620

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	170.634.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	187.697.620
1	6	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	140.131.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	154.000.000
1	6	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	24,00	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	93.500.000
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									3.846.611.695		5.515.165.528
1	6	2	02.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									3.846.611.695		5.515.165.528
1	6	2	02.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang dibina	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang terlatih	Meningkatnya PMKS yang tertangani	91%	91%	135 orang	92%	288.333.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350.000.000
1	6	2	02.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang dibina	Jumlah Klien PMKS yang didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Meningkatnya PMKS yang tertangani	91%	91%	80 orang	92%	77.014.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	95.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	2	02.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang dibina	Terbentuknya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	Meningkatnya PMKS yang tertangani	91%	91%	1 lembaga	92%	321.677.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	387.000.000
1	6	2	02.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang dibina	Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang Mendapat Pembinaan	Meningkatnya PMKS yang tertangani	91%	91%	5 Lembaga	92%	3.159.586.495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.683.165.528
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									1.742.901.123		2.000.000.000
1	6	4	02.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial									1.295.044.666		1.580.000.000
1	6	4	02.01	1	Penyediaan Perumahan	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan sesuai standart gizi	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	160 orang	92%	213.655.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	485.000.000
1	6	4	02.01	2	Penyediaan Sandang	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	50 orang	92%	50.505.771	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	4	02.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang memanfaatkan alat bantu	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	9 orang	92%	44.173.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.000.000
1	6	4	02.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang direunifikasi dengan keluarga	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	15 orang	92%	42.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.000.000
1	6	4	02.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	10 orang	92%	66.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.000.000
1	6	4	02.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani	Jumlah masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	286 orang	92%	745.285.475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	820.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	4	02.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima layanan kedaruratan	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	40 orang	92%	132.424.670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85.000.000
1	6	4	02.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial										447.856.457	420.000.000	
1	6	4	02.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan layanan kedaruratan	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	15 orang	92%	199.014.605	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	140.000.000
1	6	4	02.02	3	Penyediaan Permakanan	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan pangannya	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	110 orang	92%	89.275.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85.000.000
1	6	4	02.02	4	Penyediaan Sandang	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	105 orang	92%	20.646.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	4	02.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan alat bantu	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	7 orang	92%	10.400.830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.000.000
1	6	4	02.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan perbekalan kesehatan	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	30 orang	92%	7.971.592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.000.000
1	6	4	02.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	132 orang	92%	102.347.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120.000.000
1	6	4	02.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga	Meningkatnya PMKS yang tertangani	19%	100%	10 orang	92%	18.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								11.313.296.100		10.723.661.850	
1	6	5	02.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								7.840.000		8.668.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	5	02.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang didata	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	90%	24 orang	92%	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.960.000
1	6	5	02.01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	90%	24 orang	92%	4.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.488.000
1	6	5	02.01	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang dipantau	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	90%	24 orang	92%	200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220
1	6	5	02.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									11.305.456.100		10.714.993.850
1	6	5	02.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah fakir miskin yang di data	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	14042 orang	92%	1.231.132.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.161.228.200
1	6	5	02.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan verval DTKS	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	27 kelurahan	92%	851.783.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	907.005.550
1	6	5	02.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	3900 KK	92%	9.120.538.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.509.303.000
1	6	5	02.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan pengembangan ekonomi	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	10 KUBE	92%	102.002.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	137.457.100

1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA																				766.036.250		667.041.550	
1	6	6	02.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota																				161.799.100		183.250.000
1	6	6	02.01	1	Penyediaan Makanan	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	3300 orang	92%	40.269.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.150.000										
1	6	6	02.01	2	Penyediaan Sandang	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	1000 orang	92%	15.178.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.000.000										
1	6	6	02.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan dukungan psikososial	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	300 orang	92%	106.351.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	133.100.000										
1	6	6	02.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																				604.237.150		483.791.550
1	6	6	02.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	60 orang	92%	130.627.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14.707.000										

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	6	02.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	Jumlah tagana yang mendapatkan pembinaan	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	26 orang	92%	473.609.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	469.084.550	
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										186.106.080		92.219.325
1	6	7	02.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										186.106.080		92.219.325
1	6	7	02.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Penegelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dalam kondisi baik	Meningkatnya PMKS yang tertangani	100%	100%	1 paket	92%	186.106.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92.219.325	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)										2.700.506.802		2.911.909.361
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										846.501.000		930.276.589
2	8	2	02.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										303.301.000		332.756.589
2	8	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase program yang di ARG	Jumlah dokumen program yang di ARG	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	10%	34 dokumen	14%	135.718.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220.099.682	
2	8	2	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase program yang di ARG	Jumlah peserta rakor PUG	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	10%	375 orang	14%	57.775.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	63.553.105	
2	8	2	02.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase program yang di ARG	Jumlah peserta PPRG	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	10%	70 orang	14%	100.090.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	39.289.855	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	2	02.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase program yang di ARG	Jumlah peserta sosialisasi PUG dan PPRG	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	10%	75 orang	14%	9.716.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.813.947
2	8	2	02.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									173.850.000		191.235.000
2	8	2	02.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	93%	180 orang	14%	67.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	73.810.000
2	8	2	02.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	93%	116 orang	14%	106.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	117.425.000
2	8	2	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									369.350.000		406.285.000
2	8	2	02.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Prosentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan layanan pemberdayaan perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	50%	15 lembaga	14%	65.216.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	71.737.600
2	8	2	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Prosentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	50%	80 orang	14%	102.046.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	112.250.765

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	2	02.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Prosentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pengembangan KIE	Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan	15%	50%	32 lembaga	14%	202.087.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	222.296.635
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									250.155.865		327.752.000
2	8	3	02.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									53.143.795		112.700.000
2	8	3	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup kabupaten/kota	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	100%	67,39%	115 orang	100%	33.619.285	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72.500.000
2	8	3	02.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	100%	67,39%	155 orang	100%	19.524.510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.200.000
2	8	3	02.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota									162.140.250		167.360.000
2	8	3	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase klien yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	100%	56%	40 orang	100%	162.140.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	167.360.000
2	8	3	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									34.871.820		47.692.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	3	02.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	Jumlah klien perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam situasi darurat	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	100%	100%	29 klien	100%	24.659.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.200.000
2	8	3	02.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	100%	100%	30 orang	100%	10.212.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17.492.000
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									836.784.054		667.703.740
2	8	4	02.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									191.270.900		169.891.920
2	8	4	02.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Prosentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah peserta pendampingan dan pelatihan data kualitas keluarga	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	10%	80%	111 orang	100%	56.247.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21.366.070
2	8	4	02.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Prosentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah RT yang memiliki data Kualitas Keluarga	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	10%	80%	108 RT	100%	60.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	66.968.000
2	8	4	02.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Prosentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah peserta pelatihan pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	10%	80%	81 orang	100%	74.143.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	81.557.850
2	8	4	02.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									457.573.954		291.078.700

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	4	02.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	Jumlah peserta rakor peningkatan kualitas keluarga	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	10%	100%	104 orang	100%	20.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23.045.000
2	8	4	02.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	10%	100%	14 lembaga	100%	97.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	107.261.000
2	8	4	02.02	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	Jumlah peserta pertemuan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	10%	100%	102 orang	100%	339.113.954	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	160.772.700
2	8	4	02.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									187.939.200		206.733.120
2	8	4	02.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Prosentase keluarga yang terlayani dalam peningkatan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	10%	100%	81 orang	100%	187.939.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	206.733.120
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									229.549.120		252.504.032
2	8	5	02.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									229.549.120		252.504.032
2	8	5	02.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Terpilah Gender dan Anak	Persentase pengumpulan data gender dan anak	Jumlah peserta bimtek data gender dan anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	1 dokumen	100%	65 orang	100%	85.116.770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	93.628.447

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	5	02.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Terpilah Gender dan Anak	Persentase pengumpulan data gender dan anak	Jumlah peserta rakor dan monev data gender dan anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	1 dokumen	100%	65 orang	100%	144.432.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	158.875.585
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									409.276.685		547.035.000
2	8	6	02.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									59.659.865		56.949.000
2	8	6	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	12,50%	33 lembaga	150 orang	100%	59.659.865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	56.949.000
2	8	6	02.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									349.616.820		490.086.000
2	8	6	02.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan dini	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	12,50%	33 lembaga	105 orang	100%	93.427.695	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	101.000.000
2	8	6	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah anak yang didampingi dalam peningkatan kualitas hidup anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	12,50%	33 lembaga	67 orang	100%	116.036.705	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	197.450.000
2	8	6	02.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah dokumen yang tersedia	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	12,50%	33 lembaga	1 dokumen	100%	78.233.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80.685.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	6	02.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah peserta sosialisasi sekolah ramah anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	12,50%	33 lembaga	160 orang	100%	61.919.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110.951.000
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									128.240.078		186.638.000
2	8	7	02.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									52.185.560		77.102.000
2	8	7	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kasus Kekerasan terhadap anak	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	0,003%	40,74%	35 sekolah	100%	52.185.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	77.102.000
2	8	7	02.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									54.881.439		71.421.000
2	8	7	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kasus Kekerasan terhadap anak	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	Jumlah pendamping yang menangani perlindungan anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	0,003%	48%	8 orang	100%	3.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.890.000
2	8	7	02.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kasus Kekerasan terhadap anak	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	Jumlah peserta pelatihan konvensi hak anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	0,003%	48%	40 orang	100%	51.031.439	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	69.531.000
2	8	7	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									21.173.079		38.115.000
2	8	7	02.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi kasus Kekerasan terhadap anak	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan perlindungan khusus anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan	0,003%	100%	65 orang	100%	21.173.079	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	38.115.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)							6.077.071.000		7.218.644.000			
2	9	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.307.071.000		5.630.644.000			
2	9	1	02.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							136.000.000		137.000.000			
2	9	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	20 dokumen	23,98 Skor	136.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	137.000.000
2	9	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.892.000.000		3.892.000.000			
2	9	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,98 Skor	3.892.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.892.000.000
2	9	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							149.071.000		186.644.000			
2	9	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,98 Skor	149.071.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	186.644.000
2	9	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.000.000		150.000.000			
2	9	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,98 Skor	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	9	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							968.350.000		1.100.000.000			

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	9	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,98 Skor	968.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.100.000.000
2	9	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									160.650.000		165.000.000
2	9	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan / jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,98 Skor	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65.000.000
2	9	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,98 Skor	45.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000
2	9	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,98 Skor	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									595.000.000		1.337.000.000
2	9	3	02.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									300.000.000		332.000.000
2	9	3	02.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase angka kecukupan Energi	Prosentase Ketersediaan Pangan utama	Jumlah Dokumen (NBM Prognosa Kebutuhan Neraca Pangan Strategis)	Skor pola pangan harapan	100%	100%	3 Dokumen	95,7	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60.000.000
2	9	3	02.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase angka kecukupan Energi	Prosentase Ketersediaan Pangan utama	Tertanganinya Kerawanan Pangan (kelompok)	Skor pola pangan harapan	100%	100%	27 Kelompok	95,7	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	190.000.000
2	9	3	02.01	4	Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	Persentase angka kecukupan Energi	Prosentase Ketersediaan Pangan utama	Jumlah Dokumen stok Pasokan dan harga Pangan (tingkat grosir tingkat eceran tingkat produsen rekapitulasi)	Skor pola pangan harapan	100%	100%	4 Dokumen	95,7	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	82.000.000
2	9	3	02.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi									295.000.000		1.005.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	9	3	02.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Persentase angka kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi / AKE (kkal/kapita)	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Skor pola pangan harapan	100%	2100	2 Dokumen	95,7	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.000.000
2	9	3	02.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase angka kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi / AKE (kkal/kapita)	Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang (kali)	Skor pola pangan harapan	100%	2100	2 kali	95,7	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	810.000.000
2	9	3	02.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Persentase angka kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi / AKE (kkal/kapita)	Tersedianya laporan/peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (dokumen)	Skor pola pangan harapan	100%	2100	1 Dokumen	95,7	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN									175.000.000		251.000.000
2	9	5	02.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota									175.000.000		251.000.000
2	9	5	02.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah Peserta penguatan Kelembagaan	Skor pola pangan harapan	80	8 kali	200 orang	95,7	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	137.000.000
2	9	5	02.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa	Skor pola pangan harapan	80	8 kali	45 sampel	95,7	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	114.000.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)									4.005.224.830		4.614.773.000
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									520.081.430		546.087.000
2	14	2	02.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									21.621.200		22.703.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	2	02.01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	Persentase Sekolah SSK yang membuat RPP Kependudukan	Terbentuknya RPP Sekolah Siaga Kependudukan di 5 sekolah	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	≤ 4.7 %	100%	100%	1,91	21.621.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22.703.000	
2	14	2	02.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									498.460.230		523.384.000	
2	14	2	02.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	Persentase Pendataan Keluarga	Terdatanya semua keluarga dalam Pendataan Keluarga (PK) 2021 di 18 kelurahan	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	≤ 4.7 %	100%	100%	1,91	498.460.230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	523.384.000	
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									2.806.958.000		3.268.816.000	
2	14	3	02.01		Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal									340.290.000		1.702.844.000	
2	14	3	02.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Menurunnya Unmet Need	Persentase Pelaksanaan Kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah jenis sarana KIE Program KKBPK	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	<7.9	100%	3 Jenis	1,91	120.042.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	120.042.000	
2	14	3	02.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Menurunnya Unmet Need	Persentase Pelaksanaan Kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Kelompok yang terpapar Program Bangga Kencana (BKB BKR PIK R UPPKS BKL IMP PKB PUS)	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	<7.9	100%	8 kelompok	1,91	220.248.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	1.582.802.000	
2	14	3	02.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									129.600.000		129.600.000	
2	14	3	02.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Menurunnya Unmet Need	Persentase Kader yang melakukan updating data	Jumlah kader IMP yang melakukan updating data	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	<7.9	100%	148 Kader	1,91	129.600.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	129.600.000	
2	14	3	02.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									2.184.956.000		1.284.260.000	
2	14	3	02.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Menurunnya Unmet Need	Menurunnya angka Drop Out	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alokan dan sarana penunjang pelayanan KB	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	<7.9	<19.5%	21 Faskes	1,91	51.766.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	51.766.000	

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	3	02.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Menurunnya Unmet Need	Menurunnya angka Drop Out	Jumlah aseptor yang mendapatkan pelayanan KB baru MKJP	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	<7.9	<19.5%	100%	1,91	1.224.894.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.219.886.000	
2	14	3	02.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Menurunnya Unmet Need	Menurunnya angka Drop Out	Jumlah paket pengadaan	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	<7.9	<19.5%	5 paket	1,91	908.296.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.608.000	
2	14	3	02.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											152.112.000		152.112.000
2	14	3	02.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Menurunnya Unmet Need	Persentase Poktan, IMP dan Pokja Kampung KB yang menerima pembinaan kesertaan ber KB	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBP di kampung KB	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	<7.9	100%	3 kegiatan	1,91	152.112.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	152.112.000	
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											678.185.400		799.870.000	
2	14	4	02.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											678.185.400		799.870.000
2	14	4	02.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	Meningkatnya angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB	Jumlah kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	71%	61%	2 kegiatan	1,91	75.399.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	79.170.000	
2	14	4	02.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	Meningkatnya angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total	71%	61%	3 kegiatan	1,91	602.785.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	720.700.000	
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA)											3.209.615.445		10.955.105.200		
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN											475.000.000		984.500.000	

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
2	19	2	02.01	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																			475.000.000		984.500.000		
2	19	2	02.01	8	Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda berprestasi	jumlah event kepemudaan yang diselenggarakan	Jumlah keikutsertaan pemuda	jumlah pemuda berprestasi	2 orang	1 event	200 orang	2	475.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	847.000.000											
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																			2.734.615.445		9.860.605.200			
2	19	3	02.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			1.203.197.370		2.750.000.000		
2	19	3	02.01	3	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	jumlah prestasi olahraga yang diraih	30 medali	3 sarana prasarana olahraga	3 sarana prasarana olahraga	30	1.203.197.370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.750.000.000											
2	19	3	02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			404.609.015		1.241.605.200		
2	19	3	02.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	jumlah event kejuaraan yg diselenggarakan	jumlah event kejuaraan yg diselenggarakan	jumlah prestasi olahraga yang diraih	30 medali	1 event	1 event	30	404.609.015	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.241.605.200											
2	19	3	02.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																			1.000.000.000		5.000.000.000		
2	19	3	02.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Jumlah cabang olahraga yang dibina	jumlah prestasi olahraga yang diraih	30 medali	3 cabang olahraga	3 cabang olahraga	30	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.000.000.000											
2	19	3	02.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																			126.809.060		363.000.000		
2	19	3	02.05	1	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	jumlah prestasi olahraga yang diraih	30 medali	1 festival olahraga	1 festival olahraga	30	126.809.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	363.000.000											
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN (DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA)																			7.529.586.820		11.742.603.230				
2	22	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			6.054.839.300		7.326.103.230			
2	22	1	02.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			30.000.000		44.000.000		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 dokumen	22,28 skor	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44.000.000
2	22	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3.202.119.300		3.853.200.230
2	22	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	22,28 skor	3.202.119.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.853.200.230
2	22	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									299.700.000		299.700.000
2	22	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	22,28 skor	299.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	299.700.000
2	22	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									20.790.000		220.000.000
2	22	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	22,28 skor	20.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220.000.000
2	22	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2.337.115.000		2.570.826.500
2	22	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	22,28 skor	2.337.115.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.570.826.500
2	22	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									165.115.000		338.376.500

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	22,28 skor	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60.500.000
2	22	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	22,28 skor	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	211.750.000
2	22	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	22,28 skor	40.115.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	66.126.500
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									1.259.314.150		3.932.500.000
2	22	2	02.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									1.259.314.150		3.932.500.000
2	22	2	02.02	1	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi	Jumlah Keragaman Budaya yang Terfasilitasi	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	6%	8 budaya	8 budaya	5%	1.067.529.815	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.722.500.000
2	22	2	02.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	jumlah keragaman budaya yang terfasilitasi	Jumlah festival seni yang diselenggarakan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	6%	8 budaya	2 festival	5%	191.784.335	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.210.000.000
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									123.886.145		242.000.000
2	22	3	02.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									123.886.145		242.000.000
2	22	3	02.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang dibina	jumlah pelatihan yang diselenggarakan	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	100 orang	1 pelatihan	1 pelatihan	5%	123.886.145	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	242.000.000
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									91.547.225		242.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	22	5	02.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota										91.547.225		242.000.000
2	22	5	02.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yg dilestarikan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	21%	21%	21%	35%	91.547.225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	242.000.000
2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)										6.104.892.447		12.762.145.191
2	23	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4.543.547.447		10.326.104.191
2	23	1	02.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										55.000.000		55.000.000
2	23	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	10 dokumen	29.25 skor	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.000.000
2	23	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.867.787.447		3.154.557.985
2	23	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29.25 skor	2.867.787.447	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.154.557.985
2	23	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										80.000.000		72.831.000
2	23	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29.25 skor	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72.831.000
2	23	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										527.860.000		6.040.155.000
2	23	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29.25 skor	527.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.364.440.000
2	23	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										790.000.000		801.317.396

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	23	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29.25 skor	790.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	801.317.396
2	23	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									222.900.000		202.242.810
2	23	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29.25 skor	64.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	57.042.810
2	23	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29.25 skor	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.900.000
2	23	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29.25 skor	63.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	69.300.000
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN									1.461.345.000		2.336.041.000
2	23	2	02.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									729.060.000		1.503.391.000
2	23	2	02.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	Persentase keterampilan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	5,95%	4.3%	72 Perpustakaan	8.90	506.386.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	717.991.000
														Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		
2	23	2	02.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah bahan perpustakaan tercetak dan terekam atau digital yang diadakan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	5,95%	4.3%	3500 eksemplar	8.90	155.324.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	385.000.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	23	2	02.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	5,95%	4.3%	4100 eksemplar	8.90	67.350.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	400.400.000	
2	23	2	02.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										732.285.000	832.650.000	
2	23	2	02.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pemasyarakatn Gemar Membaca	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	5.95%	20 kali	2500 orang	8.90	732.285.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	832.650.000	
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO										100.000.000	100.000.000	
2	23	3	02.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota										100.000.000	100.000.000	
2	23	3	02.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	37%	168 eksemplar	4 kegiatan	8.90	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)										800.916.000	1.050.000.000	
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP										651.625.000	900.000.000	
2	24	2	02.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota										342.140.000	450.000.000	
2	24	2	02.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Persentase Arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	jumlah arsip dinamis yang dipelihara dan disusutkan	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	42%	28 %	912 meter lari	9%	342.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450.000.000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	24	2	02.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota										309.485.000		450.000.000
2	24	2	02.02	2	Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Jumlah arsip statis yang dikelola	Jumlah berkas arsip statis yang diakuisisi diolah dipreservasi dan layanan akses arsip	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	42%	250 nomor arsip	250 berkas	9%	309.485.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450.000.000
2	24	3		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP										149.291.000		150.000.000
2	24	3	02.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun										149.291.000		150.000.000
2	24	3	02.01	1	Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	jumlah arsip in aktif yang dinilai	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	8,4	0,01%	917 nomor berkas	9%	70.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	24	3	02.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	Jumlah pelaksanaan pemusnahan arsip	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	8,4	0,01%	1 kali	9%	78.901.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)								925.000.000		1.760.000.000	
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								395.000.000		1.050.000.000	
3	25	4	02.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								395.000.000		1.050.000.000	
3	25	4	02.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	Jumlah Prasarana yang diperbaiki	rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	280	245	2 unit/tahun	1,25	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25	4	02.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	Jumlah Sarana yang tersedia	rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	280	245	4 paket	1,25	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
3	25	4	02.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	Jumlah Dokumen Penyuluhan Pembinaan dan Monitoring Pembudidaya Ikan	rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	280	245	3 Dokumen	1,25	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								80.000.000		110.000.000	
3	25	5	02.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								80.000.000		110.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25	5	02.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah Dokumen Penyuluhan Monitoring Perikanan Tangkap	rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	89 ton	435	2 Dokumen	1,25	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110.000.000
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								450.000.000		600.000.000	
3	25	6	02.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								150.000.000		200.000.000	
3	25	6	02.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	Jumlah Dokumen Penyuluhan Pembinaan dan Monitoring Pengolah dan Pemasar Ikan	rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	15,7	50	3 Dokumen	1,25	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
3	25	6	02.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								300.000.000		400.000.000	
3	25	6	02.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga (ton)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapat Fasilitas	rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	15,7	24	10 UMKM	1,25	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400.000.000
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)								2.593.999.000		8.850.350.000	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								1.781.771.600		5.498.150.000	
3	27	2	02.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								1.581.771.600		5.140.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	2	02.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	Prosentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani (%)	Jumlah monitoring dan evaluasi pengawasan penggunaan sarana pertanian	Peningkatan Produktivitas pertanian	55%	75	39 lokasi	7,22	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
3	27	2	02.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	Prosentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani (%)	Jumlah Sarana Pertanian yang diberikan	Peningkatan Produktivitas pertanian	55%	75	2 Paket	7,22	1.531.771.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.040.000.000
3	27	2	02.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								200.000.000		358.150.000	
3	27	2	02.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik (%)	Jumlah Sampel Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman yang diawasi	Peningkatan Produktivitas pertanian	55%	75	12 lokasi	1,214	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	358.150.000
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								321.000.000		1.950.000.000	
3	27	3	02.01		Pengembangan Prasarana Pertanian								200.000.000		300.000.000	
3	27	3	02.01	2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Prosentase pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	prosentase pengembangan prasarana pertanian	Penyusunan Laporan/ Peta/ Peraturan Daerah tentang LP2B, KP2B dan LCP2B Kota Madiun	Peningkatan Produktivitas pertanian	50%	50%	1 Dokumen	7,22	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
3	27	3	02.02		Pembangunan Prasarana Pertanian								121.000.000		1.650.000.000	
3	27	3	02.02	1	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Prosentase pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	Prosentase Prasarana Pertanian yang Terbangun /Rehabilitasi/Dipelihara (%)	Jumlah JIUT dibangun/direhab/dipelihara	Peningkatan Produktivitas pertanian	50%	25%	1 unit	7,22	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	750.000.000
3	27	3	02.02	3	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Prosentase pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	Prosentase Prasarana Pertanian yang Terbangun /Rehabilitasi/Dipelihara (%)	Jumlah JUT dibangun/direhab/dipelihara	Peningkatan Produktivitas pertanian	50%	25%	1 unit	7,22	44.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	3	02.02	9	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Prosentase pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	Prosentase Prasarana Pertanian yang Terbangun /Rehabilitasi/Dipelihara (%)	Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	Peningkatan Produktivitas pertanian	50%	25%	1 Unit	7,22	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								175.000.000		372.200.000	
3	27	4	02.01		Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota								100.000.000		210.500.000	
3	27	4	02.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Prosentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit hewan Menular (%)	Prosentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	Jumlah Hewan yang mendapat Pelayanan kesehatan Hewan	rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	10%	80	2850 ekor	1,214	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.500.000
3	27	4	02.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								75.000.000		161.700.000	
3	27	4	02.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Prosentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit hewan Menular (%)	Prosentase Jumlah sampel Produk asal Hewan yang Aman dikonsumsi (%)	Jumlah sampel produk asal hewan yang diperiksa	rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	10%	80	200 sampel	1,214	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	161.700.000
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								111.750.000		300.000.000	
3	27	5	02.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								111.750.000		300.000.000	
3	27	5	02.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Prosentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	Luas lahan aman bencana pertanian (ha/th)	Luas lahan yang aman dari gangguan OPT dengan penerapan budidaya ramah lingkungan	rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	72	1750	10 ha	7,22	111.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN								50.000.000		50.000.000	
3	27	6	02.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								50.000.000		50.000.000	
3	27	6	02.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Prosentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	jumlah petani yang produksinya lolos uji layak mutu	rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	10%	2	4 Orang	7,22	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
3	27	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											154.477.400		680.000.000		
3	27	7	02.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian											154.477.400		680.000.000		
3	27	7	02.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	Jumlah SDM Pertanian Terlatih (orang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang disediakan dan dimanfaatkan	rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	20%	78	1 paket	7,22	42.905.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	230.000.000			
3	27	7	02.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	Jumlah SDM Pertanian Terlatih (orang)	pelatihan dan sekolah lapang yang diselenggarakan	rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	20%	78	1 jenis	7,22	111.572.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000			
7				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1			KECAMATAN (KECAMATAN MANGUHARJO)											560.045.300		14.026.734.388		
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													560.045.300		1.094.347.212
7	1	4	02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													324.385.300		831.847.212
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	324.385.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	831.847.212			
7	1	4	02.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													235.660.000		262.500.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	235.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	262.500.000
7	1				KECAMATAN (KECAMATAN TAMAN)									597.606.270		962.605.940
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									597.606.270		962.605.940
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									437.352.670		792.235.440
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	24 pertemuan	100%	437.352.670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	792.235.440
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									160.253.600		170.370.500

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	8 pertemuan	100%	160.253.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	170.370.500
7	1				KECAMATAN (KECAMATAN KARTOHARJO)									608.688.850		967.860.487
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									608.688.850		967.860.487
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									382.507.140		730.370.487
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	8 pertemuan	100%	382.507.140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	730.370.487
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									226.181.710		237.490.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	15 pertemuan	100%	226.181.710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	237.490.000
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)											
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
8	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
8	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	12 dokumen	21,47 Skor	30.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35.750.000
8	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
8	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	2.987.145.114	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.987.145.114
8	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
8	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Peralatan Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	712.263.583	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	800.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000
8	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									72.000.000		77.000.000
8	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Prosentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	27.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	27.000.000
8	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000
8	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Prosentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35.000.000
8	1	2			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									344.302.347		600.000.000
8	1	2	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									344.302.347		600.000.000
8	1	2	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	Prosentase konflik yang tertangani	100%	150 orang	150 orang	100%	344.302.347	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600.000.000
8	1	3			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik									871.058.100		958.164.700
8	1	3	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik									871.058.100		958.164.700

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1	3	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik	Prosentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	Jumlah peserta pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Parpol	Prosentase konflik yang tertangani	100%	80%	11 parpol	100%	725.062.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	797.568.000
8	1	3	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik	Prosentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	Jumlah peserta pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	Prosentase konflik yang tertangani	100%	80%	125 orang	100%	145.996.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	160.596.700
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								222.985.000		300.283.500	
8	1	4	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								222.985.000		300.283.500	
8	1	4	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase status kelembagaan Orkesmas yang berbadan Hukum	Prosentase tingkat keaktifan organisasi kemasyarakatan	jumlah organisasi kemasyarakatan yang terfasilitasi	Prosentase konflik yang tertangani	71%	75%	109 orang	100%	222.985.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.283.500
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA								553.661.370		608.161.200	
8	1	5	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya								553.661.370		608.161.200	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1	5	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Jumlah koordinasi	Jumlah peserta sosialisasi	Prosentase konflik yang tertangani	100%	3 kali	100 orang	100%	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	104.500.000
8	1	5	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Jumlah koordinasi	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	Prosentase konflik yang tertangani	100%	3 kali	200 orang	100%	493.661.370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	503.661.200
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								1.503.198.050		1.700.859.050	
8	1	6	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								1.503.198.050		1.700.859.050	
8	1	6	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Konflik horisontal di dalam masyarakat	Jumlah konflik	jumlah peserta rakor	Prosentase konflik yang tertangani	0 konflik	0 konflik	1055 orang	100%	1.503.198.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.700.859.050

PAGU PRIORITAS III PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DAN HARMONISASI KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN KONDISI MASYARAKAT YANG KONDUSIF

585.777.646.367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
PRIORITAS IV PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI																
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)							6.885.228.540		7.556.498.296		
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.886.374.935		5.853.072.932		
2	12	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							340.018.360		62.000.000		
2	12	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	84.819.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	31.572.000
2	12	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen pengendalian SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	61.767.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	61.767.360
2	12	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	193.432.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	188.473.375
2	12	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.030.000.000		3.648.150.000		
2	12	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	3.030.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.648.150.000
4	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							194.811.000		32.966.464		
4	2	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	194.811.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	177.194.680

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	12	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1.270.609.278		1.515.834.532
2	12	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	1.117.648.278	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.283.817.326	
2	12	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	152.961.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	178.960.120	
2	12	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											92.784.238		270.000.000
2	12	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	92.784.238	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	270.000.000	
2	12	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											202.620.000		270.000.000
2	12	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	202.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	270.000.000	
2	12	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											755.532.059		357.088.400
2	12	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	27.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.250.000	
2	12	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	592.124.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	A Skor	100%	100%	30,42 Skor	135.907.559	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	226.838.400
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									233.627.050		827.591.264
2	12	2	02.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk									233.627.050		276.059.264
2	12	2	02.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	Jumlah perekaman KTP EL	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84%	17.000 dokumen	2500 data	84,25 A	133.074.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	154.444.100
2	12	2	02.01	5	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	Jumlah penerbitan KIA	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84%	17.000 dokumen	1000 dokumen	84,25 A	100.552.925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	121.615.164
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL									402.719.632		275.057.800
2	12	3	02.01		Pelayanan Pencatatan Sipil									402.719.632		121.589.800
2	12	3	02.01	1	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencataan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	Jumlah penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94,25%	1.700 Dokumen	1500 dokumen	84,25 A	110.536.272	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	121.589.800
2	12	3	02.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencataan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94,25%	1.700 Dokumen	200 dokumen	84,25 A	292.183.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									362.506.923		600.776.300
2	12	4	02.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan									362.506.923		420.776.300

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	4	02.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	akurasi database kependudukan	Persentase update data penduduk	Jumlah penyusunan laporan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,10%	77%	13 laporan	84,25 A	308.105.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	358.699.600
2	12	4	02.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	akurasi database kependudukan	Persentase update data penduduk	Jumlah perjanjian kerjasama dan inovasi	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,10%	77%	10 dokumen	84,25 A	54.400.933	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62.076.700
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)									22.324.377.000		26.606.877.000
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									6.946.939.000		7.366.564.000
2	16	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									115.000.000		115.000.000
2	16	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	20 dokumen	32,02 Skor	115.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	115.000.000
2	16	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3.783.741.000		3.733.400.000
2	16	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	32,02 Skor	3.783.741.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.733.400.000
2	16	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									1.000.000.000		1.076.826.000
2	16	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 Paket	32,02 Skor	1.000.000.000	DBH CHT	1.076.826.000
2	16	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									200.000.000		200.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	32,02 Skor	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
2	16	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.228.338.000		1.208.838.000
2	16	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	32,02 Skor	1.228.338.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.208.838.000
2	16	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									619.860.000		1.032.500.000
2	16	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	32,02 Skor	150.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
2	16	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	32,02 Skor	132.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	632.500.000
2	16	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	32,02 Skor	336.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									4.789.955.000		7.773.155.000
2	16	2	02.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									4.789.955.000		7.773.155.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	2	02.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75%	100%	1200 Informasi	88,5	2.289.955.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.873.155.000
2	16	2	02.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah media komunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75%	100%	5 media	88,5	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.500.000.000
2	16	2	02.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75%	100%	100%	88,5	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350.000.000
2	16	2	02.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75%	100%	27 Kelompok	88,5	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	2	02.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah Kegiatan	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75%	100%	1 paket	88,5	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75%	100%	7 Tema informasi	88,5	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450.000.000
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA									10.587.483.000		11.467.158.000
2	16	3	02.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									5.100.000.000		6.700.000.000
2	16	3	02.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase OPD pengguna domain.id	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	238 domain	3,35	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.400.000.000
2	16	3	02.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase OPD pengguna domain.id	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	1750 titik	3,35	5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.300.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	16	3	02.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										5.487.483.000		4.767.158.000
2	16	3	02.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	1 paket	3,35	3.978.005.000		2.600.000.000
2	16	3	02.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Jumlah titik Client	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	180 titik	3,35	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500.000.000
2	16	3	02.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	7 Aplikasi	3,35	460.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	460.000.000
2	16	3	02.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan aplikasi integrasi	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	1 paket	3,35	302.553.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	302.553.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	3	02.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang mendukung smart city	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	100%	3,35	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	404.605.000
2	16	3	02.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Jumlah komunitas yang mendapatkan pelatihan TIK	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	4 Komunitas	3,35	186.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	275.000.000
2	16	3	02.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	Jumlah Sarana Information Center	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	100%	1 unit	3,35	60.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	225.000.000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)								500.000.000		500.000.000	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								500.000.000		500.000.000	
2	20	2	02.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								500.000.000		500.000.000	
2	20	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Dokumen Statistik	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	1 dokumen	1 dokumen	3,35	295.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	20	2	02.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Kegiatan	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	1 dokumen	1 paket	3,35	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000	
2	20	2	02.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah dokumen metadata	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	1 dokumen	1 dokumen	3,35	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)									350.000.000		400.000.000	
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									350.000.000		400.000.000	
2	21	2	02.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									350.000.000		400.000.000	
2	21	2	02.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah OPD yang mengimplementasikan tanda tangan elektronik (TTE)	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi keamanan informasi	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	7 OPD	7 OPD	3,35	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000	
2	21	2	02.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah OPD yang mengimplementasikan tanda tangan elektronik (TTE)	Jumlah berita sandi yang diamankan	Nilai Domain Layanan SPBE	100%	7 OPD	900 berita	3,35	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
4	1			SEKRETARIAT DAERAH							57.262.138.860		3.521.157.500			
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							934.234.250		1.056.157.500			
4	1	1	02.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8.522.500		10.000.000			
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 dokumen	65 Indeks	8.522.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.000.000
4	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							499.157.500		499.157.500			
4	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	499.157.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	499.157.500
4	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							100.000.000		200.000.000			
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
4	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.163.250		-			
4	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan peralatan dan mesin	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	3 unit	65 Indeks	1.163.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
4	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							285.891.000		300.000.000			
4	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	285.891.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										39.500.000		47.000.000
4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000
4	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000
4	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.000.000
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										2.202.809.000		2.465.000.000
4	1	2	02.01	Administrasi Tata Pemerintahan										1.769.469.000		2.020.000.000
4	1	2	02.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase laporan administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	jumlah pembinaan administrasi pemerintahan	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	10 kali	Tinggi	1.379.469.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.700.000.000
4	1	2	02.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase laporan administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	jumlah dokumen rupa bumi	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	2 dokumen	Tinggi	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
4	1	2	02.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase laporan administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	jumlah laporan pelaksanaan otonomi daerah	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	5 dokumen	Tinggi	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	320.000.000

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	1	2	02.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah												433.340.000		445.000.000
4	1	2	02.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase kerjasama yang difasilitasi	Jumlah fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	5 kali	Tinggi	433.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	445.000.000		

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Organisasi

4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2.610.646.998		2.966.613.000
4	1	1	02.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												15.000.000		15.000.000
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 Dokumen	65 Indeks	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000		
4	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												437.447.500		558.405.000
4	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	437.447.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	558.405.000		
4	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												167.326.280		192.500.000
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	167.326.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	192.500.000		
4	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												212.847.108		189.400.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	212.847.108	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	189.400.000
4	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									33.873.000		37.500.000
4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	18.963.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.500.000
4	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	1.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.000.000
4	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Sarana/Prasarana Gedung Yang Representatif	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	13.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000
4	1	1	02.13		Penataan Organisasi									1.744.153.110		1.973.808.000
4	1	1	02.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Tinglat Kematangan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang besaran dan urusan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor		100%	65 Indeks	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500.000.000
4	1	1	02.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Tinglat Kematangan Organisasi	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor		2.85 Indeks	65 Indeks	745.153.110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	861.808.000
4	1	1	02.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Tinglat Kematangan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya minimal BB	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor		100%	65 Indeks	549.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	612.000.000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum																
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1.642.838.620				
4	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							38.923.200		38.923.200		
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	65 Indeks	38.923.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	38.923.200
4	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.119.923.300		1.197.330.000		
4	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	65 Indeks	1.119.923.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.197.330.000
4	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							130.000.000		130.000.000		
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	65 Indeks	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	130.000.000
4	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6.500.000		30.000.000		
4	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 paket	65 Indeks	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.000.000
4	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							305.551.400		310.000.000		
4	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	65 Indeks	305.551.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	310.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											41.940.720		42.047.600
4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	65 Indeks	20.547.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.547.600	
4	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung kantor yang layak digunakandigunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	65 Indeks	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.500.000	
4	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	65 Indeks	18.893.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	19.000.000	
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											941.759.300		953.535.800
4	1	2	02.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum											941.759.300		953.535.800
4	1	2	02.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang tersusun	jumlah penyusunan perda/ raperda	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	1 1 jenis	100%	388.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	427.735.000	
4	1	2	02.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang tersusun	Jumlah Pembinaan dan Bantuan Hukum	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	3 kegiatan	100%	282.928.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	306.820.800	

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	2	02.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang tersusun	Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	3 jenis	100%	269.980.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	218.980.000	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan

4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.594.471.000		1.960.083.330
4	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										41.636.000		37.491.630
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	21 dokumen	65 Indeks	41.636.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	37.491.630	
4	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1.233.270.000		1.383.913.000
4	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	1.233.270.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.383.913.000	
4	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										98.194.000		100.000.000
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	98.194.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100.000.000	
4	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										4.300.000		80.000.000
4	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	4.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	80.000.000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										363.091.000		300.000.000
4	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	363.091.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300.000.000
4	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										853.980.000		58.678.700
4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	15.321.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15.703.700
4	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	826.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30.000.000
4	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	12.659.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12.975.000
4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										600.700.000		838.868.133
4	1	3	02.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan										130.300.000		188.868.133
4	1	3	02.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasinya >79% dari target	Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	1 dokumen	100%	28.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	3	02.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target	Jumlah laporan kegiatan pembangunan yang terealisasi sesuai target	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	12 dokumen	100%	101.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	158.868.133
4	1	3	02.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									470.400.000		650.000.000
4	1	3	02.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	Jumlah personel PD yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai jadwal dan ketentuan perundang-undangan	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	130 orang	100%	185.850.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	250.000.000
4	1	3	02.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai target	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	120 paket	100%	284.550.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	400.000.000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1.207.275.500		-
4	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									20.000.000		-
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	21 dokumen	65 Indeks	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
4	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									559.825.500		-

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	559.825.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
4	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									180.000.000		-
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
4	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									2.000.000		-
4	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
4	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									385.500.000		-
4	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	385.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
4	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									59.950.000		-
4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
4	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	28.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	9.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									5.737.465.595		-
4	1	2	02.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									5.737.465.595		-
4	1	2	02.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah fasilitasi bina mental spiritual	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	93,75%	15 kegiatan	93,75%	5.737.465.595	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									866.000.000		-
4	1	3	02.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									571.000.000		-
4	1	3	02.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan sesuai target	Jumlah kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	3 kegiatan	4%	370.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
															DBH CHT	
4	1	3	02.01	5	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan sesuai target	jumlah koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	2 kegiatan	4%	201.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
4	1	3	02.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam									295.000.000		-
4	1	3	02.04	1	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Presentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	100%	4%	295.000.000	DBH CHT	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah																
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Umum																
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							37.923.938.597		34.735.534.962		
4	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							145.008.000		145.008.000		
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	145.008.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	145.008.000
4	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							10.739.383.967		10.739.383.967		
4	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	10.739.383.967	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.739.383.967
4	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							4.905.645.120		8.203.870.120		
4	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	4.905.645.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.203.870.120
4	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							2.238.407.600		2.250.000.000		
4	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%		65 Indeks	1.988.407.600		2.000.000.000
4	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							7.652.365.000		1.150.000.000		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lainnya yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	7.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
4	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	2.365.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.000.000.000
4	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
4	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									5.001.104.785		5.000.000.000
4	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	5.001.104.785	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.000.000.000
4	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2.229.816.895		2.235.065.645
4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang Layak Digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	1.479.816.895	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.485.065.645

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500.000.000
4	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
4	1	1	02.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									1.000.000.000		1.000.000.000
4	1	1	02.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000
4	1	1	02.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600.000.000
4	1	1	02.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									1.735.240.850		1.735.240.850
4	1	1	02.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase rumah tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Persentase kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tercukupi	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	874.529.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	874.529.750
4	1	1	02.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase rumah tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	persentase kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tercukupi	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	550.000.000
4	1	1	02.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase rumah tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Persentase kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah tercukupi	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	65 Indeks	310.711.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	310.711.100
4	1	1	02.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									2.276.966.380		2.276.966.380

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	1	1	02.14	1	Fasilitas Keprotokolan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Persentase fasilitas keprotokolan pimpinan	Jumlah fasilitas keprotokolan pimpinan Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Reformasi Biro Krasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	500 kali	65 Indeks	2.276.966.380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.276.966.380	
4	2				SEKRETARIAT DPRD										42.653.913.443		51.083.447.848
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										27.510.475.233		31.544.668.583
4	2	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										52.080.201		43.081.493
4	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/RKA/PK)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 Dokumen	25,61 skor	52.080.201	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	43.081.493	
4	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.495.474.176		2.630.464.179
4	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Sekretariat DPRD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	2.495.474.176	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.630.464.179	
4	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										31.686.562		32.966.464
4	2	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase perijinan kinerja ASN yang tercapai	persentase pemenuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	29.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.899.880	
4	2	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase perijinan kinerja ASN yang tercapai	Persentase peserta yang paham	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	1.986.562	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.066.584	
4	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2.167.006.000		1.209.250.678
4	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi ASN	Persentase pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas/ Operasional DPRD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	2.167.006.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.209.250.678	
4	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										167.144.698		394.887.591

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	2	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Alat Penunjang Kantor	Persentase pemenuhan sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang terpenuhi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	167.144.698	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	394.887.591
4	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									3.225.254.353		3.026.251.050
4	2	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase pemenuhan Sarana Prasarana yang Representatif	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	3.225.254.353	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.026.251.050
4	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									721.614.245		1.197.036.803
4	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase peralatan atau aset kantor yang dipelihara	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	319.217.070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	332.888.017
4	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase peralatan atau aset kantor yang dipelihara	Presentase Peralatan Gedung Kantor yang Layak Digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	252.391.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	231.376.533
4	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase peralatan atau aset kantor yang dipelihara	Presentase Gedung Kantor yang Layak Digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	150.005.275	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	632.772.253
4	2	1	02.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									12.747.186.328		15.364.055.804
4	2	1	02.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	Terpenuhinya Hak Keuangan DPRD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	12 Bulan	25,61 skor	12.313.774.636	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.893.475.878
4	2	1	02.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang dicukupi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	5 Jenis	25,61 skor	283.411.692	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	289.079.926

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	2	1	02.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	Terpenuhinya Hak Layanan Kesehatan DPRD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 Kali	25,61 skor	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	181.500.000
4	2	1	02.16		Layanan Administrasi DPRD									5.903.028.670		7.646.674.521
4	2	1	02.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	10 Dokumen	25,61 skor	38.496.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.051.394
4	2	1	02.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas/ Operasional DPRD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,61 skor	5.864.532.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.606.623.127
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									15.143.438.210		19.538.779.265
4	2	2	02.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD									6.318.890.000		6.950.779.000
4	2	2	02.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	Jumlah Raperda yang dibahas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Skor	100%	15 Raperda	84 Skor	5.396.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.936.447.000
4	2	2	02.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang di Kaji	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Skor	100%	3 Kegiatan	84 Skor	922.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.014.332.000
4	2	2	02.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran									956.825.000		800.280.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	2	2	02.02	3	Pembahasan APBD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	Pembahasan Program Pemerintah Daerah Sesuai Jadwal/Tepat Waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Skor	100%	12 Dokumen	84 Skor	956.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	800.280.000
4	2	2	02.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan									1.310.741.500		1.268.975.000
4	2	2	02.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Notulensi Hasil Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas LHP-BPK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Skor	100%	5 Dokumen	84 Skor	389.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	388.350.000
4	2	2	02.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	Pembahasan LKPJ dan LPJ yang Tepat Waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Skor	100%	8 Dokumen	84 Skor	921.391.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	880.625.000
4	2	2	02.04		Peningkatan Kapasitas DPRD									5.481.186.390		9.467.386.265
4	2	2	02.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	Anggota DPRD yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Skor	100%	180 Orang	84 Skor	2.945.594.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.352.886.265
4	2	2	02.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Skor	100%	50 Kegiatan	84 Skor	1.485.881.410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.114.500.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	2	2	02.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	Tersusunnya Program Kerja DPRD Tepat Waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Skor	100%	2 Dokumen	84 Skor	1.049.710.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.000.000.000			
4	2	2	02.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										1.075.795.320		1.051.359.000			
4	2	2	02.05	3	Pelaksanaan Reses	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Reses	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Skor	100%	3 Kali	84 Skor	1.075.795.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.051.359.000			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	1	PERENCANAAN (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)													10.835.768.792		11.469.000.000		
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													7.686.779.907		8.307.000.000	
5	1	1	02.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													88.215.400		95.000.000
5	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	7 dokumen	29 skor	66.979.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72.000.000			
5	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	12 dokumen	29 skor	11.050.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.000.000			

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	2 dokumen	29 skor	10.185.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11.000.000
5	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									5.680.875.000		5.845.000.000
5	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	5.550.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.700.000.000
5	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	13 dokumen	29 skor	129.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	145.000.000
5	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									335.438.767		357.000.000
5	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	persentase peningkatan kapasitas pegawai	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	176.934.957	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	180.000.000
5	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	persentase peserta yang memahami	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	158.503.810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	177.000.000
5	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									401.934.000		450.000.000
5	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	401.934.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	450.000.000
5	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									6.023.940		196.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	6.023.940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	196.000.000
5	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									948.971.045		1.035.000.000
5	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	656.918.405	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	880.000.000
5	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	292.052.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	155.000.000
5	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									225.321.755		329.000.000
5	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.000.000
5	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	100.000.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	199.000.000
5	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	29 skor	75.321.565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.000.000
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									1.263.338.885		1.940.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
5	1	2	02.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											954.338.885		1.410.000.000
5	1	2	02.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik	Persentase Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)	100%	3 dokumen	1 kali	100%	109.009.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000	
5	1	2	02.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	jumlah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas PD	Persentase Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)	100%	3 dokumen	1 kali	100%	149.725.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	180.000.000	
5	1	2	02.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	jumlah pelaksanaan musrenbang kota	Persentase Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)	100%	3 dokumen	1 kali	100%	239.344.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	420.000.000	
5	1	2	02.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	Persentase Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)	100%	3 dokumen	1 dokumen	100%	456.259.435	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	710.000.000	
5	1	2	02.03	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											309.000.000		410.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	2	02.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Persentase perangkat daerah yang dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi sesuai ketentuan	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	Persentase Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%	99.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220.000.000
5	1	2	02.03	3	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Persentase perangkat daerah yang dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi sesuai ketentuan	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi OPD	Persentase Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)	100%	2 dokumen	4 dokumen	100%	210.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	190.000.000
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								1.885.650.000		1.222.000.000	
5	1	3	02.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								542.000.000		622.000.000	
5	1	3	02.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	100%	100%	115.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110.000.000
5	1	3	02.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	14 dokumen	100%	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22.000.000
5	1	3	02.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pembangunan manusia	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	100%	100%	400.581.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	270.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3	02.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	6.418.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220.000.000
5	1	3	02.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								588.800.000		300.000.000	
5	1	3	02.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	153.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
5	1	3	02.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	435.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
5	1	3	02.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								754.850.000		300.000.000	
5	1	3	02.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	182.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110.000.000
5	1	3	02.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	394.296.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3	02.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	98.521.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
5	1	3	02.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	80.033.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90.000.000	
5	2				KEUANGAN (BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH)									61.688.581.005		58.461.263.246	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									52.081.379.246		52.214.302.246	
5	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									21.032.000		21.032.000	
5	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	21.032.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21.032.000	
5	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									34.938.345.046		35.298.345.046	
5	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Presentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	34.938.345.046		35.298.345.046	
5	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									200.000.000		200.000.000	
5	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000	
5	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									187.077.000		-	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	187.077.000		-
5	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									16.557.925.200		16.557.925.200
5	2	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	16.557.925.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16.557.925.200
5	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									177.000.000		137.000.000
5	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
5	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000
5	2	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	17,33 skor	87.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	87.000.000
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									7.770.012.719		3.039.221.000
5	2	2	02.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									928.400.460		892.592.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2	2	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen yang disusun	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	2 dokumen	80%	104.549.510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
5	2	2	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen yang disusun	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	2 dokumen	80%	78.704.510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.000.000
5	2	2	02.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Jumlah DPA yang terfasilitasi	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	34 Dokumen	80%	38.786.940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35.840.120
5	2	2	02.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Jumlah DPA yang terfasilitasi	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	34 Dokumen	80%	35.949.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32.688.880
5	2	2	02.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen yang disusun	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	2 Dokumen	80%	262.262.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000
5	2	2	02.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen yang disusun	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	2 Dokumen	80%	210.418.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	204.414.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2	2	02.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen yang disusun	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	2 Dokumen	80%	197.729.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	194.649.000
5	2	2	02.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								265.243.000		130.000.000	
5	2	2	02.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Administrasi Kasda	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	55 dokumen	80%	145.243.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	130.000.000
5	2	2	02.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Pengeluaran Kas	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	3 jenis dokumen	80%	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
5	2	2	02.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								1.296.629.000		1.016.629.000	
5	2	2	02.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Permintaan Laporan keuangan yang terfasilitasi	Jumlah Produk Hukum	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	2 dokumenDokumen	80%	280.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
5	2	2	02.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Permintaan Laporan keuangan yang terfasilitasi	Jumlah laporan keuangan semesteran dan Prognosis	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	2 buku	80%	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.000.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2	2	02.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Permintaan Laporan keuangan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen yang disusun	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	3 Dokumen	80%	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000	
5	2	2	02.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Permintaan Laporan keuangan yang terfasilitasi	Jumlah Sosialisasi dan pendampingan OPD	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	500 peserta/30 kali pendampingan	80%	876.629.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	876.629.000	
5	2	2	02.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										5.279.740.259		1.000.000.000
5	2	2	02.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	Presentase BTT	Jumlah Dokumen Pengajuan BTT	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%		80%	5.279.740.259	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.000.000.000	
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										1.837.189.040		3.207.740.000
5	2	3	02.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah										1.837.189.040		3.207.740.000
5	2	3	02.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah dokumen BMD	Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	100%	100%	5 Dokumen	7%	157.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.740.000	
5	2	3	02.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah BMD yang dipelihara	Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	100%	100%	2 jenis aset BMD	80%	1.629.449.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.000.000.000	
5	2	3	02.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jenis dan tipe barang yang sudah terstandart	Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	100%	100%	18 Dokumen	7%	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000	
5	2				KEUANGAN (BADAN PENDAPATAN DAERAH)										11.112.372.000		12.029.762.487
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10.009.082.000		11.283.907.000
5	2	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5.000.000		13.068.000

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	20 dokumen	25,55 Skor	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.068.000
5	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9.309.082.000		10.199.552.000	
5	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Prosentase Pemenuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	100 Persen	25,55 Skor	9.309.082.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.199.552.000
5	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										110.110.000	
5	2	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	100 persen	25,55 Skor	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106.480.000
5	2	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Presentase peserta yang paham	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	100 persen	25,55 Skor	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.630.000
5	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								30.000.000		60.500.000	
5	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	100 persen	25,55 Skor	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.500.000
5	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										40.000.000	
5	2	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	100 persen	25,55 Skor	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000
5	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								500.000.000		585.832.000	

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	100 persen	25,55 Skor	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	585.832.000
5	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								165.000.000		274.845.000	
5	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	100 persen	25,55 Skor	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53.845.000
5	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	100 persen	25,55 Skor	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000
5	2	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Prosentase peralatan gedungkantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	100 persen	25,55 Skor	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.000.000
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1.103.290.000		745.855.487	
5	2	4	02.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								1.103.290.000		745.855.487	
5	2	4	02.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	100%	100%	2 Dokumen	100%	4.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.900.000
5	2	4	02.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah WP yang menerima rewod,dan WP yang menerima sosialisasi	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	100%	100%	450 Wajib Pajak	100%	560.987.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	707.487
5	2	4	02.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah obyek pajak yang di data dan di daftar	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	100%	100%	125 obyek Pajak	100%	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2	4	02.01	6	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Modul aplikasi yang di kembangkan	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	100%	100%	2 aplikasi	100%	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000
5	2	4	02.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan penilaian NJOP	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	100%	100%	2 Laporan	100%	87.298.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000
5	2	4	02.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah WP yang dilakukan Penetapan	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	100%	100%	60.035 WP	100%	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.000.000
5	2	4	02.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Pencapaian Penagihan Pajak Daerah	Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Terlayani	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	41%	100%	2500 WP	100%	37.200.000		42.200.000
5	2	4	02.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Peningkatan Pencapaian Penagihan Pajak Daerah	Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	41%	100%	1 Laporan	100%	56.716.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77.678.000
5	2	4	02.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Peningkatan Pencapaian Penagihan Pajak Daerah	Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang menunggak	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	41%	100%	50 WP	100%	35.070.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.700.000
5	2	4	02.01	13	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peningkatan Pencapaian Penagihan Pajak Daerah	Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang pembayarannya belum sesuai potensi	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	41%	100%	100 WP	100%	6.419.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.670.000
5	3				KEPEGAWAIAN (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA)								8.817.848.375		8.865.079.536	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6.109.101.755		6.082.162.576	
5	3	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								78.213.600		77.162.576	
5	3	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	6 Dokumen	23,28 Skor	78.213.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	77.162.576

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13						
5	3	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							4.408.048.155				4.200.000.000	
5	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	45 ASN	23,28 Skor	4.408.048.155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.200.000.000																
5	3	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																							307.840.000				440.000.000	
5	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	80 kali	23,28 Skor	307.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	440.000.000																
5	3	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							950.000.000				1.100.000.000	
5	3	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	18 Jenis	23,28 Skor	950.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.100.000.000																
5	3	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							365.000.000				165.000.000	
5	3	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	19 kendaraan	23,28 Skor	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000																
5	3	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	2 Gedung	23,28 Skor	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000																
5	3	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Skor	100%	8 Jenis	23,28 Skor	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000																
5	3	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																							2.708.746.620				2.782.916.960	

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
5	3	2	02.01	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																				1.476.253.060		1.556.400.000	
5	3	2	02.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Data	Jumlah Formasi ASN	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	88 Score	100%	250 formasi	23.52 persen	1.019.913.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.100.000.000											
5	3	2	02.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Data	Jumlah realisasi pemberhentian ASN	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	88 Score	100%	212 ASN	23.52 persen	53.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54.000.000											
5	3	2	02.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Data	Persentase data kepegawaian yang valid	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	88 Score	100%	3000 dokumen	23.52 persen	402.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	402.400.000											
5	3	2	02.02	Mutasi dan Promosi ASN																				468.089.560		464.612.960	
5	3	2	02.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	Jumlah Pegawai yang ditempatkan	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	88 Score	100%	209 ASN	23.52 persen	374.409.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	371.742.960											
5	3	2	02.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	Jumlah SK	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	88 Score	100%	475 dokumen	23.52 persen	93.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	92.870.000											
5	3	2	02.03	Pengembangan Kompetensi ASN																				694.904.000		694.904.000	
5	3	2	02.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah Peserta	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	88 Score	100%	280 Peserta	23.52 persen	409.266.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	409.266.000											
5	3	2	02.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah Peserta	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	88 Score	100%	40 Peserta	23.52 persen	285.638.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	285.638.000											
5	3	2	02.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																				69.500.000		67.000.000	
5	3	2	02.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Persentase Pelanggaran Disiplin	Jumlah Pegawai Dibina	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	88 Score	0.3%	515 pegawai	23.52 persen	69.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	67.000.000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
5	4			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA)								4.426.619.390		5.608.319.545		
5	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								4.426.619.390		5.608.319.545		
5	4	2	02.01	Pengembangan Kompetensi Teknis								1.308.319.545		1.408.319.545		
5	4	2	02.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	Jumlah Peserta	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	12%	100%	226 Peserta	30 persen	1.308.319.545	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.408.319.545
5	4	2	02.02	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								3.118.299.845		4.200.000.000		
5	4	2	02.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	Jumlah Peserta	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN		85%	240 Peserta	30 persen	3.118.299.845	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.200.000.000
5	5			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)								870.033.756		1.295.000.000		
5	5	2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								870.033.756		1.295.000.000		
5	5	2	02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								552.300.610		720.000.000		
5	5	2	02.01	2	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian	jumlah dokumen penelitian/kajian	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%	428.403.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	490.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
5	5	2	02.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian	jumlah dokumen data kelitbangan	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	2 dokumen	1 dokumen	100%	123.897.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	230.000.000		
5	5	2	02.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi									317.733.146		575.000.000		
5	5	2	02.04	1	Penelitian Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah	jumlah dokumen pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	100%	1 dokumen	4 dokumen	100%	317.733.146	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	575.000.000		
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	1				INSPEKTORAT DAERAH											11.311.938.000		649.730.400
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											8.935.922.000		649.730.400
6	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											85.105.000		-
6	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	10 dokumen	23,61 Skor	85.105.000		-		
6	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											7.773.908.000		-
6	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100 persen	23,61 Skor	7.773.908.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		
6	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											837.706.995		-
6	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 paket	23,61 Skor	625.551.250		-		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 paket	23,61 Skor	212.155.745		-
6	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								176.522.005		649.730.400	
6	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan / jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23,61 Skor	92.301.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	649.730.400
6	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan peralatan dan mesin	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	2 jenis	23,61 Skor	84.221.005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
6	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								62.680.000		-	
6	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 unit	23,61 Skor	22.700.000		-
6	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	1 unit	23,61 Skor	4.979.000		-
6	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	5 jenis	23,61 Skor	35.001.000		-
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								1.237.019.000		-	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1	2	02.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								957.688.000		-
6	1	2	02.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah Laporan Kegiatan	Jumlah dokumen hasil pengawasan internal	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	35%	29 dokumen	3 dokumen	92%	51.772.000	-
6	1	2	02.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah Laporan Kegiatan	jumlah dokumen hasil pengawasan	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	35%	29 dokumen	15 dokumen	92%	459.516.000	-
6	1	2	02.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah Laporan Kegiatan	Jumlah dokumen hasil reviu kinerja pemerintah daerah	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	35%	29 dokumen	4 dokumen	92%	24.507.000	-
6	1	2	02.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah Laporan Kegiatan	jumlah dokumen hasil reviu keuangan	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	35%	29 dokumen	3 dokumen	92%	402.728.000	-
6	1	2	02.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Jumlah Laporan Kegiatan	Jumlah dokumen hasil Monev TLHP	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	35%	29 dokumen	4 dokumen	92%	19.165.000	-
6	1	2	02.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								279.331.000		-

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
6	1	2	02.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	35%	100%	1 dokumen	92%	279.331.000		-		
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								1.138.997.000		-			
6	1	3	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								6.623.000		-			
6	1	3	02.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta asistensi yang Terpenuhi	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	Jumlah dokumen dan sisdur pengawasan yang disusun	Level Kapabilitas APiP	100%	2 dokumen	2 dokumen	2	6.623.000		-		
6	1	3	02.02		Pendampingan dan Asistensi								1.132.374.000		-			
6	1	3	02.02	2	Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta asistensi yang Terpenuhi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Jumlah dokumen penilaian dan verifikasi	Level Kapabilitas APiP	100%	6 dokumen	4 dokumen	2	466.539.000		-		
6	1	3	02.02	3	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta asistensi yang Terpenuhi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Jumlah dokumen monev dan verifikasi	Level Kapabilitas APiP	indikator	6 dokumen	2 dokumen	2	665.835.000		-		
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN (KECAMATAN MANGUHARJO)											20.877.245.304		14.026.734.388
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											11.536.794.226		12.365.615.767
7	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											68.784.000		72.223.200

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	20 dokumen	20 Skor	68.784.000		72.223.200
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9.479.554.103		10.344.857.261	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	9.477.554.103	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.342.757.261
7	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	13 Dokumen	20 Skor	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.100.000
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								7.200.000		7.560.000	
7	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	presentase peserta yang memahami	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.560.000
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								140.715.000		150.938.550	
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	140.715.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.938.550
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								149.029.500		200.000.000	
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	16.632.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase gedung kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	7.397.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.487.886.720		1.300.071.696
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	1.487.886.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.300.071.696
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									203.624.903		289.965.060
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	59.559.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62.537.160
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	98.765.703	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	179.862.900
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	20 Skor	45.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	47.565.000

1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13					
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																								62.205.440		65.315.712	
7	1	2	02.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																								62.205.440		65.315.712
7	1	2	02.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	62.205.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65.315.712														
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																								269.600.360		305.182.878	
7	1	3	02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																								269.600.360		305.182.878
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase usulan musrenbang taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	12%	33%	269.600.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	305.182.878														
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																								181.926.494		196.272.819	
7	1	5	02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																								181.926.494		196.272.819

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Jumlah Sosialisasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	111.926.494	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	117.522.819
7	1	5	02.01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Persentase Konflik yang terselesaikan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	57.750.000
7	1	5	02.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Jumlah buku progil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	2 dokumen	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Manguharjo

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										745.384.070	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										745.384.070	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	659.172.787	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	745.384.070
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										367.500.000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										367.500.000	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	302.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	40%	33%	48.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000
											TOTAL		1.009.172.787		1.112.884.070	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Sogaten

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										671.121.717
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7	1	2	02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													671.121.717
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	593.902.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	671.121.717	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													367.500.000	
7	1	3	02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													367.500.000
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	175.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	35%	33%	174.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000	
TOTAL													943.902.300		1.038.621.717		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Patihan

7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													627.025.917	
7	1	2	02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													627.025.917

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	557.251.628	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	627.025.917	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												367.500.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												367.500.000
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	222.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	30%	33%	127.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000	
													TOTAL	907.251.628		994.525.917	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Ngegong

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												598.600.737
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												598.600.737

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	529.846.609	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	598.600.737		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												367.500.000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												367.500.000	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000		
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	30%	33%	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000		
													TOTAL			879.846.609		966.100.737

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Winongo

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												749.287.224
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												749.287.224

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	664.426.063	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	749.287.224		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												367.500.000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												367.500.000	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	197.088.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000		
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	40%	33%	152.911.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000		
													TOTAL			1.014.426.063		1.116.787.224

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Madiun Lor

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												715.540.875
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												715.540.875

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	647.414.045	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	715.540.875	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												367.500.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												367.500.000
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	225.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	40%	33%	124.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000	
													TOTAL	997.414.045		1.083.040.875	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Pangongangan

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												619.330.635
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												619.330.635

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	550.740.057	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	619.330.635	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												367.500.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												367.500.000
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	220.385.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	35%	33%	129.615.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000	
													TOTAL			986.830.635	
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo																	
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Nambangan Lor																	

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												869.867.189
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												869.867.189

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	773.160.291	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	869.867.189		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												367.500.000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												367.500.000	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	310.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000		
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	30%	33%	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000		
													TOTAL			1.123.160.291		1.237.367.189

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan Nambangan Kidul

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												786.840.905
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												786.840.905

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	92,05 skor	100%	100%	100%	700.805.004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	786.840.905		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												367.500.000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												367.500.000	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	33%	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	210.000.000		
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	45%	33%	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	157.500.000		
													TOTAL			1.050.805.004		1.154.340.905
7	1				KECAMATAN (KECAMATAN TAMAN)												20.741.996.019	12.540.305.549
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												11.329.439.485	11.079.727.149
7	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												78.787.547	58.967.520

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	12 dokumen	25,35 Skor	78.787.547	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	58.967.520
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9.850.172.584		9.225.821.629	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,35 Skor	9.850.172.584	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.225.821.629
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								18.151.972		18.152.000	
7	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase peserta yang memahami	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,35 Skor	18.151.972	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18.152.000
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.195.184.282		1.116.838.000	
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,35 Skor	1.096.612.282	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.019.045.000
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,35 Skor	98.572.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	97.793.000
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.195.100		475.000.000	
7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/ jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	11 Unit	25,35 Skor	357.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	275.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	2 Paket	25,35 Skor	1.837.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									184.948.000		184.948.000
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatanl yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,35 Skor	48.448.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48.448.000
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,35 Skor	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	25,35 Skor	36.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36.500.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									83.408.827		83.440.970
7	1	2	02.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									83.408.827		83.440.970
7	1	2	02.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentrman dan ketertiban masyarakat	88,398 skor	100%	3 pertemuan	100%	83.408.827	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83.440.970

1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								291.351.905		274.611.840	
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								291.351.905		274.611.840	
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase usulan musrenbang taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	291.351.905	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	274.611.840
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								156.717.790		139.919.650	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								156.717.790		139.919.650	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Jumlah Sosialisasi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	1 kali	100%	91.906.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	57.293.130
7	1	5	02.01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Persentase Konflik yang terselesaikan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	28.272.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	56.813.560

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	5	02.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Jumlah buku progil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	2 dokumen	100%	36.539.490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.812.960

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Mojorejo

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												724.653.550
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												724.653.550
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor	100%	100%	100%	724.653.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	724.653.550	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												350.000.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi		Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	100%	205.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan		Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	72.937.535	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL															1.002.591.085		1.074.653.550

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Pandean

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													699.676.380
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													699.676.380
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor	100%	100%	100%	699.676.380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	699.676.380	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													350.000.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi		Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	44%	515.764.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan		Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	73.603.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL															1.289.044.130		1.049.676.380

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Banjarejo

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														637.877.740
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														637.877.740
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor	100%	100%	100%	658.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	637.877.740			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														350.000.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	100%	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000	
TOTAL														908.000.000		987.877.740	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Kuncen

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													467.500.000
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													467.500.000
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor	100%	100%	100%	436.111.197	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	467.500.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													350.000.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	100%	200.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	73.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000	
TOTAL														709.236.197		817.500.000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Manisrejo

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													766.742.260
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													766.742.260
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor	100%	100%	100%	766.742.260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	766.742.260		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													350.000.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi		Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	100%	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan		Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL															1.041.742.260		1.116.742.260

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Kejuron

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														685.722.740
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														685.722.740
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor	100%	100%	100%	685.722.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	685.722.740		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														350.000.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi		Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	100%	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan		Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	67.831.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL															953.554.140		1.035.722.740

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0007 Kelurahan Josenan

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														768.731.250
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														768.731.250
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor	100%	100%	100%	623.675.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	768.731.250		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														350.000.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi		Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	100%	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan		Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL															898.675.100		1.118.731.250

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0008 Kelurahan Demangan

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													623.675.100
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													623.675.100
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor	100%	100%	100%	623.675.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	623.675.100	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													350.000.000

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	100%	238.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000	
TOTAL														936.735.100		973.675.100	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0009 Kelurahan Taman

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													716.650.740
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													716.650.740
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Tersesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	88 skor	100%	100%	100%	710.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	716.650.740		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													350.000.000

1					2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	3 paket	100%	356.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000		
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000		
TOTAL															1.141.500.000	1.066.650.740		
7	1				KECAMATAN (KECAMATAN KARTOHARJO)										19.763.052.096	17.105.304.833		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10.480.915.838	15.525.793.358		
7	1	1	02.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										65.762.400	69.050.520		
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	6 dokumen	21,43 Skor	57.776.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23.016.840		
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	12 dokumen	21,43 Skor	3.992.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	23.016.840		
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	2 dokumen	21,43 Skor	3.992.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23.016.840		
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8.381.822.530	11.880.912.500		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	8.379.822.530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11.878.912.500	
7	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	13 dokumen	21,43 Skor	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.000.000	
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										7.000.000		7.350.000
7	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persentase peserta yang memahami	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.350.000	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										112.996.000		138.900.000
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	112.996.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	138.900.000	
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										375.341.000		1.400.000.000
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase gedung kantor yang representatif	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.200.000.000	
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	175.341.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000	
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.400.630.163		1.906.369.338

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	1.400.630.163	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.906.369.338
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								137.363.745		123.211.000	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas/operasional Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	25.251.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.251.000
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.000.000
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	67.152.745	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53.000.000
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,43 Skor	34.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	34.960.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								62.205.440		65.315.712	
7	1	2	02.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								62.205.440		65.315.712	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	2	02.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75	100%	3 pertemuan	100%	62.205.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65.315.712
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									259.875.650		315.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									259.875.650		315.000.000
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase usulan musrenbang Kartoharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	259.875.650		315.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									172.589.050		231.335.276
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									172.589.050		231.335.276
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Jumlah Sosialisasi		100%	100%	1 kegiatan	100%	31.446.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	5	02.01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Persentase Konflik yang terselesaikan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	56.872.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	86.245.000
7	1	5	02.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	Jumlah buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	2 dokumen	100%	84.269.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.090.276

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Oro-Oro Ombo

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												686.443.842
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												686.443.842

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	672.956.040		686.443.842	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												350.000.000
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	217.437.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	30.163.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000	
													TOTAL		920.556.690		1.036.443.842

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Sukosari

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													568
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													568

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	560.181.546		568	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												350.000.000
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	316.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	33.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000	
													TOTAL	910.181.546		350.000.568	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Klegan

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												759.507.000
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												759.507.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Tersesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	741.948.355		759.507.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												350.000.000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												350.000.000	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	322.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000		
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	28.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000		
													TOTAL			1.091.948.355		1.109.507.000

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Rejomulyo

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												745.100.000
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												745.100.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	728.815.767		745.100.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												350.000.000
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000	
													TOTAL	1.078.815.767		1.095.100.000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Pilangbango

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												631
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												631

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	628.459.777		631	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												350.000.000
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	316.116.410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	33.883.590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000	
TOTAL													978.459.777		350.000.631		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Tawangrejo

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												625
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												625

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	584.340.251		625
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											350.000.000
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	219.299.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000
TOTAL													858.640.051		350.000.625	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Kanigoro

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													763.875.000
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													763.875.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	662.294.395	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	763.875.000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												350.000.000	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												350.000.000	
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000		
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	93.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000		
													TOTAL			1.006.194.395		1.113.875.000

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0008 Kelurahan Kartoharjo

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												644.714.217
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												644.714.217

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	623.772.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	644.714.217	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												350.000.000
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	298.419.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	51.572.755	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000	
													TOTAL		973.764.935		994.714.217

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0009 Kelurahan Kelun

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												629.700.000
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												629.700.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,75 skor	100%	100%	100%	618.904.602	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	629.700.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												350.000.000
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												350.000.000
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	2 paket	44%	312.709.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000	
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada	18 Usulan	100%	100%	44%	37.290.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000	
													TOTAL			994.714.217	
													968.904.602			994.714.217	
PAGU PRIORITAS IV PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI																	
300.781.112.580																	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama

Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari capaian dan penetapan target indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Indikator kinerja tersebut meliputi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Penetapan indikator kinerja daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Salah satu tolak ukur penilaian kinerja Walikota dan wakil walikota dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama. IKU pemerintah Kota Madiun memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Madiun. IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran pembangunan. Penetapan IKU Kota Madiun dalam RKPD 2022 mengacu pada penetapan IKU RPJMD tahun ketiga dengan memperhatikan kondisi capaian tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.1
Prioritas Pembangunan dan Target Indikator Kinerja Utama Kota Madiun

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target		
			Realisasi 2020	2021	2022
1	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif			
		Tingkat Kemiskinan	4,98	4,56	4,45
2	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Livable City	80,65	81,45	82,15
3	Peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,91	80,63	80,76
		Indeks Pembangunan Gender	94,38		
		Indeks Ketentraman	77	78	80
4	Percepatan Reformasi Birokrasi,	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	B	B	BB

Sumber: Bappelitbangda, 2021 dan BPS Kota Madiun, 2021

RKPD Kota Madiun tahun 2022 memuat empat prioritas pembangunan dengan tujuh indikator kinerja utama. Prioritas pertama yaitu Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital terdiri dari tiga IKU yaitu Pertumbuhan Ekonomi, tingkat kemiskinan, Indeks Gini, dan tingkat pengangguran terbuka. Capaian Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020 sebagai dampak pandemic covid-19 mengalami kontraksi sebesar -3,39 persen, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 5,16 persen dan 5,32 persen. Tingkat kemiskinan juga mengalami peningkatan di tahun 2020 yaitu sebesar 4,98 persen dengan target kinerja pada tahun 2021 dan 2022 adalah 4,56 persen dan 4,45 persen. Tingkat ketimpangan pendapatan yang diindikasikan oleh Indeks Gini, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sebesar 0,339 dan ditargetkan sebesar 0,332 dan 0,329 pada tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya, Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 8,32 dan ditargetkan sebesar 3,75 persen dan 3,63 persen tahun 2021 dan 2022.

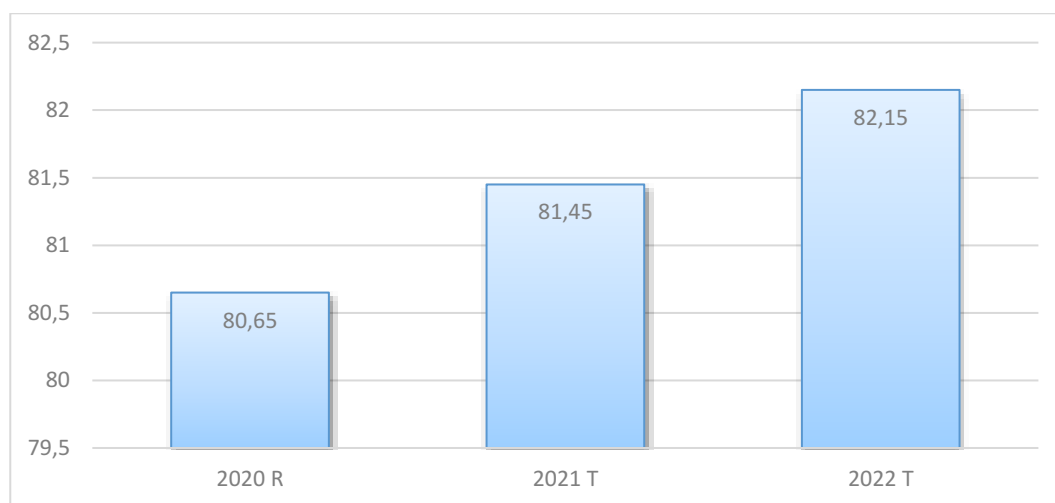


Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021

Grafik 6.1

Prioritas Pembangunan Pertama dan Target Indikator Kinerja Daerah

Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan merupakan prioritas pembangunan daerah kedua. Prioritas tersebut memiliki satu indikator kinerja utama yaitu Livable City. Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 80,65 dan pada tahun 2021 dan 2022 ditargetkan masing-masing sebesar 81,45 dan 82,15.



Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021

Grafik 6.2

Prioritas Pembangunan Kedua dan Target Indikator Kinerja Daerah

Prioritas pembangunan daerah ketiga yaitu Peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif. Indikator kinerja utama pada prioritas pembangunan ketiga meliputi Indeks Pembangunan Manusia dan indeks ketentraman. Capaian kedua IKU tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 80,91 dan 77. Target indikator kinerja pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 80,63 dan 80,76 untuk IPM dan 78 dan 80 untuk indeks ketentraman.



Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021

Grafik 6.3
Prioritas Pembangunan Ketiga dan Target Indikator Kinerja Daerah

Prioritas pembangunan daerah keempat menekankan pada Percepatan Reformasi Birokrasi, Penyederhanaan Regulasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Terdapat satu indikator kinerja dalam mengukur keberhasilan prioritas ini yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Capaian IRB pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2021 dan 202 target IRB masing – masing B dan BB.

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan menunjukkan indikator keberhasilan pembangunan di lihat dari sisi urusan baik wajib maupun pilihan. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan lain sebagainya. Aspek Pelayanan Umum meliputi empat fokus yaitu Urusan Wajib Layanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Aspek Daya Saing Daerah meliputi empat fokus yaitu Kemampuan Ekonomi Daerah, Iklim Berinvestasi, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia. Rincian mengenai indikator dan target capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
a	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1	Laju Pertumbuhan PDRB	6,01	6,02	6,03	Indikator makro
2	PDRB Per Kapita	76,53	79,78	82,71	Indikator makro
3	Angka Kemiskinan	4,98	4,98	4,98	Indictor sasaran kota
4	Indeks Gini	0,392	0,392	0,392	Indikator Tujuan Kota
5	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif				Indikator Tujuan Kota
b	Fokus Kesejahteraan Sosial				
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,51	80,63	80,76	Indikator Tujuan Kota
I	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
1	Persentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal	92,12%	91%	91,50%	Indikator baru tujuan PD
2	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial			91%	Indikator baru program PD
3	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		90%	90%	Indikator baru program PD
4	Prosentase PMKS yang tertangani	92,12%	91%	92%	Indikator baru sasaran PD
5	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana		100%	100%	Indikator baru program PD
6	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik			100%	Indikator baru program PD
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	100%	100%	Lppd
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	Lppd
9	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3 (SLRT, WEB dan Kotak Saran)	3	3	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	10	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	800	810	820	Lppd
	11	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	Lppd
	12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	800	810	820	Lppd
	13	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4	4	4	Lppd
	14	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	800	810	160	Lppd
	15	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	2 (Shelter, Rumah Aman PPT)	2	2	Lppd
	16	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	501 (Shelter dan ngebrok)	501	50	Lppd
	17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	7	9	9	Lppd
	18	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	3 (Kursi roda, tandu, alat bantu jalan/Krek)	5	7	Lppd
	19	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1	1	1	Lppd
	20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	24	161	165	Lppd
	21	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-	-	-	Lppd
	22	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	Lppd
	23	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	116	118	60	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	24	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	2	2	2	Lppd
	25	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	3	4	5	Lppd
	26	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	102	105	107	Lppd
	27	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	218	220	222	Lppd
	28	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	218	220	15	Lppd
	29	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	58	60	62	Lppd
	30	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	7479 (Rumah Roboh dan Terdampak covid 19)	0	3.300	Lppd
	31	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1 (Rumah Roboh)	0	1.000	Lppd
	32	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	0	0	Lppd
	33	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	7478 (Terdampak Covid-19)	0	0	Lppd
	34	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	1	0	300	Lppd
	35	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	Lppd
	36	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	91	93	95	Spm
	37	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	453	457	460	Spm
	38	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	133	135	137	Spm

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	39	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	88	90	92	Spm
	40	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1	36	36	Spm
II		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,38	94,4	94,44	Indikator baru tujuan kota
	2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,07%	77,07%	77,07%	Lanjutan indikator sasaran kota dan indikator tujuan PD
	3	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	25,21%	13,32%	14%	Indikator baru sasaran PD
	4	Rasio KDRT	0,02%	0,02%	0,02%	Indikator baru tujuan PD
	5	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan	100%	100%	100%	Indikator baru sasaran PD
	6	Prosentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG		10%	15%	Indikator baru program PD
	7	Prosentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas		5%	10%	Indikator baru program PD
	8	Jumlah dokumen Data terpilah gender dan anak		100%	1 dokumen	Indikator baru program PD
	9	Prosentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan		100%	100%	Indikator baru program PD
	10	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak			0,003	Indikator baru program PD
	11	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak			12,50%	Indikator baru program PD
	12	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	17,53%	10%	15%	Lppd
	13	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,02%	0,00%	0,00%	Lppd
	14	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	0,01%	0,00%	0,00%	Lppd
	15	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	36 (OPD dan BUMD)	36	63	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	16	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	34 OPD	68	96	Lppd
	17	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, JTV, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	Lppd
	18	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	11 (Panti Asuhan Anak)	15	15	Lppd
	19	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100%	100%	Lppd
	20	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	15 (Panti Asuhan Anak)	15	15	Lppd
	21	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	8 (Panti Asuhan)	15	15	Lppd
	22	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1 (PKK)	15	20	Lppd
	23	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	45 (Kader PKK)	45	45	Lppd
	24	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1 (PKK)	10	10	Lppd
	25	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	20	20	20	Lppd
	26	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	3 (PERDA, Leaflet, Sosialisasi)	2	2	Lppd
	27	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1 (PPT)	1	1	Lppd
	28	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	100%	Lppd
c.		Fokus Seni Budaya dan Olahraga				
I		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				
	1	Jumlah prestasi pemuda dan atlet berprestasi di tingkat regional dan nasional	79	33	33	Indikator baru tujuan PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	2	Jumlah pemuda berprestasi	2 orang	2 orang	2 orang	Indikator baru sasaran PD dan program PD
	3	Jumlah prestasi olahraga yang diraih	79	33	33	Indikator baru sasaran PD
	4	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	79 medali	33 medali	33 medali	Indikator baru program PD
	5	Jumlah organisasi pemuda yang dibina		1 lembaga	1 lembaga	Indikator baru program PD
	6	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	40,81%	40,81%	40,81%	Lppd
	7	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	45,49%	45,49%	45,49%	Lppd
	8	Peningkatan prestasi olahraga	79	33	33	Lppd
	9	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	2	2	2	Lppd
	10	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	0	3	6	Lppd
	11	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kaderpengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	8	8	8	Lppd
	12	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	0	0	Lppd
	13	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	158	158	158	Lppd
	14	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	3	3	3	Lppd
II		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				
	1	Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan	35	40	45	Tujuan pD
	2	Prosentase budaya daerah yang dilestarikan	4%	5%	6%	Indikator baru sasaran PD
	3	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	4%	35%	35%	Indikator baru Program PD
	4	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	21%	21%	21%	Indikator baru Program PD
	5	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina	100 orang	100 orang	100 orang	Indikator baru Program PD
	6	Terlestarikannya Cagar Budaya	20	20	20	Lppd
	7	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	20	20	20	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	8	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yangdikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	20	20	20	Lppd
	9	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	20	20	20	Lppd
	10	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	100	100	Lppd
	11	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	148	148	148	Lppd
	12	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	20	20	20	Lppd
	13	Layanan perijzinan membawa cagar budaya kabupaten/kota ke luar provinsi dengan dukungan data	0	0	0	Lppd
	14	Pengembangan cagar budaya kabupaten/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	2	2	2	Lppd
	15	Pemanfaatan cagar budaya kabupaten/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	20	20	20	Lppd
	16	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	0	0	Lppd
	17	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	0	0	Lppd
	18	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	0	0	Lppd
	19	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	6	6	6	Lppd
	20	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota	0	0	0	Lppd
	21	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	0	0	0	Lppd
	22	Pemetaan sdm cagar budayadan permuseuman	0	0	0	Lppd
	23	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	0	0	0	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	24	0	0	0	Lppd	
	25	0	0	0	Lppd	
II		ASPEK PELAYANAN UMUM				
a		Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib				
1		Terkait Pelayanan Dasar				
I		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
	1	Rata-rata Lama Sekolah	11,13	11,14	11,15	Indikator baru sasaran kota dan tujuan PD
	2	Harapan Lama Sekolah	14,4	14,41	14,42	Indikator baru sasaran kota dan tujuan PD
	3	APM Paud, SD, dan SMP	100%	100%	100%	Indikator baru sasaran PD
	4	Wajib belajar 9 tahun	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
	5	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
	6	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	81.25%	20%	20%	Indikator baru program PD
	7	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	5.122	4.500	4.210	Lppd
	8	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	18.229	17.000	16.750	Lppd
	9	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	8.819	8.000	7.750	Lppd
	10	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	202	200	195	Lppd
	11	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	99	16	16	Lppd
	12	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	49	50	50	Lppd
	13	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	109	90	90	Lppd
	14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	01.15	01.14	01.14	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	15	Jumlah pendidik pada PAUD	483	475	470	Lppd
	16	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	473	470	465	Lppd
	17	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	15	10	10	Lppd
	18	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	70	70	70	Lppd
	19	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.658	2.658	2.658	Lppd
	20	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3.284	3.284	3.284	Lppd
	21	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	11.482	11.400	11.400	Lppd
	22	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	10.957	10.500	10.500	Lppd
	23	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	01.24	01.23	01.23	Lppd
	24	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	01.29	01.28	01.28	Lppd
	25	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	831	803	760	Lppd
	26	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	649	629	371	Lppd
	27	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	01.04	01.04	01.04	Lppd
	28	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	01.07	01.05	01.05	Lppd
	29	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	184	176	171	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	30	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	90	86	80	Lppd
	31	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	818	833	648	Lppd
	32	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	642	656	666	Lppd
	33	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	65	70	70	Lppd
	34	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	19	20	20	Lppd
	35	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	184	180	175	Lppd
	36	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	90	80	78	Lppd
	37	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	3	1	1	Lppd
	38	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	0	0	Lppd
	39	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	0	0	Lppd
	40	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	01.15	01.25	01.27	Lppd
	41	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	61	40	37	Lppd
	42	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	61	40	37	Lppd
	43	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	65	70	70	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	44	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	6	6	6	Lppd
	45	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	30.204	26.937	26.450	spm
	46	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	202	200	210	spm
	47	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	5.122	4.500	4.250	spm
II		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
	1	Angka Harapan Hidup	72,81	72,81	72,81	Indikator baru sasaran kota dan tujuan PD
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Madiun	83,54	81,99	82,21	Indikator baru sasaran PD
	3	Persentase indikator SPM mencapai target	50,00%	50,00%	58,33%	Indikator baru sasaran PD
	4	Indek Keluarga Sehat	0,34	0,39	0,41	Indikator baru Program PD
	5	Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan		90%	91%	Indikator baru Program PD
	6	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart		85%	86%	Indikator baru Program PD
	7	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	60,38%	61,50%	62%	Indikator baru Program PD
	8	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0.48%	0.48%	0.48%	Lppd
	9	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%	Lppd
	10	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99.31%	100%	100%	Lppd
	11	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100.04%	100%	100%	Lppd
	12	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100.72%	100%	100%	Lppd
	13	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	98.82%	100%	100%	Lppd
	14	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	79.41%	100%	100%	Lppd
	15	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	104.63%	100%	100%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	16	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	76.10%	100%	100%	Lppd
	17	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55.85%	100%	100%	Lppd
	18	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	112.74%	100%	100%	Lppd
	19	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	108.90%	100%	100%	Lppd
	20	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	63,69%	100%	100%	Lppd
	21	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	111.81%	100%	100%	Lppd
	22	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	8	8	8	Lppd
	23	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	8	8	8	Lppd
	24	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Lppd
	25	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	330	330	330	Lppd
	26	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
	27	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	291	291	291	Lppd
	28	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	Lppd
	29	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	289	289	289	Lppd
	30	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	Lppd
	31	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	571	571	571	Lppd
	32	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Lppd
	33	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	371	371	371	Lppd
	34	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
	35	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	578	578	578	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	36	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
	37	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1286	1286	1286	Lppd
	38	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
	39	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	156	156	156	Lppd
	40	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
	41	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	169	169	169	Lppd
	42	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
	43	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	30	30	30	Lppd
	44	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	Lppd
	45	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	748	748	748	Lppd
	46	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
	47	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	376	376	376	Lppd
	48	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	99.31%	100%	100%	Spm
	49	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100.04%	100%	100%	Spm
	50	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100.72%	100%	100%	Spm
	51	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	98.82%	100%	100%	Spm
	52	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	79.41%	100%	100%	Spm
	53	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	104.63%	100%	100%	Spm
	54	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	76.10%	100%	100%	Spm
	55	Persentase warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	55.85%	100%	100%	Spm
	56	Persentase warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	112.74%	100%	100%	Spm
	57	Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	108.90%	100%	100%	Spm

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	58	Persentase warga negara terduga tubercolosis yang mendapatkan layanan kesehatan	63,69%	100%	100%	Spm
	59	Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	111.81%	100%	100%	Spm
III		Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat				
	1	Indeks Ketentraman	76,87	76,95	77,05	Lanjutan Indikator Tujuan Kota
	2	Indeks Rasa Aman	76,05	76,15	76,2	Lanjutan Indikator sasaran kota
	3	Persentase nilai Keamanan dan Ketentraman	72,44	72,45	72,48	Indikator baru tujuan PD
	4	Persentase masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97%	96%	97%	Indikator baru sasaran PD
	5	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100%	100%	100%	Indikator baru sasaran PD
	6	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97%	97%	97%	Indikator baru program PD
	7	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
	8	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	97%	100%	100%	Lppd
	9	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	Lppd
	10	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Lppd
	11	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	Lppd
	12	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	2,051	2.000	2.000	Lppd
	13	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1348 orang	1300 orang	1300 orang	Lppd
	14	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	76	76	76	Lppd
	15	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4 orang	4 orang	5 orang	Lppd
	16	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	35 SOP	35 SOP	35 SOP	Lppd
	17	Tersedianya sarana prasarana minimal	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	18	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	5 jenis	5 jenis	5 jenis	Lppd
	19	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	Lppd
	20	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	Lppd
	21	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	Lppd
	22	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	Lppd
	23	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	9 orang	9 orang	9 orang	Lppd
	24	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	22 orang	22 orang	22 orang	Lppd
	25	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
	26	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada	100%	100%	100%	Spm
	27	Pelayanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Spm
	28	Cakupan penanganan penanggulangan bencana				Indikator baru tujuan PD
	30	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	Indikator baru tujuan PD
	31	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100%	100%	100%	Indikator baru sasaran PD
	32	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100%	100%	100%	Indikator baru Program PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	33	Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	Indikator baru Program PD
	34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	845 orang	845 orang	845 orang	Lppd
	35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	50 orang	50 orang	50 orang	Lppd
	36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	560 orang	400 orang	400 orang	Lppd
	37	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	0	100%	Lppd
	38	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	100%	Lppd
	39	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	Lppd
	40	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	Lppd
	41	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	0,80%	5%	5%	Lppd
	42	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,57%	5%	5%	Lppd
	43	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	100%	100%	Lppd
	44	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	0	0	Lppd
	45	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	0	0	Lppd
	46	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%	Lppd
	47	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	Lppd
	48	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%	Lppd
	49	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	Spm

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	50	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	Spm
	51	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	Spm
2		Tidak Terkait Pelayanan Dasar				
I		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				
	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,8	3,75	3,63	Lanjutan indikator sasaran kota
	2	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,01	55%	60%	Indikator baru tujuan PD
	3	Prosentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal	73,04%	70%	75%	Indikator baru sasaran PD
	4	Prosentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sesuai standart	100%	70,00%	71,50%	Indikator baru sasaran PD
	5	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial		10%	10%	Indikator baru program PD
	6	Prosentase Pencari Kerja yang dilatih	0,69%	23%	23%	Indikator baru program PD
	7	Prosentase Pencari Kerja Yang ditempatkan	56,15%	79%	79%	Indikator baru program PD
	8	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	76,92%	76,92%	76,92%	Lppd
	9	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	68%	68%	68%	Lppd
	10	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	15.242.643.966	12.000.000.000	12.500.000.000	Lppd
	11	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100%	70,00%	71,50%	Lppd
	12	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	56,15%	50%	51%	Lppd
	13	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	1	1	Lppd
	14	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0	0	0	Lppd
	15	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	5	8	10	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	16	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0%	0%	30%	Lppd
	17	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	30%	30%	30%	Lppd
	18	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	50%	50%	50%	Lppd
	19	Persentase LPK yang terakreditasi	50%	38%	38%	Lppd
	20	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%	100%	100%	Lppd
	21	Jumlah penganggur yang dilatih	35	230	230	Lppd
	22	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	100%	100%	Lppd
	23	Persentase penyerapan lulusan	66%	20%	20%	Lppd
	24	Lulusan bersertifikat kompetensi	66%	20%	20%	Lppd
	25	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0%	0%	25%	Lppd
	26	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0%	0%	25%	Lppd
	27	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0%	1%	1%	Lppd
	28	Data tingkat produktivitas total	64,00%	62,50%	63%	Lppd
	29	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	30%	25%	25%	Lppd
	30	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	48%	30%	30%	Lppd
	31	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	23	23	23	Lppd
	32	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	100%	100%	100%	Lppd
	33	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100%	70%	70%	Lppd
	34	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	3%	5%	5%	Lppd
	35	Jumlah mogok kerja	0	5	5	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	36	Jumlah penutupan perusahaan	0	10	10	Lppd
	37	Jumlah perselisihan kepentingan	0	15	15	Lppd
	38	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	1	1	Lppd
	39	Jumlah perselisihan PHK	0	15	15	Lppd
	40	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	61	60	60	Lppd
	41	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	50	50	Lppd
	42	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	1	1	Lppd
	43	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	80%	70%	70%	Lppd
	44	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	105	110	115	Lppd
	45	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	374	300	325	Lppd
	46	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	19	19	19	Lppd
	47	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	0	0	Lppd
	48	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	1	1	Lppd
	49	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	0	0	Lppd
	50	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	52	50	50	Lppd
	51	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	0	0	Lppd
	52	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	11,50%	10%	10%	Lppd
	53	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	52	50	50	Lppd
	54	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja	0	0	0	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6
	Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan				
55	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	0	0	Lppd
56	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	0	0	Lppd
57	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	0	0	Lppd
II	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A-83,56	A-84	A-84,25	Indikator baru Tujuan PD
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	92,45%	92,72%	Indikator baru sasaran PD
3	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	93,33%	84%	84,00%	Indikator baru program PD
4	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	93,33%	94%	94,25%	Indikator baru program PD
5	Akurasi database kependudukan		99%	99,10%	Indikator baru program PD
6	Perekaman KTP elektronik	99,34%	98,25%	98,50%	Lppd
7	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	81,76%	81,00%	90,00%	Lppd
8	Kepemilikan akta kelahiran	98,90%	98,90%	99,00%	Lppd
9	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	2 OPD dengan Perjanjian Kerjasama dan 20 lembaga pengguna data kependudukan	18,18%	39,39%	Lppd
10	Penerbitan akta perkawinan	100%	99,00%	99,10%	Lppd
11	Penerbitan akta perceraian	100%	99,00%	99,10%	Lppd
12	Penerbitan akta kematian	100%	98,50%	98,75%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	13	Penyajian data kependudukan	100%	100%	100%	Lppd
III		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
	1	Indeks Ketahanan Pangan	80,64	80,74	80,84	Indikator baru tujuan PD
	2	Skor Pola Pangan Harapan	95,4	95,5	95,6	Indikator baru sasaran PD
	3	Prosentase Angka Kecukupan Energi (%)	0	100	100	Indikator baru program PD
	4	Prosentase Peningkatan Sample Pangan Aman yang Teruji (%)	0	80	80	Indikator baru program PD
	5	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	138,56	100	100	Lppd
	6	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	tidak	tidak	tidak	Lppd
	7	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	tidak	tidak	tidak	Lppd
	8	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	tidak	tidak	tidak	Lppd
	9	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ada	ada	ada	Lppd
	10	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	-	1	1	Lppd
	11	Tertanganinya kerawanan pangan	ada	ada	ada	Lppd
	12	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	tidak	tidak	tidak	Lppd
	13	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	ada	ada	ada	Lppd
IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	1	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total	1,98	<2.1	<2.1	Indikator baru sasaran PD
	2	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	≤ 4.9%	≤ 4.8%	≤ 4.7%	Indikator baru program PD
	3	Menurunnya Unmeet Need	12%	< 8 %	<7.9%	Indikator baru program PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	4	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	87,90%	70%	71%	Indikator baru program PD
	5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	72.76%	72,77%	72,78%	Lppd
	6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11.58%	< 8 %	<7.9%	Lppd
	7	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	Sudah ada dokumen GDPK tetapi masi belum diperdakan	Sudah ada dokumen GDPK tetapi masi belum diperdakan		Lppd
	8	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	27 Tahun	Wanita >21 tahun	Wanita >21 tahun	Lppd
	9	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	0,55	0,54	0,53	Lppd
	10	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100,00%	100,00%	100,00%	Lppd
	11	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	16	16	16	Lppd
	12	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	98,04%	97,78%	97,78%	Lppd
	13	Persentase Peserta KBAktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	72,76	72,77%	72,78%	Lppd
	14	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	56	56	56	Lppd
	15	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	44,90%	45,00%	45,01%	Lppd
	16	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	64,96%	64,96%	64,96%	Lppd
	17	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	100%	100%	100%	Lppd
V		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				
	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2,83(BAIK)	2,85 (BAIK)	Lanjutan indikator sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87,25	87,5	87,75	Indikator baru sasaran PD
	3	Nilai Domain Layanan SPBE		3,3	3,35	Indikator baru sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	4	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	75%	100%	100%	Indikator baru program PD
	5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
	6	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70%	72%	73,00%	Lppd
	7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	81,86%	81,88%	81,90%	Lppd
	8	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	100%	100%	Lppd
	9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	Lppd
	10	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	Lppd
	11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100%	100%	100%	Lppd
	12	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Ada	Ada	Ada	Lppd
	13	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100%	100%	100%	Lppd
	14	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	100%	100%	Lppd
	15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan	100%	100%	100%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6
	aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				
16	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100%	100%	100%	Lppd
17	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0%	10%	15%	Lppd
18	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	Lppd
19	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	86%	80%	82%	Lppd
20	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	100%	100%	Lppd
21	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	100%	100%	Lppd
22	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	100%	100%	Lppd
23	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100%	100%	100%	Lppd
24	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100%	100%	100%	Lppd
25	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%	100%	100%	Lppd
26	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ada	Ada	Ada	Lppd
27	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100%	100%	100%	Lppd
28	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	100%	100%	Lppd
29	Persentase diseminasi dan	100%	100%	100%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6
	layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan				
VI	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				
	1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
	2 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	Lppd
	3 Tersedianya buku profil daerah	Ada	Ada	Ada	Lppd
	4 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1	1	1	Lppd
	5 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	1	1	Lppd
	6 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	1	1	Lppd
	7 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	1	1	Lppd
	8 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	0%	0	100%	Lppd
	9 Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	0%	0	100%	Lppd
VII	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				
	1 Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	100%	Indikator baru program pd
	2 Tingkat keamanan informasi pemerintah	65%	65%	67%	Lppd
	3 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0%	0	0	Lppd
	4 Persentase system	100%	100%	100%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah					
	5	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100%	70%	75%	Lppd
	6	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	88,23%	88,50%	88,80%	Lppd
VIII	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					
	1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	8,7	8,8	8,9	Indikator baru sasaran PD
	2	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	5,59%	5,95%	5,95%	Indikator baru program PD
	3	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	-	-	36%	Indikator baru program PD
	4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	2,38	2,4	2,42	Indikator baru tujuan PD
	5	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	Lppd
	6	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	3,8 %.	4%	4,30%	Lppd
	7	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	2 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	3 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	Lppd
	8	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	5,59%	5,95%	5,95%	Lppd
	9	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	55%	56%	57%	Lppd
	10	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	56 Eksemplar	10 eksemplar	10 eksemplar	Lppd
	11	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Lppd
	12	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6
IX	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				
1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	71,5	72	72,5	Indikator baru tujuan PD
2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip		9%	9%	Indikator baru sasaran PD
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, (alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	38%	40%	42%	Indikator baru program PD
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	8,2	8,2	8,4	Indikator baru program PD
5	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	9%	9%	9%	Lppd
6	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	15%	9%	9%	Lppd
7	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	12%	6%	6%	Lppd
8	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0% Aplikasi SRIKANDI belum di launching oleh ANRI	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
9	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Belum Dilakukan Pemusnahan	Belum Dilakukan Pemusnahan	1 kali	Lppd
10	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	22 daftar arsip yang diselamatkan	25 daftar arsip yang diselamatkan	28 daftar arsip yang diselamatkan	Lppd
11	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi	2 Perangkat Daerah Provinsi	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
12	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	18 arsip hasil alih media	21 arsip hasil alih media	24 arsip hasil alih media	Lppd
13	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	2 Daftar Arsip	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	1 (satu) SOP Layanan Peminjaman Arsip	1 (satu) SOP Layanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	belum dilaksanakan	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2		3	4	5	6
3	Fokus Pelayanan Urusan Pilihan					
I	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					
	1	Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	2%	3%	3%	Indikator baru sasaran PD
	2	Prosentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	-	-	20%	Indikator baru program PD
	3	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	tidak ada kawasan transmigrasi		Lppd
	4	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitas		Lppd
	5	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina		Lppd
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
I	Sekretariat Daerah					
	1	Nilai Indeks reformasi birokrasi	B	B	BB	Lanjutan indikator tujuan kota
	2	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (rata-rata)	25,62	26,32	27,45	Indikator baru sasaran rutin semua PD
	3	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	BB (70,01)	BB (73)	BB (76)	Lanjutan indikator sasaran kota
	4	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah (rata-rata)	A	A	A	Indikator baru Program rutin semua PD
	5	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,1	3,11	3,12	Lanjutan indikator sasaran kota
			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	6	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82,85 (baik)	82,85 (baik)	83 (baik)	Lanjutan indikator sasaran kota
	7	Persentase Indeks RB Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun bernilai baik		70%	72%	Indikator baru tujuan PD
	8	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun yang berpredikat BB	100%	100%	100%	Indikator baru sasaran PD
	9	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100%	100%	100%	Indikator baru sasaran PD
	10	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
	11	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
	12	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	13	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	21,52%	21,55%	21,60%	Lppd
	14	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	87,42%	87,50%	87,60%	Lppd
II		Sekretariat DPRD				
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD			84	Indikator baru tujuan PD
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD			84	Indikator baru sasaran PD
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	90,42	79	80	Indikator baru program PD
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
III		Perencanaan				
	1	Tercapainya Target Sasaran – sasaran RPJMD	70%	80%	85%	Indikator baru tujuan PD
	2	Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	100%	100%	100%	Indikator baru sasaran PD
	3	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	91%	100%	100%	Indikator baru sasaran PD
	4	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
	5	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
IV		Keuangan				
	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	Lanjutan sebelumnya indikator sasaran kota menjadi indikator tujuan PD
	2	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP/WTP	100%	100%	100%	Indikator baru sasaran PD
	3	Persentase pemanfaatan aset daerah	7,10%	7,10%	7,10%	Indikator baru sasaran PD
	4	Persentase aset yang dilindungi	77%	80%	80%	Indikator baru sasaran PD
	5	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target	100%	100%	100%	Indikator baru program PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	6	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
	7	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	21%	21,10%	21,20%	Lppd
	8	Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas	2,49%	2,50%	2,50%	Lppd
	9	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (expenditures)	60,63%	60,70%	60,90%	Lppd
	10	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	79,38%	80%	80%	Lppd
	11	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	106%	93,15%	95,50%	Lppd
	12	Manajemen Aset	Ya	Ya	Ya	Lppd
	13	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	22,15%	21,50%	20,10%	Lppd
	14	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	76.350.000.000	76.978.000.000	80.255.000.000	Indikator baru tujuan PD
	15	Prosentase Peningkatan Target Pajak daerah	36%	37%	38%	Indikator baru sasaran PD
	16	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10%	10%	10%	Indikator baru Program PD
	17	Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	41%	41%	41%	Indikator baru Program PD
IV		Kepegawaian				
	1	Indeks Profesionalisme ASN	69,66	69,66	70	Indikator baru tujuan PD
	2	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	20,06	30	33	Indikator baru sasaran PD
	3	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	34,38	23,52	25,5	Indikator baru sasaran PD
	4	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	87,62	88	88,2	Indikator baru program PD
	5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	167%	184%	222%	Lppd
	6	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10%	11%	14%	Lppd
	7	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	72%	74%	80%	Lppd
V		Pendidikan dan Pelatihan				
	1	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	-	10	12	Indikator baru program PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
VI	Penelitian dan Pengembangan					
	1	Indeks Inovasi Daerah	1892	1987	2086	Indikator baru sasaran Kota
	2	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	100%	100%	Indikator baru Program PD
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
VII	Inspektorat Daerah					
	1	Level Maturitas SPIP Kota Madiun	2	3	3	Indikator baru tujuan PD
	2	Prosentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	91%	92%	93%	Indikator baru sasaran PD
	3	Level Kapabilitas APIP	2+	2+	2+	Indikator baru sasaran PD
	4	Prosentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	25%	30%	35%	Indikator baru program PD
	5	Prosentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
	6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	3	3	Lppd
	7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2+	2+	2+	Lppd
7	Unsur Kewilayahan					
VIII	Kecamatan					
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan kartoharjo	87,7	87,7	87.75	Indikator baru tujuan PD dan program PD
	2	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan Kartoharjo	100%	100%	100%	Indikator baru tujuan PD
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan manguharjo	90,54	92.00.00	92.05.00	Indikator baru tujuan PD dan program PD
	4	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan Manguharjo	100%	100%	100%	Indikator baru tujuan PD
	5	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan taman	88.298	88.348	88.398	Indikator baru tujuan PD dan program PD
	6	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan taman	100%	100%	100%	Indikator baru tujuan PD
	7	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	Indikator baru sasaran PD
	8	Prosentase kelurahan yang	22%	33%	44%	Indikator baru

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6
	mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan kartoHarjo				sasaran PD
9	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	Indikator baru sasaran PD
10	Prosentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan manguharjo	11%	22%	33%	Indikator baru sasaran PD
11	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	Indikator baru sasaran PD
12	Prosentase kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di Kecamatan taman	22%	33%	44%	Indikator baru sasaran PD
13	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan kartoHarjo	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
14	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan kartoHarjo (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
15	jumlah usulan prioritas musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD di kecamatan kartoHarjo	18 usulan	18 usulan	18 usulan	Indikator baru program PD
16	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan manguharjo	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
17	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan manguharjo (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
18	jumlah usulan prioritas musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD di kecamatan manguharjo		18 usulan	18 usulan	Indikator baru program PD
19	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan taman	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
20	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan taman (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
21	jumlah usulan prioritas musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD di kecamatan taman	90 usulan	18 usulan	18 usulan	Indikator baru program PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
8	Unsur Pemerintahan Umum					
IX	Kesatuan Bangsa dan Politik					
	1	Indeks Kerukunan	B skor 74,0306 (Harmonis)	B skor 74,30 (Harmonis)	B skor 76,40 (Harmonis)	Lanjutan indikator sasaran kota dan indikator tujuan PD
	2	persentase konflik yang tertangani	100	100	100	Indikator baru sasaran PD
	3	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	Indikator program baru PD
	4	Prosentase pendidikan politik kepada Partai Politik	100%	100%	100%	Indikator program baru PD
	5	Prosentase Status Kelembagaan Orkemas yang Berbadan Hukum	72,91%	68%	71%	Indikator program baru PD
	6	Prosentase koordinasi yg dilakukan dengan pemangku kepentingan	100%	100%	100%	Indikator program baru PD
	7	Konflik horisontal di dalam masyarakat	0 konflik	0 konflik	0 konflik	Indikator program baru PD
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
A	Kemampuan Ekonomi					
I	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
	1	Persentase koperasi yang berkualitas	1,30%	10,53%	11,76%	Indikator baru tujuan PD
	2	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro yang beromzet naik		0,05%	0,05%	Indikator baru tujuan PD
	3	Persentase koperasi aktif	98,69%	98,69%	98,71%	Indikator baru sasaran PD
	4	Persentase Usaha Mikro yang beromzet naik		0,05%	0,05%	Indikator baru sasaran PD
	5	Persentase koperasi bersertifikat NIK	81,29%	98,69%	86,50%	Indikator baru program PD
	6	Persentase koperasi aktif dengan omzet meningkat		30%	30%	Indikator baru program PD
	7	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi yang beromzet naik		7,00%	7,00%	Indikator baru program PD
	8	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	80%	80,65%	80,65%	Lppd
	9	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	0,42%	0,42%	0,43%	Lppd
	10	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	80%	80%	80%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	kabupaten/kota					
	11	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0	0	Lppd
	12	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	16,13%	16,13%	16,13%	Lppd
	13	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	19,35%	19,35%	19,35%	Lppd
	14	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	96,77%	96,77%	96,77%	Lppd
	15	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	2,35%	2,35%	2,35%	Lppd
	16	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	22,58%	22,58%	22,58%	Lppd
	17	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	1,29%	1,29%	1,29%	Lppd
	18	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	81,29%	81,29%	81,29%	Lppd
	19	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Hasil sama dengan no.21			Lppd
	20	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,29%	1,29%	1,29%	Lppd
	21	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	78,71%	78,71%	78,71%	Lppd
	22	Persentase koperasi	1,29%	1,29%	1,29%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6
	yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				
	23 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0,42%	0,42%	0,42%	Lppd
	24 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	100%	100%	100%	Lppd
	25 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,14%	0,14%	0,14%	Lppd
	26 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0%	0,02%	0,04%	Lppd
	27 Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,28%	0,28%	0,28%	Lppd
	28 Rasio usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,84%	0,84%	0,84%	Lppd
	29 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0,12%	0,12%	0,12%	Lppd
II	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
	1 Nilai Realisasi Penanaman Modal	377,632 M	191 M	195 M	Indikator baru tujuan PD dan sasaran PD
	2 Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	0	0	100%	Indikator baru program PD
	3 Persentase investor yang merealisasikan investasinya	19,23%	13%	26%	Indikator baru program PD
	4 Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan		80%	85%	Indikator baru program PD
	5 Jumlah Perusahaan Wajib LKPM		80 perusahaan	110 perusahaan	Indikator baru program PD
	6 Prosentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik		90%	100%	Indikator baru program PD
	7 Persentase peningkatan investasi dikabupaten/ kota	-66,17%	4,37%	2,09%	Lppd
	8 PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	RUPM	1 dokumen	1 dokumen	Lppd
	9 Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	RUPM	0	0	Lppd
	10 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	RUPM	0	0	Lppd
	11 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	2 kali	2 kali	Lppd
	12 Kegiatan pameran	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6
	penanaman modal				
	13 Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	-	1 kali	Lppd
	14 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	39	267	275	Lppd
	15 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2035	1500	1600	Lppd
	16 Laporan realisasi penanaman modal	327,632 M	191 M	195 M	Lppd
	17 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	5 orang	15 orang	15 orang	Lppd
	18 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	50 perusahaan	80 perusahaan	110 perusahaan	Lppd
	19 Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	1 buah	1 buah	1 buah	Lppd
III	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				
	1 Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	1,1	1,2	1,25	Indikator baru sasaran PD
	2 Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	275,3	277	280	Indikator baru program PD
	3 Tingkat Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/tahun)	15,5	15,6	15,7	Indikator baru program PD
	4 Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	-	-	89	Indikator baru program PD
	5 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	362,9 ton	365	369	Lppd
	6 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	435 RTP	435 RTP	435 RTP	Lppd
	7 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
	8 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
	9 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	90 Orang	0	245	Lppd
	10 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	477.406 ekor	477.406 ekor	497,400 ekor	Lppd
IV	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	1	Jumlah penetapan destinasi wisata	1	2	2	Indikator tujuan PD
	2	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	8,7	8,6	8,7	Lanjutan sebelumnya indikator sasaran kota sekarang Indikator tujuan PD
	3	Jumlah Kunjungan Wisatawan	351.554	375.000	400.000	Indikator baru sasaran PD
	4	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	2 destinasi	2 destinasi	2 destinasi	Indikator baru program PD
	5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	3 event	4 event	4 event	Indikator baru program PD
	6	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	18,68%	18,68%	19,00%	Indikator baru program PD
	7	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-93%	1%	2%	Lppd
	8	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	10.67%	5%	7%	Lppd
	9	Tingkat hunian akomodasi	100%	100%	100%	Lppd
	10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,80%	4,90%	5%	Lppd
	11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	265,70%	265,80%	265,90%	Lppd
	12	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	0	0	0	Lppd
	13	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	704	704	704	Lppd
	14	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	853	875	900	Lppd
	15	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	5	5	5	Lppd
	16	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	0	0	Lppd
	17	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	0	0	Lppd
	18	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	18,68%	18,68%	19,00%	Lppd
	19	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	3	3	Lppd
V		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
	1	Peningkatan produktivitas pertanian (ton/ha)	6,9 ton/ha	7,21 ton/Ha	7,22 ton/Ha	Indikator baru sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	2	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	1,206	1,21	1,214	Indikator baru sasaran PD
	3	Efektifitas Sarana Pertanian (%)		50	55	Indikator baru program PD
	4	Prosentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)		50	60	Indikator baru program PD
	5	Prosentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Jumlah Menular (%)	50,86	10	10	Indikator baru program PD
	6	Prosentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)		70	72	Indikator baru program PD
	7	Prosentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)			10	Indikator baru program PD
	8	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)		15	20	Indikator baru program PD
	9	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				Lppd
	10	Sarana pertanian yang diberikan	13 jenis	1	2	Lppd
	11	Prasarana pertanian yang digunakan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	Lppd
	12	Penerbitan izin usaha pertanian	-	0	2	Lppd
	13	Persentase prasarana yang digunakan	66.7%	75	75	Lppd
	14	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	0%	0	0	Lppd
	15	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana(%)	50.86	50	50	Lppd
VI		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				
	1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,91	6,01	6,12	Lanjutan indikator sasaran kota
	2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa				indikator baru sasaran kota
	3	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	24,05	24,05	24,05	Indikator baru tujuan PD
	4	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	1,76	1,76	1,76	Indikator baru sasaran PD
	5	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
	6	Jumlah pasar yang berstandar	0	1 pasar	1 pasar	Indikator baru program PD
	7	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100%	100%	100%	Indikator baru program PD
	8	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100%	100%	100%	Indikator baru program PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	9	Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	15 produk	15 produk	15 produk	Indikator baru program PD
	10	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	0	100%	100%	Indikator baru program PD
	11	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	62,63	100%	100%	Lppd
	12	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	98,06%	100%	100%	Lppd
	13	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	100%	100%	Lppd
	14	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :				Lppd
		a. Pusat perbelanjaan	100%	100%	100%	Lppd
		b. Toko swalayan	100%	100%	100%	Lppd
	15	Persentase penerbitan TDG	100%	100%	100%	Lppd
	16	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	100%	100%	100%	Lppd
	17	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	100%	100%	100%	Lppd
	18	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	100%	100%	100%	Lppd
	19	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
	20	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	50%	50%	50%	Lppd
	21	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
	22	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	95%	100%	100%	Lppd
	23	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Lppd
VII		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	-12,84	7,30%	7,35%	Indikator baru tujuan PD
	2	Prosentase pertumbuhan industri	0%	0,03%	0,03%	Indikator baru sasaran PD
	3	Prosentase Tersedianya Dokumen Induk Perindustrian		100%	100%	Indikator baru program PD
	4	Prosentase IKM yang mengikuti publikasi produk		12,80%	12,80%	Indikator baru program PD
	5	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	0%	0,02%	0,02%	Lppd
	6	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0%	0,02%	0,02%	Lppd
	7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	25,00%	25,00%	Lppd
	8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	0%	0%	Lppd
	9	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	0%	0%	0%	Lppd
	10	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	45%	45%	45%	Lppd
	11	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	0%	0%	0%	Lppd
	12	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	0%	75%	100%	Lppd
	13	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0%	50,00%	50,00%	Lppd
	14	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	0%	0%	0%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	15	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	1,28%	1%	1%	Lppd
B		Fasilitas Wilayah Infrastruktur				
	1	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)				
I		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	1	Indeks Infrastruktur	96,15	96,2	96,5	Lanjutan Indikator sasaran kota dan indikator tujuan PD
	2	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	Indikator sasaran dan program PD
	3	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	-	20%	19.5%	Indikator sasaran PD
	4	Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100	100	100	Indikator sasaran PD
	5	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	94,03%	94,50%	95,00%	Indikator sasaran PD
	6	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi		95%	95,50%	Indikator program PD
	7	Presentase bangunan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Indikator program PD
	8	Persentase Pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum		100%	100%	Indikator program PD
	9	Persentase kawasan rawan banjir/genangan		20%	19.5%	Indikator program PD
	10	Presentase panjang drainase dalam kondisi baik	90,40%	90,50%	90,50%	Indikator program PD
	11	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	94,03%	94,50%	95,00%	Indikator program PD
	12	Ketaatan terhadap RT RW	100%	100%	100%	Indikator program PD
	13	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	79.47%	79.47%	79.47%	Lppd
	14	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	0	0	Lppd
	15	Rasio luas daerah irigasi	0	0	0	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6
	kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
16	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	96.58%	97	97,5	Lppd
17	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99%	99%	99%	Lppd
18	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	72.65%	72,67	72,68	Lppd
19	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	94.03%	94,04%	94,05%	Lppd
20	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	48%	54.5%	59.4%	Lppd
21	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	3,8 Km ²	3,7 Km	3,5 Km	Lppd
22	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	19.334 M	19.334 M	19.334 M	Lppd
23	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	0	0	Lppd
24	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	0	0	Lppd
25	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
26	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
27	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	0	0	Lppd
28	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	0	0	0	Lppd
29	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0	0	0	Lppd
30	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	0	0	Lppd
31	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada	Ada	Ada	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	32	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Lppd
	33	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	1	1	1	Lppd
	34	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	0	0	Lppd
	35	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	0	0	Lppd
	36	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0	0	0	Lppd
	37	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	0	0	Lppd
	38	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0	0	0	Lppd
	39	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	0	0	Lppd
	40	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	0	0	Lppd
	41	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	0	0	Lppd
	42	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	100	100	100	Lppd
	43	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	0	0	Lppd
	44	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	0	0	Lppd
	45	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0	0	0	Lppd
	46	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	0	0	Lppd
	47	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	0	0	Lppd
	48	Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD	0	0	0	Lppd
	49	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	0	0	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	50	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	98%	98%	98%	Lppd
	51	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	400	410	415	Lppd
	52	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Lppd
	53	Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Lppd
	54	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Lppd
	55	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Lppd
	56	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	230	230	230	Lppd
	57	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Lppd
	58	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	433,095 Km	433,095 Km	433,095 Km	Lppd
	59	Panjang jalan yang dibangun	0,654 Km	0,5 km	0,45 km	Lppd
	60	Panjang jembatan yang dibangun	0	18 m	20 m	Lppd
	61	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	5,32 Km	3,5 km	3,5 km	Lppd
	62	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	0	0	Lppd
	63	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi	14,422 Km	9,4 km	5 km	Lppd
	64	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	0	0	Lppd
	65	Panjang jalan yang dipelihara	46 Km	40 km	40 km	Lppd
	66	Panjang jembatan yang dipelihara	3,9 Km	3,9 Km	3,8 km	Lppd
	67	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	2	3	3	Lppd
	68	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	80	125	125	Lppd
	69	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	30	30	30	Lppd
	70	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan	Ada	Ada	Ada	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6
	kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir				
	71 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	Ada	Ada	Ada	Lppd
	72 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
	73 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	Ada	Ada	Lppd
	74 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	Ada	Ada	Lppd
	75 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	1	1	Lppd
	76 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
	77 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
	78 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
	79 Tersedianya data dan	Ada	Ada	Ada	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6
	informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota				
80	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada	Ada	Ada	Lppd
81	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Ada	Ada	Lppd
82	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Ada	Ada	Lppd
83	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Ada	Ada	Lppd
84	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	100	125	122	Lppd
85	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	0	0	Lppd
86	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	50	50	50	Lppd
87	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	100	100	100	Lppd
88	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	30	30	30	Lppd
89	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	50	50	50	Lppd
90	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	0	0	Lppd
91	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi	100	100	100	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6
	pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
	92 Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100	SPM
	93 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90	90	90	SPM
II	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	1 Indeks Sarana Prasarana Permukiman	87,12%	89,13%	90,13%	Sebelumnya indikator sasaran kota sekarang menjadi Tujuan pd
	2 Indeks Perumahan Permukiman	99,65%	99,60%	99,66%	Lanjutan Sasaran pd
	3 Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman	74,59%	76,34%	78,48%	Lanjutan Sasaran pd
	4 Prosentase Pengembangan Perumahan	100%	100%	100%	Indikator program baru
	5 Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	98,10%	98,50%	99,00%	Indikator program baru
	6 Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	100%	Indikator program baru
	7 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0	0	lppd
	8 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	65 KK	65 KK	105 KK	lppd
	9 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	18,73%	37,34%	55,95%	lppd
	10 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	21 unit	133 unit	100 unit	lppd
	11 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	38	38	40	lppd
	12 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	0	0	lppd
	13 Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	0	0	lppd
	14 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	0	0	lppd
	15 Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	0	0	lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	16	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	0	0	lppd
	17	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	0	0	lppd
	18	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	0	0	lppd
	19	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	0	0	lppd
	20	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	0	lppd
	21	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	0	lppd
	22	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	0	lppd
	23	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	65 KK	65 KK	105 KK	lppd
	24	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	0	lppd
	25	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	0	0	lppd
	26	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	52,41 ha	40,41 ha	28,41 ha	lppd
	27	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	115 unit	133 unit	100 unit	lppd
	28	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	12,08 ha	10,08 ha	12,08 ha	lppd
	29	Jumlah rumah di kab/kota	42329	42329	42329	lppd
	30	Jumlah unit PK RTLH	115 unit	133 unit	100 unit	
	31	Jumlah rumah tidak layak huni	21 unit	133 unit	100 unit	lppd
	32	Jumlah rumah yang tidak dihuni	1438 unit	1438 unit	1438 unit	lppd
	33	Rasio rumah dan KK	171,87%	171,87%	171,87%	lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	34	Jumlah rumah pembangunan baru	133	50	50	lppd
	35	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	38	38	38	lppd
	36	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	37	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	38	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	39	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	40	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	41	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	38	38	38	lppd
	42	Jumlah pengembang yang terregistrasi	38	38	38	lppd
	43	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	38	38	38	lppd
	44	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	Spm
	45	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	spm
III		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				
	1	Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan	100			Indikator program lama
	2	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	100%	100%	100%	Indikator program baru
	3	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100%	100%	100%	Indikator program baru
	4	Prosentase Penatagunaan Tanah	100%	100%	100%	Indikator program baru
	5	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0%	0%	100%	Lppd
	6	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	4,17 ha	4,17 ha	4,17 ha	Lppd
	7	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	0	0	0	Lppd
	8	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang	0	0	0	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6
	berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				
9	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0	0	0	Lppd
10	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	0	1	Lppd
11	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	0	1	Lppd
12	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	0	0	Lppd
13	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	0	0	Lppd
14	Dokumen Izin membuka tanah	0	0	0	Lppd
15	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	0	0	Lppd
IV	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,15	57,69	57,77	Lanjutan indikator sasaran kota dan indikator tujuan PD
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	51,28	51,29	51,3	Indikator sasaran PD
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,26	82,73	82,9	Indikator sasaran PD
4	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	97,01%	98,00%	98,50%	Indikator sasaran PD
5	Prosentase data Perencanaan LH yang tersedia	64,10%	69,23%	71,79%	Indikator program baru PD
6	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	53,19%	48%	49%	Indikator program baru PD
7	Prosentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	96,83%	-	Indikator lama program PD
8	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	-	-	94,32%	Indikator program baru PD
9	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	70,96	71	71,5	Indikator program baru PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	
	10	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	44,59%	52,90%	64,70%	Indikator program baru PD
	11	Prosentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	90%	100%	Indikator program baru PD
	12	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	90%	100%	Indikator program baru PD
	13	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	74,97%	74%	73%	Indikator program baru PD
	14	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	97,01%	98,00%	98,50%	Lppd
	15	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	0	0	Lppd
	16	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)				Lppd
	17	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas udara (IKU)				Lppd
	18	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	32,66	32,67	32,68	Lppd
	19	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Data mencakup no.26,27,28			
	20	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	0,0043	1,604	1,6035	Lppd
	21	Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	5,99	5,985	5,983	Lppd
	22	Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing - masing lingkungan	belum memiliki TPST			
	23	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	44,59%	52,90%	64,70%	Lppd
	24	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	Lppd
	25	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
	26	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Target	Target Capaian Setiap Tahun		Keterangan
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6
	masyarakat hukum adat terkait PPLH				
27	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	100%	100%	Lppd
28	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	100%	100%	100%	Lppd
V	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				
1	Kinerja Lalu Lintas		38	39	Indikator tujuan PD
2	Kecepatan rata-rata lalu lintas		38	39	Indikator sasaran PD
3	Kinerja Angkutan Umum		40%	41%	Indikator sasaran PD
4	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas		84%	88%	Indikator program PD
5	Rasio konektivitas kabupaten/kota	-	-	-	Lppd
6	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,38	0,43	0,42	Lppd
7	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	100%	100%	100%	Lppd
8	Terlaksananya pelayanan uji berkala	100%	100%	100%	Lppd
9	Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100%	100%	100%	Lppd
10	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100%	100%	100%	Lppd

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021 dan BPS Kota Madiun, 2021

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan tahunan ini memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaannya.

Dalam upaya mendapatkan masukan dari masyarakat telah dilakukan mulai dari konsultasi publik, Forum Perangkat Daerah sampai dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diikuti oleh berbagai profesi mulai dari perwakilan organisasi profesi, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan dunia usaha, serta masukan berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Pelaksanaan forum Musrenbang dimaksud dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Seluruh masukan/saran, aspirasinya berupa tanggapan serta pertimbangan-pertimbangan yang riil terhadap kebijakan pemerintah daerah, telah menjadi masukan untuk menyempurnakan dokumen RKPD tahun 2022 ini.

Seiring dengan pelaksanaan penyusunan yang dilakukan sesuai tahapannya, maka secara otomatis pendekatan-pendekatan penyusunannya juga telah terpenuhi yakni : pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas - bawah dan bawah - atas (*top down* dan *bottom up*). Hal ini menunjukkan, bahwa semua ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah digunakan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2022. Dalam penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2022 ini senantiasa memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dalam upaya untuk menjamin adanya keselarasan, sinergi dan harmonisasi antar dan antara dokumen perencanaan pembangunan tingkatan pemerintahan.

Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2022 ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dalam dokumen RKPD ini memuat dan mengintegrasikan pula program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Madiun dalam rangka mendukung program prioritas Kota Madiun.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2022 yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2022. Dengan ditetapkannya dokumen RKPD Tahun 2022 ini diharapkan nantinya dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan, dan sebagai media evaluasi bagi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Kepala Daerah dapat terwujud dan terukur hasil kinerjanya sebagai bahan pertimbangan kebijakan untuk tahun-tahun berikutnya.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

**Drs. H. MAIDI, SH,
MM, M.Pd**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19750117 199602 1 001